



# SOSIOLOGI PERLAWANAN

Studi Perlawanan Repertoar Petani  
di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan

**Dr. Mohammad Syawaludin. M.A.**

**SOSIOLOGI PERLAWANAN STUDI PERLAWANAN REPERTOAR PETANI DI  
RENGAS OGAN ILIR SUMATERA SELATAN**

Mohammad Syawaludin

Desain Cover : Dwi Novidiantoko  
Tata Letak Isi : Cinthia Morris Sartono

Cetakan Pertama: Mei 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH  
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [deepublish@ymail.com](mailto:deepublish@ymail.com)

---

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

**SYAWALUDIN, Mohammad**

Sosiologi Perlawanan Studi Perlawanan Repertoar Petani I di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan/oleh Mohammad Syawaludin.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Mei 2017.

xii, 310 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN 978- 602-401-928-0

I. Sosiologi

I. Judul

300

# **SOSIOLOGI PERLAWANAN**

STUDI PERLAWANAN REPERTOAR PETANI  
DI RENGAS OGAN ILIR SUMATERA SELATAN

## **UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

### Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# **SOSIOLOGI PERLAWANAN**

**STUDI PERLAWANAN REPERTOAR PETANI  
DI RENGAS OGAN ILIR SUMATERA SELATAN**

**Dr. Mohammad Syawaludin. MA.**



**SOSIOLOGI PERLAWANAN STUDI PERLAWANAN REPERTOAR PETANI DI  
RENGAS OGAN ILIR SUMATERA SELATAN**

**Mohammad Syawaludin**

Desain Cover : Bernand M  
Tata Letak Isi : Cinthia Morris Sartono  
Sumber Gambar : Sumber

Cetakan Pertama: Februari 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH  
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [deepublish@ymail.com](mailto:deepublish@ymail.com)

---

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

**SYAWALUDIN, Mohammad**

Sosiologi Perlawanan Studi Perlawanan Repertoar Petani 1di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan/oleh Mohammad Syawaludin.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Februari 2017.

xii, 310 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN 978-Nomor ISBN

1. Sosiologi

I. Judul

300

## **KATA PENGANTAR**

---

Alhamdulillah segala puji dan puja bagi Allah SWT dengan segala Rahmat dan Rahim Nya yang terus menyinari hamba NYa. Buku ini awalnya hasil penelitian untuk tugas akhir penyusunan Disertasi pada jurusan Sosiologi Fisip Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tugas akhir ini dimulai dengan cinta, dijalani dengan cinta, dan kemudian juga diselesaikan dengan penuh rasa cinta, utamanya adalah cinta akan pengetahuan. Namun selaku hambaNya, ada saat-saat di mana kejenuhan menyergap dan memberati langkah, namun dengan bertawakkal dan berdoa, cinta kembali meneguhkan hati untuk tetap tegar menyelesaikan disertasi ini.

Lalu cinta dengan doa pula yang mengiringi serpihan-serpihan gagasan awal yang berlompatan dari benak penulis yang paling awal dari proposal penelitian ini mulai dituliskan, lalu revisi demi revisi yang ketika itu rasanya tak kunjung selesai bahkan tak tahu lagi apa yang mau dituliskan.

Hantaman-demi hantaman terus berjalan sampai tak tahu lagi dimana ujungnya, dimana lagi awalnya, dimana lagi akan berhenti, lagi-lagi cinta dan doa menjadi tempat terakhir penulis bercurhat dan menenangkan diri, sehingga perjalanan disertasi ini juga dihiasi dengan beberapa waktu dan hambatan di lapangan.

Sulit bagi penulis membayangkan disertasi ini bisa diselesaikan Dan akhirnya, Allahu Akbar! Dengan izinMu disertasi ini selesai. Alhamdulillah Allah mempertemukan penulis dengan orang-orang hebat, yang penuh kesabaran dan berdedikasi keilmuan tanpa beliau-beliau disertasi ini tidak akan terwujud.

Dua orang yang berjasa sangat besar adalah Promotor, Prof. Dr. Partini dan Ko-Promotor, Dr. Suharko, diketika gagasan penulisan disertasi ini masih belum jelas wujudnya, Mas Harko memberikan buku tentang direktori gerakan sosial dan gerakan sosial baru dan dari kedua sumber itulah penulis mendapatkan *insight* tentang teori *repertoire* Tilly yang kemudian menjadi tulang punggung disertasi ini. Menjadi mahasiswa bimbingan mereka berdua adalah kehormatan dan berkah. Ibu Prof. Dr. Partini dengan cermat memberikan masukan tertulis di tiap tahap perkembangan penulisan bahkan selalu memberi semangat. Mas Dr. Suharko “menghujani” penulis dengan berbagai artikel yang memperkaya bangunan kerangka teoretik yang penulis gunakan sebagai pijakan. Oh ya, yang juga tak mungkin penulis lupakan, selalu mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan.

Momen-momen pembimbingan bersama Prof. Dr. Partini dan Dr. Suharko adalah peristiwa yang sangat membanggakan bagi penulis, lalu harus penulis katakan bahwa beliau-beliau adalah guru teori sosiologi yang tak tergantikan. Dari Bu Partini penulis mendapatkan *insight* bagaimana membangun kerangka teori yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Mas Harko pula penulis belajar bahwa setiap ilmu memiliki pakem masing-masing.

Akhirnya secara khusus seiring dengan doa *barakallah lana walakum* untuk guru-guru saya selama menimba ilmu di Fisip Universitas Gadjah Mada Yogyakarta “yang terhormat” Prof. Dr. Sunyoto Usman, Prof. Dr. Susetiawan, Prof. Dr. Heru Nugroho. Prof. Dr. Tadjoeidin Noer Effendi, Prof. Dr. Sri Hedy Ahimsya. MA. Dr. Supraja. Dr. Sugeng, Dr. L. Simatupang. Dr. Tia, Dr. Zuly Qodir dan staf akademik departemen sosiologi saya haturkan terima kasih.

Untuk semuanya, terutama untuk istriku tercinta *Mursidah Karim* tanpa cinta tulus nan penuh kasih sayang, yang setia mendampingi siang dan malam, yang selalu memberi *support* bahkan pada saat-saat yang paling berat sekalipun, diketika melangkahpun

rasanya sudah tak sanggup lagi. Mengingat dirimu membuat penulis bangkit dan bersemangat, terimakasih istriku. Semoga semua jadi catatan kebaikan yang berlimpah di sisiNya.

Yogyakarta, 12 Januari 2016

Mohammad Syawaludin



# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian .....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.7. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
<b>BAB II</b>	
TINJAUAN TEORI .....	22
2.1. Pengantar .....	22
2.2. Perlawanan Petani Rengas Adalah Perjuangan Perubahan Agraria Nasional.....	23
2.3. Definisi Gerakan Sosial.....	30
2.4. Peta Teori Gerakan Sosial.....	39
2.5. Teori Repertoire .....	48
2.6. Kerangka Berpikir Penelitian .....	81
<b>BAB III</b>	
METODE PENELITIAN.....	83
3.1. Jenis Penelitian.....	83
3.2. Metode Pendekatan.....	87

3.3.	Sumber Data.....	88
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	89
3.5.	Lokasi Penelitian.....	94
3.6.	Teknik Pengolahan Data.....	96
3.7.	Analisa Data.....	98

## **BAB IV**

SETTING KEHIDUPAN MASYARAKAT RENGAS .....	102
4.1. Pengantar.....	102
4.2. Dinamika Kehidupan Masyarakat Rengas .....	102
4.2.1. Risalah Asal Muasal Lahan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis .....	102
4.2.2. Hubungan PTPN VII dengan Masyarakat Rengas.....	104
4.2.3. Sistem Pengelolaan Lahan Masyarakat Rengas.....	106
4.2.4. Sistem Pengukuran Batas Tanah Masyarakat Rengas.....	107
4.2.5. Perbedaan Ukuran antara Masyarakat Rengas Vs PTPN VII.....	108
4.2.6. Kondisi Kelembagaan Sosial, Keagamaan dan Kepemudaan.....	111
4.2.7. Elit dan Pelapisan Sosial.....	113
4.2.8. Pertambahan dan Penyebaran Penduduk desa Rengas.....	115

## **BAB V**

STRATEGI DAN TAKTIK PERLAWANAN SERTA CAPAIAN PERJUANGAN DI MASA ORDE BARU TAHUN 1981-1997 .....	122
5.1. Pengantar.....	122
5.2. Awal Mula Perlawanan Petani Rengas .....	122

5.3.	Tindakan Perlawanan dengan Perubahan Strategi dan Taktik untuk Mewujudkan Capaian ( <i>outcome</i> ) Perjuangan Petani Rengas Tahun 1981-1991.....	132
5.4.	Strategi dan Taktik Perlawanan Dalam Mencapai Kemenangan Petani di Tingkat Mahkamah Agung Tahun 1992-1997.....	168
5.5.	REFLEKSI .....	179
<b>BAB VI</b>		
<b>STRATEGI DAN TAKTIK PERLAWANAN SERTA CAPAIAN PERJUANGAN DI MASA REFORMASI TAHUN 1998-2010 .....</b>		
		<b>193</b>
6.1.	Pengantar .....	193
6.2.	Perlawanan dengan Perubahan Strategi dan Taktik serta Tujuan Perjuangan Petani Rengas Tahun 1998-2008.....	194
6.3.	Reklaming dan Redistribusi Lahan Tahun 2009-2010 .....	237
6.4.	Refleksi .....	270
<b>BAB VII</b>		
<b>PENUTUP .....</b>		
		<b>283</b>
7.1.	Kesimpulan .....	283
7.2.	Inferensi Akademik.....	292
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
		<b>293</b>
<b>GLOSSARY .....</b>		
		<b>307</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>		
		<b>310</b>



# **BAB I**

---

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Orde Baru cenderung melakukan kebijakan pembangunan dengan ekonomi sebagai panglimanya. Hal ini menyebabkan adanya perubahan persepsi terhadap fungsi tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat unik sifatnya. Tanah dilihat sebagai sarana investasi dan alat akumulasi modal. Perubahan ini berlangsung sejalan dengan perubahan kebijakan pertanahan yaitu dari kebijakan yang memihak kepentingan rakyat ke kebijakan yang lebih memihak pada kepentingan kapitalis.

Semasa Orde Baru, politik agraria lebih mengacu kepada revolusi hijau, transmigrasi, dan modernisasi. Kenyataan ini diikuti dengan undang-undang produk hukum Orde Baru bersifat keagrariaan, misalnya, Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967), UU tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11/1967), UU tentang Pengairan (UU No. 1/1974), UU tentang Ketentuan Transmigrasi (UU No. 3/1972), UU tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 4/1982) dan UU tentang Rumah Susun (UU No. 16/1985).

Sejumlah undang-undang lain yang secara nyata berlawanan dengan UUPA ditampilkan, misalnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang memberikan kesempatan kepada berbagai kalangan untuk memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Demikian pula dengan dihapusnya Sistem Pemerintahan Adat (marga, gampoeng) yang digantikan dengan UU No.5/1979. Keberadaan tanah ulayat atau tanah *pancung alas* yang dimiliki oleh masyarakat adat, termasuk marga, menjadi tidak jelas. Sistem marga adalah unit teritorial tradisional yang dikepalai seorang *pasirah* yang terdiri dari beberapa dusun dan teritori marga sering mencakup tanah marga atau hak ulayat<sup>1</sup>.

Berlakunya undang-undang ini menyebabkan hak-hak masyarakat, misalnya hak-hak adat atas tanah atau hak ulayat menjadi terpinggirkan. Hak-hak mereka tergusur oleh kepentingan para pemilik modal. Bahkan penguasaan sumber daya alam digeser menjadi 'pemilikan oleh negara dan swasta (termasuk swasta asing). Berbagai kasus perlawanan petani yang terjadi di hampir seluruh penjuru tanah air pada dekade 1980, pada kenyataannya berawal dari dilaksanakannya berbagai undang-undang di atas dan

---

<sup>1</sup> Apa yang seringkali disebut sebagai program-program pembangunan, tidak lain merupakan produk strategi pembangunan Orde Baru untuk melemahkan masyarakat desa atas hak ulayat. Salah satu rumusan strategi pertumbuhan ekonomi tersebut didasarkan pada strategi pinjaman utang luar negeri guna pengembangan infrastruktur modern yang kemudian harus dibayar oleh pemerintah dari dana yang diperolehnya melalui eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Tidak mengherankan bila pada tingkat lokal, implementasi strategi tersebut membuahkan berbagai konflik di mana negara berupaya keras memenuhi kas pendapatannya harus berhadapan dengan masyarakat desa baik petani, penambang dan lainnya harus kehilangan tanahnya melalui program-program pembangunan tersebut. Sebagai contoh Hadirnya HTI, HPH, Plasma, ditengah masyarakat desa, disebabkan oleh masuknya sistem *contract-farming* oleh negara melalui perkebunan dan jual beli paksa lahan merupakan bentuk intervensi dari luar yang menghambat konsolidasi kelas menengah pedesaan tersebut. Mereka menghancurkan pertumbuhan kelas menengah ini dan pada saat yang bersamaan menciptakan kelas menengah lain yang lebih tergantung pada sumber daya negara seperti kredit dan fasilitas-fasilitas lainnya. Mereka adalah orang-orang kaya baru di pedesaan, tetapi secara politik sangat lemah dan menjadi pendukung kebijakan-kebijakan negara yang aktif. Ramainya sengketa tanah menyebabkan masyarakat desa harus berhadapan-hadapan dengan aparat pemerintahan yang berkolaborasi dengan pemilik.

berakibat terhadap penggusuran lahan tanah secara paksa serta menempatkan petani pada posisi yang berhadap-hadapan dengan Negara.

Berbagai tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh petani menjadi bukti bahwa petani tidak tinggal diam, tetapi tetap melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk, strategi maupun taktik untuk menolak penindasan dan pemaksaan oleh pemerintahan di masa Orde Baru. Kondisi perlawanan petani lebih sering dilakukan dengan cara tertutup, terbatas dan bahkan tersamar untuk sekedar mendukung organisasi petani yang di buat pemerintah. Meskipun demikian tindakan perlawanan kolektif petani terus berlanjut dan berulang-ulang menyesuaikan waktu dan tempat terjadinya perlawanan.

Peristiwa krisis kepercayaan yang berlanjut kepada krisis moneter pada tahun 1997, berdampak pada kekuasaan Orde Baru yang akhirnya memaksa terjadinya pergantian puncak kekuasaan dengan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya selama 32 tahun. Pergantian kekuasaan Orde Baru ke era Reformasi di tahun 1998, berakibat pada perubahan arah politik Indonesia secara menyeluruh.

Pergantian era kekuasaan di tahun 1998, mendorong “kembangkitan petani” dalam bentuk upaya dan perlawanan terhadap pemerintah untuk merombak atau menata kembali pengelolaan, penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria secara adil, bukan sekedar kebutuhan ekonomi tetapi hak atas lahan yang dikuasai oleh Negara.

Kenyataan menunjukkan bahwa tindakan kolektif perlawanan petani di masa Reformasi, lebih sering dilakukan dengan strategi terstruktur dan taktik terbuka serta konfrontatif. Ini dilakukan oleh petani sebagai hasil dari proses pembelajaran dan pengalaman kegagalan berbagai tindakan perlawanan yang dilakukan

sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan keadaan yang mengalami dinamika dari tantangan dan besarnya tekanan sistem politik dan ketidakberpihakan penguasa pada petani.

Meskipun demikian, waktu dan tempat terjadinya peristiwa bukan berarti pembatas atau periodisasi perlawanan, namun lebih pada waktu terjadinya perlawanan dan konten dari tindakan yang dilakukan. Lebih tepatnya tidak dimaknai sebagai suatu taksinomi dari tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan petani. Perlawanan yang terjadi merupakan suatu bentuk pengulangan tindakan dengan strategi dan taktik inovatif untuk perlawanan di masa berikutnya.

Perubahan tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan petani sebagai suatu bentuk respon terhadap pihak yang berkuasa. Kondisi ini berdampak pada ruang untuk menciptakan cara yang digunakan sebagai alat perlawanan agar tercapai tujuan perlawanan. Perubahan perlawanan yang terjadi selalu diikuti dengan strategi dan taktik inovatif. Kondisi tindakan perlawanan kolektif seperti ini, selalu dilakukan dengan pilihan bentuk strategi dan taktik inovatif sebagai pembeda. Tindakan perlawanan kolektif seperti ini disebut dengan *repertoire*.

Tilly mendefinisikan *repertoire* sebagai serangkaian rutinitas terbatas yang dipelajari dari kegagalan pengalaman masa lalu, dibagi dan dilakukan dalam bentuk strategi dan taktik perlawanan sebagai pilihan untuk mencapai tujuan perjuangan<sup>2</sup>. Tindakan kolektif perlawanan yang dilakukan sering merupakan suatu tindakan lama namun dalam bentuk aksi yang lebih kreatif dan berdampak meluas. Tindakan perlawanan yang dilakukan oleh petani sebagai suatu tindakan kolektif oleh petani didalamnya ada *repertoar*. Perlawanan tersebut dilakukan oleh petani secara

---

<sup>2</sup> Charles Tilly, *The Contentious French*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986: 4-6

berulang-ulang dan terus menerus mengikuti strategi dan taktik yang muncul dan berkembang dalam lingkungan perlawanan.

Peristiwa tindakan perlawanan kolektif petani dengan cara repertoar pernah terjadi dalam konflik agraria antara petani dengan PTPN VII di Desa Rengas Payaraman Sumatera-Selatan. Konflik agraria yang sudah berjalan 30 Tahun menunjukkan bahwa tindakan perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas terhadap PTPN VII, bukan sekedar konflik struktural yang berkepanjangan atau kondisi terbatasnya jaringan yang dimiliki petani atau petani tidak memiliki ideologi perlawanan yang kuat, tetapi ada kondisi-kondisi yang menggambarkan bahwa petani Rengas tidak tinggal diam, petani Rengas terus melakukan tindakan perlawanan secara kondisional dan inovatif menyesuaikan konteks waktu dan tempat peristiwa dari masa Orde Baru di tahun 1981-1997 sampai dengan masa Reformasi di tahun 1998-2010.

Fakta awal di lapangan ditemukan berbagai tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh petani Rengas seperti; protes, penolakan, demonstrasi, penghadangan, pembakaran, pendudukan, blokade, barikade massa, litigasi, reklamings dan redistribusi lahan.

Dalam melakukan perlawanan petani Rengas selalu memperhatikan kondisi realitas yang akan dihadapi baik dari sisi peluang maupun ancaman dari pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan petani Rengas sering merupakan suatu tindakan perlawanan yang berbeda bentuknya. Hal ini dilakukan sebagai penyesuaian kondisi dari strategi dan taktik perlawanan yang digunakan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa perubahan tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh petani Rengas sesungguhnya menghadirkan suatu bentuk repertoar yang tidak ditentukan oleh periodisasi dan dikotomik, tetapi ada kondisi-

kondisi lainnya yang menjadikan ruang bagi lahirnya strategi dan taktik baru sebagai pembelajaran dari pengalaman kegagalan dalam mencapai tujuan perlawanan. Kondisi-kondisi tersebut merupakan realitas yang terjadi namun kontelasinya tidak ditentukan oleh periode dan dikotomi. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut terhadap kasus perlawanan petani Rengas.

Meskipun perlawanan petani Rengas terhadap PTPN VII di Ogan Ilir Sumatera Selatan telah berlangsung selama 30 tahun dan telah berlangsung selama periode Orde Baru dan periode Reformasi. Dalam kurun waktu itu, perlawanan telah memberikan pengaruh terhadap aktor perlawanan yakni petani, isu, proses, bentuk, strategi, taktik capaian dan kondisi eksternal lainnya. Strategi dan taktik perlawanan muncul dan berkembang dalam bentuk baru yang ditentukan oleh kondisi dan faktor lainnya. Perubahan strategi dan taktik perlawanan tidak bersifat parsial, tetapi mempertegas rangkaian tindakan perlawanan kolektif dari masa ke masa yang selalu mengalami proses pembelajaran dari tindakan perlawanan sebelumnya yakni kondisi perlawanan antara petani Rengas dengan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang sudah dimulai semenjak tahun 1981 sampai dengan tahun 2010.

Tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh petani Rengas menggambarkan tindakan perlawanan dengan pilihan strategi dan taktik perlawanan yang dinamis dan memiliki tekanan terhadap pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Seperti tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan petani Rengas dalam bentuk protes dan penolakan di tahun 1981-1982, tindakan serupa juga dilakukan pada tahun 2002-2003 dengan strategi dan taktik berbeda.

Kondisi ini menunjukkan penggunaan strategi dan taktik perlawanan yang dinamis, dan memiliki tekanan gangguan yang berbeda untuk mencapai tujuan perlawanan. Lebih jauh tindakan

perlawanan kolektif di atas merupakan cara petani Rengas melakukan perlawanan menuntut kembali lahan mereka, tetapi juga suatu cara petani tetap melestarikan dan memelihara politik perlawanan. Perlawanan bukan sebatas respons kehilangan, tetapi sebuah kesinambungan tindakan perlawanan kolektif melalui strategi dan taktik inovatif.

## **1.2. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, tindakan kolektif perlawanan petani Rengas merupakan wujud dari strategi dan taktik inovatif untuk tujuan tertentu. Tindakan perlawanan kolektif tersebut mengalami perubahan baik dari sisi repertoarnya, aktor, strategi, taktik, capaian dan hasil ke arah perubahan sosial dan kebijakan atas tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Tindakan perlawanan kolektif dan perubahan yang terjadi dilakukan oleh petani Rengas karena beberapa alasan yakni;

- 1) Adanya kondisi-kondisi seperti: keluh kesah, kekecewaan dan ancaman yang berdampak terhadap kehilangannya sumber kehidupan dan sumber mata pencarian bagi petani. Kondisi-kondisi tersebut mendorong petani untuk melakukan tindakan perlawanan kolektif dengan repertoar yang diikuti oleh strategis dan taktik inovatif serta dilakukan berulang-ulang.
- 2) Strategi dan taktik inovatif berimplikasi pada capaian tujuan dari perlawanan petani Rengas.
- 3) Baik kondisi yang menjelaskan alasan petani Rengas melakukan tindakan perlawanan kolektif dengan repertoar maupun kondisi yang menjelaskan perubahan strategi dan taktik perlawanan tersebut menegaskan kondisi dari rangkaian tindakan kolektif yang satu dengan lainnya tidak

terpisahkan oleh perioderisasi. Kondisi ini, terkait dengan tiga (3) hal yakni;

- a. Kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan dan merubah tindakan perlawanan kolektif petani dengan repertoar.
- b. Hubungan perubahan bentuk strategi dan taktik dengan capaian perjuangan.
- c. Perlawanan dengan repertoar (*Repertoire of Contention*) yang dilakukan petani Rengas membutuhkan ruang mobilisasi, interest dan tindakan kolektif.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian ini berawal dari pokok permasalahan utama yakni kondisi apa yang dapat menyebabkan petani Rengas menggunakan repertoar dengan perlawanan (*repertoire of contention*) dan melakukan perubahan strategi dan taktik terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Pertanyaan di atas dijabarkan dalam dua pertanyaan empiris yakni;

- 1) Mengapa terjadi perubahan strategi dan taktik perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas dalam rentang waktu 1981- 2010 ?
- 2) Apakah perubahan strategi dan taktik yang dilakukan berdampak pada capaian perjuangan (*outcome*) ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Merujuk pokok pertanyaan utama dan empiris penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain;

- 1) Mengetahui lebih mendalam tentang kondisi-kondisi yang menjadi penyebab munculnya repertoar dengan perlawanan.
- 2) Menjelaskan proses terjadinya perubahan strategi dan taktik perlawanan dilakukan oleh petani Rengas dalam rentang waktu 1981- 2010.

- 3) Menjelaskan dampak dari perubahan strategi dan taktik yang dilakukan petani Rengas terhadap capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas yakni :

- 1) Bagi perkembangan ilmu Sosiologi khususnya terkait dengan perkembangan dari sosiologi gerakan, sosiologi sejarah dan politik.
- 2) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai *share of academic*, bagi kinerja peningkatan birokrasi dalam persoalan agraria khususnya perkebunan. Modal kapital berupa tanah bagi masyarakat agraris bukan sekedar pemanfaatan lahan untuk sumber ekonomi tetapi berfungsi juga sebagai sumber kehidupan dalam makna sosial, politik dan budaya.

#### **1.7. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Ada beberapa hasil disertasi dan penelitian yang secara umum ikut memberikan pengaruh terhadap penelitian tentang repertoar perlawanan petani ini terutama pada konsep perlawanan petani diantaranya;

Disertasi Hotman Siahaan<sup>3</sup>, fokus kajiannya untuk menjawab dua hal yakni;

- 1) Realitas pembangkangan terselubung dalam program TRI merupakan reaksi yang rasional terhadap hegemoni birokrasi yang gagal mengartikulasikan kepentingan para petani.

---

<sup>3</sup> Hotman M Siahaan, *Pembangkangan Terselubung Rakyat dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*. Disertasi, Pasca: Universitas Airlangga, Surabaya, 1996

- 2) Pembangkangan terselubung tersebut sebagai upaya mempertahankan batas keamanan subsistensi petani demi kelangsungan hidupnya.

Dalam alasan teoritik dan hipotesis, penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dari James C. Scott; *Everyday Forms of Peasant Resistance* dan Samuel Popkin; *Rational-Actors Theory* yang dipakainya untuk menguji beberapa hipotesis, yakni; Pembangkangan terselubung yang dilakukan oleh petani dalam program TRI adalah suatu reaksi rasional. Selain itu, pembangkangan terselubung yang dilakukan petani muncul di dalam tata hubungan produksi antara petani miskin dan petani kaya, dan antara petani dan berbagai institusi yang mendominasi tata hubungan produksi tersebut lewat aplikasi program TRI. Selanjutnya terjadi dominasi jaringan birokrasi pemerintah di dalam program TRI. Hipotesis lainnya ialah pembangkangan yang dilakukan para petani di dalam program TRI adalah sebagai upaya untuk mempertahankan batas keamanan subsistensi.

Penelitian ini secara teoritik hendak mengajukan teori pembangkangan terselubung dalam konteks teori-teori yang membicarakan protes-protes sosial dan tindakan kolektif petani yang dapat dikategorikan sebagai *everyday forms of peasant resistance*. Di sisi lain Hotman menegaskan bahwa teori pembangkangan terselubung merupakan tindakan rasional dan individual para petani, tapi bukan dalam kategori Pilihan Rasional sebagaimana dikatakan Samuel Popkin. Sebab menurutnya pengalaman pembangkangan TRI tidak bersifat terbuka, berlangsung secara informal, tidak dinyatakan, dan dalam skala kecil. Posisi teori Pembangkangan Terselubung yang dikemukakan dalam studinya ini merupakan eklektisasi yang berada di antara teori *everyday forms of peasant resistance* dari Scott dan Teori Pilihan Rasional dari

Popkin, yang dihubungkan oleh faktor kuatnya hegemoni negara, baik secara ideologis maupun material.

Disertasi Musdhalifah<sup>4</sup>, fokus mengkaji untuk menjawab tiga (3) hal yakni;

- 1) Relasi antara aktor pemerintah, swasta dan masyarakat pada level mikro dan makro dalam terjadinya konflik antara PT. Lonsum dengan masyarakat tani.
- 2) Dampak positif, negatif dari aspek ekonomi dan sosial antara PT. Lonsum dengan masyarakat tani serta terjadinya dialektika pertimbangan moral dan rasional petani.
- 3) Pengaruh faktor eksternal dalam mengubah konflik laten menjadi konflik manifest antara PT. Lonsum dengan masyarakat tani; dan bentuk-bentuk resolusi konflik dalam proses akomodasi antara PT Lonsum dengan masyarakat tani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat digambarkan sebagai hubungan keterikatan antara kepentingan dan kekuasaan pemerintah. Terjadi dialektika konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Bulukumba telah berkembang dari konflik yang cenderung tertutup (laten), kemudian mencuat dan selanjutnya menjadi konflik manifest akibat tindakan agresif pihak perusahaan yang mendorong terjadinya tindakan perlawanan.

Musdhalifah mendasarkan teorinya pada konsep Scott tentang pertimbangan moralitas melalui protes, perlawanan, bahkan revolusi petani sebagai suatu tindakan defensif melawan kapitalisme yang mengancam keamanan subsistensi masyarakat, dan konsep Popkin tentang pertimbangan rasionalitas melalui kesepakatan melakukan perlawanan yang dinilai sebagai cara yang

---

<sup>4</sup> Musdhalifah, Disertasi, *Perlawanan Petani : Studi Tentang Konflik Agraria dalam Relasi antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba*, Pascasarjana: Universitas Indonesia, 2008.

efektif dan efisien dalam menuntut hak-hak mereka. Sementara dinamika konflik dalam bentuknya masing-masing digunakan dengan konsep dialektika konflik J.Gultung.

Penelitian Hafis<sup>5</sup> fokus mengkaji dua hal yakni;

- 1) Realitas dari strategi perlawanan yang dilakukan oleh petani Jenggawah adalah perlawanan kolektif.
- 2) Taktik perlawanan dengan strategi unjuk rasa dan jaringan arus bawah dengan beberapa lembaga hukum dan LSM.

Perlawanan petani dalam bentuk yang lebih radikal dan langsung yakni lewat aksi massa juga merupakan jalan yang dipilih petani. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada kewajiban bagi anggota Serikat Petani Pasundan (SPP) melakukan aksi massa. Beberapa aksi massa tersebut adalah *reclaiming* atau secara aktif melakukan penguasaan tanah, ekspansi anggota baru di lingkungan sekitarnya untuk menambah jumlah anggota OTL, dukungan solidaritas terhadap OTL-OTL yang lain melalui pengerahan massa.

Tindakan perlawanan yang dilakukan oleh petani dilakukan dengan strategi terbuka dan massif dan memanfaatkan sumberdaya arus bawah dalam bentuk jaringan dan dilakukan dengan gerakan. Perpaduan aksi-aksi yang digerakan oleh aktor gerakan dari generasi muda dan aktor dari para tokoh kharismatik yang memanfaatkan jaringan arus bawah membuktikan bahwa aksi demonstrasi adalah hasil dari fungsi jaringan yang dibangun.

Titik tolak penelitian ini adalah paradoksnya persoalan tanah makin krusial akibat keluarnya UU Pokok Kehutanan (No.5/1967) dan UU Pokok Pertambangan (No. 7/1967) karena UU ini dianggap tidak sejalan dengan UUPA No.5/1960. Dengan adanya UU tersebut, hak dan kepentingan rakyat kecil menjadi semakin

---

<sup>5</sup> Hafid JOS, *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah: Strategi dan Taktik Perlawanan*. Bogor: Pustaka Latin, 2001

tergeser karena segala bentuk pembangunan yang dilakukan hanya untuk mengejar keuntungan pemodal besar. Protes petani untuk mendapatkan hak-haknya tidak didengar oleh pemerintah dan malah dianggap sebagai tindakan pidana dengan menentang kebijakan pembangunan nasional.

Hafis mendasarkan kajiannya pada teori aktor-aktor gerakan dari McAdam bahwa gerakan sosial terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan, transisional menuju perubahan sosial karena terbukanya kesempatan aktor untuk merespon, memobilisasi struktur-struktur sosial dan budaya yang ada sehingga memungkinkan dilakukannya komunikasi, koordinasi, dan komitmen di antara para aktor sehingga menghasilkan kesamaan pengertian dan kesadaran kolektif.

Penelitian Heru Purwandari<sup>6</sup>, fokus kajiannya ada tiga hal yakni:

- 1) Kondisi-kondisi yang menjadi faktor penentu membentuk organisasi petani respon atas permasalahan ekonomi dan politik.
- 2) Karakter pengorganisasian petani yang berpeluang memberikan solusi atas permasalahan yang ada
- 3) Karakter perlawanan petani apabila dikaitkan dengan watak negara dan aktor global.

Teori yang dibangun dalam memahami fenomena organisasi petani berangkat dari kesadaran bahwa realitas yang ada harus dipahami secara kritis. Dengan mendasarkan kajian pada teori pemikiran neo-Marxian dalam hal ini ditempatkan pada posisi mengkaji faktor-faktor yang saling berkaitan dalam struktur masyarakat. Persoalan yang dihadapi petani adalah persoalan

---

<sup>6</sup> Penelitian Heru Purwandari, *Perlawanan Tersamar Organisasi Petani: Upaya Memahami Gerakan Sosial Petani*. Thesis Pascasarjana Sosiologi Pedesaan :IPB, 2006

struktural yang harus dilihat dari integrasi tiga faktor yakni ekonomi, politik, dan ideologi.

Temuan teoritik penelitian ini ialah perlawanan dapat dilakukan dengan cara yang halus, tanpa mengubah struktur yang ada, atau dengan cara dekonstruksi sosial. Perlawanan dengan mempertahankan kemapanan dalam terminologi Scott dikenal dengan perlawanan tersembunyi, atau perlawanan dalam kepatuhan, sementara perlawanan dengan cara dekonstruksi dilakukan dengan merombak struktur yang ada. Pola perlawanan yang dikembangkan oleh organisasi petani SPPQT tidak dilakukan dengan mengubah struktur yang ada, melainkan mempergunakan struktur yang ada dan menjadi bagian dari sistem tersebut untuk kemudian memperbaiki sistem. Isu pokok yang ditawarkan adalah organisasi menjadikan gerakan ini tidak eksklusif.

Meski diawal pembentukan, organisasi memilih disain *community development* (CD), namun dalam perkembangannya organisasi ini menemukan dasar mendobrak kekuatan dengan cara memindahkan jalur perlawanan dari pola radikal ke pola yang lebih halus, dari *production-center oriented* menuju *people-center oriented*.

Penelitian Muhammad Romdloni<sup>7</sup>, fokus mengkaji latar belakang petani melakukan gerakan perlawanan secara radikal lebih di dasari atas aspek ekonomi, sejarah kepemilikan tanah, budaya dan agama. Pemaknaan terhadap penggusuran lahan secara paksa dan intimidatif merupakan kejahatan dan harus dilawan. Konteks ini menjadi teologi gerakan petani untuk melakukan perlawanan. Bertemunya komitmen, integritas dan

---

<sup>7</sup> Muhammad Romdloni, "Teologi Petani : Analisis Peran Islam dalam Radikalisme Gerakan Petani pada Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NB) di Kabupaten Batang dan Pekalongan", Thesis: UMS, 2005

kemampuan pengorganisasian dikalangan petani tidak bias lepas dari batuan aktor non petani seperti Walhi kabupaten Batang.

Hilma Safitri<sup>8</sup> juga melakukan studi terhadap gerakan petani di Batang temuannya mampu memberi penjelasan bahwa pola dan strategi gerakan yang dilakukan oleh FP2NB tidak lepas dari kerja intelektual aktor-aktor organik yang berada dalam lingkungan ketegangan. Petani mengalami kesulitan dan mati langkah terhadap aksi tandingan yang dilakukan oleh Negara. Petani seharusnya mampu memaknai kembali persolan kebersamaan dan komitmen dengan cara belajar dari gerakan-gerakan petani sebelumnya yang selalu gagal.

Penelitian Geidy Tiara Ariendi<sup>9</sup>, mampu menjelaskan bahwa strategi perjuangan petani dalam mendapatkan akses dan penguasaan atas lahan jumlah tanggungan, pengalaman dan peran dalam organisasi, serta jumlah dan luas relasi dengan tingkat keterlibatan petani dalam memperjuangkan akses dan penguasaan atas lahan . Petani menyadari sepenuhnya bahwa tanah tersebut tidak dapat menjadi hak milik pribadi. Hal ini pula yang membuat petani tidak melakukan aksi-aksi radikal untuk memiliki lahan tersebut. Petani merasa hanya dengan melakukan kompromi, tujuan mereka telah tercapai. Petani juga sudah merasa cukup puas dengan dapat melanjutkan hidup dengan menggarap lahan perkebunan meski tanpa kepastian jangka waktu yang diperbolehkan oleh pihak perkebunan.

---

<sup>8</sup> Hilma Safitri, "*Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB)*". Bandung: Akatiga, 2010

<sup>9</sup> Geidy Tiara Ariendi, *Strategi Perjuangan Petani Dalam Mendapatkan Akses Dan penguasaan Lahan: Studi Perlawanan Petani di Cisarua*, Disertasi, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia: IPB, 2011

Hasil studi Kartodidjo<sup>10</sup> pemberontakan petani Banten tahun 1888, menunjukkan bahwa perlawanan petani dapat mengambil bentuk yang terbuka, keras dan terorganisasi secara formal. Radikalisasi petani merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan perlawanan petani secara terbuka dan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. menyatakan bahwa kecenderungan petani menjadi bersikap radikal tidak dapat dilepaskan dari peran ideologi ratu adil atau *jihad fi-sabilillah*.

Menurut Kartodidjo kebanyakan studi gerakan perlawanan petani di Indonesia didasarkan pada asumsi bahwa berbagai pemberontakan petani lebih merupakan suatu ledakan fanatisme atau huru-hara menentang pajak. Studi-studi tersebut sudah puas dengan mengemukakan faktor-faktor agama atau ekonomi sebagai penyebabnya. Dalam garis studi ini, Sartono menyebut nama-nama seperti G.W.J. Drewes, Van der Kroef, Cohen Stuart dan Brandes<sup>11</sup>. Menurutnya faktor pemicu pemberontakan memiliki dimensi yang cukup luas yang mencakup sekaligus ekonomi, sosial, politik dan keagamaan.

Berdasarkan hasil kajian dan penelusuran literatur hasil penelitian terdahulu dengan topik serupa atau yang terdapat relasi dengan topik yang akan diteliti, maka ada dua penelitian bisa menjadi perbandingan bagi penelitian ini yakni;

1. Penelitian Wahyudi, tentang Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani" studi kasus Reklaiming atas tanah PTPN XII Kalibakar Malang Selatan. Disertasi pascasarjana UI<sup>12</sup>. Fokus

---

<sup>10</sup> Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1984. Lihat juga Kuntowijoyo, *Masyarakat Desa dan Radikalisasi Petani*", *Esai-esai Sejarah Dr. Kuntowijoyo: Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002

<sup>11</sup> R. H. Bates, *Markets and States in Tropical Afrika: Te Political Basis of Agricultural Policies Berkeley*: University of California Press, 1981

<sup>12</sup> Wahyudi, tentang *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani*" *Studi kasus reklaiming atas tanah PTPN XII Kalibakar Malang Selatan*. Disertasi Pascasarjana :UI, 2005

penelitian ini pada proses formasi dan pembentukan struktur gerakan petani di Kalibakar. Perspektif teorik penelitian menggunakan pendekatan perilaku kolektif dari Smelser untuk menganalisis formasi dan teori mobilisasi sumber daya dari Charles Tilly untuk menganalisis struktur gerakan sosial petani Kalibakar.

Alasan Wahyudi menggunakan kedua teori ini adalah model analisis mobilisasi Tilly dapat saling melengkapi dengan model yang dibangun oleh Smelser tentang bagaimana proses tindakan atau perilaku kolektif itu terjadi dalam kasus Kalibakar. Alasan rasionalnya adalah Smelser tidak memberi tekanan pada interest, sedangkan Tilly tidak memberikan perhatian pada aspek belief. Padahal, kedua elemen tersebut sangat menentukan dalam peristiwa Kalibakar.

Kedua kerangka teoritik ini akan dikombinasikan untuk melihat kasus Kalibakar, karena menurut temuan lapangan diketahui bahwa para aktornya ada yang berorientasi pada norma, yaitu; land reform (untuk kepentingan bersama petani) dan ada pula yang berkepentingan untuk mengejar *self interest* yang berupa kekuasaan sosial dan politik (*social and political power*).

Mengikuti hasil penelitian Wahyudi membawanya berada pada posisi sebagai Smelselian sekaligus juga Tillyian. Riset ini juga menemukan konsep-konsep pokok yang berbeda, dan barangkali temuan inilah yang menjadi kekhasan sosiologi gerakan sosial petani Indonesia. Temuan teoritik Smelselia-Tillyian yang tidak sejalan dengan pemikiran Smelser dan Tilly. Adapun temuan yang dimaksud meliputi:

- a. Adanya hukum aktivasi dan control sosial dalam setiap fase perkembangan perilaku kolektif.

- b. Pentingnya menempatkan networking ke dalam bagian dari *the main* atau *the important determinants* tindakan atau perilaku kolektif, dan
- c. Model gerakan sosial yang merupakan hasil konvergensi dari teori Smelser (1962) dan Tilly (1978).

Memperhatikan uraian di atas menegaskan bahwa penelitian Wahyudi tidak mengkaji tentang *repertoire*. Dalam tradisi gerakan sosial perlawanan kajian tentang episode pertentangan dan perubahan aktor-aktor gerakan menjadi gerakan sosial merupakan bagian yang penting dari studi tersebut, sebab menemukan cara bagaimana suatu gerakan sosial membangun diri dan terhubung dengan bentuk perlawanan yang dilakukan dalam episode pertentangan serta bagaimana mobilisasi dapat meningkatkan *performance* perlawanan gerakan).

Selain itu dalam pemikiran Tilly keterhubungan antar sumberdaya dilakukan dengan cara penafsiran kondisi-kondisi yang dihadapi agar tersedia alternatif yang dapat memanfaatkan kerja dari *interest*, *organization* dan *opportunity*, artinya melalui konsep *many alternative interpretations*, Tilly ingin menegaskan bahwa aktor yang terlibat memiliki kemampuan menghidupkan kondisi pertentangan dan mewarisinya untuk episode selanjutnya.

2. Penelitian Musta'im, tentang, Gerakan Petani Di Pedesaan Jawa-Timur Pada Era Reformasi: Studi Kasus Gerakan Reklamasi oleh Petani atas Tanah yang dikuasai PTPN XII di Kalibakar, Malang Selatan. Disertasi, pascasarjana Airlangga<sup>13</sup>. Penelitian ini mengkaji gerakan petani pada pengaruh aspek kesejarahan sosial.

---

<sup>13</sup> Musta'im, *Gerakan Petani Di Pedesaan Jawa Timur Pada Era Reformasi: Studi Kasus Gerakan Reklamasi oleh Petani atas Tanah yang dikuasai PTPN XII di Kalibakar, Malang Selatan*. Disertasi, Pascasarjana :Airlangga, 2004

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa akar permasalahan kasus Kalibakar adalah dimulai dari sejarah lahirnya hak erfpacht dan berlanjut pada konversi menjadi HGU terhadap tanah perkebunan. Hal inilah yang menjadi sumber permasalahan struktural. Sebab dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan peruntukan, penguasaan dan pengasingan terhadap penduduk.

Dalam penelitian ini pengkajian dilakukan dengan pendekatan teori moral ekonomi James Scott dan teori ekonomi politik dari Popkin. Teori Scott digunakan untuk memberikan analisis pada perlawanan petani yang dilakukan secara tertutup, seolah-olah menuruti program yang diberikan tetapi sesungguhnya petani melakukan perlawanan dengan cara demikian agar mereka tetap bisa hidup memenuhi kebutuhannya.

Sementara teori ekonomi politik Popkin digunakan untuk menganalisis tindakan reklamings yang dilakukan gerakan petani, sebab petani yang termarginalisasikan dapat melakukan hal demikian karena petani memiliki kemampuan dan tindakan rasional. Menurut Musta'im bahwa gerakan rakyat secara terbuka dan ekspresif seperti itu menjadi kondusif, bukan saja karena faktor krisis subsistensi (Scott), termasuk rasionalitas (Popkin) melainkan juga karena terbukanya kesempatan (*opportunity*) akibat krisis politik tahun 1997 yang memungkinkan tokoh gerakan rakyat membangun *framing processes* dan *mobilizing structures* terhadap nilai-nilai sosial dan institusi lokal yang sesungguhnya sudah terkondisikan sejak konflik hutan.

Aktivitas reklamings rakyat atas tanah yang dikuasai oleh PTPN XII bisa dilakukan pada saat kekuasaan negara tengah berada dalam situasi transisional. Pada saat sistem politik dilanda arus Reformasi menuju situasi transisional inilah para rakyat miskin menangkapnya sebagai suatu peluang (*opportunity*) untuk melakukan aksi *counter-claim* dan atau reklamings.

Mentela'ah uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengkaji kondisi-kondisi yang menjadikan aktor-aktor gerakan berubah menjadi gerakan perlawanan, selain itu penelitian ini juga tidak menjelaskan berbagai variable yang mempengaruhi dan menghubungkan kerja aktor-aktor gerakan dengan bentuk perlawanan dalam pemikiran Scott maupun Popkin. Bahkan penjelasan *opportunity* yang menggunakan pendekatan model mobilisasi diserderhanakan sebagai akibat dari perubahan sistem politik.

Dalam pemikiran Tilly teori mobilisasi merupakan model 'politik-interaktif' sebab menggunakan model politik untuk memeriksa proses yang menimbulkan gerakan sosial. Ini berfokus pada perubahan struktur peluang untuk tindakan kolektif dan peran jaringan yang sudah ada serta dukungan horisontal dalam kelompok yang dirugikan. Hal tersebut mengkaji isu-isu kekuasaan politik, kepentingan, sumber daya politik, solidaritas kelompok, dan interaksi perlawanan. Lebih khusus lagi penelitian ini tidak mengkajian *repertoire*, sebagai suatu bentuk inovasi perlawanan gerakan sosial dalam episode perlawanan.

Memperhatikan hasil penelitian Wahyudi, Musta'im, Hotman Siahaan, Musdalifah, Hafis dan Heru Purwandari kesemuanya dikategorikan penelitian tentang perlawanan petani. Hasil temuan penelitian tersebut menyatakan bahwa perlawanan petani merupakan akibat dari kekuasaan negara yang menjadikan tanah sebagai modal pembangunan dengan cara industrilisasi dan terjadi eksploitasi. Kendatipun secara umum studi-studi terdahulu bersifat saling melengkapi dan ada beberapa hasil penelitian melihat gerakan perlawanan petani dari perspektif yang berbeda yakni satu sisi sebagai gerakan yang lahir karena ideologisasi tanah dan sisi lainnya sebagai suatu gerakan sosial petani yang menginginkan

perubahan agraria dengan melakukan tindakan perlawanan dan membangun kontinuitas akhir gerakan yakni pengorganisasian.

Peneliti berkesimpulan bahwa penelitian tentang perlawanan petani di desa Rengas adalah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji tindakan kolektif perlawanan yang dilakukan oleh petani dengan cara repertoar. Kondisi perlawanan repertoar menggambarkan suatu realitas perlawanan yang dinamis dan inovatif, karena terjadi perubahan satu bentuk repertoar ke bentuk repertoar lainnya. Tindakan kolektif berupa repertoar dan adanya perubahan repertoar adalah menarik untuk diadakan penelitian.

Penelitian ini fokus pada kajian tentang realitas kondisi-kondisi petani Rengas yang melakukan tindakan perlawanan kolektif dengan repertoar. Perlawanan yang selalu diiringi dengan strategi dan taktik inovatif sebagai alat perlawanan untuk mewujudkan tujuan akhirnya menyesuaikan waktu, tempat dan bentuk tindakan<sup>14</sup>. Berbagai cara yang digunakan dalam tindakan perlawanan yang dilakukan selalu menginovasi strategi dan taktik baru yang berfungsi sebagai media memelihara keberlangsungan perlawanan secara terus menerus, berlanjut dan berdampak pada gangguan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Muncul dan berkembangnya suatu bentuk repertoar baru menggambarkan kondisi yang menjelaskan petani Rengas belajar dari pengalaman kegagalan dalam perlawanan yang dilakukan sebelumnya. Hal menunjukkan bahwa petani Rengas mampu membaca dan menginterpretasikan keadaan yang dihadapinya dan melakukan perubahan perlawanan dengan cara memanfaatkan strategi dan taktik inovasi untuk mencapai tujuannya.

---

<sup>14</sup> Bagian akhir tulisan ini diambil dari pemikiran Darmawan Triwibowo (ed), *Gerakan Sosial, Wacana Civil Society bagi Demokratisasi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal: 125

## **BAB II**

---

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1. Pengantar**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian dan bagaimana kerangka konseptual penelitian tersebut dilakukan. Teori-teori dimaksud akan dijadikan pijakan dalam peneliti ini untuk menganalisis kondisi-kondisi yang menyebabkan tindakan perlawanan kolektif dengan repertoar dan menjelaskan berbagai kondisi penentu yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dan taktik perlawanan baik yang terkait dengan periode pemerintah berkuasa maupun kondisi terjadinya repertoar. Sebab kedua kondisi berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan hasil perlawanan.

Tindakan perlawanan kolektif dengan repertoar diposisikan sebagai tindakan gerakan, sebab tiga unsur utama setiap gerakan adalah kampanye, *repertoire of contention* dan *WUNC Display*. Tindakan tersebut dilakukan terus menerus sampai tujuan dan hasil perlawanan gerakan tercapai. Sementara dalam setiap gerakan yang melakukan perlawanan ada repertoar dan setiap repertoar selalu diikuti dengan strategi dan taktik. Perubahan terus terjadi didalam repertoar, strategi, taktik, aktor, capaian tujuan agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan perlawanan.

Untuk meneliti tindakan perlawanan kolektif dengan repertoar maupun kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan repertoar, strategi dan taktik perlawanan, maka diperlukan peta teori gerakan sosial dan teori tindakan kolektif

repertoire yang bisa digunakan sebagai alat pendekatan bagi penelitian ini.

## **2.2. Perlawanan Petani Rengas Adalah Perjuangan Perubahan Agraria Nasional**

Di masa Orde Baru tanah yang dijadikan ikon pembangunan untuk mensejahterahkan rakyat, ternyata kembali menimbulkan persoalan baru, yakni harus mengambil tanah yang menjadi sumber kehidupan rakyat demi pembangun proyek perkebunan Negara<sup>15</sup>. Pada masa tersebut perlawanan petani untuk menuntut kepemilikan hak atas tanah hampir tidak bergejola ke permukaan, karena rakyat mendapatkan tekanan, surveilensi dan kontrol yang ketat dari sebuah pemerintahan rezim otoriter, sehingga masyarakat tidak berani menuntut hak-hak yang dimiliki, karena pemerintahan waktu itu beralih “tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan negara”<sup>16</sup>.

Dalam sejarah perkembangan kepemilikan hak atas tanah paling tidak Indonesia telah mengalami lima kali guncangan antara lain :

---

<sup>15</sup> Menurut Sayogyo: Sejak diberlakukannya UUPA tahun 1960 (LN 104 tahun 1960) seharusnya problem pertanahan bisa dituntaskan, akan tetapi dalam kenyataannya menyisakan problem yang tidak sedikit harus dipecahkan pada masa sekarang, yakni pertama, masih cukup banyak unsur dari ketentuan UUPA 1960 sampai kini belum ada penjabaran yang jelas, misalnya: fungsi sosial hak milik atas tanah. Kedua, ada juga UU pokok lain, misalnya UU Pokok Kehutanan tahun No.41/1999 (LN. 167 tahun 1999), yang sempat membuka jalur HPH bagi perusahaan besar loging kayu hutan alami dimana jelas ada intervensi hukum oleh negara yang mirip pernyataan domein dari masa Hindia Belanda, atas lahan tak terpakai oleh penduduk pribumi (woeste gronden). Lihat Sayogyo, dalam Karl J. Pelzer, 1991, *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal: 10

<sup>16</sup> Sesuai dengan pasal 33 (3) UUD 1945 “(Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat)

- 1) Pada masa Belanda meninggalkan Indonesia dan Jepang menjadi penjajah baru, dalam masa ini penataan kepemilikan hak atas tanah mengalami fase awal penataan karena aturan-aturan dan penguasaan tanah masih atas nama penjajah Belanda sementara Indonesia dikuasai penjajah Jepang. Dalam masa ini sebagian besar tanah bekas perkebunan Belanda dikuasai Jepang dan belum dilakukan penataan secara teratur, karena hanya kurun waktu 3,5 tahun Jepang sudah meninggalkan Indonesia.
- 2) Pada masa kemerdekaan, pada masa ini penataan tanah eks perkebunan Belanda banyak dikuasai oleh darurat militer yang bekerja sama dengan penduduk setempat untuk menggarap lahan bekas perkebunan tersebut, sehingga belum ada penataan secara pasti tentang kepemilikan hak atas.
- 3) Pada masa diundangkan UUPA 1960: Pada masa ini penataan kepemilikan hak atas tanah mulai dilakukan dengan dasar-dasar hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk di dalamnya adalah tanah-tanah yang menjadi obyek land reform tahun '64 SK/49/KA/64 tentang redistribusi tanah perkebunan untuk kepentingan penduduk dan desa yang ada di sekitar perkebunan. Belum tuntas mengenai penataan tanah sudah muncul gejolak tahun 1965 tentang G/30.S/PKI yang menyisakan persoalan tentang penataan tanah tersebut.
- 4) Pada masa perubahan dari rezim Orla ke rezim Orba, dalam masa ini persoalan tanah bermunculan karena kepemilikan tanah secara legal dilakukan dengan cara-cara paksa oleh mereka yang berkuasa secara politik pada waktu itu terhadap mereka yang dianggap terlibat G/30 S/PKI. Sehingga penataan tanah pada masa Orde Baru tersebut tidak bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada masa itu.

Meskipun demikian masyarakat tidak mengalami gejolak karena ditekan oleh pihak aparat keamanan dengan dasar stabilitas nasional.

- 5) Masa reformasi; pergantian dari rezim Orde Baru ke reformasi menyisakan problem pertanahan yang mengakibatkan tuntutan warga yang merasa dirampas haknya pada masa Orde Baru muncul di permukaan, sehingga hampir mencapai 50% lebih tanah perkebunan di wilayah Indonesia umumnya mengalami sengketa dengan landasan menuntut dikembalikan hak mereka yang pernah dirampas oleh rezim Orde Baru ketika itu<sup>17</sup>. Khusus di Sumatera-Selatan konflik agraria warga dengan PTPN.VII setelah reformasi terjadi di beberapa lokasi Payaraman Ogan Ilir.

Terjadinya proses perubahan sosial dan sistem politik di Indonesia sejak zaman Belanda hingga Orde Lama berdampak pula terhadap transisi di bidang hukum dan politik agraria nasional, tidak terkecuali di sektor perkebunan, sehingga menimbulkan konflik kepemilikan hak atas tanah di berbagai wilayah di Indonesia khususnya tanah perkebunan.

Dengan demikian timbul permasalahan yakni terjadi ketidakpastian hukum yang berkenaan dengan status tanah perkebunan yang berganti-ganti penguasaannya; konflik hak atas tanah perkebunan baik pada masa pra kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan. masa transisi yang berkepanjangan di bidang pertanahan khususnya tanah perkebunan, berdampak pada

---

<sup>17</sup> Bagian tulisan ini diambil dari tulisan Ahmad Sodkin *Ibid*. Pendapat ini juga pernah digunakan oleh Solih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)*, Disertasi: Undip, 2008. Untuk kepentingan penelitian ini penulis menyesuaikan dengan tidak merubah ide pokoknya.

munculnya sengketa hak atas tanah perkebunan yang terus menerus, sehingga penyelesaian melalui cara litigasi dianggap tidak efektif dan efisien dibarengi dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta persepsi masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan yang semakin menurun.

Pada masa Orde Baru, persoalan tanah bermunculan karena kepemilikan tanah secara legal dilakukan dengan cara-cara paksa oleh mereka yang berkuasa secara politik. Hal ini berakibat pada penataan tanah tidak bisa memenuhi rasa keadilan bagi petani. Meskipun demikian petani tidak mengalami gejolak karena ditekan oleh pihak aparat keamanan dengan dasar stabilitas nasional<sup>18</sup>.

Pada masa pergantian dari rezim Orde Baru ke Reformasi menyisakan problem pertanahan yang mengakibatkan tuntutan petani yang merasa dirampas haknya pada masa Orde Baru muncul ke permukaan. Sebagaimana keadaan di Kabupaten Ogan Ilir mengalami gelombang sengketa agraria menuntut dikembalikan hak mereka yang pernah dirampas oleh rezim Orde Baru ketika itu<sup>19</sup>.

Pada masa Orde Baru, pemerintah lebih mengedepankan negasi dan merampas hak-hak rakyat atas tanah yang lebih banyak diberikan bagi kegiatan investasi (ekspansi dan akumulasi kapital) atau kegiatan ekonomi skala besar yang memerlukan pengadaan tanah dalam skala besar pula. Sementara hak-hak kaum tani tak

---

<sup>18</sup> Pandangan ini diolah dari disertasinya Mahfud MD tentang *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES Jakarta, 1998, hal: 15

<sup>19</sup> Pada masa Orde Baru menjadikan sengketa pertanahan tidak mereda, sehingga pemerintah Orde Baru menggunakan cara kekerasan dan tekanan-tekanan dalam menyelesaikan sengketa tersebut karena demi strategi tercipta stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (tri logi pembangunan pada masa Orde Baru). Konflik agraria pada masa Orde Baru menjadi jalan dan alas an digunakannya kekerasan dan masuknya kekuatan Meliter dalam urusan agrarian.

bertanah (*landless peasants*) dalam memperoleh prioritas atas tanah-tanah pertanian dan hak-hak para petani penggarap memperoleh jaminan penggarapan - seperti yang dijamin oleh UUPBH 2/1960, UUPA 5/960, UU 52/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan PP No.224/1961 yang mengatur soal tanah-tanah obyek *land reform* dan pemberian ganti-ruginya lebih banyak diabaikan. Begitu pula dengan hak-hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) atas tanah-tanah adat dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya lebih banyak dinafikan.

Menurut Suhendar<sup>20</sup> kenyataan di atas menjelaskan bahwa pola-pola konflik agraria yang ada pada masa Orde Baru merupakan bentuk dari ketidakpuasan masyarakat terhadap politik agraria yang dilakukan dengan mengedepankan investasi dan modal para kapitalis besar (baik negeri maupun swasta) yang ada di Indonesia. Hebatnya lagi penyelesaian konflik tersebut banyak dilakukan dengan cara pendekatan keamanan yang mengandalkan aparat untuk melakukan tekanan kepada masyarakat dengan dalih stabilitas nasional. Karena itu sudah menjadi rahasia umum bahwa konflik yang pada mulanya sederhana ini pada gilirannya menjadi sengketa yang sangat rumit, karena kewenangan dan manajemen yang sentralistik penerapannya dikawal oleh birokrasi yang otoriter, praktek manipulasi dan kekerasan terhadap penduduk yang mempertahankan hak azasinya<sup>21</sup>.

Dalam kenyataannya paradigma pembangunan yang dianut oleh rezim Orde Baru pada waktu itu adalah lebih menekankan

---

<sup>20</sup> Endang Suhendar & Ihdhal Kasim, *Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pertanahan di Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 1995.

<sup>21</sup> Pemerintahan Soeharto menetapkan ideologi baru, yakni pembangunanisme (developmentalism), yang merupakan wajah baru dari kapitalisme. Strategi pembangunan ini dijalankan dengan mengaitkan diri pada kapitalisme Internasional.

pada pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi modal asing secara besar-besaran, sehingga kegiatan ekonomi yang menjadi prioritas adalah kegiatan industrialisasi menengah dan besar yang cenderung mampu mendatangkan devisa. Walaupun industri yang dikembangkan tidak berbasis atau bertumpu pada sektor pertanian, tetap sebagian besar rakyat berada pada sektor ini. Hasil akhirnya sudah di ketahui secara bersama, bahwa akses dan aset secara nasional hanya dimiliki oleh sedikit orang, yaitu para penguasa dan pengusaha.

Dalam keadaan yang demikian sengketa yang terjadi adalah antara rakyat dengan perusahaan perkebunan akibat klaim Tanah Negara, seperti yang terjadi dalam kasus Badega, kasus Gunung Batu, dan kasus Cimerak, di Jawa Barat, serta Jenggawah Eks keresidenan Besuki, termasuklah kasus perlawanan petani versus PTPN VII di Rengas Payaraman Pagan Ilir. Sesungguhnya semua kasus ini adalah kontestasi dan kompetisi kepentingan dari kekuasaan<sup>22</sup>. Pihak birokrasi pertanahan negara yang menerbitkan

---

<sup>22</sup> Kasus Badega adalah sengketa atas lahan seluas 498,5 hektar yang keseluruhannya merupakan tanah garapan masyarakat setempat di empat desa yang masuk dalam Kecamatan Cikajang, Kab. Garut, Jawa Barat dan melibatkan 579 KK yang bersengketa dengan PT SAM. Tanah yang disengketakan itu adalah bekas perkebunan PT C yang tidak digarap oleh pemegang haknya tetapi disewakan kepada masyarakat setempat selama, kurang lebih 38 tahun sebelum muncul sengketa. Tahun 1986 pemerintah menerbitkan HGU untuk PT SAM atas sejumlah tanah garapan rakyat tadi dan memulai pengusiran rakyat dari tanah-tanah tersebut. Padahal sebagian rakyat juga telah mengajukan sertifikat kepemilikan tanah jauh sebelum PT SAM mengajukan permohonan HGU, karena HGU PT C telah berakhir pada tahun 1990. Tetapi permohonan rakyat tidak dianggap oleh pemerintah. Pemberian HGU untuk PT SAM ini dilakukan oleh pemerintah tanpa ada musyawarah atau meminta persetujuan dari rakyat setempat. Dalam konflik ini ada 13 petani yang kemudian ditahan oleh aparat keamanan dengan tuduhan membuat kerusuhan dan menyebarkan permusuhan.

Sementara kasus Badega Tanah-tanah garapan rakyat yang secara defacto telah menjadi pemukiman (perkampungan), persawahan dan perladangan di daerah Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Sukabumi Selatan diklaim oleh PT. BLA

---

sebagai areal yang di bawah penguasaannya karena perusahaan itu telah mengantongi HGU yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1984 untuk tanah seluas 450 hektar. Tanah itu, yang seluruhnya memiliki luas 830 hektar, adalah bekas perkebunan asing yang HGU-nya, kemudian dipegang oleh NY C sampai tahun 1980, sebagian sudah digarap masyarakat berakhirnya kekuasaan kolonial asing Bahkan sejak 1973 kegiatan perkebunan sudah tidak berlanjut di situ, dan Bupati Sukabumi pada waktu itu memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengolah tanah-tanah itu sepenuhnya asalkan dijadikan areal pertanian.

Kasus Cimerak Proyek PIR-Bun Cimerak yang berlokasi di Kecamatan Cimerak meliputi sejumlah lahan yang luasnya mencapai 6.000 hektar. Proyek dimulai pada tahun 1981. Pada mulanya ditetapkan areal yang akan digunakan adalah sejumlah lahan yang dikaitkan sebagai tanah negara, tetapi pada kenyataannya proyek ini juga meliputi sejumlah areal yang telah digarap penduduk yang berstatus tanah letter C maupun yang telah bersertifikat hak milik yang jumlahnya mencapai 134 sertifikat. Tetapi karena proyek ini harus berjalan menggunakan tanah-tanah itu, maka sertifikat-sertifikat tadi dinyatakan sebagai ASPRO (asli tapi salah prosedur). Akhirnya sejumlah tanah pertanian digusur dengan begitu saja oleh PTP XIII selaku pemilik proyek tanpa ganti kerugian. Untuk itu, PTP XIII melakukan sejumlah intimidasi terhadap warga yang menolak upaya penggusuran. Pemaksaan juga dilakukan oleh aparat militer dan pemerintah daerah. Rakyat-rakyat yang membangkang akan segera dicap sebagai oknum PKI atau anggota kelompok separatis islam yang membangkang terhadap pembangunan.

Adapun kasus Jenggawah adalah sengketa atas lahan yang luasnya mencapai 2800 hektar yang diperebutkan oleh PTP XXVII dengan penduduk setempat. Tanah itu adalah bagian dan eks perkebunan Belanda yang terletak di dua kecamatan di Karesidenan Besuki. Oleh pemilik perkebunan waktu itu, penduduk diberi hak untuk menggarap tanah-tanah yang sekarang disengketakan karena pihak perkebunan membutuhkan kehadiran dan tenaga mereka sebagai buruh perkebunan maupun untuk mengolah tanah sesuai dengan tatacara pengelolaan perkebunan tembakau. Ketika pendudukan Belanda berakhir, dan perkebunan itu secara otomatis dinasionalisasikan, maka pihak PTP XXVII, secara sepihak mengklaim tanah tersebut juga menjadi bagian hak mereka. Tahun 1978 sengketa perebutan penguasaan lahan ini Pernah meledak dengan tuntutan ditahannya beberapa penduduk setempat. Tahun 1994, BPN malah menerbitkan HGU baru untuk PTP XXVII atas tanah yang sebetulnya masih bermasalah tadi. Rakyat menjadi marah, dan melakukan sejumlah aksi protes atas terbitnya HGU untuk PTP XXVII mereka tentunya menjadi terancam dan bisa diusir oleh pihak perusahaan setiap saat. Ulasan ini dikembangkan dari berbagai sumber diantaranya lihat : Bachriadi, Dianto, Dalam dokumen "Kekerasan Dalam Persoalan Agraria dan Relevansi Tuntutan Dijalankannya pembaharuan Agraria di Indonesia pasca Orde-Baru",

HGU atas sejumlah lahan yang dianggap (klaim) sebagai tanah negara yang kosong tidak berpenghuni menjadi pemicunya. Padahal di atas tanah-tanah itu sudah bermukim dan hidup sejumlah keluarga untuk masa yang cukup lama, bahkan bergenerasi.

Pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi diyakini oleh banyak pihak bahwa penggantian kekuasaan tersebut pasti akan membawa perubahan politik Indonesia secara menyeluruh. Di berbagai wilayah perkebunan hampir di seluruh Indonesia mengalami gejolak sengketa bersamaan dengan perubahan perilaku masyarakat tersebut. Tuntutan kembalinya hak garapan mereka merupakan isu utama yang dihembuskan di semua wilayah sengketa perkebunan di Indonesia.

Ini berarti ada ruang untuk upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dan rakyat dalam merombak atau menata kembali lapangan agraria dengan cara menata ulang penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria secara adil. Tanpa perubahan kekuasaan politik “yang mendasar”, tidak ada harapan bagi siapapun untuk bisa melihat perubahan seperti yang diharapkan.

### 2.3. Definisi Gerakan Sosial

Beragam pandangan yang dikemukakan oleh pemikiran tentang definisi gerakan sosial<sup>23</sup>, hal ini menegaskan bahwa konsep

---

Naskah Internal Konsersium Pembaruan Agraria, Tanpa Penerbit, Tanpa tahun, Kasdi, Aminuddin, *Masalah Tanah dan Keresahan Petani di Jawa Timur 1960-1965: Studi tentang Gerakan Aksi Sepihak yang dilancarkan PKI-BTI*, Tesis Pascasarjana UGM, 1990. Lihat juga Solih Mua'di, *Ibid*, hal:213

<sup>23</sup> Ada dua teori yang mendominasi studi-studi gerakan sosial kontemporer, yakni teori mobilisasi sumber daya yang berbasis di Amerika Serikat, dan perspektif gerakan sosial baru yang berbasis di Eropa Barat. Teori mobilitas sumber daya lahir sebagai tanggapan terhadap perspektif teori Durkheimian yang memandang gerakan sosial secara negative sebagai anomie dan perilaku

gerakan sosial tidaklah manunggal, tetapi beraneka-ragam sebagai suatu gejala sosial, diantara konsep gerakan sosial sebagai berikut;

Pandangan ahli sosiologi dalam kamus sosiologi memberikan definisi gerakan sosial sebagai berikut:

*Any board social alliance of people who are associated in seeking to effect or to block an aspect of social change within a society.*

(Suatu aliansi sosial sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong ataupun menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat)<sup>24</sup>.

Ralph Turner dan Lewis Killian melihat gerakan sosial dalam perspektif "perilaku kolektif". Menurut keduanya, gerakan sosial merupakan sebuah bentuk khusus dari perilaku kolektif yang dibedakan terhadap perilaku "organisasional" dan "institusional". Gerakan sosial tidaklah perlu ataupun memiliki tipikal dengan gerakan yang berbasiskan sejumlah organisasi, meskipun gerakan ini membawa juga kerja-kerja gerakan dan secara teratur mencoba untuk melakukan kontrol dan berbicara atas nama gerakan<sup>25</sup>.

*a collectivity acting with some continuity to promote or resist a change in the society or organisation of which it is part. As a collectivity a movement is a group with indefinite and shifting membership and with leadership whose position is determined more*

---

irasional. Sedangkan perspektif teori gerakan sosial baru lahir sebagai tanggapan terhadap perspektif Marxis yang dinilai reduksionis, karena menerjemahkan gerakan sosial semata-mata sebagai perjuangan kelas. Sejumlah akademisi mencoba upaya serius untuk membahas, mengali dan mengedepankan beberapa unsure umum dari gerakan sosial kontemporer; seperti : Charles Tilly 1978, 1985, Melluci 1980,1985, Tarrow: 1982, Morris dan Herring 1984, Jean Cohen 1985, Klaus 1985, lihat lebih detil tulisan Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, 2010: 15

<sup>24</sup> Lihat dalam Julia Jary dan David Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, Edisi Kedua, 1995, hal: 614-615.

<sup>25</sup> Ralph Turner, "Collective Behaviour and Resource Mobilisation as Approach to Social Movements: Issues and Continuities", dalam L. Kriesberg (Ed), *Research in Social Movements: Conflicts and Change*, Vol. 4. Greenwich: JAI Press, 1982, hal: 5

*by informal response of adherents than by formal procedures for legitimising authority*<sup>26</sup>.

Sementara Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai ;

*a Social movement as collective challenges to elites, authorities, other groups or cultural codes by people with common purposes and solidarity in sustained interactions with elites, opponents and authorities. He specifically distinguishes social movements from political parties and advocacy groups*<sup>27</sup>.

(Organisasi gerakan sosial didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki kesadaran diri untuk bertindak, concern untuk mengungkapkan apa yang dilihatnya sebagai klaim-klaim dengan menentang kelompok elit, penguasa, atau kelompok lain).

Menurut Tarrow ada elemen-elemen yang menjadi bagian penting keberadaan gerakan sosial yakni;

*The elements of social movements in to the realm of contention; Collective challenges, based on common purposes and social solidarities, in sustained interaction with elites, opponents, and authorities. "sequences of contentious politics that are based on underlying social networks and resonant collective action frames, and which develop the capacity to maintain sustained challenges against powerful opponents"*<sup>28</sup>.

(Elemen gerakan sosial dalam ranah perlawanan adalah; tantangan kolektif, tujuan umum, solidaritas sosial, interaksi yang berkelanjutan dengan elit, lawan, dan otoritas. Jadi gerakan sosial gerakan yang melakukan politik perlawanan/perseteraan yang didasarkan pada jaringan

---

<sup>26</sup> Ralph Turner and Lewis Killian, *Collective Behaviour*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1987, hal: 223

<sup>27</sup> Sydney Tarrow, *Power In Movement: Collective Action, Social Movements And Politics*, Cambridge University Press, 1994.

<sup>28</sup> Ibid: 2.

sosial dan pembingkaiannya tindakan kolektif, dan selalu mengembangkan kapasitas untuk mempertahankan tantangan yang berkelanjutan terhadap lawan kuat).

Pandangan yang berbeda seperti diutarakan oleh Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama; atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui aktor-aktor gerakan (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang sudah mapan.

*a collective attempt to further a common interest or secure a common goal, through collective action outside the sphere of established institutions*<sup>29</sup>.

Sementara Piotr Sztompka<sup>30</sup>, berpandangan gerakan sosial adalah pertentangan teori umum masyarakat yang berlawanan secara tradisional yang berkaitan erat dengan dua pendekatan berlawanan dalam studi gerakan sosial. Teori umum pertama menekankan mobilisasi aktor: gerakan sosial muncul dari bawah ketika volume keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan rakyat melampaui ambang batas tertentu. Salah satu variasi teori umum ini mempunyai semacam citra "ledakan". Gerakan sosial dilihat sebagai ledakan spontan tindakan kolektif, kemudian baru mendapat pemimpin, organisasi dan ideologi (gerakan terjadi secara spontan). Variasi lain mempunyai citra "kewirausahaan" atau komplotan. Gerakan sosial dipandang sebagai tindakan kolektif yang mempunyai tujuan, direkrut, dimobilisasi dan dikendalikan oleh pimpinan dan ideolog (pemrakarsa persekongkolan, pemrakarsa gerakan dan sebagainya) dalam

---

<sup>29</sup> Anthony Giddens and Philip W Sutton [2010] *Sociology; Introductory Reading* (3<sup>rd</sup> Edition), Polity Press, UK. 1993: 642. lihat juga Anthony Giddens, *Sociology*. Third Edition. Polity Press, 1997, hal :511.

<sup>30</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (terj), Jakarta: Prenada, 2004, hal: 351-352

upaya untuk mencapai tujuan tertentu. teori ini menilai bahwa gerakan sosial itu dibentuk dengan sengaja. Selanjutnya Sztompka<sup>31</sup> mengatakan teori umum kedua yang bertentangan, menekankan pada kondisi struktural yang dapat memudahkan atau menghambat kemunculan gerakan sosial. Menurutnya suatu gerakan sosial berkobar jika kondisi, keadaan, situasi kondusif. Satu variasinya berasal dari metafora tutup pengaman. Potensi gerakan (dalam setiap masyarakat selalu ada dalam ukuran tertentu dan dipandang konstan) di lepaskan dari atas ketika hambatan, rintangan, dan kendali di tingkat sistem politik melemah. Variasi lain menekankan pada akses ke sumber daya: gerakan timbul karena terbukanya cara dan peluang baru yang memudahkan tindakan kolektif.

Adapun Doug McAdam dan David A. Snow mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu gerakan yang melakukan protes untuk suatu tujuan perubahan bersama;

*as a collectivity acting with some degree of organization and continuity outside of institutional channels for the purpose of promoting or resisting change in the group, society, or world order of which it is a part*<sup>32</sup>.

McCarthy dan Mayer Zald<sup>33</sup>, mendefinisikan gerakan sosial sebagai seperangkat opini dan kepercayaan (*opinion and belief*) dalam suatu kelompok masyarakat yang mencerminkan preferensi bagi perubahan pada sebagian elemen struktur sosial dan atau distribusi kemanfaatan dalam tatanan masyarakat yang lebih luas. Singh mengistilahkannya dengan "konstituen sadar"<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Doug McAdam dan David A. Snow. 1997. *op-cit.*, hal:xviii

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru, Resist*, 2010, hal:137

*a set of opinions and beliefs which represents preferences for changing some elements of the social structure and/or reward distribution of society. A countermovement is a set of opinions and beliefs in a population opposed to a social movement*<sup>35</sup>.

John McCarthy dan Mayer Zald menggunakan pendekatan *resource mobilisation theory* dengan memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada pentingnya faktor peran organisasi dalam gerakan sosial.

Pandangan ini sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Scott<sup>36</sup> bahwa gerakan sosial petani dalam kasus perlawanan petani sebenarnya menjalankan tindakan perlawanan dengan *prinsip everyday forms of resistance* disebabkan meluasnya peranan Negara dalam proses transformasi pedesaan.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Charles Tilly<sup>37</sup>, mendefinisikan gerakan sosial sebagai berikut;

*Social movements as a series of contentious performances, displays and campaigns by which ordinary people make collective claims on others For Tilly, social movements are a major vehicle for ordinary people's participation in public politics.*

(Menurut Tilly gerakan sosial adalah rangkaian aksi perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok yang dirugikan terhadap pemegang kekuasaan melalui berbagai ragam protes publik, termasuk tindakan-tindakan di luar jalur partisipasi politik formal yang diatur oleh hukum dan perundangan, untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen, serta mewakili jumlah yang signifikan).

---

<sup>35</sup> John. D. McCharty and Mayer. N. Zeld, "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory", dalam *American Journal of Sociology*, Vol. 82 (1977), hal: 1217-1218.

<sup>36</sup> James Scott, *lok-cit*: 1993, hal: 305

<sup>37</sup> Charles Tilly, Lesley J. Wood, *Social movements, 1768 - 2008*, Paradigm Publishers, USA, 2009

Secara umum Tilly berargumentasi bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang terorganisir (*organised*), berkelanjutan (*sustained*), menolak *self-conscious* (*self conscious challenge*) dan di dalamnya terdapat kesamaan identitas (*shared identity*) di antara mereka-mereka yang terlibat di dalamnya<sup>38</sup>. Tilly menekankan pada dinamika kondisi keseluruhan yang menentukan keresahan (bahkan kerusuhan) sosial (*social unrest*) dan karakteristik-karakteristik yang ada padanya, ketimbang pada gerakan sosial di mana terdapat aktor-aktor yang terorganisir secara spesifik.

Perspektif teoritis Tilly<sup>39</sup>, Ini bisa dilihat dalam definisinya mengenai gerakan sosial sebagai sebuah “rangkaian interaksi berkelanjutan (*sustained series of interactions*)” antara otoritas dengan para penantang yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi khusus.

*Sustained series of interactions between power holders and persons successfully claiming to speak on behalf of a constituency lacking formal representation, in the course of which those persons make publicly visible demands for changes in the distribution or exercise of power, and back those demands with public demonstrations of support*<sup>40</sup>.

Sementara Rajendra Singh mendefinisikan gerakan sosial suatu gerakan sosial yang lebih menonjolkan pluralitas, ditunjukkan secara beragam melalui isu anti rasis, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, lingkungan, regionalisme dan etnisitas, kemerdekaan sipil, kebebasan individu dan perdamaian. Menurutnya model gerakan seperti ini tidak sebagaimana gerakan

---

<sup>38</sup> Ibid.hal: 155

<sup>39</sup> Hanspeter Kriesi. 1988, *The Interdependence of Structure and Action: Some Reflections on the State of the Art*. JAI Press Inc, hal: 352.

<sup>40</sup> Charles Tilly, “*Social Movement and National Politics*” dalam C. Bright and Sandra Harding (Eds), *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*, Ann-Arbor, Michigan: University of Michigan Press, hal: 306.

sosial lama (klasik dan neo klasik) dan tidak meliputi diskursus ideologi yang mempertanyakan antikapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Dalam literatur Singh menyebutnya sebagai Gerakan Sosial Baru<sup>41</sup>.

Memperhatikan beberapa definisi tentang gerakan sosial di atas, jelas sekali memberikan titik tekan terhadap pengertian gerakan sosial pada beberapa hal yakni;

- a. Gagasan ideal ketimbang pengejaran kepentingan material,
- b. Senantiasa berkaitan dengan perubahan menuju suatu arah yang dianggap ideal oleh para penggeraknya,
- c. Menekankan pada segi kolektif dari suatu gerakan sosial, sedangkan diantara mereka ada pula yang menambahkan segi kesengajaan, organisasi dan kesinambungan.

Beberapa ahli memposisikan gerakan sosial sebagai suatu gerakan perubahan yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan ideal. Munculnya gerakan tersebut karena ada suatu kesenjangan yang dilakukan oleh kelompok dominan atau berkuasa. Gerakan sosial merupakan entitas dinamis terkadang bersifat non formal. Sisi lain ada juga yang memberi perhatian pada aksi dan upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama dalam rangkai perubahan, gerakan mana dilakukan oleh kelompok di luar lingkungan lembaga-lembaga yang mapan.

Sementara Singh tentang gerakan sosial baru pada dasarnya mengembangkan politik akar rumput, aksi-aksi dari akar rumput, gerakan mikro dari kelompok-kelompok kecil, membidik isu-isu lokal dengan dasar kelembagaan yang terbatas dan struktur gerakan ditentukan oleh pluralitas pencarian tujuan, sasaran dan orientasi yang berbasis pada heterogenitas sosial <sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New : A Post Modernist Critique*. New Delhi, Thousand Oaks, London : Sage Publications, 2001,hal: 89.

<sup>42</sup> Rajendra Singh, 2001, *Ibid*, hal : 101-102

Definisi yang berbeda dikemukakan oleh Charles Tilly yang pada intinya gerakan sosial merupakan aksi tindakan sebuah “rangkaiannya interaksi berkelanjutan (*sustained series of interactions*)” antara otoritas dengan para penantang yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi khusus.

Tilly mengajukan konsep “serangkaian tindakan perlawanan kolektif” dalam konsep yang generik Tilly menyebutnya dengan *repertoire*. Dalam konsepnya Tilly jelas mengemukakan bahwa disebut dengan gerakan bila meliputi tiga unsur utama yakni; kampanye, repertoire of contention dan WUNC Display, karena itu, tindakan perlawanan kolektif dengan repertoire merupakan perwujudan dari unsur repertoire dari gerakan itu sendiri.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan gerakan sosial yang dikemukakan Charles Tilly. Peneliti berpendapat dalam gerakan sosial selalu ada repertoire dan diikuti oleh strategi dan taktik. Konsep ini dapat menjelaskan fenomena tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh petani Rengas terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dalam rentang periode berbeda-beda serta kondisi pembentukan repertoire yang berbeda.

Peneliti juga berpendapat bahwa secara teoritik fenomena tindakan perlawanan kolektif petani Rengas bisa saja dianalisis dengan teori-teori yang dikategorikan sebagai gerakan sosial lama. Sebab, isu yang diperjuangkan masih berbasis pada aspek materialistik, aktor-aktor kolektifnya tidak didasarkan pada eksploitasi, dan masih dalam paradigma *grievances*. Namun untuk fenomena perlawanan petani Rengas hanya dengan pendekatan gerakan sosial saja tidak cukup. Hal ini berdasarkan pada kondisi dari tindakan perlawanan petani Rengas yang dilakukan dengan cara repertoire dan menggunakan strategi dan taktik inovatif sebagai alat perlawanan yang terkait dengan tahun dan pemerintah

yang berkuasa. Karena itu, diperlukan konsep gerakan yang ada *repertoire*.

Dengan kondisi demikian, tindakan perlawanan kolektif *repertoire* adalah tindakan yang dilakukan oleh petani baik secara kolektif maupun gerakan sebagai cara perlawanan untuk mencapai tujuan. Cara perlawanan yang digunakan dengan strategi dan taktik inovatif yang dipelajari dari pengalaman-pengalaman kegagalan perjuangan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan perlawanan yang dilakukan oleh petani berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan sampai dengan tercapainya tujuan perlawanan.

#### **2.4. Peta Teori Gerakan Sosial**

Berdasarkan uraian tentang definisi gerakan sosial di atas, maka perlu dikemukakan teorisasi gerakan sosial yang pernah berkembang dari masa ke masa serta isu yang diperjuangkan oleh masing-masing gerakan. Pemetaan teori gerakan sosial diperlukan, sebab begitu banyak ahli dari berbagai aliran dan dalam rentang waktu yang berbeda. Dalam pemetaan teori gerakan sosial ini, peneliti menggunakan pandangan dan klasifikasi yang dikembangkan oleh Rajendra Singh untuk membuat peta teori gerakan sosial dalam penelitian ini.

Dalam khasanah gerakan sosial yang berkembang di Barat, banyak sekali perspektif yang menganalisis kemunculan gerakan sosial. Menurut Singh paling tidak ada empat perspektif atau pendekatan di dalam memahami terjadinya gerakan-gerakan sosial diantaranya<sup>43</sup>;

- 1) Aliran yang menganalisis gerakan sosial dari sudut proses politik , proses politik dan struktur mobilisasi. Beberapa tokoh penting dalam aliran ini seperti McAdam (1982, 1989,

---

<sup>43</sup> Rajendra Singh, 2010, *lok-cit*, hal: 89-114

1998), Sidney Tarrow (1994,1995,1989), Michael Lipsky (1970), Peter Eisinger (1973), Jenkins dan Perrow (1977), Kitschelt (1986), Brockett (1991), Kriesi, et al (1992)<sup>44</sup>.

Inti pemikiran aliran ini adalah pada struktur peluang politik yang mempengaruhi kelangsungan gerakan sosial. Dalam struktur peluang politik ada elemen mendasar bagi gerakan sosial yakni tingkat keterbukaan, tingkat stabilitas elit yang berkuasa, adanya pengelompokan dan perpecahan elite, dan kapasitas Negara dan tindakan repressif.

Aliran ini mengutamakan konsepsi peluang dan keterbukaan proses (eksplanatoris), akan tetapi konsepsi ini menemukan kesulitan dalam menganalisis kasus yang spesifik. Sebab peluang politik tidak selalu mendatangkan keuntungan bagi gerakan sosial.

- 2) Aliran yang menganalisis gerakan sosial dari perspektif mobilisasi sumberdaya, proses framing, diantaranya adalah McCarthy dan Zald (1966, 1977), Mancur Olson (1965), Anthony Oberschall (1973, 1978), Charles Tilly (1970, 1977, 1978), McAdam (1996)<sup>45</sup>.

Inti pemikiran aliran ini adalah ada tiga faktor utama dalam menganalisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial, yakni; mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*), peluang politik (*political opportunities*) dan proses pembingkaihan (*framing process*). Aliran ini melihat aspek ketidakpuasan dan keluhan tidak selalu melahirkan protes atau perlawanan sebab ada aspek rasional yakni mempertimbangkan *cost and benefits*. Karena itu gerakan

---

<sup>44</sup> Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, Cambridge University Press, 1998, hal: 14-18

<sup>45</sup> Doug McAdam, , John D. McCarthy and Mayer N. Zald (eds), *Comparative perspectives on social Movements: Political Opportunities, Mobilizing structure and Cultural Framing*, NewYork, Cambridge University Press. 1996, hal: 2

sosial mampu bertahan dengan cara melakukan mobilisasi sumber daya.

Berdasarkan teorinya aliran ini selalu mendahulukan aspek rasional dan melemahkan aspek kesadaran, kultur, bahkan ideologi. Menurut aliran ini aspek Organisasi gerakan hal yang utama dalam peluang politik, karena itu, aliran ini tidak memperhatikan dari aspek tersebut yakni birokratisasi dan institusionalisasi.

- 3) Aliran yang menganalisis gerakan sosial dari sudut perilaku kolektif diantaranya seperti Neil Smelser (1971), Le Bon (1960), Blummer (1969), Toch (1966), Gurr (1970) Hoffer (1951), Kornhauser (1959). Perspektif ini melihat bahwa aksi-aksi kolektif akibat dari adanya perilaku kolektif sebagai akibat ketidakpuasan dan keluhan.

Hal ini terjadi disebabkan adanya situasi dan kondisi baru yang diciptakan oleh gelombang modernisasi dan perubahan yang cepat. Dalam teorinya aliran ini selalu melihat gerakan sosial sebagai respons emosional dan irasional yang mendatangkan perilaku kolektif. Hal lainnya adalah mengabaikan basis organisasi gerakan.

- 4) Aliran gerakan sosial baru aliran berbasis di Eropa Barat diantaranya tokoh aliran ini seperti; Della dan Diani (1970), Alberto Melucci (1982,1989,1996), Rajendra Singh (2001), Alain Touraine (1977-1981), Laclau dan Mouffe (1985), Inglehart (1990).

Menurut aliran ini gerakan sosial baru adalah respons terhadap ketidakberdayaan struktur politik dan ekonomi masyarakat pasca industrial. perspektif teori gerakan sosial baru lahir sebagai tanggapan terhadap perspektif Marxis yang dinilai reduksionis, karena menerjemahkan gerakan

sosial semata-mata sebagai perjuangan kelas<sup>46</sup>. Aliran ini menyampingkan keterkaitan antar gerakan-gerakan sosial bahkan memutus sejarah dari peran gerakan-gerakan sosial di Negara industri (nonpascaindustri). Lebih jauh aliran ini tidak melihat peran cara dan strategi organisasi-organisasi gerakan bertahan dan terus melakukan aksinya.

Berdasarkan uraian di atas, keempat perspektif aliran yang mengkaji gerakan sosial, dinilai masih kurang dapat secara tepat untuk menjadi alat analisis terhadap fenomena yang diteliti.

**GAMBAR 2.1. KONSEPSI GERAKAN SOSIAL**

Perspektif Gerakan Sosial	Pendukung dan Cara Memahami Gerakan Sosial
Tindakan Kolektif	Tarrow (1998) Ada empat cara memahami gerakan sosial 1. Perspektif perilaku kolektif ( <i>collective behavior</i> ), 2. Mobilisasi sumber daya ( <i>resource mobilization</i> ), 3. Proses politik ( <i>political process</i> ) dan 4. Gerakan sosial baru ( <i>new social movements</i> ).
Proses Politik	McAdam (1982, 1989, 1998), Peter Eisinger (1973), Jenkins dan Perrow (1977), Ada tiga cara memahami gerakan sosial. 1. Mobilisasi sumberdaya ( <i>resource mobilization</i> ), 2. Peluang politik ( <i>political opportunities</i> ) dan 3. Proses pembingkaihan ( <i>framing process</i> ).
	Canel, (1997) Alain Touraine (1977-1981), Claus

<sup>46</sup> Eduardo Canel. "New Social Movement Theory and Resources Mobilization Theory: the Need for Integration", dalam Michael Kaufman dan Haraldo Dilla Alfonso, Ed., 1997, hal: 28-34. Lihat Cohen (1985); Klandermans (1986); Melucci (1984); and Salman (1990), *An earlier version of this chapter was published in 1991 as a working paper for the CERLAC community power project, and then, in a somewhat different version but under the same title, in Carroll: 1992.*

Perspektif Gerakan Sosial	Pendukung dan Cara Memahami Gerakan Sosial
Gerakan Sosial Baru	Offe (1985), Laclau dan Mouffe (1985), Melucci (1982,1989,1996), Ada dua cara memahami gerakan sosial 1. Mobilisasi 2. Gerakan Sosial Baru
Mobilisasi Sumber Daya	Charles Tilly (1978) Zald dan Ash (1966), McCarthy dan Zald (1977), Anthony Oberschall (1973, 1978), Ada tiga cara memahami gerakan sosial : 1. Mobilisasi 2. Peluang Politik 3. Proses Politik
Repertoire	Charles Tilly (1978), Tarrow (1989, 1998). Ada cara lain menganalisis tindakan kolektif dan gerakan sosial : 1. Tindakan perlawanan kolektif yang ada repertoarnya. 2. Ada alat ( <i>mean</i> ) atau sekumpulan alat yang digunakan sebagai strategi dan taktik 3. Terjadi serangkain tindakan atau lingkaran protes secara umum atau secara khusus.

Sumber: Charles Tilly (1978); Canel (1997), Tarrow (1998); della Porta dan Diani (1999); Singh (2001)<sup>47</sup>.

Dalam pemikiran Tilly dikatakan gerakan sosial harus memiliki tiga unsur utama yang menjadi property gerakan sosial yakni;

- a. Campaigns: a sustained, organized public effort making collective claims of target authorities.

<sup>47</sup> Charles Tilly, *lok-cit*, 1978, hal: 56-57, Doug McAdam, , John D. McCarthy and Mayer N. Zald (eds) *op-cit*. 1996: 2-14. Lihat juga Eduardo Canel, *op-cit* , 1997, hal: 28-34. Lihat Rajendra Singh, 2001, *lok-cit*, hal: 30. d, Della Porta, dan Diani, *Social Movements: An Introduction*. Oxford dan Malden, Mass.: Blackwell, 2006, hal: 10-22

- b. Repertoire (*repertoire of contention*): employment of combinations from among the following forms of political action: creation of special-purpose associations and coalitions, public meetings, solemn processions, vigils, rallies, demonstrations, petition drives, statements to and in public media, and pamphleteering
- c. WUNC displays: participants' concerted public representation of worthiness, unity, numbers, and commitments on the part of themselves and/or their constituencies.<sup>48</sup>

Bagi Tilly bahwa istilah *social movement* ada karena hal itu penggabungan antara beberapa unsur utama yang ada didalam suatu aktor-aktor gerakan yakni hal-hal seperti melakukan tuntutan terhadap pihak lawan dengan cara kampanye atau koalisi dengan WUNC. Sehingga klaim tersebut didorong ke ruang publik umum agar masyarakat luas tahu bahwa sudah terjadi tindakan perlawanan.

Seperti apa yang dipikirkan oleh Tilly bahwa tindakan kolektif perlawanan yang membentuk proses penuntutan digolongkan sebagai tindakan gerakan sosial yang melakukan perlawanan. Karena itu ada kondisi tertentu mendasar yakni ; melakukan kampanye terbuka atas klaim, melakukan *repertoire*, dan mempertegas identitas gerakan perlawanan<sup>49</sup>.

Dalam pemikiran Tilly, gerakan sosial tidak dalam posisi statis, karena gerakan sosial bukanlah sebuah ekspresi politik tetapi

---

<sup>48</sup> Charles Tilly, *social movements, 1768-2004*, Boulder, CO, Paradigm Publishers, 2004, hal: 3-4.

<sup>49</sup> Hannigan berpendapat sebuah gerakan sosial tipologi berdasarkan pola solidaritas muncul dikandung bersama dua dimensi: (a) kritik anti-institusional gerakan; dan, (b) kesatuan budaya gerakan. Kombinasi dari kedua variabel ini menghasilkan empat jenis gerakan: gerakan pembebasan sosial, gerakan revolusioner, gerakan kebudayaan dan gerakan reformasi profesional. Hannigan, John A. "Alain Touraine, Manuel Castells, A Critical Appraisal," *The Sociological Quarterly* , 26, 1985: 435-454

sebuah gerakan alternatif dari ketidakpuasan atau ketidakadilan. Tilly berpendapat bahwa gerakan sosial bersifat dinamis<sup>50</sup>, karena itu aksi-aksi tuntutan merupakan wujud dari perlawanan gerakan yang selalu dihidupkan di dalam aksi-aksi tuntutan. Intensitas perlawanan yang terjadi merupakan hasil dari interaksi perlawanan.

Tilly menempatkan gerakan sosial dalam kondisi bergerak untuk menjelaskan bagaimana proses transformasi dapat terjadi pada sebuah gerakan sosial. Tidak hanya selesai pada satu perubahan kebijakan namun sebagai agenda yang berulang (*repertoires*) menuju perubahan sosial. Menurut Tilly salah satu unsur utama adanya gerakan sosial adalah kondisi *contention relation*. Konsep ini memberikan penegasan bahwa aksi kolektif adalah suatu aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai kepentingan bersama<sup>51</sup>.

Mengikuti konsep Tilly dimaksud, maka ada beberapa hal yang dapat dicatat sebagai gerakan sosial yang melakukan repertoar di antaranya;

- a. Gerakan sosial merupakan gerakan terorganisir.
- b. Gerakan sosial senantiasa memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau untuk mempertahankan suatu kondisi.
- c. Gerakan sosial adalah gerakan yang memelihara politik perlawanan tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung.
- d. Gerakan sosial melakukan tindakan yang terorganisasi.
- e. Gerakan sosial melakukan tindakan menentang secara berkelanjutan

---

<sup>50</sup> Charles Tilly, *Contentious performances*, Cambridge: University Press, 2008, hal: 14

<sup>51</sup> *Ibid*, hal :7

- f. Gerakan sosial berkembang dan bertahan karena mampu memanfaatkan peluang politik yang ada.
- g. Gerakan sosial memiliki solidaritas dan identitas gerakan.
- h. Gerakan sosial melakukan klaim secara terbuka.
- i. Gerakan Sosial melakukan aksi perlawanan yang terus-menerus dan berulang<sup>52</sup>.

Dalam pengertian di atas Tilly membagi menjadi tiga *model collective action* yakni;

- a. *Competitive collective action*, adalah suatu bentuk aktor-aktor gerakan terjadi jika dua kelompok atau lebih saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu hal.
- b. *Reactive collective* yaitu aktor-aktor gerakan yang terjadi sebagai reaksi terhadap hak-haknya yang telah mapan dilanggar oleh pihak lain.
- c. *Proactive collective action* merupakan suatu aktor-aktor gerakan yang ingin membentuk struktur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Demonstrasi atau aksi protes merupakan salah satu bentuk dari aktor-aktor gerakan yang dilakukan masyarakat<sup>53</sup>.

Berdasarkan alasan tersebut, maka yang dimaksud dengan “gerakan sosial” dalam studi ini menunjuk pada “gerakan petani” yakni sebagai gerakan sosial terdiri atas aktor petani dan non petani yang membingkai isu atau mengusung agenda perubahan tatanan agraria dengan basis massa utamanya adalah petani<sup>54</sup>.

Dari posisi dimaksud juga dapat dipahami bahwa;

---

<sup>52</sup> Ibid, hal: 6-10

<sup>53</sup> Ibid, hal: 73-75

<sup>54</sup> Bagian dalam tulisan ini diadopsi dari beberapa sumber Noer Fauzi, *Tanah Sebagai Syarat Hidup Masyarakat*, 2010, Mohamad Shohibuddin, *Sketsa Perkembangan Reforma Agraria dan Studi Agraria*, 2012, Anto Sangaji, *Kapitalisme dan Produksi Ruang*, 2011.

- a. Gerakan petani adalah suatu bentuk gerakan sosial yang mengusung agenda perubahan norma (struktural) dan nilai (kultural) agraria; dan
- b. Gerakan petani hanya dilakukan oleh aktor-aktor petani.

Fenomena tindakan kolektik perlawanan petani Rengas tidak hanya tindakan perlawanan atau konflik saja, tetapi sebagai sebuah rangkaian dari tindakan perlawanan dengan strategi dan taktik inovatif. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari hadirnya ruang pembelajaran dari pengalaman kegagalan mencapai tujuan perlawanan sebelumnya. Kenyataan ini dalam tataran konsepnya disebut dengan tindakan perlawanan kolektif dengan repertoar.

Berdasarkan alasan diatas, peneliti berpendapat bahwa fenomena ini bisa dikaji melalui pendekatan gerakan sosial yang melihat secara khusus terjadinya serangkaian tindakan perlawanan kolektif yang didalamnya ada repertoar. Konsep teoritik yang mengajukan teori dimaksud adalah *repertoire* dari Charles Tilly. Ia menganalisis gerakan sosial dengan melihat fenomena tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh aktor dengan cara repertoar yang berkesinambungan dan berulang dengan pilihan. Ada alat (*mean*) atau sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan repertoar dan diikuti dengan strategi serta taktik inovatif atau improvisasi kreativitas perlawanan sehingga membentuk dan membangun bentuk baru repertoar. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh tahun peristiwa dan pemerintahan yang berkuasa.

Fenomena ini menunjukkan kondisi yang khusus dan berbeda dari perlawanan petani yang pernah diteliti sebelumnya seperti penelitian Wahyudi (2005) Musta'im (2004) dan Siahaan (1997). Ketiga penelitian ini melihat aksi perlawanan petani sebagai bentuk politik pertentangan yang dilakukan oleh gerakan sosial petani. Perlawanan yang terjadi bisa bersumber dari proses penguatan

formasi dan struktur gerakan, bisa bersumber dari penguatan ideologi mencari selamat, dan bisa juga bersumber dari cara melakukan perlawanan dengan manipulasi harmoni.

Kasus tindakan perlawanan kolektif petani Rengas terhadap PTPN VII di Payaraman Ogan Ilir Sumatera-Selatan ini, jelas sekali menunjukkan perlawanan petani Rengas dengan cara repertoar yang diikuti juga adanya strategi dan taktik yang inovatif serta dilakukan secara berulang-ulang dalam mencapai tujuan perjuangannya<sup>55</sup>.

## 2.5. Teori Repertoire

Meski teori repertoire ditemukan dan dikembangkan oleh Charles Tilly di tahun 1970, 1978, dan 1995, namun peneliti perlu juga mengemukakan pendapat tokoh lainnya yang juga mengembangkan teori tersebut seperti Sidney Tarrow di tahun 1998. Kedua tokoh ini memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan perlawanan repertoar. Namun keduanya meletakkan term *repertoires* untuk menggambarkan konstelasi khas dalam subyek “perlawanan” yang digunakan oleh kelompok-kelompok bertindak secara kolektif melakukan perlawanan secara terus menerus dan berulang.

Charles Tilly mendefinisikan *repertoire* adalah sekumpulan alat atau cara yang di pergunakan sekelompok masyarakat dalam mencapai keinginan atau klaim mereka, alat atau cara tersebut memiliki fungsi sebagai pilihan bentuk strategi dan taktik aksi kolektif “the whole set of means (a group) has formaking claims of different kinds on different individuals or groups”<sup>56</sup>. Teori ini pertama kali digunakan untuk menganalisis ketegangan-ketegangan politik di Inggris Raya pada tahun 1758-1834 dan kasus

---

<sup>55</sup> Charles Tilly. 1978. *Op.Cit.*, hal. 63

<sup>56</sup> Charles Tilly, *The Contentious French* ,Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986, hal: 4-6

perlawanan yang mengakibatkan ketegangan politik di Burgundy yang dilakukan oleh kaum buruh tanah dan pekerja pertenakan yang berhasil melakukan revolusi 1675-1975<sup>57</sup>.

Sementara Sidney Tarrow mendefinisikan repertoire sebagai cara mencapai keinginan melalui pilihan khusus dengan capaian khusus. Ia menggunakan pendekatan ini ketika meneliti ketegangan politik yang menyebabkan lingkaran protes di Italia di tahun 1965-1970. Karenanya Tarrow, mengategorisasi konsep *repertoire* yang di gagas Tilly sebagai *repertoire* umum, sebab mengakomodasi semua alat *repertoire* yang dapat di pergunakan oleh masyarakat<sup>58</sup>.

Tilly berpandangan *repertoire* merupakan suatu konsep kerja untuk mengidentifikasi berbagai bentuk dari tindakan perlawanan dan sebagai suatu cara untuk menyampaikan tuntutan yang digunakan oleh kelompok subordinate melalui cara menginovasi strategi dan taktik yang pernah dilakukan.

*The repertoires concept to identify important historical variations in forms of protest and to explain the rise of the national social tactical repertoires of social movements as a form of claims-making used by subordinate groups in modern capitalist democratic societies*<sup>59</sup>.

Sementara Tarrow menggunakan konsep *repertoire* sebagai alat mengidentifikasi bentuk protes secara khusus sebagai taktik yang mungkin saja digunakan kelompok lainnya dengan tujuan berbeda meskipun masing-masing kelompok tidak pernah berhubungan sebelumnya.

---

<sup>57</sup> Sidney Tarrow, "Democracy and Disorder Protest and Politic" In Italy. 1965- 1975, New York Oxford University press, 1988

<sup>58</sup> Sidney Tarrow, *Cycles of Collective Action: Between Movements of Madness and the Repertoire of Contention*, In *Repertoires and Cycles of Collective Action* by Mark Traugott. Durham and London University Press, 1995, hal: 47-50

<sup>59</sup> Tilly, 1986: 15-42 dan Tarrow, 1998, hal: 51

*To being historically specific, protest repertoires are modular in the sense that similar tactics may be borrowed by different groups of activists pursuing different targets without face-to-face interaction*<sup>60</sup>.

Bagi Tilly *repertoire* eksistensinya bisa berada pada level group kecil spesifik yang menggunakan taktik “tertentu” dari aksi sebagai cara penyampaian klaim dan digunakan untuk alat perlawanan. Namun bisa juga berada pada kelompok umum yang menggunakan taktik di dalam aksi-aksinya sebagai mean (alat) tuntutan bersifat umum dan bisa digunakan sebagai alat atau strategis penyampaian tuntutan bagi banyak orang dimana saja dan kapan saja<sup>61</sup>.

*“Repertoire exists initially at the level of a specific group, where it describes the available means of contention for that group. However, as similar groups generally have similar repertoires, we can speak more loosely of a general repertoire that is available for contention to the population of a time and place”.*

Sementara Tarrow memposisikan *repertoire* sebagai tindakan gerakan sosial yang melakukan perlawanan dengan protes. Menurutnya titik tekan *repertoire* ada pada *the way protest tactics and sequence of events to analyze social movements*<sup>62</sup>.

Padangan Tarrow tersebut diperkuat oleh della Porta, Diani dan Mc Adam yang mengemukakan bahwa suatu konstruksi identitas kolektif melalui fungsi *repertoire* yang mengrekognisi bentuk khusus protes oleh gerakan sosial.

*To consider the construction of collective identity as one of the defining features of a tactical repertoire means recognizing that a*

---

<sup>60</sup> Sidney Tarrow, *Cycles of Collective Action: Between Moments of Madness and the Repertoire of Contention*. Social Science History, 17, 1993, hal: 281–307.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Sidney Tarrow, *Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 1965–1975*. Oxford University Press, 1989, hal: 24-30.

*movement's particular forms of protest are not only directed to external targets, but they also have an internal movement-building dimension*<sup>63</sup>.

*One of the major tasks of any movement is to create opportunities and incentives for participation in protest that outweigh the costs by facilitating the creation of new forms of solidarity. A movement's repertoire of tactics typically supplies a range of levels of participation, varying from low risk and low effort actions such as donating money, writing a letter, signing a petition, participating in a peaceful demonstration, or constructing a quilt to what McAdam*<sup>64</sup>.

Menurut Verta Taylor istilah "repertoar" yang digunakan Tilly adalah penyempurnaan dari teori mobilisasi yang hanya fokus pada proses pembentukan peluang, kepentingan dan aksi kolektif dalam gerakan sosial tanpa melihat bagaimana sebuah aksi perlawanan itu muncul berkembang. *Repertoire* Tilly menyiratkan bahwa suatu mobilisasi berada pada suatu kondisi interaksi pertentangan antara gerakan dengan pihak lawan yang disebabkan oleh aksi-aksi tuntutan yang dilakukan oleh gerakan dengan taktis dan strategis sebagai cara melakukan perlawanan untuk mendapatkan apa yang menjadi klaim<sup>65</sup>.

Sementara Amy r. Poteete memberikan penjelasan lebih rinci lagi tentang teori *repertoire* Tilly. Amy r Poteete mengatakan *repertoire* adalah aksi-aksi yang multiple melalui aktor yang kreatif dan inovatif.

---

<sup>63</sup> della Porta, Donatella, and Mario Diani, *Social Movements: An Introduction*. New York: Blackwell, 1999, hal: 105

<sup>64</sup> Mc Adam, *Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer*. *American Journal of Sociology*, 92, 1986, hal: 64-90.

<sup>65</sup> Verta Taylor and Nella Van Dyke, "Get up, Stand up": *Tactical epertoires of Social Movements*, *The Blackwell Companion to Social Movements* Edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, Hanspeter Kriesi Copyright © 2004 Blackwell Publishing Ltd, 2004, hal: 265

*A repertoire, by definition, includes multiple performances. Repertoires may change in response to opportunities or expand through actor creativity and improvisation. Thus, repertoires offer considerable albeit not total flexibility. The action stage is only one of many possible acts. The background conditions of power influence both the richness of repertoires and the quality of particular performances. Repertoires include multiple performances because they draw on multiple forms of power political, economic, discursive, coercive, symbolic and material. These powers may be located in things, instruments, techniques, symbols, individuals, institutions, relations, or in the contours of discourse<sup>66</sup>.*

Verta Taylor dan Nella Van Dyke<sup>67</sup>, berpandangan bahwa konsep tentang *repertoire* yang dikemukakan Tilly merupakan penyempurnaan dari konsep mobilisasi. Khusus *repertoire* lebih menekankan kajian tentang tindakan kolektif yang bisa dianalisis melalui pendekatan sejarah perjuangan (*evens in history*)

*However, social movement researchers interested in understanding the factors that influence a movement's choice of particular tactics point out that tactics of protestare, to the contrary, fairly predictable, limited, and bounded by the repertoires that protestors have learned to describe the distinctive constellation soft tactics and strategies developed over time and used by protest groups to act collectively in order to make claims on individuals and groups. Like its theatrical counterpart, the term "repertoire" implies that the interactions between a movement and its antagonists can be understood as strategic performances or "established ways in which pairs of actors make and receive claims bearing on each other's interests<sup>68</sup>.*

---

<sup>66</sup> Amy r. Poteete, *Repertoires of domination: decentralization as process in botswana and senegal*, world Development Vol. 39, No. 3, 2011, hal: 446

<sup>67</sup> Verta Taylor , *lok-cit*, hal: 267

<sup>68</sup> Ibid

Alexander dan Mast<sup>69</sup> melihat konsep *repertoire* Tilly sebagai konsep dominasi yakni melatih aktor-aktor dengan beberapa cara di mana aktor kuat mampu membangun, dan mempertahankan posisi dominasi. Aktor-aktor terlibat dalam cara rutin atau dipraktekkan dalam melakukan sesuatu aksi melalui improvisasi kreatif dan kualitas penampilan. Berdasarkan keterampilan dan pengalaman masing-masing aktor yang berbeda-beda, mereka mungkin membangun konstituen, dan menggunakan beberapa tindakan untuk menyampaikan pesan yang sama.

*The concept of "repertoires of domination" trains interest on the multiple ways in which powerful actors gain, build, and maintain positions of dominance. Actors engage in routine or practiced ways of doing things as well as creative improvisation and the quality of their performances varies based on skill and experience. Their performances may appeal to morality or showcase their strengths in markets, politics, or violence. To sway opinions or build constituencies, they deploy multiple acts to convey the same messages and present different (even contradictory) messages to different audiences<sup>70</sup>.*

Lain halnya dengan Tarrow yang menyatakan bahwa muncul dan berkembangnya *repertoire* seperti keberadaan lingkaran protes. Menurutnya bagaimana repertoar bisa berevolusi, memperluas, dan mendapatkan dukungan aksi, maka Tarrow mengajukan konsep " *protes cycles* atau siklus protes" yang dimaknai sebagai taktik memelihara perlawanan. Dalam konsep *repertoire* Tarrow menyebutkan mekanisme evolusi *repertoire* seperti mekanisme protes cenderung mengikuti siklus berulang di mana mobilisasi kolektif meningkatkan dan menurunkan frekuensi, intensitas, dan

---

<sup>69</sup> Alexander, J. C., & Mast, J. L., *Introduction: Symbolic action in theory and practice. The cultural pragmatics of symbolic action*. In J. C. Alexander, B. Giesen, & J. L. Mast (Eds.), *Social performance. Symbolic action, cultural pragmatics, and ritual* New York: Cambridge University Press, 2006, hal: 1-28.

<sup>70</sup> *Ibid.*

pembentukan. Gagasan bahwa protes terjadi pada siklus atau gelombang perlawanan memungkinkan untuk mengenali bagaimana pasang surut terjadinya tindakan perlawanan yang mencirikan protes<sup>71</sup>.

Tilly menggunakan kerja dari repertoire untuk menggambarkan mekanisme unit-unit dari aksi perlawanan secara periodik. Tilly memberikan penjelasan pada aspek cluster dari perlawanan "*clusters of contentious interactive performances or protest events*"<sup>72</sup>. Aksi-aksi perlawanan dalam berbagai bentuk, dan taktik yang dijadikan sebagai *cluster* atau unit dari analisis repertoire. Unit-unit perlawanan tersebut selalu dilihat dengan mekanisme periode tertentu untuk memberikan penjelasan tentang kondisi perlawanan dan dinamika yang terjadi.

Menurut Tilly, kondisi ini ditentukan oleh pelembagaan klaim namun tidak selalu berarti demobilisasi, karena itu pelembangan klaim sebagai *media perlawanan* yang berarti aksi-aksi sudah menjadi bagian dari repertoire, seperti aksi pemogokan, yang sudah ada dan berproses selama abad 20. Aksi pemogokan tersebut didalamnya terdiri dari berbagai aksi-aksi lainnya yang membentuk unit dari aksi perlawanan dalam periode tersebut. Tilly berpandangan bahwa proses pelembagaan aksi-aksi perlawanan adalah proses yang menghilangkan kekhususan aksi sebagai penantang dari politik, sistem dan kerugian<sup>73</sup>.

Proses pelembagaan itu menjadikan aksi-aksi memiliki tujuan umum dan membentuk klaim umum. Jadi suatu aksi-aksi perlawanan selalu menggambarkan suatu unit aksi yang besar, unit

---

<sup>71</sup> Sydney Tarrow, *Cycles of Collective Action: Between Moments of Madness and the Repertoire of Contention*. Social Science History, 17, 1993, hal: 281-307.

<sup>72</sup> Verta Taylor and Nella Van Dyke, *lok-cit*, hal: 292

<sup>73</sup> Monika Dowbor, *Institutional dimensions of social movements: case study of the sanitaro movement and its fight for universal access to health in Brazil*. QEH Working Paper Serie 1, QEHWPS 187, 2011, hal: 5-6

tersebut terdiri dari berbagai bentuk aksi perlawanan yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum.

Proses pelebagaan strategi, taktik, aktor dan capaian perlawanan dapat dipahami seperti mekanisme kerja dari *"incorporation of performances and political actors into the routine of organized politics"*<sup>74</sup>. Keduanya memiliki dua aspek mendasar yakni;

- a. The institutionalization of the social movements' action repertoire
- b. The institutionalization of the organizations.

Menurut Tilly proses pembentukan pelebagaan dalam repertoar merujuk pada bentuk dari aksi-aksi rutinitas dari tindakan kolektif yang dilakukan dalam budaya gerakan sosial.

*Repertoire institutionalization refers to the routinization of the forms of collective action characteristic of social movements that were once disruptive or violent, such as rallies or demonstrations. In routinization, both parties, the movement and the authorities, take recourse to the same legal script that determines in what way protests can be organized and carried out. This means that the State begins to respond to and interact with movement protests in conventional, regulated and institutional ways*<sup>75</sup>.

Menurut Tilly strategi dan taktik perlawanan berdampak pada mengganggu yang menjadikan tindakan perlawanan kolektif sangat efektif sebagai alat politik perseteruan.

*When it comes to the institutionalization of forms of contention, the focus inevitably falls on protests, the disruptive nature of which*

---

<sup>74</sup> Charles Tilly & Sidney Tarrow, *Contentious politics*. Paradigm Publisher, Boudler, Colorado, 2007, hal: 216

<sup>75</sup> Charles Tilly *"Social movements as Politics", "Inventions of the Social Movement" and "Future of Social Movements"*. in: *Social Movements 1768-2004*. Boudler, Colorado Paradigm Publisher, 2004, hal: 45-55

*made them the most effective political instrument available to the disadvantaged*<sup>76</sup>.

Jika sumber daya gerakan sosial seperti; interest, opportunity dan mobilisasi, ini tidak dapat ditarik dari kalangan pendukung gerakan atau asosiasi, dan entitas menemukan dirinya dengan tidak ada alternatif selain melihat ke organisasi lain atau negara, kinerjanya mungkin dikompromikan dalam hal bagaimana radikal dapat mengejar penyebabnya. Ini adalah salah satu mekanisme kooptasi. Dimana sponsor ini adalah Negara itu sendiri, bila kondisi ini terjadi di dalam aksi kolektif akan berakibat pada pengurangan klaim dan pertentangan diikuti penghentian mobilisasi.

*The formalization of organizational structure and the professionalization of membership oblige entities to seek stable sources of resources to ensure the viability of their activities, but reliance on such sources could also lead to cooptation. If these resources cannot be drawn from among the movement's supporters or associates, and the entity finds itself with no alternative but to look to other organizations or to the State, its performance may well be compromised in terms of how radically it can pursue its causes. This is one mechanism of cooptation, that sees the entity's scope of action and objectives restricted by its sponsors. Where this sponsor is the State itself, one can expect to see a reduction in protests and contention followed by a whittling of grass-root support and a cessation of mobilizations*<sup>77</sup>.

Tilly berpandangan bahwa repertoar seperti aksi-aksi protes yang terjadi di Eropa Barat dan Amerika Utara pada akhir abad 18 kemudian bertransformasi pada awal abad 19<sup>78</sup>. Transformasi

---

<sup>76</sup> David, s. Meyer, & Sidney Tarrow "a movement society: contentious politics for a new century". In: *the social movement society: contentious politics for a new century*. Rowman & littlefield, 1998, hal: 20

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid, hal: 37

tersebut bisa terjadi pada episode berbeda karena beberapa taktik tuntutan yang digunakan sebagai alat perlawanan agar tetap bertahan bahkan berinovasi menjadi melalui strategi dan taktik perlawanan baru untuk atau menciptakan kondisi perlawanan. Kondisi ini terjadi berulang, kontinuitas dan intensitas<sup>79</sup>.

Padangan Tilly di atas tidak sejalan dengan Tarrow, Zald dan Snow, menurut mereka perubahan yang terjadi didalam tindakan repertoar baik strategi maupun taktik perlawanan dimedia oleh kemampuan aktor-aktor terlibat dalam membaca keadaan dan melakukan interpretasi keadaan ke dalam strategi dan taktik perlawanan. Kondisi ini memberikan alternatif munculnya aksi dan taktik lainnya dan menciptakan bentuk repertoar baru. Konsep ini dapat dijumpai dalam pemikiran Zald, Snow dan Tarrow disebut sebagai proses *framing* yakni suatu proses kolektif interpretasi, atribusi dan konstruksi sosial yang menjadi perantara peluang dan tindakan<sup>80</sup>.

Maksudnya adalah proses framing dalam teori proses politik digunakan dalam memahami kesuksesan dan kegagalan organisasi ataupun gerakan sosial meraih simpati luas dari masyarakat. Pembentukan *framing* secara interaktif berkaitan dengan struktur mobilisasi, proses *framing* membutuhkan alat atau modul. Meminjam pandangan Tarrow terkait dengan alat atau cara *framing* yang sering digunakan adalah media atau sejenisnya.

*"Social movements attempt to replace 'a dominant belief system that legitimizes the status quo with an alternative mobilizing belief system that supports collective action for change,' movement leaders proffer the symbols of revolt to gain support and mark themselves off*

---

<sup>79</sup> Michael, *How Repertoires Evolve : The Diffusion Of Suicide Protest In The Twentieth Century, Mobilization: An International Quarterly* 18(4): 2013, hal: 407-428

<sup>80</sup> Charles Tilly e-tal, *Dynamic of Contentious, Dynamics of Contention*. New YoCambridge University Press, 2005, hal: 16

*from opponents" Leaders construct "collective action frames" that accentuate grievances in order to mobilize (even where the grievances existed without action before) by magnifying injustice and creating emotional pivots. The media can be used to transmit these symbols and frames, in a move towards constructing consensus (at least among those taking part in the action and who are meant to be mobilized). Still, we must consider that created cultural frames and "inherited cultural frames are combined with strategic choices within the process of contention"<sup>81</sup>.*

Tarrow berpendapat bahwa media atau sejenisnya yang terlibat di dalam tindakan kolektif dapat sangat memberi pengaruh terhadap transmisi symbol dengan proses pembedaan untuk dikonstruksikan menjadi *belief system* dalam masyarakat umum. Sementara konsep Tilly tentang perubahan yang terjadi dalam repertoar ditentukan oleh faktor penentu yang bersifat statis, karena itu, harus disempurnakan kembali dengan konsep proses framing dan proses politik sebagai media yang mengikat dan menjadi struktur penggerak dari timbulnya strategi dan taktik tindakan perlawanan kolektif .

Menurut Tilly memposisikan repertoar sebagai bagian dari kerangka yang lebih besar untuk menganalisis perbedaan jenis aksi-aksi perlawanan dalam periode sejarah tertentu dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan digunakannya repertoar. Indikasi awal dari kondisi tersebut adalah ada pilihan strategi dan taktik baru yang digunakan aksi kolektif dari kelompok<sup>82</sup>.

Untuk menjelaskan bagaimana proses perubahan repertoar perlawanan dari satu tindakan ke tindakan lainnya atau berevolusi, memperluas, dan mendapatkan dukungan perlawanan terjadi.

---

<sup>81</sup> Sidney Tarrow, *Power in movement*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, hal: 106-117

<sup>82</sup> Verta Taylor, *lok-cit*, hal: 271

Menurut Tilly meletakkan tindakan perlawanan kolektif merupakan bentuk dari repertoar umum dengan tujuan umum, meskipun demikian Tilly berpendapat bahwa aksi-aksi perlawanan dalam bentuk dan tujuan umum bisa bergerak dan melakukan transformasi dinamis bila ada suatu kondisi yang menentukan perubahan yang di gambarkan sebagai kondisi revolusi.

Berbeda dengan pandangan Tarrow bahwa suatu perlawanan yang melakukan repertoar perlawanan adalah suatu bentuk gerakan sosial yang melakukan inovasi perlawanan khusus dan memiliki tujuan yang ada didalam gerakan sosial. Tarrow menggambarkan kondisi dari tindakan perlawanan kolektif khusus dengan tujuan khusus tersebut dengan istilah *Paradigmatic change – ‘moments of madness’* atau perubahan paradigma disaat-saat kegilaan karena itu, capaian dari repertoar khusus adalah tujuan utama dari klaim itu sendiri<sup>83</sup>.

Dalam pemikiran Tilly suatu *repertoire* bergerak dari level lokal ke level nasional dengan memanfaatkan bentuk aksi-aksi umum yakni dari orientasi yang biasa saja ke taktik dengan perlawanan yang ditujukan ke pihak yang memiliki otoritas atau pihak lawan yang lebih kuat. Bahkan Tilly memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana pergeseran aksi tersebut terjadi dari suatu kondisi biasa ke suatu kondisi yang dinamis dan mempercepat pencapaian tujuan perlawanan. Tilly menyebutnya sebagai suatu kondisi dari eksklusif ke revolusi<sup>84</sup>.

Pandangan Tilly tersebut tidak sejalan dengan pemikiran McAdam, McCarthy dan Zald, menurut mereka pemikiran Tilly tentang Bergeraknya repertoar dari level lokal ke level nasional

---

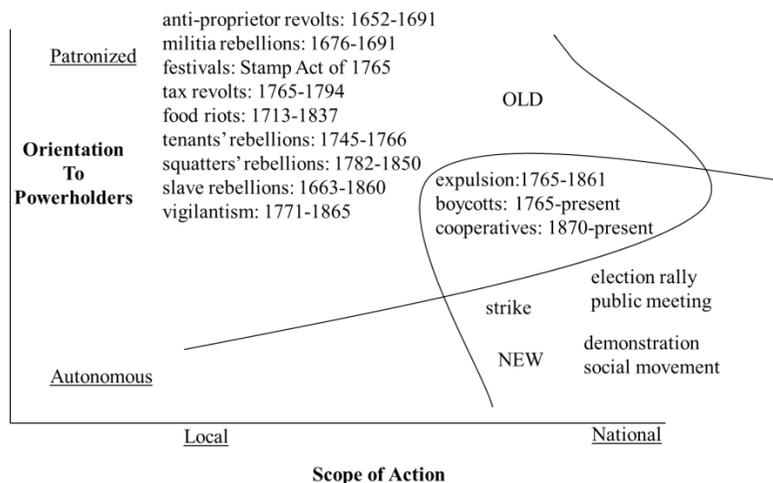
<sup>83</sup> Charles Tilly & Sidney Tarrow *lok-cit*, 2007, hal: 216

<sup>84</sup> Charles Tilly, *Getting It Together In Burgundy, 1675-1975, Theory and Society 4*, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam - Printed in the Netherlands, 1977, hal :498

bukanlah disebabkan repertoar umum ke repertoar khusus yang dipengaruhi oleh tahun dan rezim politik, tetapi lebih karena adanya sarana atau media bagi dilakukannya tindakan perlawanan kolektif . Sarana-saran ini ternyata berdampak positif bagi aksi-aksi perlawanan dilihat dari mekanisme mobilisasi yakni; struktur mobilisasi dan terjadinya *framing* proses dalam periode tertentu. Struktur mobilisasi yang memposisikan sarana atau media baik formal maupun informal dimanfaatkan untuk tindakan perlawanan kolektif yang memberikan ruang bagi lahirnya aksi-aksi baru kolektif <sup>85</sup>.

**GAMBAR 2.2**

**Old and New Repertoires of Contention in U.S., 1752-1996**



Sumber: Tilly: 1986: 395

<sup>85</sup> Doug McAdam, John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (editor's). 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural*, USA: Cambridge University Press., hal. 2. Lihat juga tulisan dalam bagian ini dari Abdul Wahib Situmorang, *op-cit*, hal: 23-24

Gambar di atas menjelaskan proses periodisasi terjadinya repertoar dari lama ke repertoar baru dimulai dengan aksi-aksi yang dikategorikan *patronized* ke *autonomous* yang berorientasi *powerholders*. Dari aksi-aksi level lokal ke aksi-aksi yang berlevel nasional. Menurut Tilly fenomena aksi-aksi repertoar lama ke baru yang terjadi dalam pertentangan politik di Amerika Serikat tahun 1752-1996.

Repertoar lama dimulai dengan aksi anti-proprietor revolts: 1652-1691, dilanjutkan aksi militia rebellions: 1676-1691, kemudian aksi festivals: Stamp Act of 1765, selanjutnya aksi tax revolts: 1765-1794, berlanjut pada aksi food riots: 1713-1837, lalu aksi tenants' rebellions: 1745-1766, kemudian squatters' rebellions: 1782-1850, lalu aksi slave rebellions: 1663-1860, selanjutnya aksi vigilantism: 1771-1865

Aksi-aksi perlawanan dalam episode repertoar lama umumnya dilakukan dengan strategi *expulsion* dari tahun 1765-1861. Selanjutnya perlawanan dilanjutkan dengan strategi *boycott* tahun 1765-sekarang.

Perlawanan berlanjut dengan strategi *cooperative* tahun 1870 sampai sekarang. Perubahan strategi ini menandai pergeseran tindakan kolektif repertoar lama ke tindakan kolektif repertoar baru, meskipun strategi dan taktik beroperasi secara overlapping dalam periode tertentu. Dalam kondisi transisi tersebut terjadi strike atau suatu kondisi benturan antara pihak-pihak yang saling berlawanan. Tindakan kolektif dalam repertoar lama merupakan tindakan yang berorientasi *patronized*, sementara tindakan kolektif repertoar baru berorientasi pada *powerholders*. Tilly memberi kategori tindakan kolektif repertoar yang bisa terulang lagi di wilayah yang berbeda dan rentang waktu berbeda.

### GAMBAR 2.3. BENTUK REPERTOAR

<i>Repertoar lama dan patronizes</i>	<i>Repertoar baru dan autonomus</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizure of grain (food riots)</li> <li>• Invasion of forbidden fields, forests, streams</li> <li>• Destruction of tollgates and other barriers</li> <li>• Attacks on machines</li> <li>• Serenades (rough music)</li> <li>• Expulsion of tax collectors,</li> <li>• Rowdy holiday parades</li> <li>• Inter-village battles</li> <li>• Sacking private homes</li> <li>• Popular courts</li> <li>• Turnouts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strikes</li> <li>• Demonstrations</li> <li>• Electoral Rallies</li> <li>• Public meetings</li> <li>• Petition marches</li> <li>• Planned insurrections</li> <li>• Invasion of official assemblies</li> <li>• Social movements</li> <li>• Electoral campaigns</li> </ul>

Sumber: Diadopsi dari Tilly: 1984: 6<sup>86</sup>

Tilly memberi penegasan tentang kondisi-kondisi yang mempengaruhi transisi suatu bentuk repertoar lama ke bentuk repertoar baru dalam satu periode atau pada periode lainnya seperti antara lain<sup>87</sup>;

- a. Terjadi ekspansi besar-besaran dan sentralisasi kekuasaan negara mengubah hubungan kebijakan.
- b. Perubahan tindakan perlawanan kolektif dari tindakan komunal ke tindakan perlawanan populer.
- c. Perubahan dari tindakan kolektif perlawanan yang berputar pada perlawanan terhadap pihak pemilik modal ke perlawanan terhadap kebijakan nasional.
- d. Adanya tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan secara kelompok aktif dari periode ke periode lainnya.

<sup>86</sup> Charles Tilly, *Nineteenth Century Origins of Our Twentieth Century Collective Action Repertoire*, University of Michigan, 1981, hal: 6. Lihat Juga Tilly Getting It Together In Burgundy, 1675-1975, *lok-cit*: 1977, hal: 498

<sup>87</sup> *Ibid*, hal: 479-504

- e. Melakukan tindakan kolektif konfrontatif terbuka dari hanya sekedar gugatan ke bentuk tindakan kolektif yang lebih mengundang massa.
- f. Keterlibatan dukungan dari pihak penguasa ke penentang yang membuka kesempatan lahirnya aktor-aktor baru.
- g. Aksi-aksi perlawanan sebagai media membangun ide baru dan menginovasi tindakan kolektif lama secara terus-menerus dan kontinyu.
- h. Kemampuan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan kolektif meskipun oleh kelompok kecil<sup>88</sup>.

Kondisi-kondisi di atas memberi pengaruh terhadap berkembangnya strategi dan taktik dalam repertoar ke dalam bentuk tindakan yang baru dan inovatif yang menentukan suatu capaian tujuan dan hasil perlawanan. Seperti dikutip dari Verta Taylor<sup>89</sup>, sebagai berikut;

*Tilly (1978, 1986, 1995) contends that the forms of protest that we have come to associate with modern social movements are part of a larger repertoire of contention that emerged in the nineteenth century with the rise of the nation-state and centralized decision-making, the development of capitalist markets, and the emergence of modern forms of communication. Examining contentious repertoires in the United States, Britain, and France between the eighteenth and nineteenth centuries, Tilly provides empirical evidence of fundamental changes in the forms of protest used by subordinated groups. Older or "traditional" repertoires included actions such as grain seizures, field invasions, barricades, and the use of music, irreverent costumes, and other performances that ridiculed local authorities.*

---

<sup>88</sup> Charles Tilly, *Contentious Repertoires in Great Britain, 1758–1834*. In Mark Traugott (ed.), *Repertoires and Cycles of Collective Action*, Durham, NC: Duke University Press, 1995, hal: 15–42.

<sup>89</sup> Verta Taylor, *op-cit*, hal: 272-274

(Tilly (1978, 1986, 1995) berpendapat bahwa bentuk-bentuk protes selalu diasosiasikan dengan gerakan sosial modern, namun bentuk-bentuk protes tersebut menjadi bagian dari repertoar perlawanan yang muncul pada abad kesembilan belas seiring dengan bangkitnya pasar kapitalis, dan munculnya bentuk-bentuk komunikasi modern. Tilly memberikan bukti empiris perubahan mendasar dalam bentuk protes yang digunakan oleh kelompok-kelompok subordinasi." seperti repertoar di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis antara abad kedelapan belas dan kesembilan belas).

Sementara faktor yang terkait dengan gerakan, maka diindikasikan ada tiga faktor yakni;

*Three internal features that influence a social movement's tactical choices: the level of organization among collective actors; the cultural frames of meaning used to justify collective action; and the structural power of the participants*<sup>90</sup>.

Ketiga faktor internal di atas memberi pengaruh terhadap keterbaruan repertoar yang dilakukan oleh gerakan dan kondisi yang menggambarkan perubahan aksi dan strategi dalam rentang waktu berbeda. Sebagai berikut;

- 1) Faktor tingkat organisasi antar pelaku aktor-aktor gerakan. Pada tataran ini ada dua pandangan yang berbeda yakni; Di satu sisi ada yang berpendapat organisasi diperlukan untuk tindakan kolektif dan dalam keadaan sikap tertentu, dimana organisasi memfasilitasi protes perlawanan (Cress and Snow)<sup>91</sup>. Sementara sisi lainnya ada yang berpendapat bahwa

---

<sup>90</sup> Verta Taylor, *lok-cit*, hal: 274

<sup>91</sup> Cress, Daniel M., and David A. Snow, *Mobilization at the Margins: Resources, Benefactors, and the Vitality of Homeless Social Movement Organizations*. *American Sociological Review*, 61, 1996, hal: 1089-109. Dan *The Outcomes of Homeless Mobilization: The Influence of Organization, Disruption, Political Mediation, and Framing*. *American Journal of Sociology*, 2000: hal: 105.

keterlibatan organisasi pasti akan mengarah pada penggunaan taktik kelompok konvensional yang di arahkan oleh kepentingan nasional dan pelebagaan gerakan. (Rucht 1999; Van Dyke et al. 2001)<sup>92</sup>.

- 2) Faktor frame pemaknaan budaya (perilaku) yang digunakan untuk membenarkan tindakan kolektif. Dalam hal ini, repertoar yang digunakan dalam tindakan kolektif juga dipengaruhi oleh perilaku sosial budaya suatu kelompok . Seperti dikutip dari Verta Taylor <sup>93</sup>.

*The tactical repertoires used by a set of collective actors are also influenced by social movement culture (Darnovsky et al. 1995). Frequently activists adopt strategies and tactics not simply because they have been shown to be effective, but because they resonate with the beliefs, ideas, and cultural frames of meaning people use to make sense of their situation and to legitimate collective action (Snow and Benford 1988; Gamson 1992; Morris and Mueller 1992; Taylor and Whittier 1995; Jasper 1997; Benford and Snow 2000).*

(Repertoar perlawanan yang digunakan oleh sekelompok pelaku kolektif juga dipengaruhi oleh budaya gerakan sosial atau menggunakan cara-cara gerakan sosial. Sering aktivis repertoar mengadopsi strategi dan taktik dari kultur gerakan sosial, tidak hanya karena mereka telah terbukti efektif, tetapi karena mereka beresonansi dengan keyakinan, ide, dan frame budaya berarti suatu frame budaya digunakan untuk memahami situasi mereka dan aksi-aktor-aktor gerakan yang sah).

---

<sup>92</sup> Rucht, Dieter, *Linking Organization and Mobilization: Michels' Iron Law of Oligarchy Reconsidered. Mobilization*, 2, 1999, hal: 151-69. dan Van Dyke, Nella, Sarah A. Soule, and John D. McCarthy, *The Role of Organization and Constituency in the Use of Confrontational Tactics by Social Movements*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, Anaheim, CA, 2001, hal: 19

<sup>93</sup> *Ibid*, hal: 275

- 3) Faktor kekuatan struktural aktor terlibat. Adalah kekuatan struktural kelompok perlawanan yang memberi pengaruh terhadap repertoar perlawanan yang digunakan. Dimana aktor berada dalam posisi relatif dalam struktur sosial yang lebih besar yang mampu memperjuangkan rasa keadilan dan hak.

Tilly berpendapat bahwa repertoar sebuah gerakan juga dapat dipengaruhi oleh sumber daya budaya, keterampilan, dan rasa keadilan dan "hak" dari partisipannya<sup>94</sup>.

Groups must consider the "relative appropriateness and efficiency" of established tactics in comparison with the new, alternative tactics.

Sementara Tilly menekankan pada adanya aksi-aksi tuntutan yang meningkat dan berdampak gangguan besar<sup>95</sup>, sebab memberi ruang bagi munculnya strategi dan taktik inovatif yang dilakukan oleh aktor-aktor baru. Tetapi proses transformasi strategi dan taktik dari suatu periode ke periode lainnya tergantung juga dengan; *grievances, opportunities, resources, networks, identity, and intentionality*.

Konsep *repeated* dalam pemikiran Tilly adalah bentuk dari tindakan kolektif yang dilakukan dari suatu period ke periode lainnya dan menggunakan beberapa strategi dan taktik tertentu, berfungsi sebagai alat perlawanan dan diulang-ulang lagi. Pengulangan tindakan kolektif yang ada repertoarnya tersebut untuk menjaga intensitas perlawanan.

*This nineteenth-century defensive routine actually predates the nineteenth century. We can see it clearly and repeatedly among' the*

---

<sup>94</sup> Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House, 1978, hal: 153-159.

<sup>95</sup> Charles Tilly, *Contentious Performances*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2008, hal: 68

*food riots, Rough Music, machine-breaking, and other standard forms of eighteenth-century conflict. Few of those forms of action survived much past the 1830s. The routine for defending a territory against powerful outsiders was an exception. It survived to occupy a regular place in 'a new and distinctive repertoire'*<sup>96</sup>.

Menurut Tilly<sup>97</sup> meneliti repertoar perlu mempertegas posisi tiga hal mendasar yakni;

- a. Setiap bentuk dari peristiwa tindakan tuntutan yang berproses menjadi kondisi interaksi saling memberi perlawanan.
- b. Menyatakan sebagai identitas dari gerakan perlawanan itu sendiri seperti; rebellions, strike waves, revolutions, nationalist episodes, democratization, terrorism.
- c. Proses dinamika tindakan (the dynamic processes) seperti; the protest that grows into a social movement; the movement that triggers a revolution; the repression that escalates into a coup.

Tilly membedakan repertoar perlawanan dari sisi bentuk tindakan kolektif yang dilakukan yakni; ada repertoar bersifat umum dan ada repertoar bersifat khusus. Repertoar dalam bentuk umum adalah aksi bersifat lokal, tidak langsung dan parochial serta patronized. Sementara repertoar dalam bentuk khusus adalah bersifat langsung, terbuka, dilakukan oleh gerakan sosial.

Dalam repertoar khusus suatu kekerasan yang terjadi adalah suatu akibat tidak langsung dari tindakan yang dilakukan, berbeda suatu kekerasan yang terjadi dalam repertoar umum, biasanya bagian dari tujuan perlawanan yang dilakukan. Kondisi kekerasan yang terjadi juga menjadi pembeda dari atribut *claim* serta bisa menjadi preferensi bagi tindakan umum untuk mendukung

---

<sup>96</sup> Charles Tilly, *Nineteenth Century Origins of Our Twentieth Century Collective Action Repertoire*, University of Michigan, 1981, hal: 4

<sup>97</sup> Sidney Tarrow, *Charles Tilly and the Practice of Contentious Politics: Social Movement Studies* 7 Autumn 2008, hal: 17

tindakan perlawanan kolektif atau tidak memberi dukungan serta memiliki tujuan sebagai gerakan sosial.

Tilly memberikan karakter khusus tentang pelaku dari aktor-aktor yang melakukan *repertoire* yakni;<sup>98</sup>

- a. People's frequent employment of the authorities' normal means of action, either as caricature or as a deliberate, if temporary, assumption of -the authorities' prerogatives in the name of the local community;
- b. Common appearance of participants as members or representatives of constituted corporate groups and communities rather than of special interests;
- c. A tendency to appeal to powerful patrons for redress of wrongs and, especially, for representation vis to vis outside authorities;
- d. Extensive use of authorized public celebrations and assemblies for the presentation of grievances and demands;
- e. Repeated adoption of rich, irreverent symbolism in the form of effigies, dumb show, and ritual objects to state grievances and demands;
- f. Convergence on the residences of wrongdoers and the sites of wrongdoing, as opposed to seats and symbols of public power.

Sementara repertoar dalam bentuk tindakan kolektif yang dilakukan oleh gerakan sosial bersifat yakni<sup>99</sup> ;

- a. The employment of relatively autonomous means of action, of a kind rarely or never employed by authorities;
- b. Frequent appearance- of special interests and named associations or pseudo- associations (e.g. Coalition for Justice, People United Against

---

<sup>98</sup> Charles Tilly, *Nineteenth Century, Op-cit*, 1981, hal: 6

<sup>99</sup> *Ibid*, hal : 7

- c. Direct challenges to rivals or authorities, especially national authorities and . their representatives, rather than appeals to patrons;
- d. Deliberate organization of assemblies for the articulation of claims;
- e. Display of programs, slogans, signs of common membership;
- f. Preference for action in visible public places.

Menurut konsep Tilly perubahan tindakan perlawanan dari aktor ke tindakan perlawanan yang dilakukan oleh gerakan sosial ditentukan oleh dua hal yakni; kompetisi, reaksi dan proaksi terhadap tuntutan serta capaian dari peristiwa *strike*. Kedua kondisi tersebut akan memberikan ruang peluang dan tindakan kolektifitas. Perubahan pelaku tindakan kolektif dari aktor-aktor gerakan ke gerakan sosial tidak ditentukan oleh periode pemerintah yang berkuasa, apakah pemerintah tersebut menerapkan sistem politik represif ataukah pemerintahan tersebut menerapkan sistem politik terbuka. Namun oleh kondisi interest dari tujuan yang ditentukan oleh bagaimana suatu klaim yang merupakan dasar tujuan perjuangan dibangun dan ditafsirkan secara bersama-sama. Tilly meletakkan faktor *interest* sebagai faktor yang bisa memberi pengaruh bagi aksi-aksi gerakan sosial, namun interest dimaknai sebagai faktor yang terkait dengan ekonomi atau kehidupan politik. Bahkan Tilly membatasi pengaruh interest hanya pada mobilisasi, tindakan kolektif dan kesempatan.

Pandangan Tilly di atas nampaknya kurang sejalan dengan McAdam 1982; Tarrow 1989; Gamson 1990, menurut mereka Tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh petani secara bertahap yakni tindakan kolektif oleh aktor-aktor dan berlanjut oleh gerakan sosial. Kondisi ini menggambarkan konsep mobilisasi dan proses politik bahwa gerakan sosial dan perlawanan dianalisis dengan cara kelompok dan organisasi. Ini juga memperkuat apa

yang dipikirkan oleh Tarrow tentang mekanisme kerja dalam repertoire seperti pada *protes cycles* sebagai suatu taktik menjaga kondisi perlawanan dalam bentuk-bentuk khusus. Karena itu suatu perubahan terjadi dalam repertoire akan sangat dipengaruhi oleh tempat, waktu dan rezim yang berkuasa.

Tarrow memahaminya sebagai aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial baik dalam bentuk aktor perwakilan, gerakan dan organisasi. Kondisi ini seperti yang dikemukakan Noer Fauzi bahwa ada tiga pokok utama yang mbingkai gerakan petani yakni; tafsir atas situasi yang dimusuhi, kesempatan politik yang memungkinkan para aktor gerakan menetapkan pilihan-pilihan strategis; dan pilihan jenis aksi kolektif yang diandalkan para pelaku gerakan untuk merubah karakter<sup>100</sup>.

Seperti halnya Tarrow, pandangan Rubin and Rubin<sup>101</sup> yang menggarisbawahi kontinum lanjut dari bergabungnya banyak aktor dan banyak organisasi dalam melawan ketidakadilan dan ketimpangan yang menjadi dasar melahirkan agenda gerakan sosial. Konsekuensi lanjut dari kontinum tersebut adalah gagasan alternatif yang menggabungkan kepentingan ekonomi dengan analisis relasi sosial seperti isu-isu tentang kebijakan dan HAM. Pada satu titik ada peluang bahwa organisasi komunitas dibangun dengan menggunakan variabel-variabel pembangunan namun dengan target kedaulatan petani dalam konteks perlawanan atas ketertindasan dan ketimpangan yang menjadi point penting dari perubahan perjuangan.

Pemikiran Tilly tentang aktor dalam repertoire yang memiliki pengaruh ekonomi atau kekuasaan sosial. Menurutnya peran

---

<sup>100</sup> Noer Fauzi, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Insist Press. Yogyakarta 2005, hal: 7-8

<sup>101</sup> Rubin and Rubin, *Community Organizing and Development*. A Pearson Education Company. Massachusetts, 2001, hal: 25-35

sentral tokoh-tokoh yang kharismatik dan berpengaruh ternyata ikut mempercepat proses pembentukan strategi dan taktik inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tersebut mampu melakukan peran sebagai *cultural broker*, mereka memperkenalkan butir-butir budaya kritis kepada masyarakat, menggerakkan perubahan secara lokal, bahkan membuat petani sangat dibutuhkan bagi perubahan kebijakan pencadangan lahan perkebunan. Konsep *cultural broker* nampaknya seperti yang di konsepsikan oleh Hiroko Horikoshi<sup>102</sup>, yakni tokoh kharismatik seperti Kyai dan Ulama bisa memerankan fungsi perantara atau mediator bagi suatu proses perubahan besar dalam masyarakat bahkan bisa lebih mengejawantahkan otoritas mereka sebagai pemimpin lokal dibanding fungsi mereka sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat meskipun mereka tidak memiliki kekuatan posisi secara ekonomi dan politik.

Konsep aktor yang kreatif dan inovatif di dalam *repertoire* yang mampu merespon keadaan menjadi peluang mencapai tujuan perlawanan dengan berbagai aksi taktis dan strategis. Hal ini mempertegas konsep *repertoire* yang digambarkan oleh Amy r. Poteete memberikan definisi *repertoire* sebagai aksi-aksi yang multiple melalui aktor yang kreatif dan inovatif. Bahkan menurutnya *repertoires* “ include multiple performances because they draw on multiple forms of power – political, economic, discursive, coercive, symbolic”.

Kehadiran aktor non petani dan keterlibat petani dalam arena politik perlawanan nampaknya sejalan dengan tesis Migdal melalui konsep dimensi perubahan sosial. Ia menyatakan bahwa perubahan sosial dan ekonomi diintegrasikan kedalam teori tentang partisipasi petani dalam politik dan revolusi. Migdal memaparkan dengan gamblang karakter dari keterlibatan petani dalam ruang politik.

---

<sup>102</sup> Hiroko Horikoshi, *Kyai dan perubahan Sosial*, P3M, Jakarta, 1987: 244.

Inisiatif keterlibatan petani dalam arena politik lebih banyak diinisiasi oleh non-petani<sup>103</sup>.

Dengan demikian keterlibatan petani dalam arena yang lebih besar belum berasal dari inisiatif lokal. Sangat mungkin keterlibatan aktor non petani mampu memberikan kebutuhan komunitas itu sendiri dan menjadi alat bagi petani untuk mencapai tujuan tertentu dalam hubungannya dengan aktor luar lebih didominasi oleh faktor kehilangan hak atas lahan bukan ekonomi.

Bentuk-bentuk perlawanan yang dihasilkan dari repertoar selalu bersifat umum dan memiliki tujuan umum. Menurut Tilly perubahan sifat strategi, taktik, repertoar, aktor, capaian dan hasil dipengaruhi oleh kondisi-kondisi seperti;

1. Clusters of contentious
2. Rapid
3. Extensive
4. Durable
5. Repeated
6. Tujuan
7. Innovative Generally<sup>104</sup>

Bentuk dari *rapid*, *extensive* dan *durable* itu ditandai dengan kondisi *strike* antar kedua belah pihak. *Strike* sebagai sebuah kondisi interaksi perlawanan yang bisa saja sebagai pemberi tanda pergeseran kondisi; aktor, proses, bentuk, capaian tujuan dan isu-isu. Perubahan taktik jelas mengidentifikasi target aksi atau

---

<sup>103</sup> Migdal, Joel, *Peasants, Politics, and Revolution: Pressure Toward Political and Social Change the Third World*. Princeton University Press. London .1974, hal: 10-19.

<sup>104</sup> Innovation at the margins is the most accepted account of change, proposing that contenders 'generally innovate at the perimeter of the existing repertoire rather than breaking entirely with old ways', Charles Tilly, *Popular Contention in Great Britain, 1758-1834*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995, hal: 28

pencapaian tujuan tersebut dan mengartikulasikan dalam konteks taktik perlawanan (repertoar).

Karena itu, teori repertoar Tilly hanya bisa dipakai dalam menjelaskan tindakan perlawanan kolektif yang bersifat umum dan memiliki tujuan umum. Meskipun Tilly menyebutkan bahwa perlawanan repertoar bisa mencapai tujuannya sebagaimana keadaan revolusi. Namun Tilly tidak mengungkapkan apakah revolusi itu capaian tujuan perjuangan atau bagian dari perlawanan repertoar secara umum.

Lain halnya dengan konsep Tarrow memberikan pengertian lain tentang konsep *strike* dalam repertoar. Menurutnya kondisi *strike* berfungsi sebagai media aktivasi yakni; suatu cara manusia untuk memahami sesuatu yang berada di dalam sistem kemasyarakatan, sehingga bisa menangkap makna sesuatu untuk dilakukan tindakan. Aktivasi tersebut dapat dilakukan secara alamiah, yakni melalui proses pergaulan keseharian, atau melalui upaya yang terorganisir. Jaringan pendukung gerakan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses aktivasi. Tilly tidak menyinggung konsep aktivasi ini. Konsep aktivasi ini sudah ada sejak dalam tahap awal proses yang akan menuju ke terjadinya aksi dan taktik tindakan kolektif. Karena itu aktivasi merupakan proses pengaktifan berbagai sumberdaya yang dimiliki dan berjalan meluas sehingga memiliki makna atau arti mendalam sehingga bisa mendorong terjadinya perilaku kolektif untuk mencapai suatu tujuan<sup>105</sup>.

Dalam teori repertoar, Tilly sama sekali tidak memperhatikan jaringan dan sifat tindakan perlawanan kolektif dilakukan oleh petani. Realitas perlawanan yang terjadi selalu menunjukkan adanya perlawanan tersamar namun tidak berangkat dari asumsi dari

---

<sup>105</sup> Sidney Tarrow, *Charles Tilly and the Practice of Contentious Politics: Social Movement Studies* 7 Autumn, *lok-cit*, hal: 25.

adanya agenda tersamar. Agenda perlawanan tersamar yang dilakukan oleh petani dalam kasus di desa Rengas bersifat terbuka dan dapat diterima oleh semua pihak, karena perlawanan yang dibangun oleh petani Rengas tidak dilakukan dengan menciptakan struktur baru yang paralel dengan sistem yang ada melainkan mencari cara agar perlawanan petani Rengas diketahui semua pihak dan bisa diterima oleh pemerintah serta membungkusnya dengan sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak. Bila bentuk ini bagian dari repertoar yang menggunakan tindakan protes terhadap kemapanan yang ada. Pada kenyataannya dalam waktu bersamaan tetap berupaya mengintegrasikan petani kedalam sistem yang ada tanpa meninggalkan upaya memperjuangkan kedaulatan petani. Perlawanan tersamar dipilih sebagai terminologi untuk memperlihatkan bahwa musuh (pemerintah) sebetulnya mengetahui tindakan petani. Sebagai implikasi dari perlawanan tersamar dengan agenda terbuka, dalam proses perkembangan perlawanan petani Rengas menerima lembaga baru yang berniat membangun jaringan bersama petani Rengas dalam mewujudkan perjuangan mereka.

Strategi dan taktik yang demikian lebih dekat dengan pandangan mengenai terbentuknya jaringan sosial dari Roger V Gould<sup>106</sup> yang menyorotinya dari perspektif strukturalis dan rasionalis. Menurutnya dimaksud strukturalis bahwa jaringan sosial muncul karena dipengaruhi oleh konteks pola lokal atau struktur sosial. Aktor sosial terikat dalam peran khusus atau ia berada dalam kerangka kerja institusi tertentu. Bahwa perilaku sosial tidak hanya dipengaruhi oleh posisi ekonomi, sikap dan pertimbangan untung rugi saja, tetapi juga oleh *strong social attachments* terhadap orang lain. Adapun perspektif rasionalis

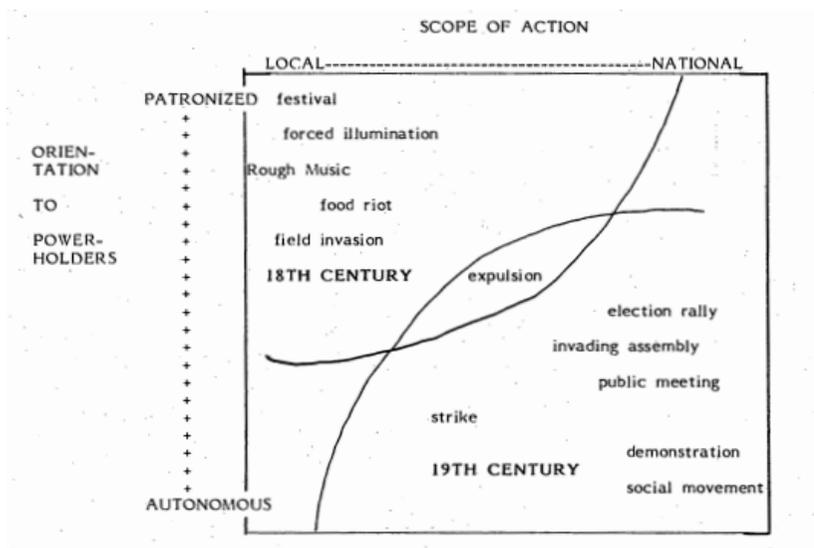
---

<sup>106</sup> Roger V. Gould, *Why Do Networks Matter? Rationalist and Structuralist Interpretations* University of Chicago June 2000, hal: 1-7

dikatakan bahwa formasi jaringan itu dipengaruhi oleh adanya *self-interest*.

*“Rational-choice accounts and structuralist accounts of social protest (and of other phenomena, like markets) are generally seen as rivals, yet each points to research on social ties and movement participation as confirming evidence. To be more precise, each represents the accumulation of evidence concerning networks and movement.....Structuralists like to say that social behavior occurs in the context of local patterns – let’s call them “structures” – that channel choices and preferences in certain directions rather than others. (It doesn’t much matter to me whether you refer to such channeling as “constraining” or as “enabling,” or both: it is obvious that the availability of one line of action typically comes at the expense of another line of action, and conversely that the closing off of one choice frequently generates others”<sup>107</sup>*

**GAMBAR 2.4**



Sumber : Charles Tilly, 1981: 8<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Ibid, hal: 8-10.

<sup>108</sup> Ibid, Nineteenth Century, *lok-cit*, hal: 8

Tilly menggambarkan skematisasi dua dimensi dari lingkup *repertoire* yakni pertama; diagram yang menempatkan beberapa *performance* dari karakteristik dalam setiap repertoar yang umumnya berhubungan tindakan tuntutan secara umum. Kedua; diagram yang menunjukkan orientasi biasa ke aksi tuntutan ke pihak berwenang atau pihak yang dilindungi dan berfungsi sebagai strategis perlawanan gerakan. Kedua diagram tersebut mengidikasikan antara lain;

- a. That the various performances occupy somewhat different positions with respect to their character istic scope and orientation to powerholders. (bahwa berbagai performance menempati posisi berbeda sehubungan dengan karakter lingkup istic (budaya) dan orientasi biasa ke pemegang kekuasaan
- b. That taken as wholes the two repertoires overlap. Somewhat in both respects. (tindakan repertoire yang overlap)
- c. That nevertheless a significant net movement along both dimensions - toward autonomous action which was national in scope occurred. In the shift from one dominant repertoire to the other (terjadi pergeseran tindakan repertoire dari lingkup lokal ke nasional disebabkan pemanfaatan kedua dimensi taktik perlawanan yang dilakukan hal ini pertanda bahwa aksi sudah menunjukkan aksi gerakan<sup>109</sup>.

Menurut Tilly, terjadinya repertoar tidak hanya tertuju pada tindakan perlawanan kolektif tetapi pada unit aktor aksinya yakni tindakan kolektif. Sebab terkait dengan perubahan aktor perilaku tindakan perlawanan tidak bisa dilepaskan dalam pencapaian tujuan yang terkait kelompoknya maupun aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial petani dengan tujuan merubah suatu kebijakan.

---

<sup>109</sup> Ibid, hal: 9

Perubahan bentuk repertoar terkait dengan strategi dan taktik yang terjadi pada dua unsur penting dari repertoar yakni; perubahan dari partisipan ke gerakan sosial. Perubahan ini berproses secara interaktif yang menghubungkan satu aksi dan taktik aksi ke aksi dan taktik lainnya secara inovatif dan strategis. Kondisi perubahan ini menggambarkan bentuk aksi-aksi di setiap episode yang dilakukan oleh aktor-aktor gerakan dalam lingkaran perlawanan. Menurut Tilly bentuk aksi dan taktik yang dilakukan secara aksi kolektif merupakan aksi yang menggunakan pilihan strategi politik perlawanan<sup>110</sup>.

Bentuk penggunaan satu tindakan ke tindakan lainnya dalam repertoar selalu memperhatikan kondisi penentu lainnya yakni dampak gangguan dan interaksi perlawanan. Kondisi ini menggambarkan suatu mekanisme berkaitan dengan kelompok dan individu satu sama lain yang termobilisasi selama periode politik perdebatan (*contentious politics*) sebagai kelompok baru yang disatukan oleh interaksi yang meningkat dan situasi ketidakpastian, sehingga menemukan kepentingan bersama mereka<sup>111</sup>. Kondisi-kondisi yang menyebabkan tindakan perlawanan kolektif dengan repertoar lebih didominasi kehilangan hak ekonomi yang tidak bisa dinikmati.

Dengan teori *repertoire* Tilly ingin membuktikan bahwa ia mengembang suatu metode menganalisis tindakan perlawanan kolektif yang dimulai dari pendekatan sejarah perjuangan (*historically struggles*) yang mengangkat peristiwa-peristiwa perlawanan secara spesifik dan tematik (*events in relation to one*

---

<sup>110</sup> Iwan Gardono Sujatmiko, "Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat" dalam *Gerakan Sosial : Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta : LP3ES. 2006, hal: xvi

<sup>111</sup> McAdam, Dough, John D. McCarthy and Mayer N. Zald (eds), *Comparative perspectives on social Movements: Political Opportunities, Mobilizing structure and Cultural Framing*, Ney York.,Cambridge University Press, 1996, hal : 12-26.

another in particular historical configuration). Tilly meletakkan konsep periodic yang berfungsi sebagai pentahapan dan pemisahan peristiwa yang terjadi. Mekanisme kerja dari repertoar itu adalah *cycles of contention*. Maksudnya adalah

*Less momentous than revolutions, more connected than contingent chains of events, the concept of cycles is a bounded way of studying the connections among events, between them and noneventful processes and in the light of major political changes, helping to interpret history as an interactive progression between structure and action*<sup>112</sup>.

(Konsep siklus adalah cara yang memberi batasan mempelajari hubungan antara peristiwa, tindakan dan proses kejadian dalam perubahan politik, konsep tersebut membantu untuk menafsirkan perkembangan sejarah antara struktur dan tindakan sebagai suatu sirkulus yang interaktif).

Menurut Tarrow, konsep *Cycles of contention* Tilly ini sesungguhnya sama dengan konsep *construction and diffusion of new frames of meaning* dari Snow and Benford<sup>113</sup>. Namun tidak menjadikan periode sebagai pemisah peristiwa satu dengan lainnya.

Tilly menjadikan dua konsep yang penting dikembangkan dalam teori repertoirenya tersebut yakni: Pertama, hubungan tindakan kolektif yang dilakukan dengan proses struktural yang ada seperti urbanisasi, industrilisasi dan capitalism. Kedua, evolusi dari tindakan perlawanan dalam suatu peristiwa ke peristiwa lainnya.

Berdasarkan dua konsep di atas, menurut Tilly tindakan perlawanan kolektif repertoar akan selalu dianalisis dalam bentuk trikotomik yakni kompetisi sistem-sistem yang ada, reaksi dari

---

<sup>112</sup> *Op-cit*, hal: 67

<sup>113</sup> Snow, David A., and Robert D. Benford, *Master Frames and Cycles of Protest. in Frontiers in Social Movement Theory*, edited by Aldon Morris and Carol McClurg Mueller. New Haven, CT: Yale University Press.1992, hal: 133-155

pihak-pihak yang melakukan perlawanan dan proaksi dari pihak yang melawan untuk mendapatkan hak-hak yang belum dinikmati atau hilang (*the trichotomy between competitive, reactive and proactive collective action*). Sementara evolusi tindakan perlawanan dalam bentuk lama dan baru akan sangat ditentukan oleh modal interaksi di dalam kelompok atau aktor (*the modal interactions between citizens and their opponents-and thus of the character of popular struggle*<sup>114</sup>).

Bagi Tilly perlawanan repertoar itu sesungguhnya perlawanan yang dilakukan dengan tindakan baru hasil dari proses belajar dari pengalaman sebelumnya. Inovasi dan berimprovisasi aksi, hal inilah yang memelihara keberlangsungan dan kontinuitas perlawanan yang ada.

*learned cultural creations that result from the history of struggle and becomes the mechanism for tracing the evolution of the culture of political struggle and of the impact of structural changes upon it*<sup>115</sup>.

(Belajar dari kreasi budaya yang dihasilkan dari sejarah perjuangan dan menjadi mekanisme untuk melacak evolusi budaya perjuangan politik dan dampak perubahan struktural di dalamnya).

---

<sup>114</sup> Charles Tilly, *lok-cit*, 1995:45. Menurut Tilly repertoar lama adalah The first is parochial, bifurcated, and particular: It was parochial because most often the interests and interaction involved concentrated in a single community...bifurcated because when ordinary people addressed local issues and nearby objects they took impressively direct action to achieve their ends particular because the detailed routines of action varied greatly from group to group issue to issue, locality to locality, issue to issue. Sementara repertoar baru; cosmopolitan, modular and autonomous: cosmopolitan in often referring to interests and issues that spanned many localities or affected centers of power whose actions touched many localities, modular in being easily transferable from one setting or circumstance to another autonomous in beginning on the claimants' own initiative and establishing direct communication between claimants and nationally-significant centers of power.

<sup>115</sup> Charles Tilly, *lok-cit*, 1995, hal :41-42

Karena itu, Tilly tidak begitu memberi perhatian terhadap tempat, waktu dan pihak yang menjadi lawan. Selain itu, capaian tujuan dan hasil yang diperjuangkan melalui *repertoire* menurut Tilly selalu dalam bentuk umum yang didominasi kepentingan ekonomi.

Menurut Tilly repertoire sesungguhnya adalah tidak hanya apa yang orang lakukan ketika mereka membuat klaim itu, namun juga apa yang mereka tahu bagaimana melakukannya dan apa yang membuat masyarakat telah datang dengan harapan meskipun dengan pilihan terbatas. Hal itulah yang Tilly sebut sebagai strategi dan taktik inovatif yang didapat dari diri mereka sendiri karena belajar dari suatu kultur dan pengalaman dalam bentuk terbatas.

*Therefore not only what people do when they make a claim; it is what they know how to do and what society has come to expect them to do from within a culturally sanctioned and empirically limited set of options*<sup>116</sup>.

Bagi Tilly repertoire merupakan tindakan yang dilakukan secara kolektif dengan menggunakan strategi dan taktik sebagai alat perlawanan mewujudkan tujuannya. Sebab titik tekan konsep ini ada pada *collective events*. Memiliki fungsi sebagai *create solidarity and collective identity*<sup>117</sup>.

*Excludes collective claims-making focused on affirmation of identity from his definition of repertoires of contention*<sup>118</sup>.

Bagi Tilly, repertoire adalah suatu bentuk kritik terhadap model aktor-tunggal yang statis, keadaan ini menyesuaikan dengan

---

<sup>116</sup> Charles Tilly, *lok-cit*, 1978, hal: 151

<sup>117</sup> McCaughey, Martha, and Michael D. Ayers (eds.) *Cyberactivism: Online Activism in Theory and Practice*. New York: Routledge, 2003, hal: 76

<sup>118</sup> Charles Tilly, *Contentious Repertoires in Great Britain, 1758-1834, lok-cit*, 1995, hal: 15-42.

tipologi Tilly sendiri yang memecahkan peristiwa-peristiwa menjadi episode-episode perlawanan secara tematik .

## 2.6. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan atas kajian teoritik yang telah diuraikan di atas dalam penelitian ini, maka peneliti berpendapat bahwa studi tentang perlawanan petani Rengas terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di Sumatera-Selatan dapat dianalisis dengan pendekatan teori *repertoire* dari Charles Tilly. Peneliti beralasan bahwa data-data empiris umumnya adalah data-data sejarah perjuangan dan peristiwa-peristiwa tindakan perlawanan yang dilakukan oleh aktor perlawanan yakni petani Rengas secara berkelompok dan telah berlangsung lama. Selain itu, tindakan kolektif yang dilakukan oleh petani Rengas dalam bentuk perlawanan yang jumlahnya tidak satu macam tetapi beragam dan memiliki cirinya masing-masing. Karena itu, keragaman bentuk perlawanan tersebut perlu dianalisis dengan suatu teori yang mengkaji akumulasi kejadian akibat ketegangan politik (*evens in history*).

Perlawanan petani Rengas yang dilakukan secara individu-individu dan sporadik menjadi pengalaman kegagalan melahirkan tindakan kolektif atas nama kelompok. Tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh petani Rengas tidak sebatas perlawanan terbatas dan insidental, tetapi berlanjut dan mengalami perubahan tindakan secara cepat. Bahkan berpartisipasi dalam berbagai aksi sebagai representasi kelompok atau golongan yang diwakilinya.

Peneliti berpendapat teori *repertoire* Tilly diperlukan ketika memberi penjelasan tentang bagaimana akumulasi tindakan perlawanan kolektif terjadi dan dimaknai sebagai suatu bentuk repertoar. Selanjutnya apakah kultur menjadi media yang

memberikan ruang belajar bagi aktor-aktor yang sedang terlibat didalam tindakan perlawanan kolektif dengan repertoar dalam hal ini petani Rengas.

Konsep-konsep inti teori *repertoire* terletak pada pemahaman yang utuh tentang sejarah perjuangan dan peristiwa-peristiwa didalam perjuangan tersebut, sebab berdampak pada improvisasi dan inovasi pilihan strategi dan taktik perlawanan. Meskipun demikian, periode-periode terjadinya suatu peristiwa apakah berfungsi sebagai pembatas perlawanan, strategi dan taktik yang dilakukan oleh petani, ataukah hanya sebagai ciri semata.

Peneliti berpandangan tindakan perlawanan dengan repertoar yang dilakukan oleh petani Rengas apakah akan berdampak pada perubahan sosial berjalan cepat ataukah melambat untuk mencapai tujuan dan hasil perlawanan. Berdasarkan alasan-alasan di atas, teori ini nampaknya masih perlu dipertentangkan dengan temuan-temuan dari lapangan penelitian ini.

## **BAB III**

---

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian kualitatif studi kasus dipilih sebagai strategi, kerangka kerja, atau desain penelitian ini<sup>119</sup>. Model induksi analitik dalam studi kasus tunggal nampaknya lebih cocok diterapkan dalam studi ini dibanding model sampel teoritik dan studi kasus kolektif. Dalam model induksi analitik maka aksi-aksi perlawanan dapat dicari kesamaannya dan dibuat suatu kategori umum, dengan cara memberi makna secara ketat atas konsep-konsep yang

---

<sup>119</sup> Dalam pendekatan kualitatif, terdapat sejumlah jenis penelitian (Creswell, 1994; Patton, 1990). Jenis penelitian di dalam pendekatan kualitatif penting untuk dirumuskan terlebih dahulu agar tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat terdefinisi dengan baik. Pemahaman jenis penelitian juga membantu peneliti untuk menyusun pertanyaan yang akan disampaikan kepada partisipan. Dalam Creswell (1994) disebutkan empat jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif. Etnografi : dalam penelitian ini yang dipelajari adalah kelompok budaya dalam konteks natural selama periode tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui budaya kelompok tersebut.- Grounded Theory : yang diupayakan dalam penelitian ini adalah menyimpulkan suatu teori dengan menggunakan tahap-tahap pengumpulan data dan saling menghubungkan antara kategori informasi. Karakteristik dari jenis ini adalah perbandingan antar data dari berbagai kategori dan penggunaan sampel yang berbeda dari kelompok populasi untuk memaksimalkan persamaan dan perbedaannya. - Studi Kasus : yang digali adalah entitas tunggal atau fenomena dari suatu masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi. - Studi Fenomenologi : dalam penelitian ini yang diteliti adalah pengalaman manusia melalui deskripsi dari orang yang menjadi partisipan penelitian, sehingga peneliti dapat memahami pengalaman hidup partisipan.

digunakan. Selain itu penelitian ini bersifat kualitatif, metode kualitatif berisikan logika induktif dan interpretasi<sup>120</sup>, pendekatan ini memberi penekanan pada sifat bentukan sosial realitas, hubungan dengan apa yang terjadi.

Sebagai konsekuensi dari tujuan penelitian, yaitu mengembangkan deskripsi dan eksplanasi yang mendalam mengenai tentang repertoar perlawanan petani Rengas, dengan demikian peneliti berangkat dari asumsi ontologis bahwa realitas yang ada bersifat subjektif dan beragam sebagaimana yang dipahami oleh setiap informan. Sebagai sebuah studi yang induktif, penelitian ini tidak meneliti sejumlah ciri atau opini untuk menguji hubungan antar sejumlah variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya, melainkan berusaha untuk menggambarkan subjek penelitian secara rinci dan akurat tentang tindakan perlawanan kolektif, perubahan strategi dan taktik, bentuk repertoar, aktor, capain tujuan dan hasil perlawanan.

Di dalam pendekatan studi kasus menunjuk pada pengertian memilih suatu (atau mungkin juga lebih dari satu) kejadian atau gejala sosial untuk diteliti dengan menerapkan serangkaian metode penelitian. Pengertian ini sekaligus menjelaskan bahwa:

- a. Studi kasus adalah studi aras mikro (menyorot satu atau beberapa kasus), dan
- b. Studi kasus adalah strategi penelitian yang bersifat multi-metode. Mengenai hal terakhir ini, lazimnya peneliti kasus akan memadukan metode pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen<sup>121</sup>.

---

<sup>120</sup> Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis* (edisi Revisi), Pustaka pelajar, 2004: 19

<sup>121</sup> John W, *Creswell, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, 2010, hal: 20

Nalar utama kualitatif studi kasus adalah eksplorasi dan penjelasan dari suatu realitas yang dibuahkan dari suatu gejala realitas itu sendiri. Dalam metode penelitian studi kasus yang digali adalah entitas tunggal atau fenomena dari suatu masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi.

Kasus tentang tindakan perlawanan kolektif petani Rengas di Sumatera-Selatan bersifat spesifik karena kemunculannya terkait dengan persoalan pertanahan yang terjadi semenjak Orde Baru sampai Reformasi dan menjadi contoh perlawanan di lokasi lainnya. Untuk memahami dinamikanya perlu dilakukan interpretasi terhadap setiap gejala yang muncul dengan menggunakan kerangka (*frame*) kerja berbagai pihak yang terlibat di dalam tindakan perlawanan kolektif petani baik petani maupun pihak lainnya. Oleh karena itu, kesatuan analisis dalam penelitian ini adalah “lingkungan” situasi di mana tindakan perlawanan kolektif itu muncul, berubah bentuk dan dan berkembang menjadi peristiwa perlawanan.

Keberadaan petani Rengas, bentuk repertoar, tempat dan waktu peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan pertanahan dengan pemerintah (negara) dan perusahaan (swasta), berjejaring dengan berbagai kelompok aktor pendukung, serta keterkaitannya dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, sebagai kesatuan analisis “lingkungan”.

Mengacu pendapat Lofland mengenai prosedur penelitian studi kasus tentang gerakan sosial, maka dalam studi ini mengikuti empat (4) langkah, yaitu<sup>122</sup>:

---

<sup>122</sup> John Lofland, *Social Movement Organizations: Guide to Research on Insurgent Realities*. New York: Aldine de Gruyter, 1996, hal: 2

- a. Memilih kejadian-kejadian yang terkait dengan tindakan kolektif petani yang akan diteliti.
- b. Memikirkan secara luas tentang bentuk-bentuk pengumpulan data atas kasus tersebut,
- c. Menjabarkan pertanyaan-pertanyaan sosial tentang data
- d. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sosiologis.

Menggunakan studi kasus dalam penelitian ini adalah yang paling relevan sebab terkait dengan tindakan perlawanan kolektif petani tingkat wilayah provinsi yang menjadi representasi perlawanan petani. Aksi-aksi perlawanan petani Rengas dibatasi tahunnya, yakni aksi-aksi perlawanan yang berlangsung mulai tahun 1981 hingga tahun 2010.

Ada dua alasan dipilihnya metode studi kasus tunggal (*single-case study*).

- a. Secara obyektif : Jenis pendekatan ini dipilih sebab lebih menekankan rasionalisme dan realitas sosial, politik, budaya yang ada. Selain itu pemilihan metode studi kasus tunggal adalah strategi penelitian yang akan membantu peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus mana dibatasi oleh waktu dan jenis aktivitas dimana peneliti mampu mengumpulkan informasi secara lengkap dan terukur. Hal lainnya adalah kasus-kasus konflik agraria di Sumatera-Selatan yang terjadi banyak mempunyai kriteria atau karakteristik yang sama, sehingga cukup diambil satu kasus saja atau karakteristik yang sama itu sudah terwakili.
- b. Secara Subyektif : Studi kasus tunggal dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga. Studi kasus adalah strategi penelitian yang bersifat multi-metode. Mengenai hal terakhir ini, lazimnya peneliti kasus akan memadukan metode

pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen<sup>123</sup>. Nalar utama kualitatif studi kasus adalah eksplorasi dan penjelasan dari suatu realitas yang dibuahkan dari suatu gejala realitas itu sendiri.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, peneliti melakukan empat perluasan.

- 1) Perluasan keterlibatan peneliti dalam keseharian informan. Hal ini terutama peneliti lakukan dengan melibatkan diri dalam aktivitas dan kegiatan seperti rapat, musyawarah dan tindakan perlawanan.
- 2) Perluasan cakupan ruang dan waktu penelitian. Walaupun periode yang diteliti dibatasi dari tahun 1981-2010, namun peneliti mengaitkannya dengan periode pasca 2011-2012.
- 3) Perluasan dari proses-proses mikro kepada kekuatan-kekuatan makro. Misalnya, peneliti mengaitkan dinamika internal yang terjadi di antara para petani dengan aspek historis-kultural masyarakat Rengas, maupun berbagai kekuatan yang dihadapinya di arena konflik struktural.
- 4) Perluasan teori terutama dilakukan dalam menganalisis hasil temuan lapangan.

### **3.2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan sejarah perjuangan, alasan memilih pendekatan ini sebab dipandang dapat menjelaskan berbagai kondisi peristiwa tindakan perlawanan kolektif yang terjadi, hubungan dengan tindakan kolektif lainnya dalam waktu, tempat dan keadaan yang berbeda. Hal ini terkait dengan konsep kondisi-kondisi yang diperlukan (*condition of*

---

<sup>123</sup> John W, *Creswell, lok-cit*, 2010, hal: 20

*existence*) seperti; aktor, repertoar, capaian tujuan perjuangan dan hasil perlawanan.

Karena itu penggalian dengan pendekatan sejarah perjuangan yang dihubungkan dengan *evens in history* serta keadaan saat itu seperti represif serta fasilitas dan tersediannya ruang politik, isu-isu yang meluas dan dukungan diluar petani. Inilah yang secara implisit ada dibalik sejumlah kondisi yang mempengaruhi tindakan perlawanan kolektif repertoar petani Rengas.

Adapun sosiologi diperlukan untuk menjelaskan secara mendalam hubungan berbagai kondisi-kondisi yang menciptakan tindakan perlawanan baik yang dialami oleh pihak petani maupun pihak PTPN VII. Perhatian terhadap analisis waktu, tempat dan bentuk perlawanan sebagai pilihan tindakan kolektif yang dihubungkan dengan peristiwa terjadi, akan mempertajam analisis kondisi digunakannya strategi dan taktik perlawanan sebagai alat mewujudkan atau menekan pihak lawan agar terbuka jalan pencapaian tujuan dan hasil perlawanan.

### **3.3. Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data yakni primer dan sekunder.

#### **1) Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Peneliti akan wawancara dengan informan untuk menggali informasi mengenai risalah kasus dan riwayat tanah Rengas, kronologis konflik agraria, lahirnya tindakan perlawanan terbatas dan meluas dalam bentuk tindakan kolektif petani Rengas.

Penelitian ini yang menjadi sumber data utama informan adalah petani Rengas yang terlibat langsung dalam tindakan perlawanan baik dalam perlawanan terbatas maupun meluas.

Sementara informan pendukung dalam penelitian ini adalah informasi dari tokoh masyarakat, pemuda, BPN, Pemerintahan dan LBH Palembang dan pihaklainnya yang dianggap adakaitannya dengan penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif data primer sering berupa kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimaksud kata-kata dan tindakan disini adalah perkataan dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer).

## 2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini seperti catatan-catatan hasil rapat desa, Hasil rapat Serikat Petani Ogan Ilir, hasil investigasi pihak-pihak lain yang tidak terkait langsung dengan aksi perlawanan.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan cara antara lain :

#### 1) Observasi terlibat (*Participant observation*)

Metode ini merupakan adanya keinginan peneliti untuk terlibat langsung dalam dunia sosial yang dipilih sebagai obyek penelitian. Dengan melibatkan diri secara langsung ini peneliti dapat mendengar, melihat dan terlibat dalam dunia pengalaman yang ada<sup>124</sup>. Kegiatan observasi dilakukan setelah peneliti

---

<sup>124</sup> Marshall, *op.cit.* hal :106. Sementara Becker, mengatakan bahwa pengamatan terlibat merupakan pengamatan yang dilakukan sambil berperan serta dalam kehidupan terhadap orang yang diteliti. Jadi, pengamatan terlibat adalah

mendapat izin penelitian pada bulan Juli tahun 2011. Pengamatan dilakukan untuk memastikan informasi-informasi terkait dengan peta informan dan kegiatan-kegiatan petani Rengas. Pada tanggal 5-7 Nopember 2011 peneliti mengikuti kegiatan pertemuan dan rapat di desa Rengas. Peneliti dapat mengamati langsung jalannya rapat dan musyawarah untuk menentukan langkah dan aksi perlawanan serta melakukan wawancara.

Selain itu, peneliti juga menghadiri pertemuan-pertemuan tidak terencana di Desa Rengas I dan Rengas II; pertemuan antar petani umumnya membicarakan di bentuk dan upaya petani Rengas dalam menghadapi ketegangan dan isu-isu yang cepat berganti. Pertemuan antar petani di beberapa desa di Kecamatan Payaraman sempat peneliti ikuti, dalam pertemuan tersebut peneliti mewawancarai peserta dialog (aktivis LSM) tentang konflik pertanahan di Rengas.

Peneliti juga mengobservasi beberapa lahan atau lokasi tempat terjadinya reklamings dan penembakan. Peneliti menyimpulkan lokasi desa Rengas I dan Rengas II. Peneliti melihat suatu desa yang dikelilingi perkebunan tebu. Peneliti lalui sepanjang jalan adalah hamparan perkebunan tebu yang subur dan

---

mengikuti orang-orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari, melihat apa yang mereka lakukan, kapan dengan siapa, dan dalam keadaan apa, dan menanyai tentang tindakan mereka, sedangkan bagi Denzin, pengamatan terlibat dianggap sebagai strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan responden atau informan partisipasi dan observasi langsung. Dengan kata lain, seperti dikatakan Bruyn, metode ini memiliki kapasitas untuk mengungkap makna, mengenai eksistensi manusia di lihat dari pandangan orang dalam (emic). Sedangkan bagi Zelditch, pengamatan terlibat dianggap bentuk riset terbaik untuk memahami peristiwa dan proses sosial. . Jadi dalam penelitian kualitatif, pada mulanya berangkat dari temuan-temuan fakta sosial kemudian ditransformasikan menjadi tema-tema, pola-pola, konsep-konsep, definisi-definisi atau model-model. Dalam proses itu kemudian dipoles dengan konsep-konsep atau teori yang telah dibaca.

sangat luas. Pekebunan tebu itu mengelilingi pemukiman penduduk dan lahan pertanian penduduk desa Rengas. Ketika peneliti masuk ke kawasan pemukiman penduduk yang peneliti rasakan adalah desa yang sepi dan sedikit aktivitas. Sebab sebagian besar penduduk mencari kerja atau berkerja jauh di luar desa mereka, terkadang sampai ke luar Kabupaten. Peneliti menemukan jawaban mengapa penduduk kerja ke luar desa ? karena mereka tidak memiliki lahan untuk digarap sebagai sawah atau kebun. Padahal desa mereka dikelilingi oleh perkebunan tebu yang subur dan sangat luas.

## 2) Wawancara semi terstruktur (semi-structured interview)<sup>125</sup>

Persiapan pertama sebelum melakukan wawancara dilaksanakan adalah peneliti mencari kawan-kawan petani dan pihak lainnya yang sudah kenal dan dipastikan dapat menjadi informan kunci, baik dari kalangan petani dan informan pendukung lainnya yakni mereka adalah yang pernah mengadvokasi konflik pertanahan, ikutserta dalam gerakan petani dan menjadi pengurus inti organisasi gerakan petani. Pada bulan Juli tahun 2011 sejak izin penelitian diperoleh maka dokumen-dokumen tentang aksi-aksi perlawanan, konflik pertanahan dan upaya penyelesaian kolektif (termasuk gerakan lokal-tradisional petani) mulai dikumpulkan. Wawancara dengan para petani dan pihak lainnya mulai dilakukan. Informasi awal ini menjadi landasan untuk mendalami lingkup permasalahan penelitian.

Sesuai dengan hasil wawancara didapatkan gambaran yang cukup tentang pemetaan konflik agraria yang terjadi, persoalan

---

<sup>125</sup> Maksud wawancara semi struktur adalah wawancara lebih memiliki kebebasan untuk memperoleh jawaban yang standar, termasuk mengklarifikasi dan mengelaborasi atas jawaban yang diberikan. dalam wawancara mendalam tak berstruktur lebih bersifat luwes, susunan pertanyaannya bisa berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi wawancara, tingkat pendidikan, status sosial dan sebagainya.

penyebab perlawanan petani dan bentuk tindakan perlawanan yang dilakukan. Pada bulan Agustus tahun 2011, peneliti melakukan wawancara secara intensif dan berkesinambungan. Beberapa informan awal di atas tetap diwawancarai lebih lanjut dan diperbanyak jumlahnya melalui cara *snowball*. Guna mendapatkan informasi yang akurat, peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan petani yang terlibat dan tidak terlibat langsung serta pihak lainnya terkait. Seperti pengurus organisasi atau mantan kerio, pesirah, birokrat dan lainnya.

Khusus kepada para informan kunci selalu dijalin hubungan langsung karena wawancara intensif dengan mereka dilakukan secara berkelanjutan, dengan bertemu langsung, melalui telepon, Handphone dan silaturahmi. Di antara mereka juga diminta untuk mengoreksi dan berdialog tentang hasil rekonstruksi dan interpretasi data yang dituangkan dalam bentuk tulisan, tabel dan gambar.

Beberapa informan awal di atas tetap diwawancarai lebih lanjut dan diperbanyak jumlahnya melalui cara *snowball*. Kemudian wawancara dilanjutkan dengan para pelaku petani dan non petani yang mengikuti aksi-aksi perlawanan dan pengurus gerakan petani Rengas seperti Walhi dan SPI Sum-Sel. Sementara dari kalangan pejabat atau mantan wawancara dilakukan dengan mereka yang pernah masuk dalam Tim 9. Adapun kalangan perusahaan diwawancarai dua manager lapangan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, sementara dari kalangan generasi muda dan pelaku inti dan empat pelaku utama aksi reklamasi. Selain itu, instansi kehutanan dan BPN berhasil diwawancarai pejabat yang banyak tahu tentang konflik agrarian di Sumatera-Selatan dan pemberian HGU terhadap perusahaan berplat merah.

Penentuan informan sendiri dibagi menjadi dua sumber yakni ; Pertama, informan kunci adalah pelaku-pelaku yang terlibat

langsung aksi-aksi perlawanan . Kedua, *informan pendukung* yaitu ; Kadus, Lurah, Camat, Kepala BPN, Aparat Keamanan, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Akademisi atau pelaku yang tidak terlibat langsung.

Adapun jumlah keseluruhan peneliti mewawancarai langsung 32 orang informan, dengan durasi wawancara keseluruhan 23 jam, 15 menit, 12 detik. Peneliti melakukan pemindaian hasil wawancara ke dalam 380 halaman transkrip hasil wawancara. Sebagian besar informan, yaitu 25 orang, adalah petani Rengas yang terlibat perlawanan. Aspek jenis kelamin, 24 orang informan adalah laki-laki. Jumlah informan dan volume data yang berhasil dikumpulkan tersebut melebihi perkiraan peneliti pada saat akan memulai penelitian. Ketika itu peneliti sempat mengkhawatirkan kesediaan para informan untuk diwawancarai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara rinci dan terbuka. Ternyata kekhawatiran tersebut tidak terbukti di lapangan. Sebaliknya, secara umum seluruh informan memberikan informasi dengan antusias.

### 3) Studi pustaka dan dokumentasi:

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan untuk memahami berbagai teori dan lebih menangkap gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Dalam penelitian ini kajian dokumentasi diambil antara lainya;

- a. Hasil laporan-laporan aksi perlawanan petani 1981-2009
- b. Surat petikan pencadangan lahan 1976
- c. Hasil laporan dan catatan berita acara tahun 2009
- d. Peta letak tanah desa Rengas tahun 1980

- e. Dokumen-dokumen penyelesai konflik milik pemprov Sumatera-Selatan.
- f. Laporan pelaksanaan ganti rugi Bupati OKI 1999
- g. Laporan dan surat Gubernur Sumatera-Selatan 2001
- h. Surat permohonan penundaan dan bantuan penyelesaian konflik lahan tahun 2002
- i. Hasil monitoring pihak Gubernur Sumatera-Selatan tahun 2008-2010 dan Risalah kasus perlawanan petani Rengas tahun 1996.

Melalui teknik ini peneliti mendapatkan bahan-bahan tertulis dan gambar yang berhubungan dengan konflik pertanahan, pembebasan dan pengambil-alihan lahan, kebijakan agraria dan kebijakan kependudukan (khususnya transmigrasi lokal), gerakan petani dan organisasi tani. Dokumen tersebut berupa

laporan kronologi dan analisis konflik pertanahan dan dampaknya terhadap komunitas petani, data wilayah dan komunitas petani yang mengalami konflik, keputusan pemerintah, surat-surat penting tentang aktivitas gerakan dan organisasi tani, keterlibatan pelaku, dan sebagainya.

### **3.5. Lokasi Penelitian**

- 1) Desa Rengas Kecamatan Payaraman Ogan Ilir

Lokasi penelitian berada di desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Sumatera-Selatan. Di desa Rengas peristiwa perlawanan petani terjadi dengan aksi-aksi tuntutan secara kolektif maupun gerakan. Berbagai aksi perlawanan sering terjadi di Rayon VI desa Rengas I dan desa Rengas 2.

- 2) Penentuan lokasi didasarkan atas pertimbangan rasional dan identifikasi

Aksi-aksi tuntutan yang berproses membentuk tindakan perlawanan gerakan petani Rengas. Aksi-aksi tersebut dilakukan secara terus-menerus dan sudah berlangsung lebih 30 Tahun. Selain itu penentuan lokasi ini terlebih dahulu melakukan pengamatan secara luas (*overview*), terhadap lokasi penelitian. Tujuannya melihat secara dekat dan seksama gambaran umum mengenai sejarah konflik penguasaan tanah, keadaan pemukiman, demografi, keagamaan, perekonomian, tradisi dan lain-lain.

3) Pertimbangan lain

Di lihat dari sisi eskalasi perlawanan yang sangat mungkin menjadi "contoh" bentuk perlawanan petani untuk merebut kembali hak atas tanah mereka dari penguasaan Perusahaan Perkebunan, khususnya di luar Rayon VI yang tersebar di Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Tanjung Batu, Kecamatan Payaraman, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Indralaya, Kecamatan Lubuk Keliat dan Kecamatan Muara Kuang.

Sementara Lahan pengembangan PTPN VII di Rayon 6 meliputi 3 Kecamatan yang tersebar di lima (5) desa yakni Rengas, Betung, Lubuk Keliat, Sonor dan Lubuk Bandung dengan luas yang dikelola + 5499 Ha.

4) Dipilih peristiwa perlawanan petani desa Rengas sebagai Obyek

Penelitian disertasi ini adalah peristiwa perlawanan petani Rengas sebab representasi dari masyarakat petani yang mempelopori aksi-aksi tuntutan petani sebelum Orde Baru tumbang baik secara individual maupun perjuangan secara aksi kolektif yang berlanjut menjadi gerakan perlawanan. Gerakan petani terus mengalami perluasan dukungan di terutama di masa reformasi. Dukungan yang kuat baik bersifat kedalam maupun ke luar gerakan. Puncak aksi-aksi

tuntutan dilakukan dalam episode gerakan perlawanan adalah dilakukan aksi reklamasi pada tanggal 3-5 Desember 2009 dan redistribusi lahan tahun 2010 sebagai capaian tujuan dari aksi dan taktik perlawanan gerakan petani Rengas setelah sebelumnya terjadi konfrontasi berdarah antara petani versus Brimod Polda Sum-Sel tanggal 4 Desember 2009.

- 5) Dipilih desa Rengas sebagai daerah penelitian  
Berdasarkan dua alasan obyektif dan subyektif adalah:
  - a. Secara obyektif aksi-aksi perlawanan muncul dan berkembang antara petani berhadapan dengan pemerintah (negara) dan perusahaan (swasta); dan aksi-aksi perlawanan petani Rengas menjadi ciri khas perlawanan yang ada di Sumatera-Selatan . Tindakan perlawanan kolektif petani Rengas berkembang menjadi beberapa organisasi gerakan petani di tingkat wilayah provinsi ke atas berjejaring dengan organisasi gerakan tingkat nasional.
  - b. Secara Subyektif adalah peneliti berasal dari Sumatera-Selatan sementara peristiwa terjadi di daerah peneliti berasal, maka bisa menjadi modal untuk memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data lapangan sekaligus menghemat waktu.

### **3.6. Teknik Pengolahan Data**

Dalam tahapan ini yang dilakukan adalah data penelitian telah diperoleh secara lengkap. Data-data yang diperoleh akan diproses melalui teknis analisis deskriptif berdasarkan sifat data yang diperlukan dalam penelitian ini, beberapa tahapan;

- a. Pemeriksaan data secara umum
- b. Pengkategorian dan pengklasifikasian data
- c. Interpretasi data

- d. Mengambil keterkaitan pola pikir, gagasan, pengalaman dan penghayatan, kemudian diambil kesimpulan secara induktif untuk mempertajam analisis di atas<sup>126</sup>.

Adapun proses operasionalnya yakni melakukan reduksi data melalui abstraksi, suatu upaya membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Proses selanjutnya menyusun data ke dalam bentuk satuan-satuan kemudian dikategorisasikan sembari *coding* dilanjutkan dengan langkah terakhir pemeriksaan dan keabsahan data. Menentukan keabsahan data (*trustworthiness*) berdasarkan kriteria antara lain :

- a. Derajat kepercayaan (*credibility*) melalui pengalokasi waktu dan triangulasi (memperkuat referensi dan pengecekan ulang data).
- b. Keteralihan (*transferibility*) berhubungan dengan informan, perbandingan data secara konstan, mencari kejadian empiris tentang kesamaan konteks.
- c. Ketergantungan (*dependability*) berhubungan dengan pemeriksaan data lapangan, reduksi data analisis interpretasi data.
- d. Kepastian (*confirmability*) berhubungan dengan pengumpulan data, konfirmasi etik dan emik, *check dan recheck* atas hasil pengolahan data.

Selanjutnya peneliti melakukan validitas internal data-data yang ada. Sebab penelitian ini menggunakan pendekatan intersubjektif, sehingga validitas internal atau kredibilitasnya yang lebih penting dijelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Beberapa hal yang penting dilakukan dalam menjamin kredibilitas dalam penelitian ini yang peneliti lakukan, diantaranya;

---

<sup>126</sup> John W, Creswell, *Loc-cit*, hal: 267

- a. Wawancara berulang. Karena penelitian ini dilakukan di wilayah Sumatera-Selatan, dan peneliti juga sudah tinggal di wilayah tersebut serta sudah kenal dengan banyak tinaliti, maka wawancara berulang lebih mudah dan lebih sering dapat dilakukan guna memperoleh akumulatif data yang komprehensif dengan melakukan konfirmasi dan konfirmasi kembali dengan para informan dan atau responden.
- b. Trianggulasi. Data penelitian dikumpulkan menggunakan dua teknik utama yaitu wawancara dan dokumentasi yang didukung dengan data sekunder dan observasi. Subyeknya adalah para pelaku petani yang terlibat langsung dan tidak langsung dengan aksi-aksi perlawanan
- c. Masukan dari informan atau narasumber. Catatan hasil wawancara dan interpretasi akan diberikan kembali kepada tinaliti untuk diperiksa dan dikomentari. Dengan cara ini dan dipadukan dengan cara pertama, selain memungkinkan peneliti dapat mengembangkan informasi lebih lanjut, juga memungkinkan mendapatkan tambahan untuk memperbaiki dan melengkapi data-data penelitian dan mempertajam hasil interpretasi.

### **3.7. Analisa Data**

Pilihan pada penelitian kualitatif yang tidak mengabaikan penggunaan multi metode pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus tentang perlawanan petani Rengas difokuskan pada dua hal penting yakni perilaku dan peristiwa dari tindakan kolektif, karena itu memungkinkan peneliti secara intensif menggunakan metode interpretasi. Sesuai dengan pokok penelitian dan karakteristik pengolahan dan analisis data kualitatif didasarkan pada fakta-fakta dan informasi yang dihasilkan. Secara ringkas pengolahan dan

analisis data mengikuti tahapan reduksi data dan klasifikasi berdasarkan kategori yang dibangun oleh konsep, dan kemudian dibuat hubungan antar konsep, diantaranya adalah; repertoar dan aktor, strategi dan taktik, capaian dan tujuan, hasil dan perlawanan.

Menurut Creswell<sup>127</sup>, analisis dan penyajian data terdiri dari beberapa tahap, yaitu: *data managing, reading and memoing, describing, classifying, interpreting, serta representing and visualizing*. Peneliti mengorganisasikan data berupa rekaman dan transkrip wawancara ke dalam sejumlah file. Kemudian peneliti membaca seluruh data secara mendalam sambil membuat catatan-catatan yang diperlukan. Selanjutnya, peneliti menyusun narasi rinci mengenai pengalaman dan pemaknaan pribadi para informan, lalu mengelompokkannya berdasarkan jenis-jenis makna untuk memudahkan tahap penafsiran. Di tahap penafsiran dikembangkan deskripsi tekstural mengenai “apa yang terjadi” dalam tindakan perlawanan kolektif repertoar yang dilakukan oleh petani Rengas dan deksripsi struktural yang berbicara mengenai “strategi dan taktik dialami dan kemudian dimaknai secara subjektif oleh para aktor yang terlibat,” serta benang merah yang menghubungkan pemaknaan subjektif masing-masing aktor tersebut sehingga terbangun suatu deskripsi yang akhirnya, pada tahap penyajian dan visualisasi, peneliti menyusun narasi yang menggambarkan esensi proses yang berlangsung sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Di samping uraian naratif, ikhtisar data dan analisis disajikan pula dalam bentuk tabel dan skema untuk mempermudah pembaca memahami data berikut analisisnya.

Dalam proses pengumpulan dan analisis data, peneliti selalu melakukan dialog dengan hasil data untuk memahami dan

---

<sup>127</sup> Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2<sup>nd</sup> ed. California: Sage Publications, 2007, hal: 20-32

menjelaskan tindakan perlawanan kolektif dan perubahan bentuk strategi dan taktik perlawanan. Semua ini berkonsekuensi pada proses interpretasi. Pilihan ini didasarkan pada asumsi menempatkan sejarah perjuangan dari petani Rengas dengan tindakan kolektif perlawanan petani Rengas dan perubahan bentuk taktik perlawanan sebagai hasil interpretasi dan bekerjanya proses pemaknaan antar aktor-aktor yang terlibat di dalam aksi-aksi perlawanan. Peneliti juga lebih menekankan pada obyektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Analisis ini sendiri lebih menekankan pada :

- a. Pemahaman tindakan perlawanan kolektif melalui interaksi;
- b. Memahami konteks perlawanan dan trekjadinya repertoar
- c. Bagaimana memahami pengalaman informan;
- d. Bagaimana informan membuat dan membagi pemahaman terkait dengan keberlangsungan perlawanan petani Rengas.

Analisis interpretasi ini mencoba mengetengahkan dimensi-dimensi yang terabaikan ke dalam analisis sosiologi yakni analisis aspek-aspek sosial, budaya, material dengan memahami makna sesuai situasi historis atau sosial yang melihat *social cultur world* (lingkungan sosial kultur) sebagai suatu fenomena yang dibentuk oleh manusia.

Dalam penelitian ini data-data yang dimaksud seperti risalah kepemilikan lahan petani Rengas, risalah pengambilan lahan secara paksa oleh PTPN VII, risalah perbedaan tradisi pengukuran dalam kehidupan petani Rengas, penghargaan dan martabat petani Rengas terhadap tanah sebagai sumber kehidupan, mata pencarian dan ruang kehidupan sosial budaya lainnya, tokoh masyarakat kharismatik dan vocal yang memiliki kekuatan mengajak, menghargai dan merubah martabat kehidupan petani Rengas.

Fokus analisis ini terletak pada apa yang disebut *shared meaning* (pemaknaan berbagai hal) dalam suatu proses sosial.

Diharapkan dapat menjelaskan kebermaknaan berbagai kondisi dan hubungan yang ada dan secara implisit membentuk repertoar baru berulang. Dengan analisis interpretasi akan diperoleh makna sebenarnya (*the deepest insights*) tentang tindakan-tindakan yang terjadi pada tindakan perlawanan kolektif dan perubahan yang terjadi didalam strategi dan taktik baru dan kaitannya dengan perubahan sosial yang diharapkan.

Peneliti akan melakukan investigasi, yaitu secara bertahap peneliti berusaha memahami gejala-gejala sosial dengan membedakan, membandingkan, mengkatalogkan, dan mengelompokkan obyek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi dengan informan, dan mencari sudut pandang informan. Diantara data-data lapangan yang diinvestigasikan sebagai data interaktif penelitian ini adalah tindakan perlawanan yang dilakukan dari tahun ke tahun, tempat satu dengan tempat lainnya, aktor dalam satu tindakan perlawanan dan tindakan lainnya, perubahan strategi dan taktik, bentuk dan proses, capaian tujuan satu dengan tujuan lainnya, repertoar satu dengan repertoar lainnya, dan konten tindakan perlawanan yang dilakukan oleh petani kaitannya dengan solidaritas kolektif dan identitas kelompok perlawanan .

Sementara itu, dialog antara temuan penelitian dengan kerangka teoretik yang

digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Bab 5, Bab 6 dan Bab 7. Pada akhirnya, peneliti melakukan refleksi teoretik, menarik kesimpulan tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan saran untuk penelitian lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian ini.

## **BAB IV**

---

### **SETTING KEHIDUPAN MASYARAKAT RENGAS**

#### **4.1. Pengantar**

Pada bab ini akan diuraikan kondisi daerah penelitian di desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Sumatera-Selatan. Aspek yang dilihat yakni perolehan lahan perkebunan PTPN VII, hubungan PTPN VII dengan masyarakat dan keadaan interaksi sosial masyarakat Rengas yang hidup dalam suasana perseteruan antara petani dengan PTPN VII.

#### **4.2. Dinamika Kehidupan Masyarakat Rengas**

##### **4.2.1. Risalah Asal Muasal Lahan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis**

Kasus sengketa lahan di Kabupaten Ogan Ilir yang banyak perhatian berbagai kalangan adalah kasus sengketa yang terjadi di Desa Rengas Kecamatan Payaraman. Sengketa terjadi antara PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat Desa Rengas. Kasus ini bermula sejak masuknya PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis pada tahun 1981 yang melakukan penyerobotan tanah ulayat milik masyarakat Desa Rengas seluas 2.353 Ha. Pada tahun 1982, PTPN VII Cinta Manis mulai beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di Kecamatan Tanjung Batu, termasuk wilayah Desa Rengas. PTPN VII Cinta Manis didirikan berdasarkan SK Mentan No. 076/Mentan/I/1981 pada tanggal 2 Februari 1981 tentang izin prinsip pendirian perkebunan tebu dan pabrik gula di Sumatera Selatan sejalan dengan swasembada gula yang saat itu sedang diupayakan pemerintah. SK Mentan tersebut kemudian diikuti oleh

SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981, perihal pencadangan tanah negara seluas 20.000 ha untuk Proyek Pabrik Gula di Kecamatan Tanjung Raja, Muarakuang, Indralaya, dan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Izin operasi tersebut juga disertai dengan Surat Tugas Bupati KDH Tingkat II OKI No: AG.210-243/1982 tanggal 10 April 1982 untuk mengadakan inventarisasi tanah, tanam tumbuh, dan bangunan rakyat pada lokasi yang akan dibebaskan oleh PTP XXI-XXII (Persero) di Marga Tanjung Batu, Meranjat, Lubuk Keliat, dan Marga Rambang IV Suku di Kecamatan Tanjung Batu dan Muara Kuang.

Tanah seluas 20.000 Ha yang masuk dalam wilayah operasi PTPN VII ternyata mencakup tanah ulayat masyarakat desa Rengas. Ini berarti tanah perkebunan milik masyarakat desa Rengas yang diusahakan PTPN VII seluas 2.353 Ha. Sementara yang diganti rugi oleh pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis hanya seluas 824 Ha, sedangkan sisanya seluas 1.529 Ha tidak diganti rugi.

Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik yang terjadi selama lebih dari 30 tahun. Petani yang saat itu mencoba melawan diancam akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Untuk sebagian petani yang saat itu tanahnya dirampas, hal yang paling kuat menjadi alasan petani tidak pernah bisa menerima penawaran apapun dari PTPN VII Cinta Manis adalah karena petani tidak bisa menerima dan melupakan bagaimana kejamnya pihak PTPN VII Cinta Manis merampas tanah mereka.

Ada tanah petani yang tidak bersedia menerima ganti rugi pada saat itu sedang ditanami karet, nanas dan padi tapi karena tetap tidak bersedia menerima ganti rugi semua tanaman yang tumbuh pada saat itu baik karet, nanas, maupun padi langsung

dimusnahkan dengan alat berat. Kondisi inilah yang menjadi awal terjadinya konflik berkepanjangan antara petani Rengas dengan PTPN VII Cinta Manis.

#### **4.2.2. Hubungan PTPN VII dengan Masyarakat Rengas**

Pabrik Gula Cinta Manis adalah salah satu dari 27 Unit Usaha PT. Perkebunan yang mengusahakan komoditi Tebu dan Pabrik Gula berlokasi di Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir – Sumatera Selatan. Pusat Kegiatan unit usaha cinta manis PTPN VII, secara administratif terletak di Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir (75 Km arah selatan Kota Palembang) Provinsi Sumatera Selatan, dengan letak :

Posisi : 104°-110° BT dan 3°-15°LS

Topografi : Bervariasi dari rata, landai sedang dan berbukit.

Ketinggian : 10-20 meter di atas permukaan air laut.

Sejak kehadiran PTPN. VII unit usaha Cinta Manis yang dulu dikenal dengan nama PT. XXI. XXII, kehidupan warga desa Rengas mulai berubah. Lahan pertanian banyak dikuasai oleh pihak perusahaan yakni sekita 2.386 Ha untuk tanaman tebu, selebihnya sekitar 30% yang terletak didekat pemukiman penduduk masih dimiliki dan ditanami. Akses lahan sebagai sumber kehidupan turun-menurun warga sangat terbatas membuat warga Rengas berubah dari petani kebun menjadi buruh tani dan penyewa lahan.

Hanya sebagian kecil saja yang masih memiliki lahan yang tersisa 10% dengan rata-rata kepemilikan lahan 1 Ha yang ditanami padi dengan 1 kali panen, karet mulai menyadap tahun ke 5 dan kebun nanas dengan 2 sampai 3 kali panen selama 3 Bulan. Disis lain banyak warga yang akhirnya menjadi buruh harian lepas diperkebunan dengan upa 13.000,-/ hari. Berdasarkan hasil obeservasi setidaknya hanya ada 2 orang warga Rengas yang

menjadi karyawan tetap PTPN.VII dan 15 orang warga menjadi karyawan musiman. Pada umumnya tenaga kerja di perusahaan diambil dari luar wilayah desa Rengas yakni Jawa dan Lampung.

Hal ini berarti lahan pertanian yang luas tidak bisa diakses oleh petani desanya sendiri. Seiring dengan perkembangan, jumlah penduduk makin bertambah, kebutuhan ekonomi makin meningkat namun lahan pertanian berangsung berkurang.

Hal ini yang membuat kehidupan masyarakat desa semakin terjepit secara ekonomi. Bahkan menurut Firli<sup>128</sup>, hal itu bisa dilihat, dari jumlah tenaga kerja yang 70 % didatangkan dari luar. Kemudian, sungai yang tadinya bisa dijadikan tempat mencari ikan, kini sudah tercemar dan ikan-ikan sudah mulai punah akibat limbah. Selanjutnya, debu pembakaran tebu dari pabrik gula PTPN VII masuk ke pemukiman warga dan mengganggu aktivitas. Mat Amin menambahkan dengan cara memanfaatkan aliran sungai, mereka mulai bercocok tanam padi, balam, nanas dan jenis palawija lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rupanya keindahan masa bercocok tanam itu sirna, ketika tahun 1981-1982, PTPN VII Cinta Manis *mencuri paksa* tanah mereka. Selain harus kehilangan lahan pertanian, sungai yang selama ini menjadi andalan pun perlahan mulai alami kekeringan.

Menurut Ferdy<sup>129</sup> menambahkan bahwa saat ini cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani Rengas mulai dari kepemilikan lahan yang rata-rata hanya 0,3 Hektare per KK, kriminalisasi petani, sistem perdagangan hasil tani yang tidak adil bagi petani, hingga ketergantungan petani kepada “kebaikan PTPN VII”. Ini semua berawal dari tanah mereka yang dirampas oleh PTPN VII pada tahun 1982. Waktu itu PTPN VII membuka

---

<sup>128</sup> Ketua SPSI Ogan Ilir. Warga asli Rengas, Tokoh Pejuang Rengas, saat penelitian ini sedang dilapangan Firli meninggal dunia tahun 2011.

<sup>129</sup> Saat ini menjabat sebagai ketua SPSI Ogan Ilir.

perkebunan tebu. Mereka mengambil tanah rakyat secara paksa (lewat bantuan militer). Memang ada ganti rugi tetapi hanya tanah yang ada tanam-tumbuhnya saja yang diganti rugi. Yang tidak ada tanam tumbuhnya harus menunjukkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT).

Janji memperkerjakan masyarakat sekitar perkebunan tebu secara layak dan tetap masih belum terealisasi sama sekali, apalagi janji akan membuat perkebunan tebu dengan system inti flasma juga sama sekali belum terbukti ada.

#### **4.2.3. Sistem Pengelolaan Lahan Masyarakat Rengas**

Sistem pengelolaan tanah Petani di Ogan Ilir sebelum masuknya PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis pada tahun 1981 adalah secara turun temurun menggarap tanah mereka. Caranya dengan tebas, tebang, bakar dan tanam. Tanah dikelola pada umumnya sebagai kebun karet, sementara karet masih kecil ditumpang-sarikan dengan padi atau nanas. Padi yang ditanam menurut kebiasaan warga adalah padi talang. Satu cara mengetahui kepemilikan atas lahan adalah setiap orang baik secara kekerabatan atau bertetangga mengetahui di mana dan mana batas-batas tanah untuk setiap orang lainnya.

Batas antara seorang petani dengan petani lainnya biasanya ditandai dengan rumpun bambu di empat sisi dari sudut lahan. Sisi-sisi ini disebut dengan ke laut untuk arah ke sungai atau payau, ke darat arah yang berlawanan dengan arah sungai atau payau, ke ulu untuk menyebut arah ke hulu sungai atau payau, dan ke ailiran untuk menyebut arah yang menuju bagian hilir aliran sungai atau payau. Sungai atau payau, atau mereka menyebutnya dengan payo, ini juga yang menjadi penanda wilayah di man sehampanan tanah berada. Payo-payo yang memiliki nama-namanya sendiri ini sangat banyak membentuk pola

bagaikan urat di tengah hamparan tanah yang sekarang menjadi perkebunan tebu milik PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

#### **4.2.4. Sistem Pengukuran Batas Tanah Masyarakat Rengas**

Dalam tradisi yang berlaku di suku panesak Ogan Ilir Untuk urusan ukuran luas masyarakat di sini tidak menggunakan satuan metrik kubik, tetapi menggunakan satuan ukuran depa (depo), satuan itupun hanya berdasarkan perkiraan sejauh mata memandang.

Dalam keseharian ketika membicarakan luas umo (beumo) masyarakat Rengas terkadang mengukurnya dengan berapa banyaknya benih padi yang ditanam dalam hitungan perkaleng. Biasanya sekalibeumo mereka mampu mengolahtanah seluas 3-5 kaleng benih padi yang dalam satuan metrik bisa melebihi satu hektar. Setelah karet mulai besar, di tahun ke 3, mereka pindah ke tempat lain yang tidak terlalu jauh atau malah berbatasan langsung dengan tanah yang diolah pada tahun pertama.

Begitulah secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat Rengas, bagi yang tidak memiliki tanah yang diwarisi dari orang tua, bisa mengerjakan tanah orang lain. Menanam karet tumpangsari dengan padi dan atau nanas, hanya saja dalam kasus ini karet menjadi milik pemilik tanah, sedangkan tanaman lainnya menjadi milik yang mengolah. Penanaman karet yang dilakukan Padi talang adalah sebutan asli untuk padi yang ditanam di tanah talang. Padi ini tumbuh dan memiliki tinggi yang hampir menyamai rata-rata tinggi orang dewasa. Mereka memanennya dengan cara dituai dengan ani-ani dan sebagian dilurut, yaitu dirontokkan dengan menggunakan tanpa memotong tangkai padi dari batangnya.

Bambu dipilih karena daya tahannya terhadap api, bambu akan tumbuh kembali dari rumpunya yang sudah terbakar. Petani

Ogan Ilir, bahkan di Sumatera Selatan, menggunakan kata umo untuk menyebut kebun. Kaleng yang dimaksud adalah kaleng minyak goreng yang biasa ditemukan di Sumatera Selatan. Di sela-sela karet mereka juga menanam tumbuhan lain seperti jengkol, petai, dll. Tidak jarang jika musim kemarau panjang, kebun yang sudah mulai ditinggalkan, karena karet yang sudah mulai tumbuh besar, terbakar dan akhirnya hanya ditumbuhi ilalang atau sisa-sisa rumpun bambu yang menjadi penanda batas tanah. Masing-masing desa yang mempunyai sistem kepemilikan tanah yang hampir sama dengan beberapa kekhasan untuk beberapa desa. Misalnya di desa Ketiau dan Tanjung Atap.

#### **4.2.5. Perbedaan Ukuran antara Masyarakat Rengas Vs PTPN VII**

Dalam proses pengukuran di desa Rengas pada tahun 1980-1983, terjadi perbedaan cara mengukur luas tanah antara petani dan PTPN VII yang berakibat pada perbedaan perhitungan luas tanah yang diganti rugi. Hamparan tanah yang luas itu dipenuhi oleh aliran sungai kecil yang disebut dengan payo atau benca. Pihak PTPN VII ternyata tidak memasukkan bagian pinggir payo selebar 25 meter di masing-masing sisi payo yang dengan demikian terjadi pengurangan 50 m dikalikan dengan panjang payo.

Menurut PTPN VII bagian ini tidak dihitung karena tidak cocok untuk ditanam tebu padahal, tetapi tetap masuk ke dalam areal perkebunan dan tidak bisa diakses oleh petani. Namun kenyataannya pada bagian tersebut ditanami dengan sawit. Perbedaan ini juga bagian yang sering diprotes oleh petani karena perbedaan cara menghitung ini berimplikasi pada cara menghitung luasan lahan yang dikuasai PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang menurut sebagian petani mendekati angka 30.000 Ha.

Berdasarkan dokumen milik Petani Rengas<sup>130</sup> baru sekitar 20% lahan yang diganti-rugi, maka sebagian warga, waktu itu, yang merasa tidak puas dan merasa memiliki hak atas tanah, melakukan aksi-aksi penolakan dan protes ke PTPN VII dan ke Bupati Ogan Komering Ilir. Pada saat persoalan ganti-rugi belum terselesaikan dan persoalan perbedaan ukuran belum menemukan kesepakatan, PTPN VII melalukukan pembersihan lahan di tahun 1982, hamparan tanah yang sangat luas ini, di antara pohon --pohon karet yang masih kecil, sedang dipenuhi oleh padi yang sedang menguning dan siap dituai. Ada juga yang sedang ditanami nanas yang mulai menghitam. Proses negosiasi para petani dengan pihak perusahaan (perusahaan pembersih bukan Cinta Manis) tidak bisa menyelamatkan padi dan nanas yang menjadi tumpuan penghidupan mereka. Alat alat berat menggusur habis apapun yang ditemukan dengan dikawal oleh seorang Pesirah dan pihak ABRI.

Pembersihan itu terkadang dilakukan di malam hari untuk menghindari usaha --usaha menghalangi yang dilakukan petani di siang harinya. Ada juga yang tidak ada tanam --tumbuhnya, seperti di desa Tanjung Batu dan Ketiau. Di desa ini kebanyakan tanah hanya ditumbuhi ilalang. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah, tanah yang tidak ada tanam-tumbuhnya tidak mendapat ganti rugi. Seperti yang dituturkan oleh DH:

Pado tahun 1980 pado waktu itu, Kerio (Kerio Waidi) mengumumkan di mesjid seperti ini siapa yang merase ade tanah di daerah Cinta Manis itu, bilang dianyo, kito berduyun duyun ke sano untuk mematoki tanah. Itu hari jumat, dia mengumumkannyo di Mesjid. Siapa iko yang meraso ado tanah, patok! Kito urang nak betanam tebu. Baduyun--

---

<sup>130</sup> Berita Acara dan Laporan Upaya Petani Rengas Terhadap PTPN VII tahun 1990.

duyun pada waktu itu masyarakat turun ke lapangan matok tanah. Setelah dipatok tanah, baru ngadokan tim pengukuran, setelah diukur oleh tim , aku terus ngikuti itu, ado pulo pengumuman kalu yang yang dak katek tanam - tumbuh tak dapat ganti rugi”.

(Waktu itu, hari jumat, kerio (sekarang kepala desa) mengumumkan di mesjid barang siapa yang punya tanah di area yang bakal dijadikan perkebuanan tebu cinta manis agar segera menandai tanahnya. Kemudian dilakukanlah pengukuran oleh tim 9. tak berapa lama kemudian ada pengumuman baru bahwa tanah siapa saja yang tidak ada tanam tumbuh di atasnya tidak akan mendapatkan ganti rugi)<sup>131</sup>.

Sebagian petani, yang mempunyai cukup keberanian meminta penundaan penggusuran yang dilakukan dengan alat berat, namun proses itu tetap saja berlanjut bahkan ada yang digusur di malam hari. Dengan didampingi oleh seorang pesirah yang menjabat waktu itu, Pesirah Raden Mustofa, alat berat menggusur tanaman petani tanpa memberikan waktu kepada petani untuk memanen padi atau nanas tumpuan hidup mereka. Perlawanan terjadi, warga Rengas menolak, kerio yang menjabat waktu itu sempat ditangkap dan dipanggil ke kantor Kodim Ogan Komering Ilir<sup>132</sup>.

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Duhro (72 TH) di desa Rengas pada tanggal 27 Nopember 2010.

<sup>132</sup> Bagian tulisan ini di ambil dari laporan Nor Fauzi Rahman dalam pembelaan saksi ahli dipersidangan pengadilan negeri Palembang tahun 2012 atas kasus Anwar Sadat.cs.

#### **4.2.6. Kondisi Kelembagaan Sosial, Keagamaan dan Kepemudaan**

Pada masa kondisi prakrisis, krisis dan konfrontasi, komunikasi dan interaksi sosial sangat tertutup dan kaku antara petani dengan PTPN VII yang selalui di back up oleh aparat keamanan yang berbeda sesuai dengan era pemerintahan. Pada masa Orba yang memback up adalah ABRI sementara pada era Reformasi yang memback up dari kepolisian dan keamanan perusahaan. Kondisi tersebut mempengaruhi juga interaksi sosial dan aktivitas lembaga-lembaga sosial di Rengas. Namun sejak aksi perlawanan reklamings terjadi dan pasca konfrontasi berdarah dan mulai terlibatnya berbagai LSM seperti Serikat Petani Indonesia basis Rengas, Walhi dan LBH Palembang, kondisi kelembagaan sosial kepemudaan mulai pulih, bangunan komunikasi dan interaksi sosial dalam masyarakat Rengas mencair. Kondisi ini mendukung terbentuknya berbagai lembaga sosial baru dalam masyarakat.

Pengajian di Masjid Ar-Rahmah merupakan lembaga sosial yang sudah lama ada di Rengas ketika masa krisis lembaga ini menjadi pusat penggodokan informasi dan strategi perjuangan, begitu pula dengan arisan adalah lembaga sosial yang telah lama ada dalam masyarakat Desa Rengas. Namun, selama masa krisis kegiatan arisan ini hanya diikuti oleh beberapa ibu saja. Setelah konfrontasi berdarah tahun 2009 dan ada jaminan dari pemerintah daerah bahwa lahan yang dikuasai PTPN VII untuk sementara distatus quokan. Semakin banyak masyarakat yang menetap di desa dan kelompok arisan semakin bertambah ketika penelitian ini berlangsung paling tidak KK yang mengikuti arisan tercatat berjumlah 25 kelompok.

Kegiatan pengajian dan arisan saat ini dilakukan bersamaan dengan pengajian, yang berarti telah terjadi peningkatan intensitas kegiatan. Sementara Karang Taruna dan Kontak Tani sudah

terbentuk sebelum konflik Rengas terjadi. Namun, kegiatannya lebih kepada kepentingan desa dan tidak terkait atau terlibat dalam masalah pertanahan. Kegiatan kepemudaan meningkat dengan munculnya SPI, FPR dan BPMR yang merupakan organisasi nonformal yang terbentuk pada akhir tahun 2009 setelah kejadian penembakan terhadap puluhan warga Rengas.

Organisasi ini dibentuk berdasarkan usulan dan saran dari pihak pendamping yang saat itu membantu masyarakat untuk berjuang dan mengambil kembali tanah mereka. Tujuannya jelas sebagai proses advokasi, pendampingan serta melengkapi perjuangan warga yang selama ini telah terbangun bersama generasi muda Rengas. Sebagaimana table;

**TABEL 4.1 LEMBAGA SOSIAL YANG BERKEMBANG**

<i>Lembaga Sosial</i>	<i>Fase Krisis/konflik Berlangsung</i>	<i>Pasca Krisis/ Setelah Konflik</i>
1. Kontak Tani	Ada/Fasif	Ada/Aktif
2. Pengajian Masjid Ar-Rahmah	Ada/Aktif	Ada/Aktif
3. Arisan Keluarga	Ada/Fasif	Ada/Aktif
4. Karang Taruna	Ada/Fasif	Ada/Aktif
5. Serikat Petani Ogan Ilir (SPIOI)®	<b>Tidak Ada</b>	Ada/Aktif
6. Barisan Tani Menghadang Rengas (BTMR)	<b>Tidak Ada</b>	Ada/Aktif
7. Front Pemuda Rengas (FPR)		

Sumber : Data penelitian 2013<sup>133</sup>

<sup>133</sup> SPIOI lahir setelah terjadinya konfrontasi berdarah 4 Desember 2009, organisasi ini telah melahirkan dua organisasi yang berbasis lintas desa yakni BTMR dan FPR, kedua organisasi ini merupakan hasil advokasi dan pendampingan SPI. Dipilih tanggal 4 Desember 2009 adalah memperingati dan menghormati petani yang menjadi korban penembakan oleh Brimoda Sum-Sel dan sekaligus sebagai hari jadi perlawanan petani Rengas.

Gambar di atas menjelaskan bahwa masa perlawanan dengan konfrontasi sedang berlangsung tercatat hanya ada empat lembaga sosial di desa Rengas I dan II, yaitu kontak tani, pengajian, arisan dan karang taruna. Hanya lembaga pengajian masjid Ar-Rahmah yang ada dan aktif menjalankan kegiatan sebagaimana adanya.

Di akhir tahun 2009, selain keempat lembaga sosial tersebut, tumbuh dan berkembang satu lembaga pioneer dan dua lembaga hasil pendampingan yakni Serikat Petani Indonesia Ogan Ilir (SPIOI) dan Front Pemuda Rengas (FPR) serta Barisan Petani Menghadang Rengas (BPMR).

#### **4.2.7. Elit dan Pelapisan Sosial**

Pada umumnya status kelompok elit sering disandarkan pada kategori pekerjaan dan kekayaan yang dimiliki. Kedua hal ini seringkali dijadikan ukuran status sosial seseorang dalam masyarakat di lingkungan kehidupannya. Dengan status sosial yang dimiliki, dalam sejumlah hal, memiliki kemampuan untuk “memerintah dan mempengaruhi” orang lain.

Dalam kehidupan masyarakat di desa Rengas dan di Kecamatan Payaraman cara pandang dan perilaku warga masih menempatkan status sosial diukur dari kekayaan dan pekerjaan yang dimiliki. Seseorang “kaya” dapat dipandang sebagai kelompok elit, sebab dianggap memiliki beberapa kemudahan kehidupan di tengah masyarakat. Kemudahan itu dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sosial ekonomi sehingga mendapatkan “penghormatan” dari lapisan sosial lainnya.

Namun ada juga sebagian masyarakat di desa Rengas dan di Kecamatan Payaraman berpandangan berbeda terkait status sosial “elit” berdasarkan kekayaan dan pekerjaan. Hasil pengamatan mendalam dan analisis persepsi dan pemahaman masyarakat Rengas umumnya bahwa orang “kaya” akan dianggap memiliki

status sosial sebagai “elit” yang dihormati bila orang tersebut memiliki perilaku dan tata kehidupan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Seorang distatuskan sebagai “elit” adalah orang yang memiliki kekayaan dan tidak berperilaku melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa Rengas. Jika seorang kaya, namun tidak berperilaku sesuai dengan nilai dan norma, maka dianggap orang tersebut bukan “elit” dan tidak pantas memperoleh perlakuan yang dihormati.

Nilai dan norma yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat desa Rengas dan di Kecamatan Payaraman umumnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial keagamaan Islam dan norma-norma adat melayu. Sebagai contoh bila seorang kaya dan memiliki pekerjaan namun perilaku kehidupannya sering melakukan sabung ayam atau sering mengambil hasil panen nanas di atas kewajaran, maka orang tersebut dianggap tidak elit dan tidak pantas dihormati. Dari persektif masyarakat desa Rengas status sosial seorang akan lebih bermartabat dan terhormat jika diikuti dengan perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan Islam.

Status sosial juga sering didasarkan pada jenis pekerjaan seorang, hal ini juga terjadi dalam penilaian masyarakat desa Rengas. Bagi masyarakat dipandang “elit” tidak sekedar memiliki harta kekayaan tetapi jenis pekerjaan juga menentukan. Tentu saja hal demikian berlaku kesesuaian norma dan perilaku sehari-hari. Jenis pekerjaan yang dianggap sebagai memiliki status sosial “elit” oleh masyarakat Rengas adalah pekerjaan formal seperti: PNS, TNI/Polisi, BUMN dan pekerjaan non formal seperti: agen buah atau sayur, ustadz, kyai, pengasuh pesantren.

Pada tingkat desa bahkan Kecamatan peran kelompok berstatus sosial seperti ini sangatlah menonjol bahkan aktif. Berbagai kegiatan pembangunan sosial, ekonomi, keagamaan dan pendidikan pada umumnya dikuasai dan dikelola oleh kelompok ini. Fakta lapangan menunjukkan bahwa aktifitas desa dan organisasi yang ada seperti karang taruna, pengajian, kesenian dan olahraga dan kegiatan lainnya dapat berkembang dengan baik. Kelompok elit berdasarkan status pekerjaan ini berkiprah lebih dominan dalam kegiatan kesejahteraan, sosial dan pendidikan.

#### **4.2.8. Pertambahan dan Penyebaran Penduduk desa Rengas**

Dalam masyarakat Rengas yang bersuku panesak masih memegang aturan ke margaan meskipun sistem ke marga sudah dihapuskan semenjak tahun 1983 oleh pemerintah Orde Baru melalui Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini melakukan penyeragaman struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Bahkan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan sistem *marga* di Sumatera Selatan. Hadirnya SK Gubernur tersebut sangat dipengaruhi oleh UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam UU 5/1979 ini secara tegas mengarah pada hegemonisasi bentuk dan susunan Pemerintahan *marga* dengan corak nasional (Jawa) yaitu desa. Sehingga terjadi konversi *marga* ke dalam struktur desa yang merupakan model pengorganisasian masyarakat menurut sistem Jawa.

Sistem peradatan *marga* merupakan susunan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat, serta mempunyai wilayah tertentu. *Marga* hidup menurut adat yang berlaku menjiwai kehidupan warganya, masyarakat dan pemerintahnya. Selain itu masyarakatnya juga mempunyai ikatan lahir batin yang kuat, yang

sejak awalnya telah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dilihat dari bentuk pemerintahannya, *marga* merupakan komunitas asli atau yang disebut masyarakat adat yang berfungsi sebagai *self governing community*, yaitu sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri. Mereka memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum, dan acuan yang jelas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, serta tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar, karena memang mereka bisa melakukan segala sesuatunya sendiri<sup>134</sup>.

Pertambahan ataupun penyebaran penduduk, merupakan salah satu penyebab terjadinya pemekaran suatu penduduk dalam suatu *marga*. Karena pemekaran itu, maka jumlah penduduk dalam *marga* selalu bertambah dari masa ke masa. Menurut H.Misbahudin (70 TH) menuturkan sebagai berikut;

Pado tahun 1980-1990 iko urang diri di marga Rengas paling banyak 200-300 KK. Lahan dan peumahan masih banyak dimiliki oleh kekerabatan atau sanak taulandan yang saling menahui urong''

(Tahun 1980-1990 jumlah penduduk 200-300 KK. Lahan masih luas, kepemilikan saling kenal satu dengan lainnya) <sup>135</sup>.

---

<sup>134</sup> Dalam pemerintahan Marga aturan-aturan yang dipakai mengacu pada undang-undang Simbur Cahaya, begitu juga dalam pengaturan pemerintahannya. Pemerintahan Marga dalam undang-undang Simbur Cahaya terdiri dari beberapa dusun, sedangkan dusun terdiri dari beberapa kampung. Masing-masing unit sosial ini dipimpin oleh seorang *Pasirah*, *Kerio* dan *Penggawa*. *Pembarap* ialah kepala dusun (*Kerio*) dimana seorang pasirah tinggal. Seorang *Pembarap* mempunyai kekuasaan untuk menggantikan seorang *Pasirah* apabila *Pasirah* berhalangan hadir dalam suatu acara/kegiatan. *Pasirah* dan *Kerio* dibantu oleh *Penghulu* dan *Ketib* dalam penanganan urusan religius atau keagamaan. *Kemit* Marga dan *Kemit* dusun ditugaskan untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan keamanan

<sup>135</sup> Wawancara dengan H.Misbahudi, tanggal 17 Nopember 2010.

Meskipun berkembang dalam jumlah, tetapi dalam norma dan nilai tetap bertahan sebagai suatu simbol yang dilakukan dan di teruskan di dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat Rengas. Dalam *marga* masyarakat memperoleh jaminan ketertiban dan keamanan, kepastian hukum, kepastian akan adanya peluang untuk menyalurkan bakat dan minat politik, peluang untuk mengatasi kebutuhan ekonomi, memperoleh kepastian jaminan hidup, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Secara bertahap dan sistematis, *marga* telah mengembangkan adat istiadat serta memiliki undang-undang khusus yang memuat berbagai aturan yang memang mencakupi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang kompleks. Sebagai suatu struktur sosial politik, *marga* memiliki kewenangan dalam pengaturan proses sosial dan budaya dalam masyarakat.

Adanya *marga* karena didorong oleh tiga faktor yaitu; penghuni atau warga yang bersangkutan sama-sama terikat pada daerah yang ditempati atau adanya perasaan terikat satu sama lainnya dengan alasan satu puyang (keturunan) atau karena penggabungan faktor teritorial dan geneologis. Dalam perkembangannya istilah *marga* mengalami proses modifikasi yaitu degenetisasi sehingga *marga* selalu dihubungkan kepada suatu wilayah dengan bentuk pemerintahan tertentu. Aspek yang menonjol dalam pembicaraan *marga* adalah aspek teritorial dan peradatan. *Marga* lebih sekedar aturan pemerintahan, kandungannya berkaitan erat dengan perilaku budaya masyarakat setempat yang menjangkau perilaku baik bersifat individual, kelompok maupun masyarakat luas, berlaku baik dalam kondisi harian maupun insidensial.

Dalam hal ini, terlihat dengan jelas bahwa *marga* membuat peraturan sendiri dan melaksanakan sendiri peraturannya, sungguhpun di bawah pengawasan suatu lembaga yang bersifat

supra-struktur yang berada di atasnya. Pada sisi lain, ditinjau dari sudut pandang masyarakat setempat, *marga* memang benar-benar memiliki peranan yang efektif sebagai pranata sosial-budaya yang asli dan yang tertinggi setelah lembaga keluarga, kampung, dan lembaga dusun. Sebagaimana di tempat lain, di Sumatera Selatan keluarga inti (*nucleus family*) yang dipertalikan oleh ayah dan ibu. Maka dalam keluarga inti terdapat ayah, ibu, dan anak-anaknya. Sedangkan keluarga yang diperluas (*extended family*) adalah lingkungan yang dipertalikan oleh kakek-nenek dan perbesanan atau hubungan akibat perkawinan. Dalam lingkungan keluarga yang diperluas ini selain keluarga inti, termasuk pula kakek nenek, paman bibi, saudara misan.

*Dalam tradisi Marga* panesak Rengas sistem marga menjamin kekerabatan keluarga tetap utuh dan dalam itu lingkungan, di mana suatu rumpun keluarga tertentu menghuni suatu tempat, dan menjadikan tempat itu sebagai tempat pemukiman kelompok mereka. Seiring dengan perjalanan waktu, jumlah anggota masyarakat dalam kelompok satu rumpun keluarga itu lambat laun bertambah. Pertambahan itu terjadi karena peristiwa alami di mana jumlah generasi baru yang lahir dan menetap di tempat itu lebih besar dari jumlah mereka yang pergi ataupun meninggal dunia. Karena tempat itu memberikan daya tarik dan memberikan jawaban atas kebutuhan ekonomis atau kebutuhan lainnya, maka kelompok itu bertambah jumlahnya karena pendatang adanya penduduk baru yang pindah dari tempat lain dan mencari penghidupan di sana.

Dalam pergaulan sehari-hari sikap keterbukaan, kejujuran amat dihargai, keakraban terus dijaga. Sementara kodrat jenis kelamin yang berbeda amat disadari. Pola pembentukan *marga* yang memperlihatkan kemauan masyarakat untuk membangun sistem sosialnya sendiri dan melestarikan berbagai hal yang terjadi

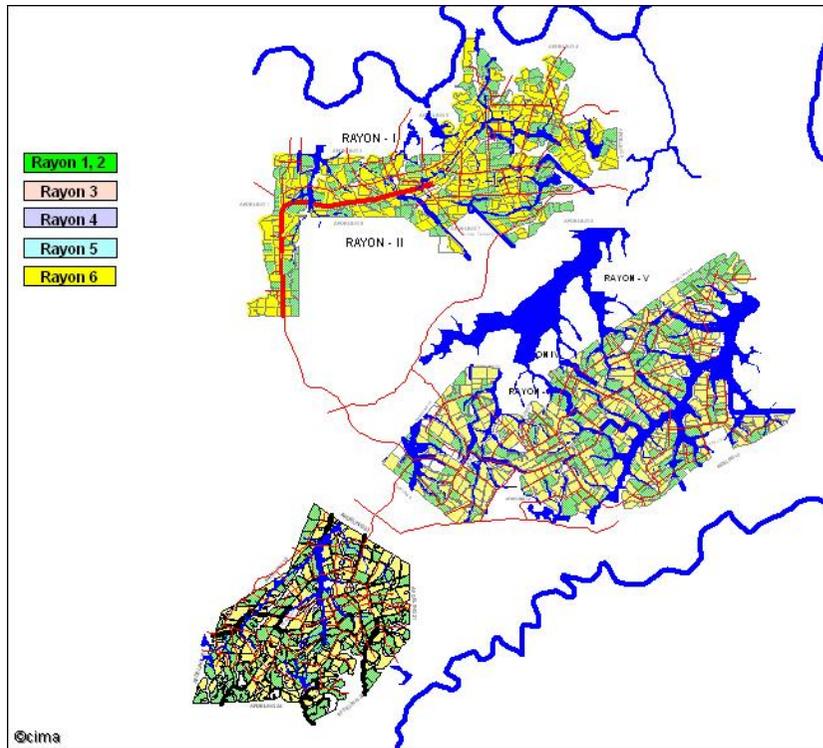
pada interaksi sosial menjelaskan kemauan yang tinggi untuk mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar.

Setiap orang mempunyai tanggungjawab atas tiap-tiap gerak atau kemajuan dalam lingkungan masyarakat adat di mana ia menjadi anggota. Setiap pelanggaran tata masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang mengganggu equilibrium di dalam kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan dalam masyarakat. Keadaan hidup bermusyawarah seperti ini membuat masyarakat yang bersangkutan sebagai satu kesatuan sosial yang memiliki, memelihara dan mempertahankan norma yang berlaku di dalamnya. Kesadaran tersebut menimbulkan pembagian tugas dalam masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan kemajuan dan aspirasi para anggotanya. Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat di desa Rengas cepat bertambah daripada merantau meninggalkan desanya<sup>136</sup>.

---

<sup>136</sup> Laporan BPS Ogan Ilir jumlah penduduk desa Rengas 800 KK atau 3.800 Jiwa di tahun 2010-2011.

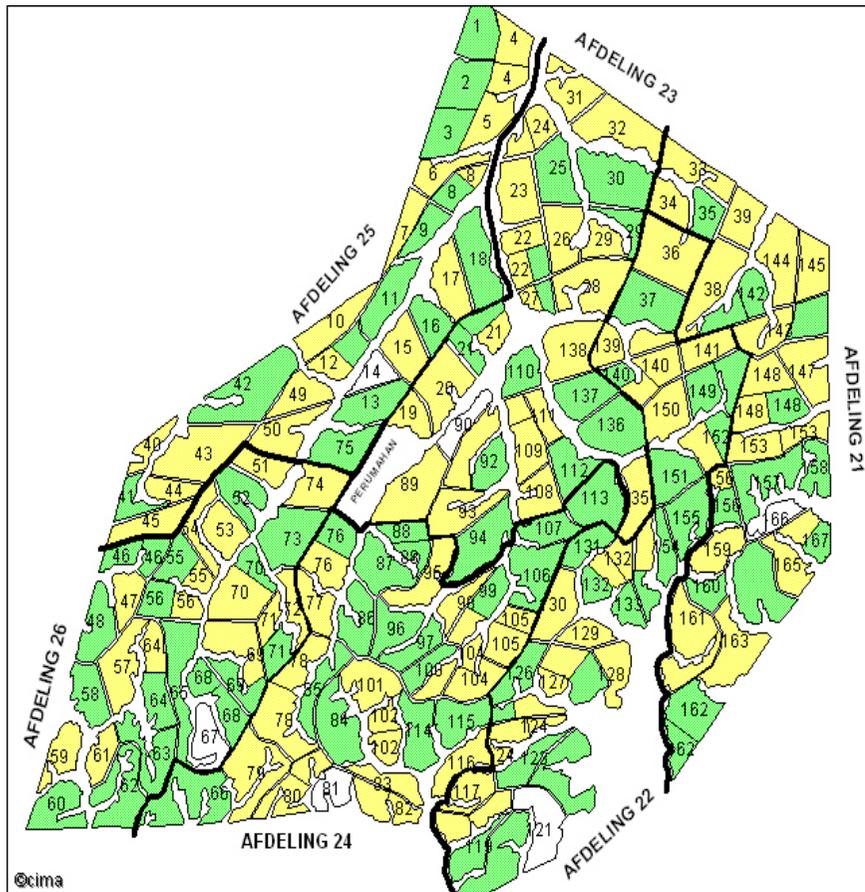
**GAMBAR 4.2 PETA LOKASI RAYON 1-V1 PTPN VII UNIT USAHA CINTA MANIS**



Sumber: Peta photo Satleit dari Cima INC 2009.

Keterangan gambar peta: peta diatas menjelaskan posisi area yang dijadikan perkebunan oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis berdasarkan sk gubernur nomor: 379/k/c/1981. Pembagian area perkebunan tebu dipecah menjadi 6 Rayon yakni; Rayon I dan II terletak di Desa Burai dan sekitarnya (60 Km dari pabrik) dengan topografi rata sampai landai. Rayon III, IV dan V berada di wilayah Desa Ketiau, Seri Bandung, Seri Kembang dan sekitarnya. Rayon VI berada di Desa Rengas dan sekitarnya (25 Km dari Pabrik) bertopografi landai sampai berbukit kecil.

GAMBAR 4.3 PETA AREA 32-33 RAYON VI DESA RENGAS



Sumber : Peta photo satelit Cima, INC tahun 2009

Keterangan : Peta area masyarakat desa Rengas yang bersengketa dengan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Area sengketa terletak di Rayon VI afdeling 25 dan 23 lokasi 32 dan 33. Garis tebal hitam menunjukan batas area afdeling berdasarkan sk 379/k.c.II.1981.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN TAKTIK PERLAWANAN SERTA CAPAIAN PERJUANGAN DI MASA ORDE BARU TAHUN 1981-1997**

---

#### **5.1. Pengantar**

Peristiwa repertoar dengan perlawanan (*repertoire of contention*) yang diikuti dengan perubahan strategi dan taktik perlawanan serta berdampak terhadap capaian perjuangan yang terjadi di masa Orde Baru menjadi focus pembahasan bab ini.

Pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam bab ini adalah mengapa strategi dan taktik perlawanan itu mengalami perubahan dalam menghadapi PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kedua dari penelitian ini yakni capaian dari perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas yang terjadi di masa Orde Baru dari tahun 1981-1997. Hasil jawaban dari kedua pertanyaan ini penting untuk mengetahui lebih dalam pewujudan repertoar dengan perlawanan (*repertoire of contention*) yang dilakukan petani Rengas terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dalam rentang waktu 1981-1997 di masa Orde Baru.

#### **5.2. Awal Mula Perlawanan Petani Rengas**

Kondisi dari awal-mula terjadinya tindakan perlawanan petani Rengas terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis adalah dilaksanakannya program swasembada gula Nasional tahun 1979. Program ini ditindaklanjuti dengan keluarnya surat menteri pertanian nomor: 076/Mentan/1/1981 tanggal 02 Februari 1981 perihal izin prinsip PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di daerah

Kabupaten Ogan Kemering Ilir dan Kabupaten Lamatang Ilir Ogan Tengah Sumatera-Selatan. Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II OKI nomor: PU.000/4117/1981 tanggal 27 Maret 1981 perihal pencadangan lahan untuk areal perkebunan tebu dan pabrik gula di Sumatera-Selatan.

Tindaklanjut keputusan Bupati dikeluarkan surat tugas Bupati Tingkat II OKI No. AG.210-243/1981 tanggal 10 April 1981 tentang pengadaan dan inventarisasi tanah, tanam tumbuh, dan bangunan rakyat terhadap lokasi yang akan dibebaskan oleh PTP XXI-XXII (Persero) di Marga Tanjung Batu, Meranjat, Lubuk Keliat, dan Marga Rambang IV Suku di Kecamatan Tanjung Batu dan Muara Kuang.

Berdasarkan keputusan Bupati dimaksud, maka proses legalisasi perolehan lahan ditindaklanjuti dengan SK Gubernur Sumsel No. 379/Kpts/I/1981 tanggal 16 November 1981, perihal pencadangan tanah Negara Seluas + 20.000 Ha, untuk proyek perkebunan tebu Nasional dan pendirian pabrik gula di Kecamatan Tanjungraja, Muarakuang, Inderalaya, dan Tanjung Batu, Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir.

Tindaklanjut dari SK tersebut adalah diadakanlah sidang panitia pembebasan tanah daerah tingkat II Ogan Komering Ilir tanggal 12 Februari 1982 mengenai transaksi ganti rugi tanah tanam tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan oleh proyek perkebunan tebu PTP XXI XXII (persero) yang terletak di Kecamatan Tanjung Batu dan Muara Kuang .

Proses pembebasan lahan milik masyarakat dilakukan yang dilakukan pemerintah dengan berbagai cara seperti: intimidasi, pemaksaan, penganiayaan, penekanan dan juga dengan ganti rugi yang tidak transparan sebesar Rp 150.000 perhektare. Khusus di

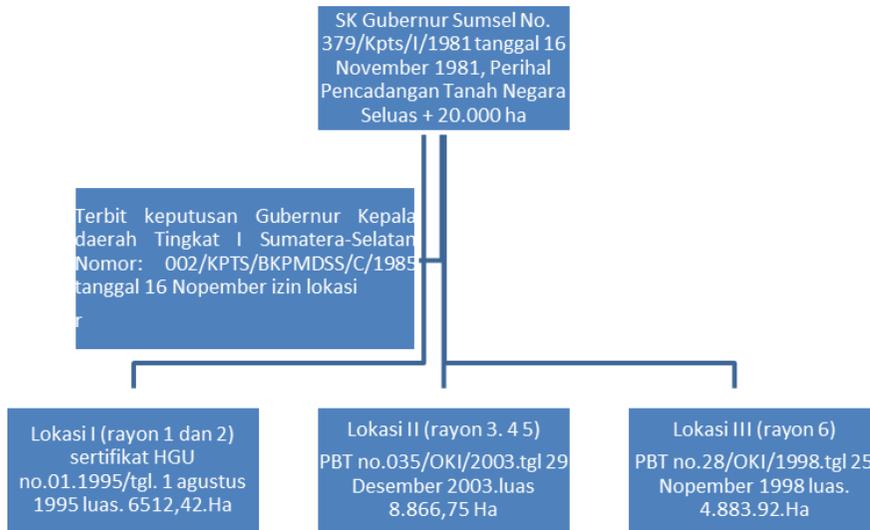
desa Rengas 1 dan 2 lahan yang digunakan untuk pengembangan areal tebu seluas 2.354 Ha dan yang disengketakan 1529 Ha.

Berdasarkan hasil kajian dokumen dari SK Gubernur Sumatera-Selatan, no: 379/Kpts/I/1981 tanggal 16 November 1981 tentang Pencadangan Tanah Negara Seluas +20.000 Ha dengan disertai diktum bahwa pencadangan Tanah Negara tersebut harus mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tanah tersebut hanya boleh diusahakan oleh PTP XXI-XXII untuk perkebunan tebu dan tidak dibenarkan menggunakan tanah tersebut untuk tanaman-tanaman lain baik sebagaimana atau seluruhnya kecuali atas persetujuan Gubernur Sumatera-Selatan.
- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini PTP XXI-XXII harus sudah melaporkan kemajuan proyek perkebunan tebu tersebut.
- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah permohonan penanaman modalnya disetujui, agar sepanjang hak-hak tanah berdasarkan adat (Hak Ulayat Marga)
- d. Pengusaha dan pengelola tanah baru dapat dimulai, apabila pembebasan dan pembayaran ganti ruginya telah diselesaikan dan PTP XXI-XXII diwajibkan mengajukan permohonan HGU kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jenderal Agraria melalui Gubernur Sumatera-Selatan.
- e. Tanah yang akan diusahakan untuk perkebunan tebu tersebut harus diukur secara teknis kadasteral dan dibuat peta pendaftaran tanah sub direktoral pendaftaran tanah. Berdasarkan ketentuan angka 1 (satu ) diatas seharusnya pihak PTPN VII unit usaha cinta manis mengurus terlebih dahulu HGU baru mengusahakan lahan, akan tetapi

perusahaan mengusahakan lahan terlebih dahulu baru mengurus HGU<sup>137</sup>.

### GAMBAR 5.1. RISALAH PEROLEHAN LAHAN PTPN VII RENGAS



Sumber: Data Olahan Penelitian 2013

Selanjutnya tahun 1982, PTPN VII (dahulu Perkebunan XXIDXXII), melakukan pembebasan lahan pencadangan seluas 19.526,3721 Ha. Pembersian lahan dimulai dengan menggunakan alat berat dan dikawal oleh aparat keamanan dari Kodim 402. Hamparan lahan yang luas menggusur seluruh tanaman petani Rengas tanpa tersisa. Kemudian diterbitkan keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera-Selatan Nomor:

<sup>137</sup> Misalnya dari hasil inventarisasi lahan, tanah rakyat di Rayon III, di Ketiau seluas 374 ha yang ganti ruginya diberikan kepada 133 warga; di Sribandung, Sritanjung, dan Tanjungatap seluas 1.479 ha dan ganti ruginya diberikan kepada 894 warga. "Jadi lahan milik rakyat yang diganti rugi seluas 1.853 ha dengan jumlah pemilik sebanyak 1.027 orang," .

002/KPTS/BKPMDS/C/1985 tanggal 16 Nopember tentang Izin Lokasi dan pemberian Hak/pembebasan tanah seluas + 20.000 ha terletak di Kecamatan-Kecamatan Tanjung Raja, Muara Kuang, Inderalaya, dan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tanah seluas 20.000 ha yang masuk dalam wilayah operasi PTPN VII ternyata mencakup tanah ulayat masyarakat Desa Rengas.

Tanah perkebunan milik petani Rengas yang diusahakan PTPN VII seluas 2.353 Ha, namun yang diganti rugi oleh pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis hanya seluas 824 Ha. Sedangkan sisanya seluas 1.529 Ha tidak diganti rugi. Hal inilah yang kemudian menjadi salah-satu persoalan sengketa antara petani Rengas versus PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang terjadi selama lebih dari 29 tahun.

Hasil investigasi ternyata lahan yang disediakan oleh pemerintah provinsi seluas 21.358 Ha, dibagi menjadi enam satuan hamparan atau rayon. Rayon I dan II terletak di Desa Burai dan sekitarnya (60 Km dari pabrik) dengan topografi rata sampai landai. Rayon III, IV dan V berada di wilayah Desa Ketiau, Seri Bandung, Seri Kembang dan sekitarnya. Rayon VI berada di Desa Rengas dan sekitarnya (25 Km dari Pabrik) bertopografi landai sampai berbukit kecil.

Permasalahan muncul dalam pencadangan tersebut adalah perbedaan pengukuran luas lahan antara pemerintah dengan petani. Dalam proses pengukuran terjadi perbedaan cara mengukur luas tanah yang berakibat pada perbedaan perhitungan luas tanah yang diganti-rugi. Hamparan tanah yang luas itu dipenuhi oleh aliran sungai kecil yang disebut dengan *payo* atau *benca*. Pihak perkebunan tidak memasukkan bagian penggir payo selebar 25 meter di masing- masing sisi payo yang dengan demikian terjadi pengurangan 50 m dikalikan dengan panjang payo. Bagian ini tidak dihitung karena tidak cocok untuk ditanam tebu padahal tetap

masuk ke dalam areal perkebunan dan tidak bisa diakses oleh petani.

Pada kenyataannya bagian payo atau benca yang tidak diganti rugi bahkan masuk dalam hitungan oleh perusahaan ternyata tetap ditanami oleh perusahaan sawit bahkan petani sama sekali tidak memiliki akses ke lahan tersebut . Perbedaan ini terus dipersoalkan oleh petani sebab PTPN VII mengklaim lahan tersebut. Hal ini berimplikasi pada cara menghitung luasan Lahan yang dikuasai Cinta Manis yang menurut sebagian petani mendekati angka 30.000 Ha.

Perbedaan cara menghitung terkait dengan pencadangan lahan memunculkan rasa ketidakpuasaan dikalangan petani Rengas yang berakibat pada tindakan ganti-rugi yang dipaksakan dan penuh intimidasi oleh PTPN VII melalui aparat keamanan saat itu. Proses ganti rugi ternyata tidak dilakukan untuk lahan tetapi untuk tanaman yang ditanam atau tanamam yang tumbuh dilahan.

Negosiasi petani dengan pihak perusahaan untuk sekedar menunggu kuningnya padi dan manisnya nanas yang menjadi tumpuan penghidupan mereka belum menemukan titik ketemu, namun pada pertengahan tahun 1982, PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis melakukan pembersihan lahan di hamparan tanah yang sangat luas ini, di antara pohon-pohon karet yang masih kecil, dipenuhi oleh padi yang sedang menguning dan siap dituai. Alat-alat berat menggusur habis apapun yang ditemukan dengan dikawal oleh seorang pesirah dan pihak keamanan. Aktivitas pembersihan itu terkadang dilakukan di malam hari untuk menghindari usaha-usaha menghalangi yang dilakukan petani di siang harinya.

Dampak lanjut dari pengambilan lahan petani secara paksa dan ganti rugi yang tidak seimbang yang dilakukan oleh pemerintah adalah hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan

masyarakat Rengas dan terancamnya subsistensi petani Rengas. Pengambilan paksa lahan petani oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dibantu oleh pihak keamanan berakibat pada petani telah kehilangan sumber daya berupa tanah, untuk keberlangsungan hidup mereka.

Kondisi dari proses pembebasan lahan milik masyarakat dilakukan pada tahun 1982, dengan berbagai cara seperti: intimidasi, pemaksaan, penganiayaan, penekanan dan juga dengan ganti rugi yang tidak transparan sebesar Rp 150.000 per hektar. Pada saat perkebunan masuk, mereka diminta menyerahkan lahan dengan ganti kerugian dengan harga Rp. 150.000 per hektar, namun, oleh Tim 9, mereka hanya mendapatkan pembayaran Rp 25.000 per hektar. Perlu diketahui Tim 9 adalah sebuah tim pembebasan lahan di masa lalu yang beranggotakan Pemda, Aparat Desa, Agraria, Masyarakat dan Perkebunan. Selanjutnya, terjadi juga rekayasa dalam penggantian kerugian dimana penerima ganti rugi tanah juga banyak dimanipulasi. Sementara, pihak yang menolak dengan mudah dikategorikan sebagai antek PKI<sup>138</sup>.

Dipaksa dan diintimidasi oleh PTPN VII, akhirnya petani mau menerima secara kompensasi (ganti rugi) yang tidak layak diterima dan adanya manipulasi secara massif lahan yang akan dijadikan perkebunan tebu. Pembebasan lahan milik masyarakat dengan ganti rugi tidak pernah dilakukan secara prosedur negosiasi bahkan pemberitahuan terlebih dahulu bahwa tanah warga diambil oleh perkebunan.

Pengalihan lahan dari perkebunan dan pertanian petani ke kepentingan pabrik dan perkebunan tebu mengepung sampai ke pemukiman penduduk Rengas, sehingga sebagian besar penduduk

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan sesepuh warga Rengas GPI dan H. Muslih tanggal 5 Juli 2011

yang bermata pencaharian petani kehilangan lahan dan matapencarian sebagai petani. Dampaknya adalah penduduk Rengas kehilangan sumber daya ekonominya dan harus bekerja menjadi buruh-buruh harian lepas di PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di lahan mereka sendiri.

Selain itu, sebagian besar petani Rengas mencari penghidupan dengan cara *ganun atau mengandon*. Nganun atau ngandon, kata ini biasanya digunakan untuk menyebut sebuah kegiatan pergi meninggalkan kampung halaman dalam beberapa waktu, untuk menyewa atau bagi hasil dengan pemilik lahan di luar desa mereka. Kegiatan mengandon dilakukan sampai dengan desa seberang di wilayah Kabupaten lainnya, jarak yang ditempuh paling dekat 100-150 KM dari desa Rengas.

Inilah yang dilakukan oleh petani Rengas ketika mereka tidak punya tanah pertanian atau perkebunan setelah masuknya PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di desa Rengas. Di desa ngandonan petani Rengas biasanya menggarap tanah milik orang dengan sistem karet atau nanas atau tanaman lainnya ditanam menjadi milik pemilik tanah sedangkan padi atau nanas menjadi milik penggarap. Dalam setiap 1 sampai 3 bulan mereka baru bisa pulang ke kampung halaman untuk menjenguk keluarga mereka di desa Rengas. Seperti yang dituturkan oleh SA (62TH):

Kami iko urong diri, sedianyo bahagia dengan kedatangan PTPN ni iko, tetapi kalulah cak ini, segalo diambek pakso, segalonyo digantirugigelepmato, apo lagi yang kami urang diri punyo ni. Hidup haruslah teros bergerak, terus gayut, meski kito cakaunyo jauh ke desa semberang, tapi cakmano lagi kita dak bedayo ngadepi perusahaan yang di dalamnyo ado Negara. Biarlah kami bercakau umoh jaug dari desa<sup>139</sup>.

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Bapak SA di desa Rengas 10 Nopember 2012

(Kami seharusnya paling bahagia dengan kedatangan PTPN ke desa kami, tapi malah bikin kami susah, semuanya diambil paksa, diganti tanpa diskusi lagi. Sekarang kami tidak memiliki apalagi untuk hidup. Tapi hidup harus tetap berjalan, biarlah kami mencari sampai desa seberang, jauh dari tempat kami tinggal).

Sumber kehidupan dan ekonomi petani Rengas yang bertumpuh pada sektor pertanian dan perkebunan menjadi hilang, akibat lahan pertanian terus berkurang dan dikuasai oleh pihak perkebunan. Lahan perkebunan yang dimiliki penduduk hanya 30 persen, sedangkan 70 persen sudah dikuasai oleh perusahaan PTPN VII<sup>140</sup>.

Seiring dengan perkembangan selama 30 tahun jumlah penduduk makin bertambah, kebutuhan ekonomi makin meningkat namun lahan pertanian berangsur berkurang. Hal ini yang membuat kehidupan masyarakat desa semakin terjepit secara ekonomi. Selain harus kehilangan lahan pertanian, sungai yang selama ini menjadi andalan pun perlahan mulai alami kekeringan. Kemudian, sungai yang tadinya bisa dijadikan tempat mencari ikan, kini sudah tercemar dan ikan-ikan sudah mulai punah akibat limbah. Selanjutnya, debu pembakaran tebu dari pabrik gula PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis masuk ke pemukiman warga dan mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat Rengas.

Hilangnya akses terhadap tanah sama artinya hilangnya kegiatan perkebunan dan pertanian petani Rengas. Ini berdampak pada berkurangnya pasar dari hasil bumi dan kerajinan lainnya seperti pandai besi yang mereka tekuni. Pasar hasil produksi

---

<sup>140</sup> Tulisan ini dikembangkan dari Mulyanto. "Adaptasi Sosial Penduduk Terhadap Perubahan Lingkungan Sumberdata Ekonomi : Kajian Dampak Pembangunan Pabrik Gula Cinta Manis terhadap mata pencarian penduduk di Desa Ketiau Kecamatan. Tanjung Batu OKI", Hasil Penelitian Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, 1991, hal: 24-27.

kerajinan besi mereka semakin menyusut ketika perkebunan tebu menerapkan teknik pembakaran lahan ketika panen untuk meningkatkan resedu gula sebelum panen tebu dilakukan, tidak lagi menggunakan sabit, parang, cangkul dan lainnya untuk membersihkan batang tebu.

Kehilangan mata pencarian dan sumber kehidupan berarti mengakibatkan berkurangnya aktivitas jual beli di desa Rengas. Pasar-pasar tradisional menjadi sepi pembeli dan harus tutup. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban kebutuhan petani sebab mereka harus membeli kebutuhan jauh dari desa Rengas.

Meskipun kondisi masyarakat Rengas sedang dalam keadaan tertindas, namun tidak melumpuhkan aktivitas mereka untuk melakukan perlawanan. Kondisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa; dari awal petani desa Rengas menolak kehadiran PTPN VII. Unit Usaha Cinta Manis, sebab kehadiran perkebunan tebu tersebut akan menggusur lahan pertanian mereka dan desa Rengas akan dikelilingi perkebunan tebu. Selain itu kenyataan proses pembebasan lahan dengan ganti rugi oleh TIM 9, tidak melalui negosiasi dan musyawarah serta penuh rekayasa. Kenyataan tentang masyarakat kehilangan rasa aman dan damai sebab pemerintah melalui aparatnya pada melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang menentang kehadiran PTPN VII Cinta Manis<sup>141</sup>.

Pemerintah tidak memberikan reaksi apapun bahkan membiarkan petani Rengas berjuang sendirian. Fenomena ini berakibat pada keadaan petani Rengas kehilangan sumber mata

---

<sup>141</sup> Menurut SD, pada tahun 1990, dia pernah didatangi oleh orang-orang yang mengaku dari Kodim, mereka memintanya untuk menandatangani surat pernyataan bercap burung garuda berwarna merah, di dalamnya tidak ada satu tulisanpun. Keluarga pada tahun itu merasa terancam apalagi bila malam. Hasil wawancara pada tanggal 12 Nopember 2012 di Rengas I.

pencarian di desa sendiri dan akhirnya menggarap lahan dengan cara menyewa diluar desa Rengas seperti di desa Cempeda, Penyaringan, Beringin di Kabupaten OKU yang berjarak 100 Km dari desa Rengas. Kondisi-kondisi tersebut membuat petani Rengas merasa kecewa dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah saat itu.

### **5.3. Tindakan Perlawanan dengan Perubahan Strategi dan Taktik untuk Mewujudkan Capaian (*outcome*) Perjuangan Petani Rengas Tahun 1981-1991**

Di tahun 1981-1983, disebut juga awal-mula petani Rengas melakukan tindakan perlawanan secara personal dan terbatas terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Meskipun kondisi ini belum begitu jelas sebagai sebuah tindakan perlawanan. Pada kenyataannya ada aktivitas-aktivitas berupa tindakan protes dengan cara mempertahankan lahan dan aksi penolakan penandatanganan surat SKKT (surat keterangan kepemilikan tanah) atas tanah eks marga yang dilakukan oleh petani dan keluarga petani. Tindakan perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas pada masa itu diantaranya;

Pada tahun 1981, tindakan perlawanan dalam bentuk protes dan bertahan di lahan yang sedang dilakukan aktivitas pembersihan lahan oleh pihak pemerintah yang dikawal aparat Kodim dari Kayu Agung. Meskipun aksi protes dilakukan secara terbuka, namun hanya merupakan aksi perlawanan personal dan terbatas di area perkebunan dekat dengan pemukiman penduduk. Tindakan tersebut dilanjutkan dengan taktik bertahan di area tersebut dengan maksud agar masyarakat dan petani Rengas lainnya ikut bergabung melakukan tindakan serupa. Seperti yang diceritakan oleh MD, sebagai berikut;

Masyarakat Rengas secara turun-menurut menjaga dan memanfaatkan aliran sungai, mereka mulai bercocok tanam padi, balam, nanas dan jenis palawija lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rupanya keindahan masa bercocok tanam itu sirna, ketika tahun 1981-1982, PTPN VII Cinta Manis *mencuri paksa* tanah mereka. Selain harus kehilangan lahan pertanian, sungai yang selama ini menjadi andalan pun perlahan mulai alami kekeringan. Namun demikian dengan segala cara pihak perusahaan terus melakukan pembukaan lahan dan beberapa tokoh yang menolak di tangkap lalu diintimidasi, dan dianiaya hingga sakit. Karena kasus itulah kepala desa / kerio (SYA) dan ketip pada saat itu di ganti<sup>142</sup>.

Tindakan perlawanan petani Rengas yang diikuti dengan strategi dan taktik tersebut ternyata direspons oleh pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dengan memobilisasi aparat keamanan yang melakukan tindakan represif dan menculik beberapa warga dan petani oleh pihak keamanan dari Kodim di Kayu Agung

Aksi penculikan dibalas oleh petani Rengas dengan tindakan perlawanan dalam bentuk protes ke Kodim Kayu Agung. Strategi tindakan protes dilakukan secara terbuka dan hanya diikuti oleh beberapa orang petani. Taktik yang digunakan dengan mendatangi markas Kodim di Kayu Agung. Tindakan perlawanan petani Rengas mendapat respon dari aparat keamanan dalam bentuk penangkapan dan memenjarakan beberapa petani yang mengikuti protes saat itu tanpa melalui proses pengadilan. Hasil penggalan data lapangan tercatat ada dua petani yang ditangkap saat itu yakni MC (sekdes) dan WD (petani)<sup>143</sup>.

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan bapak MD, tanggal 11 Pebruari 2012 di desa Rengas 1. Beliau salah-satu anggota Tim 9 pemkab OKI tahun 1982 dari unsur pemerintahan.

<sup>143</sup> Wawancara dengan bapak SS (61) di Ketiau tanggal 12 Mei 2012

Gambaran peristiwa dari tindakan perlawanan yang terjadi saat itu seperti diceritakan oleh MSD, AI, dan SI sebagai berikut<sup>144</sup>;

“Bentuk tindakan protes yang dilakukan petani Rengas saat itu pada awalnya mendatangi kepala desa dan minta untuk menunda pembersihan lahan sampai ada kepastian tentang ganti-rugi atau besaran nominal ganti rugi. Namun kepala desa saat itu saudara WD tidak berada ditempat dan tidak ada kabar keberadaannya. Selanjutnya petani melanjutkan tindakan penolakan dengan cara mempertahankan lahan atau kebun secara keluarga dan kerabat yang saling berdekatan. Sementara tindakan penolakan yang sering dilakukan oleh petani adalah tidak menandatangani atau membuat pernyataan jual beli dan membuat surat keterangan pengakuan hak atas tanah marga. Berbagai tindakan perlawanan dalam bentuk protes dan penolakan dilakukan petani langsung ke PTPN VII, namun selalu saja dihalangi dan berhadapan dengan pihak aparat terutama dari ABRI”.

Pada tahun 1982, petani Rengas yang berada di sekitar lokasi 32-33, kembali melakukan tindakan perlawanan dalam bentuk protes dan penolakan atas pengukuran tanah yang dilakukan sepihak oleh pemerintah dan PTPN VII Unit Usaha Cinta manis. Tindakan perlawanan tersebut sebagai bentuk pembalasan terhadap aktivitas pengukuran oleh pemerintah dan PTPN VII tanpa memberitahu petani. Hasil pengukuran itu sendiri tidak sesuai dengan luasnya lahan yang berakibat tidak adil dan banyak dikurangi. Seperti lahan warga yang tidak ditumbuhi tanaman hanya ilalang semata dan tanaman hutan lainnya, seperti di desa Tanjung Batu (sekarang Payaraman). Hal inilah yang dikemudian hari menjadi persoalan sebab PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis,

---

<sup>144</sup> Wawancara bersama Bapak SI, MSD dan AI di desa Rengas tanggal 27 Nopember 2011

tidak mau mengganti lahan yang tidak ada tanaman tumbuh di atasnya. Seperti yang diutarakan FY<sup>145</sup>

“ Bahwa saat ini cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani Rengas mulai dari kepemilikan lahan yang rata-rata hanya 0,3 Hektare per KK, kriminalisasi petani, sistem perdagangan hasil tani yang tidak adil bagi petani, hingga ketergantungan petani kepada “ kebaikan PTPN VII”. Ini semua berawal dari tanah mereka yang dirampas oleh PTPN VII pada tahun 1982. Waktu itu PTPN VII membuka perkebunan tebu. Mereka mengambil tanah rakyat secara paksa (lewat bantuan militer). Memang ada ganti rugi tetapi hanya tanah yang ada tanam-tumbuhnya saja yang diganti rugi. Yang tidak ada tanam tumbuhnya harus menunjukkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT)”.

Meskipun terjadi tindakan perlawanan dalam bentuk protes dan penolakan dari petani Rengas, namun proses ganti rugi tetap dilakukan oleh pemerintah. Ganti rugi itupun sangat tidak adil, contohnya dari 5 Ha lahan, hanya 1 Ha saja yang diganti. Akibatnya adalah masyarakat sekitar pun kehilangan sumber daya ekonominya dan harus bekerja menjadi buruh-buruh harian lepas di PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di lahan mereka sendiri.

Strategi perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas dengan cara tertutup dan sporadik. Sementara taktik perlawanan dengan cara bertahan di area perkebunan yang dekat dengan pemukiman warga dan berdekatan dengan keluarga korban. Salah-satu peristiwa yang muncul pasca meninggalnya salah-satu warga Rengas akibat dianiaya pihak keamanan seperti yang dilakukan

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Saudara FY tanggal 12 Nopember 2012, saat ini menjabat sebagai ketua SPSI Ogan Ilir

oleh keluarga ZO, AH, RS. Seperti yang dituturkan oleh ibu ZLHA (72 TH)<sup>146</sup> sebagai berikut;

Kami iko, wong tuo orang diri kelak teusir dari umo enduk pancung alas keluarga iko, kite begelut secaro dayo upaya seadoyo saje. Berageman lahan sampe ke kito tanami galo lahan enduk penuh dengan tanaman kite urang.

(Kita petani orang lemah tanah tergesur oleh perusahaan, kita bertahan dengan cara menanami dan mempertahankan lahan secara apa adanya).

Perubahan strategi dan taktik perlawanan dari tertutup ke terbuka dan dari personal terbatas ke kelompok keluarga korban ternyata berdampak pada muncul dan berkembangnya berbagai perlawanan di berbagai wilayah di area perkebunan Rayon VI. Perlawanan yang tidak terpusat dalam satu area dan dilakukan oleh kelurga korban petani lainnya.

Kenyataan ini dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mampu memobilisasi petani lainnya untuk melakukan tindakan perlawanan yakni hadirnya aktor petani lokal yang vocal seperti MBH, MC, WD dan DH. Kehadiran mereka menjadi satu faktor yang mapu mengikat dan memberikan proses penguatan baik secara aksi, peranan, dan tujuan sebagai unsur penting dari tindakan kolektif disaat bentuk perlawanan belum berwujud secara maksimal. Seperti yang di ceritakan oleh SA<sup>147</sup>;

Contohnya adalah peristiwa kematian MC, salah seorang tokoh vokal desa Rengas yang membela perjuangan petani Rengas tahun 1982. Kematian MC akibat dianiayah dan ditangkap pihak Kodim Kayu Agung menjadi simbol api

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan ibu ZLA di rumah kediamana desa Rengas I tanggal 27 Nopember 2011

<sup>147</sup> Wawancara dengan SA tanggal 11 Nopember 2011 di rumah desa Embacang Ogan Ilir. beliau wafat di Kayu Agung tanggal 17 Desember 2011.

perlawanan menguat dan mengembangkan berbagai macam aksi kolektif untuk memberi perlindungan terhadap petani oleh sesama petani.

Begitu juga seperti yang dikatakan oleh bapak AI sebagai berikut;

Kito iko idak banyak yang pacak dibuat disebabke huwang ini takut same tentara yang pecak kejadian MC, di jiduk dak benyawawe lagi, tetapi kematiannye itu lah pacak menyadari urang diri iko bahwasannye kite upaya dan usahe dengan gih dan kerjo nian. kite biso sampeke ke generasi lainnyo kelak bahwa kita urang diri pejuang.

(Kita orang Rengas tidak banyak yang bisa dilakukan, saudara MC meninggal dunia akibat melakukan perlawanan. Tetapi kematian MC memberikan banyak kesadaran untuk kita bahwa kita harus berani melawan dan mewariskan perlawanan ini ke generasi selanjutnya).

Pada tahun 1983, tindakan perlawanan dalam bentuk penolakan kembali dilakukan oleh petani Rengas. Strategi yang dijalankan dengan menghalangi rencana eksekusi lahan sementara taktik dengan menunjukkan bukti bahwa lahan yang akan dieksekusi bukan punya marga atau eks marga. Namun akhirnya PTPN VII mengeksekusi lahan petani yang dilakukan berdasarkan legalitas lahan eks marga dan diklaim sebagai lahan Negara yang dikuasai oleh petani Rengas. Klaim PTPN VII Unit Usaha Cinta manis tersebut ditolak dan dibantah oleh petani Rengas, dengan alasan bahwa petani Rengan tidak menggarap tanah eks marga atau tanah desa, tetapi tanah masyarakat sendiri yang digunakan untuk beumo atau berkebun secara turun-menurun dan kepemilikannya pun secara kekeluargaan<sup>148</sup>.

---

<sup>148</sup> Surat pernyataan kepala desa Rengas dan mantan kepala desa Rengas tanggal 6 September 2000 dan wawancara dengan MSD tanggal 10 Agustus .2011 di desa Rengas 2.

**GAMBAR .5.2 PETANI RENGAS MEMPERTAHANKAN  
LAHAN DENGAN CARA MENANAMI LAHAN YANG AKAN  
DI EKSEKUSI**



Sumber: Dokumentasi Intel tahun 1983

Adanya dukungan dari beberapa mantan kerio dan kepala desa Rengas. Surat pernyataan tersebut dibuat diatas segel bermaterai dan berlogo Garuda Resmi dan berasal dari mantan-mantan kerio dan kepala desa Rengas sejak tahun 1968-2000, yang terdiri enam pernyataan yakni :

- a. Berdasarkan data-data memangku jabatan bahwa di wilayah desa Rengas tidak tercatat dan atau diusahakan tanah Marga.
- b. Tanah di desa Rengas adalah tanah masyarakat dan atau penduduk yang digunakan untuk *beumo* atau berkebun atau berladang serta kepemilikan tanah tersebut berdasarkan kekeluargaan turun-menurun.
- c. Berdasarkan data administrasi serta pengetahuan "kami" selama memangku jabatan bahwa tanah-tanah masyarakat dan warga Rengas seluruhnya tidak mempunyai surat-surat,

tetapi apabila terjadi pengalihan hak pemiliknnya atau terjadi transaksi jual-beli dan sebagainya baruah dubuatkan surat-menyuratnya.

- d. Memperhatikan kebiasaan penduduk Rengas serta keadaan lahan bahwa kebun-kebun masyarakat selalu terbakar habis atau terbakar sebagian sehingga banyak ditumbuhi alang-alang dan menjadi semak belukar, karena memang di biarkan selama 5-6 tahun agar menjadi hutan kembali, baru kemudian diusahakan kembali untuk dibuat *umo* atau kebun atau ladang, begitulah seterusnya sampai turun-menurun kepada anak cucu kami. Bentuk beumo atau bekebum seperti ini merupakan kebiasaan dan cara kehidupan warga Rengas<sup>149</sup>.

Ada perubahan strategi perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas yakni perlawanan secara terbuka dan meluas yang dilakukan oleh personal, keluarga dan kerabat petani yang tidak menjadi korban.

Kondisi ini ternyata mendorong warga dan petani Rengas lainnya ikut bergabung ke petani yang melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan petani berakibat pada tindakan tegas aparat keamanan (tentara) yang melakukan penangkapan terhadap petani bahkan berulang kali mereka keluar masuk tahanan karena dianggap melakukan perlawanan terhadap negara. Tidak ada data yang pasti berapa petani yang ditangkap dan dipenjara akibat melakukan aksi perlawanan terhadap PTPN VII, namun dari beberapa informasi yang didapat dan diceritakan bahwa petani

---

<sup>149</sup> Sumber informan : MAA (mantan kerio 1968), SA (mantan kerio 1978-1981) AHA (manta kerio 1981-1982), SD mantan kerio/kades 1989-1991), Drs. AS mantan kades 1994-1997), MST mantan kades 1997-2000). Wawancara bersama tanggal 12-16 Desember 2012 di desa Rengas 1 dan 2 dan desa Ketiau.

yang mengalami penangkapan dan penganiayaan berkisar 25-30 orang<sup>150</sup>.

Tindakan perlawanan yang diikuti dengan perubahan strategi dan taktik perlawanan disepanjang tahun 1981-1983, merupakan perlawanan dalam bentuk protes dan penolakan yang pada mulanya dilakukan secara terbatas. Namun mengalami perluasan bentuk dan strategi serta taktik perlawanan di tahun 1982. Strategi perlawanan yang dijalankan umumnya masih bersifat sama dan sederhana seperti terbuka, personal, sporadik, bertahan di atas lahan sementara taktik yang digunakan seperti mendatangi Kodim, bertahan di lahan dekat pemukiman.

Semenjak tahun 1983, perlawanan dilakukan secara personal, keluarga dan kerabat korban serta melibatkan tokoh masyarakat lainnya. Awalnya perlawanan dilakukan oleh petani Rengas yang memiliki lahan persawahan dan perkebunan di area 32-33, namun mengalami perluasan pelaku yakni diikuti juga oleh penduduk yang tidak memiliki lahan persawahan dan perkebunan. Sementara dari jenis pelaku perlawanan diikuti oleh kaum laki-laki tetapi juga kaum wanita, pemuda dan anak-anak.

Perubahan strategi dan taktik perlawanan yang terjadi di tahun 1982-1983 berdampak pada capaian (*outcome*) perjuangan di tahun tersebut yakni meluasannya dukungan terhadap perlawanan petani Rengas dengan ikut bergabungnya beberapa mantan kerio dan kades dalam barisan petani Rengas. Kenyataan ini membuka jalan bagi petani lainnya untuk melakukan aksi perlawanan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Bahkan mendapatkan perhatian khusus dari beberapa warga lainnya terutama yang

---

<sup>150</sup> Data diperoleh dari informan MBD (67 TH) purnawirawan ABRI yang pernah berdinis di Kayu Agung di tahun 1976-1985. Wawancara dilakukan di Palembang 22 Desember 2012

masih berhubungan ikatan keluarga dan apparatus desa yang sedang menjabat saat itu. .

Perubahan strategi dan taktik perlawanan yang berdampak terhadap capaian perjuangan saat itu tidak lepas dari peranan yang dimainkan oleh tokoh lokal dari petani di tahun 1981-1983, yakni SA, JPH, MSD, MCH, MD dan AI<sup>151</sup>. Menurut penuturan generasi muda Rengas seperti GPI, SPI dan FI<sup>152</sup> sebagai berikut;

MSD, MCH, MD dan AI sering mengajak warga dan petani untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lahan warga secara bergantian, sementara MCH, MD dan AI mengikuti apa yang dilakukan oleh MSD. Cara gotong royong yang dilakukan tersebut sering dimanfaatkan keempat tokoh ini sebagai media pemberitahuan bahwa lahan mereka harus direbut kembali dengan cara-cara perlawanan. Terkadang MSD dan MD melakukan pemagaran lahan bersama-sama warga lainnya di lahan yang dekat pemukiman, bahkan melalui pengajian atau sedekah keempat tokoh ini selalu menekankan perlunya petani Rengas melakukan perlawanan secara berkeluarga, berkerabat dan sepemukiman.

Hadirnya tokoh-tokoh lokal petani yang terlibat di dalam tindakan perlawanan menjadikan perlawanan petani Rengas mengarah pada suatu bentuk tindakan kolektif yang bisa dilakukan secara terus menerus dan dilakukan dalam waktu yang lama sampai terwujudnya capaian perjuangan. Kondisi ini juga tidak lepas dari pengaruh isu-isu yang berkembang disekitar hubungan

---

<sup>151</sup> Hasil wawancara dan penggalan informasi dengan beberapa manta kerio (kepala desa) di antaranya: SA (77 TH), FI (76 TH) dan AB (68 TH) mantan sekda Ogan Ilir. Palembang 24 Nopember 2011

<sup>152</sup> Wawancara dengan GPI, SPI dan FI, Ketiganya tokoh generasi muda Rengas yang meneruskan aksi-aksi perlawanan pada periode selanjutnya. Wawancara dilakukan secara bersama di rumah kades tanggal 28 Nopember 2011 desa Rengas 2.

perlawanan antara petani versus PTPN VII saat itu. Salah-satunya adalah peristiwa penting yang terjadi seperti meninggalnya salah-seorang tokoh masyarakat yang bernama MCH yang dianiyah dan dicituk oleh aparat dari Kodim di tahun 1982.

Meskipun tindakan perlawanan di tahun 1981-1983, hanya berlangsung selama tiga tahun, namun perlawanan di tahun-tahun tersebut mampu membuka jalan bagi warga dan petani Rengas lainnya bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian kecil petani Rengas terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis adalah untuk melindungi hak-hak warga dan petani lainnya juga dari ancaman kehilangan dan ketidakadilan.

Salah-satu pencapaian paling berharga dari tindakan perlawanan petani Rengas periode 1981-1983 adalah meluasnya dukungan dari kalangan petani yang ikut melakukan aksi-aksi perlawanan bersama dan dengan cara repertoar bahkan secara tidak langsung mewariskan isu perlawanan kepada anak dan keluarga mereka melalui tindakan yang mereka lakukan. Hasil temuan lapangan memberikan penjelasan bahwa pihak-pihak terlibat dalam periode ini dapat diklasifikasi menjadi tiga pihak yang berbeda yakni;

- a. Pihak PTPN VII
- b. Pihak Birokrat seperti aparat desa, pemerintah daerah
- c. Pihak petani<sup>153</sup>

Temuan lapangan memberikan penjelasan bahwa tindakan perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas tahun 1981-1983, menggambarkan suatu tindakan perlawanan yang pada awalnya tindakan personal, terbatas berkembang menjadi tindakan kolektif. Sementara bentuk perlawanan yang dilakukan petani Rengas identik dengan bentuk perlawanan dengan repertoar (*repertoire of*

---

<sup>153</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

*contention*) sebab dilakukan secara berulang, terus menerus dan menggunakan strategi dan taktik perlawanan yang berbeda dan inovatif dalam mewujudkan capaian perjuangannya.

Berbagai kondisi dari peristiwa tindakan kolektif perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas di tahun 1981-1983, menjelaskan ciri kondisi perlawanan petani Rengas yang terdiri dari repertoar, aktor, strategi, taktik dan capaian tujuan sebagaimana dijelaskan dalam table berikut ;

**TABEL 5.1 REPERTOAR, AKTOR, STRATEGI, TAKTIK, CAPAIAN DAN HASIL PERLAWANAN PETANI RENGAS 1981-1983**

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
1981	Tindakan protes	Petani Rengas	Tertutup	Mempertahankan lahan,	Informasi bagi petani lainnya ada perlawanan	Perlawanan petani Rengas belum
1982	Tindakan penolakan	Petani Rengas	Terbuka sporadik	menduduki lahan disekitar area pemukiman	Bertambahnya petani yang terlibat secara terbatas	menunjukkan hasil yang diharapkan yakni mendapatkan kembali
1983	Tindakan penolakan	Petani dibantu petani lainnya dalam jumlah terbatas dari kalangan tokoh masyarakat, mantan kades dan pesirah	Terbuka dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus melintasi tahun	Mendatangi Kodim Kayu Agung terkait petani yang ditangkap	Mulai ada tindakan perlawanan bawah tanah yang melakukan perlawanan kolektif.	lahan dari pihak PTPN VII atau ganti rugi

Sumber: data penelitian tahun 2013

Tabel di atas menjelaskan bahwa repertoar tersebut dapat dilihat dari tindakan perlawanan yang sama terjadi di tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini diakibatkan oleh sedikitnya petani yang terlibat perlawanan, terbatasnya dukungan, belum adanya jaringan dan tindakan represif serta pengawasan yang ketat oleh pihak keamanan ABRI yang di BKO kan untuk kepentingan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Tidak halnya dengan strategi dan taktik perlawanan yang digunakan petani Rengas terus mengalami perubahan sejak awal tindakan perlawanan terjadi.

Sementara perubahan strategi dan taktik yang terjadi dimulai pada 1982-1983 belum begitu bervariasi dan lambat disebabkan oleh kondisi petani dan keluarga petani lebih mengambil cara aman dan menghindari diri dari ancaman pihak keamanan saat itu, sumberdaya petani yang masih terbatas, belum berjalannya mobilisasi, dukungan masih sebatas pihak keluarga dan kerabat korban. Kondisi ini akibat dari sistem politik di masa Orde Baru yang menerapkan politik meliter dan otoriter.

Meskipun demikian perubahan strategi dan taktik perlawanan tetap terjadi di Rengas. Keadaan ini disebabkan oleh keadaan yang memaksa petani Rengas untuk bertindak nekat dan adanya kesempatan dan peluang yang mampu dibaca dan diinterpretasi oleh sebagian kecil aktor petani Rengas seperti JKF, MBH, MD dan AI, untuk melakukan tindakan perlawanan yang sama dengan strategi dan taktik yang berbeda walaupun tindakan yang dilakukan belum tentu menghasilkan sesuatu yang membuat petani merasa aman dari kehilangan lahan mereka.

Di tahun-tahun awal tindakan perlawanan dilakukan petani Rengas bisa dikatakan masa dimulainya perlawanan dengan ciri repertoar. Kondisi akumulasi dari pengalaman-pengalaman kegagalan tindakan perlawanan yang dilakukan petani Rengas di tahun 1981 membuat petani Rengas melakukan tindakan

perlawanan yang sama di tahun 1982 dan 1983, namun dengan strategi dan taktik berbeda meskipun menemui kegagalan dalam mencapai tujuan perlawanan.

Berdasarkan hasil temuan ada kondisi berpengaruh terhadap terjadinya perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas yakni; waktu peristiwa terjadi, tempat peristiwa yang akan dilakukan tindakan dan pilihan bentuk perlawanan yang akan dilakukan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh sistem politik otoriter yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru.

**TABEL 5.2. PILIHAN WAKTU DAN TEMPAT YANG MERUBAH STRATEGI DAN TAKTIK TAHUN 1981-1983**

TAHUN	WAKTU PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	BENTUK PERLAWANAN
1981	Pengukuran Lahan dan Penyerahan SKKT secara paksa	Area yang berdekatan dengan pemukiman dan Balai Desa dan Rumah	Tindakan Penolakan dan Tindakan Protes
1982	Pembersihan Lahan	Area yang berdekatan dengan pemukiman	Perlawanan dengan cara mempertahankan lahan
1983	Pemasangan Patok dan penanaman tebu oleh PTPN VII	Area berdekatan dengan korban dan pemukiman Area serta kebun penduduk	Mencabut patok dan menanam tebu di area sengketa

Sumber data: Hasil analisis data lapangan 2015

Tabel di atas menjelaskan apa yang dilakukan petani Rengas menjelaskan suatu bentuk repertoar dengan perlawanan yang diikuti perubahan strategi dan taktik secara integrative tidak dipisahkan oleh periode terjadinya peristiwa perlawanan.

Perubahan yang terjadi ditentukan oleh pilihan waktu dan tempat tindakan perlawanan yang akan dilakukan.

Jadi perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas ditentukan oleh penyesuaian waktu dan tempat perlawanan sebagaimana yang dijelaskan dalam table di atas. Dampak dari perubahan strategi dan taktik perlawanan yang dilakukan petani Rengas di masa Orde Baru tahun 1981-1983 adalah adanya capaian (*outcome*) dari perjuangan seperti; kondisi perlawanan yang terjadi pada awalnya dilakukan secara personal meluas menjadi keluarga dan kerabat serta petani lainnya yang tidak menjadi korban.

*Outcome* lainnya seperti perlawanan itu juga menjadi media atau informasi bagi petani lainnya, mulai bertambahnya petani yang terlibat langsung perlawanan bahkan di tahun 1983 mulai ada perlawanan bahwa tanah yang dilakukan secara tindakan kolektif. Perlawanan secara kolektif tersebut dipimpin oleh JKF dan MBH yang melakukan persiapan tindakan perlawanan melalui jalur litigasi mengatasnamakan petani Rengas area 32 dan 33 di tahun berikutnya.

Pada tahun 1984-1991, tindakan perlawanan dimulai dengan tindakan salah-seorang petani Rengas, JKF bersama pengacara mandiri Syafrizal Syahroni.SH, melakukan perlawanan melalui jalur litigasi yakni menggugat secara perdata PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis ke Pengadilan Negeri Kayu Agung.

Isu-isu yang melatari dilakukannya aksi litigasi merupakan isu-isu yang ada di periode sebelumnya, namun ada penambahan isu baru yakni sikap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis sama sekali tidak peduli terhadap kondisi dan lingkungan warga dan petani Rengas yang kehilangan sumber kehidupan dan ekonomi mereka. Seperti yang dituturkan oleh salah seorang mantan kerio AHA (80 TH), saat diwawancara mengatakan bahwa;

“Kami iko urang diri dengan segenap tumpa urang, lah menolak PTPN VII di tahun 1981, aku iko lah pasang nyawe dan enjuk ke jabatan sebagai kerio saat itu, tapi cakyong pusat lah gile-gile galo..rakyat cak petani undok diurus malah dipasong sumber urip ye”<sup>154</sup>.

(Kami sudah berjuang segenap tenaga, menolak PTPN VII yang masuk 1981, tetapi pemerintah pusat sudah kehabisan akal sehat, memaksakan kehendaknya, petani dijadikan korban, bukan diurus untuk hidup yang layak).

Keberanian salah-satu warga Rengas menempuh jalur hukum di pengadilan Negeri Kayu Agung di tahun 1984, tidak lepas dari sosok JKR sendiri. Di mata masyarakat Rengas JKF adalah salah-seorang tokoh masyarakat yang memiliki banyak lahan dan usaha di Rengas. Lahir dan besar dari keluarga perjuang dan bangsawaan. Beberapa putra dan putrinya mendapat pendidikan tinggi dan bergelar sarjana. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti bahwa ditahun 1984 hanya putra dan putri JKF sajalah yang bisa menempu pendidikan tinggi saat itu. Memperhatikan latarbelakang kehidupan JKF maka tidaklah mengherankan bila ia satu-satunya warga Rengas yang melakukan aksi perlawanan melalui jalur litigasi di tahun 1984.

Berkas gugatan JKF disusun dan dipersiapkan materinya oleh pengacara mandiri SS. SH, namun belum diajukan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung. Obyek gugatan adalah lahan milik keluarga JKF di area 33 Rayon VI Desa Rengas. Kesamaan obyek gugatan itulah menurut pengacara mandiri cukup diwakili oleh salah-seorang warga saja. Saran dari pengacara ini didukung oleh pada umumnya warga dan petani Rengas. Terjadi kesepakatan di antara petani dan warga Rengas yang menjadi korban PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang dimediasi oleh pengacara mandiri.

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan bapak AHA di Palembang 24 Nopember 2011

Berdasarkan hal ini, gugatan diajukan atas nama JKF mewakili sejumlah petani korban dan petani bukan korban dari warga Rengas. Kesepakatan tersebut merupakan hasil musyawarah yang dilakukan di masjid Ar-Rahman tahun 1984. Semenjak kesepakatan tersebut tercapai di antara petani, keluarga, kerabatan dan petani lainnya perlawanan petani Rengas dilakukan secara tindakan kolektif dan mengatasnamakan petani Rengas.

### **GAMBAR 5.3. SUASANA RAPAT TOKOH DAN PETANI RENGAS TAHUN 1984**



Sumber: Dokumentasi JKF tahun 1984

Keterangan: Suasana rapat petani Rengas dengan kelompok petani korban dalam rangka membentuk perwakilan petani dan melakukan tindakan perlawanan kolektif .

Petani Rengas melakukan tindakan kolektif yang diwakili oleh beberapa petani korban dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung tahun 1984 sebagai berikut;

- a. RS mewakili petani yang menjadi korban PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis berjumlah 171 KK.

- b. AI mewakili petani yang menjadi korban PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis berjumlah 111 KK.
- c. STH mewakili petani yang menjadi korban PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis berjumlah 60 KK
- d. MDH bin KMS mewakili warga dan petani Rengas yang menjadi korban lainnya<sup>155</sup>.

Petani Rengas menuntut ganti rugi tanah yang belum pernah sama sekali diinventarisasi oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis sebagai berikut;

- a. Korban yang berjumlah 171 KK menuntut ganti rugi seluas 676 Ha,
- b. Korban yang berjumlah 111 KK menuntut ganti rugi seluas 342 Ha,
- c. Korban yang berjumlah 60 KK menuntut ganti-rugi seluas 152 Ha
- d. Korban yang lahannya dijadikan akses jalan dan lainnya menuntut ganti rugi 332 Ha<sup>156</sup>.

Kondisi yang memobilisasi petani dan warga Rengas untuk menyatukan kekuatan dalam melakukan perlawanan secara tindakan kolektif menurut salah-seorang warga Lubuk Ketiau yang ikut berjuang bersama petani Rengas FI (54 Th) digagas oleh MBH, menurutnya sebagai berikut;

Ide tuk merumpunke dan bereguk urang diri ke kelompok-kelompok atau ke julma-julma sesungguhnya berasal dari hasil rembukan warga dan petani Rengas di lombahan MBH. kite gale berjuang besame-same enduk kekatonan hasilnya“

---

<sup>155</sup> Kutipan surat instruksi Pemda Sum-Sel tahun 2000 tentang pembayaran uang gantirugi

<sup>156</sup> Kutipan surat instruksi gubernur Sim-Sel tahun 1999 dan 2001 tentang pembayaran uang ganti rugi kepada korban PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis sesuai kesepakatan.

walaupun kite urang sadar didek tahu sapo musuk sapo kawan. <sup>157</sup> (Aslinya ide pengelompokan itu berasal dari hasil musyawarah di rumah MBH dan kita sepakat untuk berjuang bersama).

Proses penyatuan petani dan kelompok petani dilakukan dengan cara mengumpulkan korban-korban yang lahan saling berdekatan dan jumlah korban akibat hilangnya lahan mereka. Seperti 171 berarti jumlah korban adalah 171 KK dan selanjutnya. Kehadiran beberapa korban petani dan kelompok-kelompok petani tersebut mulai dirasa perlu ditunjuk pemimpin atau yang mewakili mereka dalam melakukan setiap tindakan perlawanan kolektif seperti litigasi.

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan bapak FI di Lubuk Ketia tanggal 17 Nopember 2012

#### GAMBAR 5.4. SUASANA REMBUKAN PETANI RENGAS PASCA TERBENTUK PERWAKILAN



Sumber: Dokumentasi SD tahun 1984

Keterangan:

Gambar di atas menceritakan suasana rapat beberapa petani Korban untuk Setelah terbentuk perwakilan dalam rangka pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung tahun 1984

Tindakan perlawanan kolektif dengan litigasi dilakukan dengan strategi inovatif yakni perwakilan dari kelompok masing-masing. Strategi perwakilan adalah kondisi yang baru sepanjang perlawanan terjadi. Seperti yang diceritakan FI<sup>158</sup> sebagai berikut;

Mengingat aksi-aksi perlawanan selalui dilakukan dengan cara kelompok terkadang tidak ada koordinasi dan seponitanitas, maka perlu segera melakukan pengelompokan petani sesuai dengan area dan korban. Deklarasi penentuan ketua kelompok bertempat di halaman masjid Ar-Rahman di desa Rengas 2. Saat deklarasi menurut MBH (58 Th) surverlensi dan kontrol dari aparat Kodim saat ketat, tetapi

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan bapak FI di desa Demangan Tegah Ketiau tanggal 2 Desember 2011

warga dan petani sudah bertekad bahwa “ Iko urang bila ciduk sikok, kite ciduk pule sikok<sup>159</sup>. (*bila di antara kita di .tahan satu, maka kita akan tahan juga satu orang.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan sekaligus pelaku yang terlibat saat itu MBH<sup>160</sup> sebagai berikut;

Terkait dengan pengajuan tersebut pihak petani yang diwakili oleh JKF meminta bantuan pengacara mandiri. Warga dan petani Rengas menyebut pengacara itu sebagai “pengacara *rakyat Rengas*” saudara SS. SH. Atas saran pengacara tersebut pengajuan gugatan tanah warga yang dikuasai oleh PTPN VII Cinta Manis bisa diajukan atas nama salah-seorang warga saja, sebab obyek sengketa yang di ajukan adalah sama. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 1985<sup>161</sup>.

Sementara taktik gugatan di dalam materi gugatan ada kesepakatan bahasa yang digunakan yakni istilah “*warga Rengas*” dipakai pertama kali secara formal dalam tuntutan ganti rugi terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis ke Pengadilan Negeri Kayu Agung tahun 1985. Sebelumnya istilah tersebut hanya dipakai dalam komunikasi sehari-hari saja. Sejak istilah “*warga Rengas*” dipakai secara formal, maka tindakan kolektif perlawanan sering mengatasnamakan warga Rengas.

Kesepakatan tersebut dilanjutkan pada pembentukan kelompok-kelompok petani berdasarkan kekerabatan dan lokasi lahan yang diambil oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Sebagai bentuk taktiknya adalah kelompok-kelompok diberi nama dengan kelompok 171 (jumlah warga 171) kelompok 111 (jumlah warganya

---

<sup>159</sup> Wawan cara dengan MBH di Rengas II tanggal 11 Maret 2012

<sup>160</sup> Wawancara dengan bapak MBH tanggal 30 Nopember 2011 di Rengas 2.

<sup>161</sup> Tahun 1984, disusunlah satu tuntutan melalui jalur litigasi oleh salah seorang petani Rengas yakni JKF .

111) dan kelompok 60 (jumlah warganya 60) dan kelompok petani Rengas yang mewakili petani tidak memiliki lahan.

Pada tahun 1985, tindakan perlawanan kolektif dengan litigasi dilanjutkan ke gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung, namun sampai dengan akhir tahun, tidak ada kabar penjadwalan sidang oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung. Kondisi ketidakpastian ini mendorong petani Rengas melakukan tindakan kolektif perlawanan dalam bentuk lain di tahun berikutnya diantaranya;

Pada tahun 1986, mulai muncul kembali tindakan perlawanan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Kondisi ini diakibatkan oleh perlawanan litigasi oleh petani Rengas belum mendapatkan respon dari Pengadilan Negeri Kayu Agung dan tidak ada kepastian tindakan dari PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis hendak di bawa kemana persoalan lahan petani Rengas.

Dampak dari kondisi tersebut adalah tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh petani Rengas dalam bentuk merusak perkebunan tebu. Strategi yang dilakukan secara terbuka dan provokatif yakni aksi mencabut dan menebangi pohon tebu milik PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis oleh sekelompok petani Rengas dari kelompok 111. Tindakan tersebut dilakukan dengan taktik di area perkebunan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan dijalan akses utama perkebunan.

Pada tahun yang sama, tindakan perlawanan dengan cara merusak perkebunan tebu dengan merubah strategi perlawanan yakni pembabatan pohon tebu serta membakarnya di area 32. Sementara taktik yang digunakan merusak di lokasi yang juga berdekatan dengan pemukiman penduduk Rengas dan dilakukan secara bersama-sama yakni kelompok 171, 111, 60 dan gabungan petani lainnya.

Pada tahun 1987, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk merusak batas dan patok area perkebunan. Tindakan tersebut dilakukan dengan merubah bentuk strategi sebelumnya yakni dengan penanaman pohan nanas, pohan karet di area 32 dan 33 yang sudah *landcleaning* oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis secara bersama-sama. Sementara taktik perlawanan dilakukan dengan cara menuju koordinator lapangan untuk memimpin perlawanan yakni SA<sup>162</sup>. Penunjukan seorang koordinator lapangan untuk melakukan perlawanan merupakan kondisi yang baru sepanjang perlawanan terjadi.

Adanya tindakan perlawanan yang diikuti oleh perubahan strategi dan taktik yang dilakukan pada tahun tersebut berdampak pada capaian (*outcome*) perjuangan yang dilakukan petani Rengas yakni perluasan dukungan yang datang dari mantan kerio seperti MNH (mantan kerio 1968), SA (mantan kerio 1978-1984), AHA (mantan kerio 1984-1988. Seperti yang dituturkan oleh FI <sup>163</sup> sebagai berikut;

Semenjak aksi perlawanan litigasi akhir 1984 yang dilakukan oleh JKF wewakili warga dan petani Rengas. Aksi-aksi perlawanan makin berani dilakukan oleh petani dan semakin terbuka, begitu juga sikap yang dipertunjukkan oleh PTPN VII semakin melakukan penekanan dan memprakondisikan persoalan lahan dengan cara memperkuat keamanan perkebunan terutama lahan di dekat pemukiman. Aksi-aksi perlawanan petani Rengas saat itu mengundang simpati beberapa mantan kerio dan kades untuk ikut dalam aksi perlawanan. Masuknya tokoh-tokoh baru dalam aksi perlawanan merupakan capaian tujuan perjuangan petani.

---

<sup>162</sup> Wawancara dengan bapak SA dilakukan pada tanggal 24 Nopember 2011 di rumah desa Embacang Ogan Ilir.

<sup>163</sup> Wawancara dengan bapak FI seorang aktivis petani dan mengikuti aksi-aksi perlawanan sejak 1981-. Beliau wafat di bulan Juli 2011.

*Outcome* lainnya adalah peristiwa perlawanan dengan litigasi, merusak perkebunan dan menghancurkan batas area perkebunan ternyata menjadi suatu cara perwarisan yang berguna bagi generasi-generasi penerus petani Rengas yang tidak mengalami peristiwa tersebut secara langsung seperti yang diceritakan oleh SPI dan MKS<sup>164</sup> sebagai berikut;

Berdasarkan cerita orang tua kami yang menjadi korban PTPN VII dan mengalami peristiwa intimidasi di tahun 1984 mengatakan bahwa warga dan petani baik yang menjadi korban maupun tidak bersama-sama melakukan aksi-aksi perlawanan meskipun terbatas. Aksi-aksi yang paling sering dilakukan adalah mencabut patok atau batas yang dibuat oleh PTPN VII, ada juga aksi meracuni lahan yang disiapkan untuk tanaman tebu dengan racun imau (sejenis racun getah pohon), bahkan ada juga aksi menanami lahan dan memagarinya dengan bambo atau sejenis gelam dan menjaga bersama-sama keluarga dekat maupun yang jauh. Aksi-aksi yang tergolong membahayakan yang pernah dilakukan warga dan petani adalah menghadang mobil pembersih lahan yang dikawal oleh persirah Raden Taufik dan personal ABRI.

Pada tahun 1988, masih dalam kondisi menunggu perlawanan litigasi, petani Rengas melakukan perlawanan dalam bentuk menyerang kantor PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di Desa Ketiau. Strategi perlawanan yang digunakan dengan cara memasang blokade dan menutup jalan keluar didepan kantor PTPN VII. Sementara taktik yang dilakukan oleh petani menyerang kantor secara berkelompok dan massif tetapi tidak anarkis. Strategi dan taktik perlawanan seperti tersebut merupakan cara baru

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan bapak SPI saat ini sebagai Kepala Desa Rengas I, Muklis adalah salah seorang korban penembakan tanggal 4 Desember 2009, orang tuanya adalah korban PTPN VII. Wawancara tanggal 27 Nopember 2011

perlawanan yang dilakukan petani Rengas dalam menghadapi PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

**GAMBAR 5.5. SUASANA UNJUK RASA DI JALAN MENUJU  
PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG**



Sumber: Dokumentasi Intel di Kayu Agung Tahun 1988

Dalam peristiwa tersebut petani Rengas juga melakukan tuntutan secara terbuka kepada PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis agar membayar ganti-rugi sesuai dengan luas tanah dan harga. Tuntutan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang perlawanan yang dilakukan petani Rengas. Meskipun tindakan perlawanan mengalami kegagalan bahkan tidak direspon oleh PTPN VII dan petani dihadapkan pada pihak keamanan dari ABRI

Pada tahun 1989, tindakan perlawanan kolektif dalam bentuk unjuk rasa ke Pengadilan Negeri Kayu Agung dan kantor Bupati Kayu Agung yang dilakukan oleh kelompok 171,111 dan kelompok petani Rengas. Strategi perlawanan yang digunakan petani Rengas

secara terbuka dan bersama-sama. Sementara taktik dilakukan menunjuk AI sebagai pemimpin aksi. Selain itu petani hanya melakukan aktivitas duduk sambil berkumpul di depan pengadilan negeri Kayu Agung. Bentuk perlawanan dengan unjuk rasa ke instansi pemerintahan di masa Orde Baru merupakan bentuk yang baru dilakukan oleh petani Rengas sepanjang perlawanan terjadi. Kondisi ini dipengaruhi oleh meluasnya dukungan perlawanan petani dan semakin banyak petani yang terlibat dalam perlawanan.

Pada tahun 1990, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk menyerang armada pabrik. Strategi perlawanan yang dilakukan dengan cara menghadang truk pengangkut tebu. Sementara taktik yang digunakan secara terbuka dan dipimpin oleh SB dan dibantu oleh ED, MD, AY, SR, BI, MR dan NI. Kesemuanya mewakili keluarga dari korban PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Walaupun tindakan tersebut tidak membawa hasil karena di hadang oleh aparat ABRI dan pihak keamanan perusahaan.

Bentuk strategi dan taktik perlawanan semacam ini baru pertama kali digunakan oleh petani Rengas dalam menghadapi PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Kondisi ini dipengaruhi oleh kegagalan-kegagalan perjuangan petani dalam mencapai tujuan perlawanan mereka. Bahkan PTPN VII tidak memberikan respon terhadap perlawanan petani Rengas termasuk Pengadilan Negeri Kayu Agung saat itu.

Pada awal tahun 1991, repertoar dengan perlawanan dilakukan dalam bentuk demonstrasi ke PTPN VII. Strategi yang dilakukan oleh petani Rengas adalah menyampaikan tuntutan mereka agar lahan yang diambil oleh PTPN VII dapat diganti-rugi secara adil dan manusiawi atau dikembalikan kepada petani tanpa persyaratan. Sementara taktik perlawanan dilakukan dengan cara

terbuka dan terkonsentrasi pada kantor PTPN VII dan dilakukan oleh berbagai kelompok petani Rengas.

Strategi dan taktik perlawanan dengan cara demonstrasi dan terkonsentrasi di satu area perlawanan merupakan kondisi baru bagi perlawanan petani Rengas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pilihan tempat dan waktu perlawanan akibat dari kuatnya pengaruh politik Orde Baru yang mengedepankan penyelesaian secara meliter dan hukum formal.

Perubahan strategi dan taktik yang terjadi berdampak pada capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas meskipun belum mewujudkan tujuan utama perjuangan. *Outcome* perjuangan yang dirasakan petani Rengas seperti meluasnya aktor baru terlibat dari kalangan generasi muda desa Rengas. Dalam tindakan tersebut petani membawa beberapa bukti yang memperkuat tuntutan warga dan petani Rengas. Bukti-bukti tersebut sebagian dipakai dalam gugatan atas nama JKF di pengadilan negeri Kayu Agung dan sebagian lagi berada di tangan Pemda OKI. Hal menarik bukti tersebut diberikan sendiri oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten OKI yang masuk dalam Tim 9. Peristiwa yang terjadi seperti yang dikemukakan oleh GPI<sup>165</sup>, sebagai berikut;

Munculnya dukungan dari beberapa mantan kerio dan kadus desa Rengas yang ikut bersimpatik diantaranya; pada tahun 1991, muncul aktifitas perlawanan yang dipelopori oleh mantan kerio dan kades pada waktu itu dan didukung oleh sekelompok warga yang tidak menjadi korban PTPN VII. Perlawanan yang dilakukan oleh para mantan kerio itu dipimpin oleh SA dalam bentuk menghadang truk pengangkut pupuk untuk PTPN VII dilakukan oleh generasi muda desa Rengas mengatasnamakan karang taruna yang dipimpin oleh SPI. Peristiwa tersebut terjadi di awal tahun 1995, akibatnya beberapa pemuda karang taruna di bawa ke

---

<sup>165</sup> Wawancara bapak GPI di Rengas tanggal 28 Nopember .2011

Kodim Kayu Agung. Dukungan terhadap aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas terus mengalir dari berbagai kalangan seperti; tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, meskipun mereka bukanlah korban dari PTPN VII dan pemerintah daerah meskipun secara personal.

#### **GAMBAR. 5.6. AKSI MEDUDUKI LAHAN SENGKETA DI TAHUN 1991**



Sumber : Dokumetasi Intel di Kayu Agung

Keterangan: Petani melakukan aksi menduduki lahan sengketa namun berhadapan dengan aparat keamanan yang disiagakan oleh PTPN VII

Kenyataan ini mengungkapkan bahwa tindakan perlawanan yang terjadi dari tahun 1984-1991, tidak lagi dilakukan secara personal dan terbatas tetapi dilakukan berkelompok dan perwakilan. Kondisi terjadi atas gagasan dan usaha beberapa tokoh lokal seperti; MBH, DO, dan SHI menyatukan beberapa petani dalam kelompok-kelompok.

Pada dasarnya keadaan tersebut sudah terlihat semenjak petani Rengas selalu mengubah-ubah bentuk perlawanan dan strategi serta taktik yang digunakan. Perubahan yang terjadi dimaksud untuk memperlihatkan kepada PTPN VII, bahwa perlawanan petani Rengas tidak hanya berhenti sebatas menunggu hasil gugatan di Pengadilan Negeri Kayu Agung yang masih dalam proses persidangan. Tetapi untuk tetap menjaga kondisi dan interaksi-aksi perlawanan yang terus berlangsung.

Masa menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Kayu Agung dari tahun 1984-1991, berdampak pada perluasan isu-isu baru terkait dengan situasi dan lingkungan perlawanan yang terjadi. Isu tentang penambahan jumlah personil ABRI untuk menjaga area PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, isu tentang adanya petani yang diculik dan dipenjarakan di Kodim di Kayu Agung, isu tentang pembayaran ganti rugi tanpa negoisasi, isu tentang pengukuran ulang area yang disengketakan, sampai dengan isu pembersihan lahan disekitar pemukiman penduduk.

Isu yang mengatakan bahwa apa yang dituntut oleh petani Rengas adalah lahan perkebunan hak marga, padahal lahan yang diambil oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis merupakan lahan *pancung alas* bukan hak marga. Ada juga isu yang mengatakan bahwa lahan yang dituntut adalah lahan yang sudah diganti rugi oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, padahal lahan yang dituntut oleh petani Rengas adalah lahan yang belum sama sekali diganti rugi, bahkan lahan tersebut dikuasai oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, karena masyarakat tidak ada yang berani melawan dan berani meklaim.

Isu-isu yang beredar mempengaruhi suasana kehidupan dan hubungan sosial petani Rengas dengan lingkungan karyawan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Kondisi ini sering menyebabkan kualitas hubungan antar warga dan karyawan menjadi saling

mencurigai dan berpotensi konflik sesama warga. Meskipun belum pernah terjadi konflik antara karyawan PTPN VII dengan petani, akan tetapi suasana ketidak harmonisan sangat terasa terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Afandi, Junaidi dan Yuliyus karyawan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis<sup>166</sup>;

Kami merasa sering dicurigai, dijauhi oleh penduduk Rengas, bahkan kami dianggap sumber bencana kemiskinan petani Rengas. Berbagai acara dan kegiatan sosial yang kami adakan dianggap sebagai upaya pembujukan. Anak-anak kami terpaksa bersekolah di dalam kompleks perkebunan, dan tidak bisa bergaul dengan penduduk Rengas. Kami juga merasa takut kondisi ini akan terjadi sesuatu yang tidak bisa kami bayangkan akan keselamatan kami.

Isu-isu tersebut menciptakan kondisi yang terhubung dengan perlawanan dan menjadi media pengetahuan bagi generasi muda Rengas. Seperti yang diceritakan oleh SS<sup>167</sup> sebagai berikut;

Generasi-generasi muda dari petani Rengas yang tidak mengalami peristiwa pada tahun 1981, umumnya mereka mengetahui dan memahami kondisi desa mereka dari para orangtua dan tokoh masyarakat yang sering bercerita tentang aksi-aksi perlawanan di desa mereka. Seperti yang tuturkan oleh FI " *kito urang sering nia dengoh cerita dan pepance dari endung dan tokoh masyarakat*"<sup>168</sup>. (Menurut FI mereka sering mendengar cerita dan semangat yang terus di wariskan oleh orangtua dan tokoh masyarakat Rengas).

---

<sup>166</sup> Wawancara bersama dengan AD, YS, JD di Ketiau Payaraman Ogan Ilir tanggal 12 Januari 2012

<sup>167</sup> Wawancara dengan bapak SS, Penasehat Hukum Mandiri yang terlibat dalam litigasi 1984-1996 di Palembang 1 Desember 2011

<sup>168</sup> Wawancara dengan FD di desa Rengas I tanggal 11 Maret 2012

## GAMBAR 5.7. SUASANA MUSYAWARAH GENERASI MUDA RENGAS



Sumber : Dokumentasi MBH tahun 1986

Keterangan: Generasi Muda Rengas berkumpul dalam rangka mendukung upaya perlawanan petani Rengas di tahun 1986

Berbagai peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas, selalu saja direspon oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dengan aksi pembalasan terhadap berbagai aksi yang dilakukan oleh petani Rengas. Respon yang diberikan PTPN VII adalah mengerahkan keamanan dari ABRI dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat desa bahwa perkebunan tebu adalah milik Negara dan demi kepentingan gula nasional, barang siapa yang melakukan penolakan, protes dan aksi menentang lainnya berarti berhadapan dengan milik Negara akan dianggap sebagai perbuatan pidana. Seperti yang diceritakan oleh MBH<sup>169</sup> sebagai berikut;

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan bapak MBH di Rengas 2 tanggal 28 Nopember 2011

Di tengah-tengah kami menanti kemenangan atas gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kayu Agung, dan menungguh eksekusi yang tak pernah jelas kapan waktunya. Kami melakukan aksi mendatangi pemkab OKI dengan kawalan sangat ketat dari ABRI pada tahun 1992. Selanjutnya kami melakukan aksi tuntutan terbuka di depan Pengadilan Negeri Kayu Agung di tahun 1992 di bawa pengawalan sangat ketat ABRI, salah satu dari kami yang lantang dan berani ditangkap dan dipenjara ia adalah ZBR meskipun dilepas setelah 6 Bulan kemudian”.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tindakan perlawanan petani Rengas yang dilakukan secara kolektif, diikuti dengan perubahan strategi dan taktik yang berbeda dipengaruhi oleh peranan tokoh lokal petani untuk membangun solidaritas kelompok mereka, kelompok-kelompok yang sudah terbentuk membutuhkan arahan dari pemimpin yang dinilai sebagai pribadi yang karismatik, di samping memiliki kemampuan komunikasi, kemauan, rasa percaya diri, dan pengetahuan. Pada saat itu muncul tiga orang yang dianggap sangat memberikan perubahan yakni SA, MBH, dan SS. SH, pengacara Rakyat Rengas. Mereka para tokoh yang mampu membangun solidaritas kelompok petani Rengas dan rasa kepercayaan diri sebagai identitas kelompok yang termarjinalkan.

Penelitian ini juga menemukan kondisi-kondisi yang memberi kontribusi terhadap perubahan strategi dan taktik yang dilakukan yakni;

- a. Isu-isu yang ikut membentuk perlawanan
- b. Adanya kesamaan obyek klaim
- c. Kuatnya tekanan dari pihak pemerintah melalui PTPN VII
- d. Keterlibatan pihak ketiga yakni pengacara mandiri<sup>170</sup>.
- e. Pengaruh sistem politik otoriter Orde Baru

---

<sup>170</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

Perwujudan perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas di tahun 1984-1991 ternyata ditentukan oleh penyesuaian waktu dan tempat perlawanan yang dipilih sebagai mana penjelasan table berikut;

**TABEL 5.3. PILIHAN WAKTU DAN TEMPAT YANG MERUBAH STRATEGI DAN TAKTIK TAHUN 1984-1991**

TAHUN	WAKTU PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	BENTUK PERLAWANAN
1984	Masa Tanam Tebu	Di area perkebunan yang dekat dengan pemukiman	Tindakan Litigasi ke pengadilan
1985	Mobilisasi pihak Keamanan	Kantor PTPN VII	Merusak Perkebunan Tebu
1986	Jadwal persidangan yang belum di acarkan	Pengadilan Negeri	Unjuk Rasa
1988	Merusak patok batas lahan yang dipasang oleh petani	Kantor PTPN VII	Menyerang Kantor PTPN VII secara terbuka
1989	Musim Giling Pertama	di Area 32 dan 33 Rayon VI	Menyerang Armada Truk Pengangkut Tebu
1990	Terbentuknya kelompok petani	Rumah Kepala Desa Rengas 2	Membangun gubuk di area sengketa 33
1991	Panen raya Tebu dan Musim Giling	Kantor BPN dan Pemkab OKI	Demonstrasi Dan Mendatangi Kantor Pemkab Kayu Agung.

Sumber data: Hasil analisis data lapangan 2015

Tabel di atas menjelaskan temuan data lapangan bahwa kondisi perubahan bentuk strategi dan taktik, sangat ditentukan

oleh waktu peristiwa, tempat peristiwa yang akan dilakukan perlawanan dan bentuk peristiwa yang dipilih.

Adapun bentuk repertoar, aktor, strategi, taktik dan capaian tujuan serta hasil yang terjadi sepanjang tahun 1984-1991, sebagaimana penjelasan tabel berikut;

**TABEL 5.4. REPERTOAR, AKTOR, STRATEGI, TAKTIK, CAPAIAN DAN HASIL PERJUANGAN DI RENGAS TAHUN 1984-1991**

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
1984	Tindakan Litigasi ke pengadilan	Petani Rengas dan kelompok petani lainnya	Perwakilan Petani dan Kelompok lainnya	Membentuk Kelompok atas dasar jumlah dan lokasi.	Bertambahnya petani yang terlibat dan masuk pihak ketiga yakni pengacara mandiri,	Perlawanan Petani Rengas belum menunjukkan hasil yang diharapkan yakni mendapatkan kembali lahan dari pihak PTPN VII.atau ganti rugi
1985	Merusak Perkebunan Tebu	Kelompok 171 dan 60	Mencabut dan Menebangi pohon tebu di area perkebunan	Melibatkan pengacara mandiri	Bergabungnya tokoh-tokoh petani dan tokoh masyarakat lainnya	
1986	Menyerang Kantor PTPN VII secara terbuka	Petani dan Seluruh Kelompok dari	Pembabatan tebu dan membakar lahan	Memakai nama identitas perlawanan	Terbentuknya kelompok petani dalam	

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
		171, 111 dan 60	yang ditanami tebu	"warga Rengas"	satu wadah perjuangan.	
1987	Unjuk Rasa	Petani dan Seluruh Kelompok dibantu warga Rengas	Merusak batas lahan	Bertahan di area perkebunan yang dekat dengan pemukiman	Mampu menarik pihak-pihak dari birokrasi untuk bergabung	
1988	Menyerang Armada Truk Pengangkut Tebu	Petani dari kelompok 111 dan beberapa tokoh petani	Memasang blokade dan menutup jalan ke pabrik	Menunjuk Pemimpin Lokal.	Mulai ada dukungan secara personal dari Pemkab memberi perhatian.	
1989	Membakar perkebunan di area sengketa	Petani Rengas dan didukung oleh seluruh kelompok	Mendatangi Kodim 0402 dan meminta melepas petani lainnya	Menyampaikan surat terbuka bahwa lahan bukan milik PTPN VII	Perlawanan mulai mengganngu produksi tebu	
1990	Menutup Jalan ke area 32-33	Petani Rengas dan didukung oleh seluruh kelompok	Mendatangi kantor Pengadilan	Menuntut segera diproses beracara	Pengadilan mulai secara terbuka memberikan informasi jadwal persidangan	

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
1991	Demonstrasi	Petani Rengas dan didukung oleh seluruh kelompok	Menyampaikan Tuntutan secara terbuka	Menyering Kantor PTPN VII secara terbuka dan bersama.	Dukungan meluas datang dari masyarakat dan petani diluar desa.	

Sumber: data penelitian tahun 2013

Tabel di atas menjelaskan perjalanan dari repertoar, aktor, strategi, taktik, isu capaian dan hasil perjuangan petani Rengas. Tindakan perlawanan kolektif petani Rengas yang menjadi ciri di tahun 1984-1991 adalah perlawanan dilakukan dalam bentuk litigasi dengan strategi perwakilan dan taktik menyatukan kelompok-kelompok petani yang ada. Penyelesaian melalui jalur hukum memberi tanda bahwa ketegangan antara petani versus PTPN VII tidak lagi dalam terbatas dan sembunyi-bunyi, tetapi ketegangan sudah bersifat terbuka dan masing-masing pihak dalam klaim yang berbeda.

Tindakan perlawanan yang dilakukan petani Rengas berlangsung selama tujuh tahun yakni dari 1984-1991. Perlawanan yang diikuti perubahan strategi dan taktik memberi dampak terhadap capaian (*outcome*) perjuangan diantaranya;

- a. Meluasnya petani terlibat dalam perlawanan
- b. Terbentuknya kelompok-kelompok petani
- c. Semakin beragam bentuk perlawanan
- d. Meluasnya dukungan perjuangan terhadap petani Rengas.
- e. Media pengetahuan bagi generasi Rengas selanjutnya.
- f. Bergabungnya tokoh-tokoh petani dan tokoh masyarakat lainnya
- g. Mampu menarik pihak-pihak dari birokrasi untuk bergabung

h. Perlawanan mulai mengganggu produksi tebu

Berdasarkan temuan data lapangan menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam periode ini ada empat secara dominan berpengaruh yakni;

- a. Petani Rengas
- b. Pemerintah dengan aparatnya,
- c. PTPN VII Cinta Manis.
- d. Pengacara mandiri <sup>171</sup>.

#### **5.4. Strategi dan Taktik Perlawanan Dalam Mencapai Kemenangan Petani di Tingkat Mahkamah Agung Tahun 1992-1997**

Di tahun 1992-1997, perlawanan dimulai dengan disidangkannya gugatan perdata JKF versus PTPN VII pada Pengadilan Negeri Kayu Agung. Jalannya persidangan selalu diikuti oleh petani Rengas dan juga kontrol yang ketat dari Kodim 402 Kayu Agung.

Di masa proses persidangan sedang berlangsung dan menunggu hasil gugatan di Pengadilan Negeri Kayu Agung, petani Rengas melakukan repertoar dengan perlawanan yang diikuti dengan perubahan strategi dan taktik perlawanan sebelumnya diantaranya:

Tahun 1992, tindakan perlawanan dalam bentuk mendesak BPN Ogan Komering Ilir (OKI) dan Pemkab OKI agar memberi kesaksian dalam persidangan. Strategi perlawanan yang digunakan dengan memaksa BPN dan Pemkab OKI memberikan kesaksian bahwa PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, telah merampas tanah pancung alas bukan tanah eks margas. Sementara taktik perlawanan yang dilakukan petani Rengas melalui pengacara

---

<sup>171</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

mandiri agar majelis Hakim memanggil pihak BPN dan Pemkab OKI memberikan kesaksian. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Masani<sup>172</sup> sebagai berikut;

Kami masyarakat Rengas telah lama menunggu keputusan apa yang bakal dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung, setiap hari kami merasa diawasi dan diikuti oleh pihak intel Kodim. Terasa aktivitas kami selalu dihalang-halangi, kami takut diciduk dan dianiayah. Salah-seorang dari kami Duhro lalu mengajak kami berjumlah 30-45 orang untuk menanyakan perihal batas lahan dan hasil pengukuran oleh Tim 9 ke BPN, dijawab oleh sekretaris Tim belum ada keputusan, selanjutnya kami menghadap ke bagian Kesra Pemkab OKI bagaimana persoalan kami, Pemkab OKI belum bisa memberikan bantuan apapun terkait hal ini, sewaktu kami pulang ke rumah kami dijaga dan diikuti terus oleh pihak keamanan dari ABRI.

Strategi dan taktik yang demikian baru pertama kali digunakan oleh petani Rengas dalam menghadapi PTPN VII secara terbuka dan resmi. Perubahan terjadi disebabkan pengaruh dari mulai terbukanya beberapa personil pemerintah daerah yang terlibat dalam pengeluaran HGU PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Kenyataan ini dimanfaatkan oleh pengacara petani Rengas untuk melakukan penekanan secara terbuka agar pengadilan memerintahkan panitera Negara menghadirkan saksi dari pemerintah daerah. Hasilnya adalah beberapa personil pemerintah daerah menjadi saksi di pengadilan atas gugatan perdata petani Rengas terhadap PTPN VII.

Pada tahun 1992, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung melalui amar keputusannya tanggal 22 Februari 1992, nomor 22.pdt.9/1992 PN KAG. Terkait dengan gugatan perdata atas nama JKF terhadap PTPN VII Unit Usaha

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan bapak MSI di Rengas tanggal 28 Nopember 2011

Cinta Manis mengkabulkan gugatan perdata pemohon Jakfar Bin Puti Hamid. Akan tetapi termohon pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Pada tanggal 5 April 1993 Nomor :99/pdt/1993 PT PLG, Pengadilan Tinggi menolak banding yang diajukan tergugat dan memperkuat putusan pengadilan Negeri Kayu Agung tahun 1992.

Dalam amar keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tahun 1993, disebutkan bahwa surat keputusan tergugat (PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis) yang menyangkut hak ganti rugi hak rakyat yang terkena proyek perkebunan tebu (PTPN XXII /XXXI) atas dasar harga satuan ganti-rugi hak rakyat yang terkena proyek tersebut yang diterbitkan oleh panitia pembebasan tanah daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 12 Februari 1982, sepanjang menyangkut penggugat dinyatakan tidak memiliki landasar hukum dan selanjutnya menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat.

Hasil putusan Pengadilan Tinggi Palembang hak penggugat dalam hal ini tanah atas nama Jakfar bin Puti dinyatakan obyek yang didalamnya terkandung obyek tanah milik rakyat (hak rakyat). Pihak tergugat (PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis) pada bulan Februari 1993 atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut termohon PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis selanjutnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Pada tanggal 09 Juli 1994, putusan perkara register nomor 200K/PDT/1994, Mahkamah Agung RI menetapkan menolak permohonan kasasi tergugat (PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis) dan menghukum tergugat untuk membayar ganti-rugi kepada penggugat<sup>173</sup>.

---

<sup>173</sup> Berdasarkan salinan keputusan MA 1996 menyatakan bahwa Perjuangan jalur hukum dengan menguasai ke pengacara membuahkan hasil, yakni dengan

Pada tahun 1994, keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan JKF *incracht* atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemenangan gugatan petani Rengas terhadap PTPN VII menjadi capaian (*outcome*) terbesar dari perlawanan petani Rengas.

### **GAMBAR 5.8. Suasana Demontrasi di Depan Pengadilan Negeri Kayu Agung**



Sumber: Dokumentasi Intel Kayu Agung

Keterangan: Suasana Kegembiraan Petani Rengas atas Kemenangan Gugatan di Tingkat MA tahun 1996 di Pengadilan Negeri Kayu Agung.

---

ditetapkannya 40,725 Ha lahan warga a.n keluarga alm Jakfar yang sudah *incracht* melalui putusan MA tahun 1994 dan dinyatakan sah milik warga dengan ganti rugi sebesar Rp. 49, 567,076 juta yang menurut pengakuan PTPN VII sudah dibayarkan di pengadilan dan lahan lain a.n Arfa'i. Tetapi oleh PTPN VII tidak dilaksanakan secara benar.

Kemenangan gugatan petani Rengas atas PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di tingkat MA tahun 1994, yang sudah *incracht* ternyata eksekusi atas keputusan MA tidak berjalan seperti harapan dan perintah hukum. Juru sita Pengadilan Negeri Kayu Agung belum melaksanakan kewajiban hukum untuk melakukan eksekusi keputusan MA.

Kondisi ini berakibat pada munculnya tindakan perlawanan kolektif yang dilakukan oleh petani Rengas dari beberapa kelompok petani yang ada seperti; kelompok 171 yang dipimpin oleh RHN, kelompok 111 yang dipimpin oleh AI, kelompok 60 yang dipimpin oleh SI, dan kelompok warga dan petani yang tidak termasuk kelompok 171, 111, 60, dipimpin oleh MD diantara bentuk perlawanan yang dilakukan seperti;

Pada tahun 1995, tindakan perlawanan dalam bentuk mendesak pemerintah daerah Sumatera-Selatan. Strategi perlawanan yang digunakan adalah membatalkan HGU yang dikeluarkan pada tahun 1986. Taktik perlawanan yang digunakan adalah mengajukan bukti bahwa dasar perolehan lahan perkebunan tebu sudah menyalahi aturan dan tidak memperhatikan lahan adat yang berkembang yakni pancung alas. Selain itu pengukuran luas lahan tidak sesuai dengan lahan yang dimiliki oleh petani Rengas yang dijadikan lahan pencadangan.

Penggunaan strategi dan taktik sedemikian merupakan kondisi baru yang dilakukan oleh petani Rengas dalam menghadapi PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Hal ini bisa terjadi akibat dari pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berdaya melakukan eksekusi amar keputusan MA . ini disebabkan oleh pengaruh sistem politik otoriter Orde Baru dan adanya mobilisasi kekuatan petani Rengas oleh beberapa tokoh petani seperti MBH, FI dan AI.

Tahun 1996, tindakan perlawanan dalam bentuk protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh MBH mewakili kelompok petani Rengas yang didampingi oleh pengacara mandiri SS. SH. Strategi dilakukan dengan cara menemui beberapa pejabat terkait dengan proses pengurusan tanah petani ditahun 1981, diantaranya kepala BPN Kayu Agung , Sekretaris Wilayah Daerah Kayu Agung, Ketua DPRD Kayu Agung. Sementara taktik yang digunakan adalah dalam pertemuan tersebut petani bersama pengacara rakyat kembali menanyakan status ganti rugi dan HGU yang terkait dengan status kepemilikan tanah warga Rengas ke Pemerintah Kabupaten Kayu Agung.

Strategi dan taktik perlawanan seperti demonstrasi dan protes sebenarnya pernah dilakukan oleh petani Rengas, namun menggabungkan keduanya dalam satu bentuk perlawanan merupakan suatu bentuk yang baru dilakukan. Kondisi terjadi akibat dari kuatnya bukti kepemilikan petani atas lahan dan belum pernahnya terjadi jual beli atas area yang disengketakan. Selain itu ada semangat kolektifitas yang muncul dari kesadaran bersama yang dimotori oleh beberapa pimpinan kelompok dan pengacara mandiri.

Pada tahun 1997, tindakan perlawanan terus berlanjut dalam bentuk penyerangan kantor PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di Ketiau Payaraman. Aksi ini dipimpin oleh empat orang tokoh lokal yang menjadi korban PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, yakni MBH, Arfai Bin Syueb, Gupriadi dan SPI. Strategi yang digunakan dengan mengutus petani sebagai wakil untuk bertemu manajemen PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis saat itu Surono. Dalam keterangan yang disampaikan pada utusan petani bahwa PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis segera berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Kayu Agung dalam proses ganti-rugi selambat-lambatnya

10 hari pada bulan Mei 1997<sup>174</sup>. Sementara taktik yang digunakan dalam tindakan tersebut adalah menunjuk perwakilan dari tokoh kharismatik dan memiliki pengalaman terlibat dalam perlawanan.

Perubahan strategi dan taktik perlawanan sangat dipengaruhi oleh hadirnya tokoh lokal dalam putaran perlawanan yang mampu member harapan bagi generasi-generasi selanjutnya. Selain itu, isu-isu utama yang beredar mampu membentuk dan mempercepat lahirnya perlawanan petani Rengas. Kondisi mempercepat terbentuknya repertoar baru dan mampu berintegrasi dengan kondisi dan situasi dari waktu ke waktu berikutnya. Seperti yang di ceritakan SB<sup>175</sup> sebagai berikut;

Cerita tentang kegigihan dan keberanian serta seringnya keempat orang tersebut di masukan penjara dan dipidana oleh PTPN VII, menjadi api kesadaran bagi perjuangan selanjutnya. Keempat tokoh lokal generasi 1981 adalah; MC (55 TH meninggal dunia oleh aparat 1983), SS (77 TH), DD (73 TH) dan MBH (67 TH).

Perubahan strategi dan taktik perlawanan berlangsung selama lima tahun dari tahun 1992-1997. Kondisi ini berdampak kepada capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas meskipun belum mewujudkan tujuan utama capaian tersebut di antaranya;

- a. Meluasnya pihak terlibat
- b. Terbentuknya kelompok-kelompok petani
- c. perlawanan dilakukan secara terbuka
- d. Pemerintah memberikan respon dengan mengevaluasi hasil kerja tim 9.

---

<sup>174</sup> Berita Acara pertemuan antara petani Rengas dengan Managemen PTPN VII tahun 1997. Ditulis di atas kertas berlogo garuda dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak. Sumber keterangan dari Misbahudin diwawancara tanggal 15 Desember 2011.

<sup>175</sup> Wawancara bapak SB di desa Rengas tanggal 2 Desember 2011

- e. Membawa perlawanan ke level nasional melalui jalur litigasi<sup>176</sup>.
- f. Musyawarah dimulai dengan pihak terkait: BPN Pemkab, Kodim dan petani
- g. Kemenangan litigasi

Perwujudan perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas di tahun 1992-1997 ternyata ditentukan oleh penyesuaian waktu dan tempat perlawanan yang dipilih sebagai mana penjelasan table berikut;

**TABEL 5.5. PILIHAN WAKTU DAN TEMPAT YANG MERUBAH STRATEGI DAN TAKTIK 1992-1997**

TAHUN	WAKTU PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	BENTUK PERLAWANAN
1992	Masa persidangan	Di Pengadilan Negeri	Litigasi semangki intensif
1993	Menjelas pemberian kesaksian	Kantor BPN dan Pemkab	Mendesak Pemkab dan BPN
1994	Eksekusi keputusan tidak jelas	Pemkab dan DPRD Kayu Agung	Protes.
1995	HGU dari arsip BPN menjelaskan bahwa HGU tidak sesuai dengan peruntukan	Kantor PTPN VII	Demonstrasi

<sup>176</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

TAHUN	WAKTU PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	BENTUK PERLAWANAN
1996	Pengrusakan pondok-pondok petani	.di Area 32 dan 33 Rayon VI	Penyerangan.
1997	Pembacaan hasil keputusan kasasi dan meminta salinan dari pengadilan	Pengadilan Negeri Kayu Agung	Mendatangi Pengadilan

Sumber data: Hasil analisis data lapangan 2015

Tabel diatas menjelaskan temuan lapangan penelitian ini bahwa perubahan strategi dan taktik perlawanan ditentukan oleh waktu peristiwa, tempat peristiwa yang dipilih untuk dilakukan tindakan perlawanan dan bentuk perlawanan.

Penelitian ini juga menemukan kondisi kondisional yang memberi konstribusi terhadap perubahan strategi dan taktik perlawanan yang terjadi yakni;

- a. Kemenangan petani melalui jalur litigasi
- b. Petani lokal yang terus-menerus memobilisasi massanya
- c. Tindakan perlawanan yang terus menerus berdampak sangat mengganggu pemerintah daerah
- d. Isu-isu terus mengalami penambahan dan menjadi kepercayaan umum
- e. Upaya membangun organisasi gerakan<sup>177</sup>.

Temuan lapangan menjelaskan bahwa ciri pihak yang terlibat dalam periode ini diidentifikasi menjadi empat pihak antara lain ;

- a. Pihak dari PTPN VII ditambah pihak keamanan dari ABRI
- b. Pihak Pemerintah Daerah ditambah BPN

---

<sup>177</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

- c. Pihak dari Petani Rengas
- d. Pihak dari Penasehat Hukum Mandiri<sup>178</sup>

Adapun perwujudan dari repertoar dengan perlawanan (*repertoire of contention*) petani Rengas sepanjang tahun 1992-1997 berdasarkan hasil analisis data ditemukan bentuk repertoar, aktor, strategi, taktik, capaian dan hasil sebagaimana penjelasan tabel berikut;

**TABEL.5.6. REPERTOAR, AKTOR, STRATEGI, TAKTIK, CAPAIAN DAN HASIL YANG TERJADI DI RENGAS TAHUN 1992-1997**

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
1992	Mendesak Pemkab dan BPN.	Petani Rengas dibantu masyarakat luas Rengas dan petani dari luar desa	Memaksa BPN dan Pemkab membuka kembali arsif dan memberikan kesaksian.	Meminta pengacara kepada Majelis Hakim untuk memanggil BPN dan Pemkab menjadi saksi.	Sidang beracara di gelar di PN Kayu Agung	Perlawanan petani Rengas belum menunjukkan hasil yang diharapkan yakni mendapa
1993	Menghancurkan patok	Petani dan gabungan kelompok petani Rengas	Membatalkan HGU.	Menekan BPN dan Pemkab untuk memberikan saksi	Dukungan petani meluas dari petani desa lainnya	
1994	Menahan truk perkebunan	Petani dan gabungan	Mengutus Perwakilan	Memaksa manager PTPN VII	Beberapa anggota tim 9	

<sup>178</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
		an kelompok petani Rengas	menemui manajemen PTPN VII	agar membawa bukti HGU	memberikan kesaksian di PN	tkan kembali lahan dari pihak PTPN VII.atau ganti rugi
1995	Protes	Petani dan gabungan kelompok petani Rengas	Meminta PTPN VII menunjukan bukti HGU	Menemui anggota DPRD Kayu Agung	Mulai mendapat perhatian dari kalangan dewan terbatas	
1996	Demonstrasi	Gerakan perlawanan petani Rengas	Menemui pejabat dan DPRD OKI.	Melobi dan menanyakan satu lahan dan HGU agar dibatalkan.	Musyawarah dimulai dengan pihak terkait: BPN, Pemkab, Kodim dan petani	
1997	Penyerangan	Gerakan perlawanan petani Rengas	Menghentikan produksi gula musim giling	Menunjuk pemimpin sebagai utusan yang berpengalaman dan kharismatik dari kalangan petani Rengas	Kemenangan gugatan di PN dan Kasasi	

Sumber: data penelitian tahun 2013

Tabel di atas menjelaskan perjalanan repertoar, aktor, strategi, taktik, isu, capaian dan hasil perlawanan. Semua kondisi tersebut

berpengaruh terhadap intensitas perlawanan terjadi yang disusul dengan perlawanan balasan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Klaim dan reklamasi dalam tahun ini memberikan keuntungan tersendiri bagi petani Rengas, sebab membuka jalan alternatif berperannya aktor petani dan meluasnya jaringan baru secara fleksibel dan sesuai dengan peluang dan ancaman yang dihadapi.

## 5.5. REFLEKSI

Munculnya repertoar dalam tindakan perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas sesungguhnya berawal dari realisasi berbagai janji-janji PTPN VII terhadap petani Rengas seperti ganti-rugi, intiplasma dan memperkejakan warga lokal. Kenyataan ini menjadikan rasa sangat kecewa petani dan mendorong petani melakukan perlawanan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Rasa sangat kecewa petani sesungguhnya menjadi unsur penting dari proses pemingkasan perlawanan. Kondisi ini sejalan dengan pemikiran Gamson tentang tiga komponen *framing* perlawanan yang salah satunya adalah rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan muncul dari kegusaran moral (*moral indignation*) yang berhubungan dengan kekecewaan. Kegusaran moral ini sering kali berhubungan dengan ketidaksetaraan yang tidak memiliki legitimasi yaitu perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu-individu atau kelompok-kelompok yang dipersepsikan sebagai ketidakadilan. Meskipun demikian pandangan Bert Klandermans<sup>179</sup>, bisa juga dipertimbangkan bahwa deprivasi relative (ketidakpuasan relative) adalah suatu bahan baku atau bahan mentah (*raw material*) yang masih perlu mendapatkan dukungan sumber daya lainnya agar individu bisa dimobilisasi.

---

<sup>179</sup> Klandermans, Bert. *The Social Psychology of Protest*, Oxford/Cambridge, MA: Blackwell. 1997: 205

Bisa dikatakan bahwa repertoar dengan perlawanan yang dilakukan petani Rengas di tahun 1981-1997, sebagai suatu bentuk repertoar dengan perlawanan yang diikuti dengan perubahan strategi dan taktik dalam masa “terbatas”.

Terbatasnya ruang strategi dan taktik di tahun 1981-1997, disebabkan oleh tekanan politik masa orde baru yang otoritarian, pemerintah melakukan pendekatan dengan kekuatan militeristik, akan tetapi ditemukan juga kondisi yang menunjukkan ketidaksiapan petani Rengas seperti masih ada kelompok yang menginginkan tanah diganti rugi dan sebagian lagi petani menginginkan tanah dikembalikan tanpa syarat apapun, belum terkumpulnya bukti-bukti kepemilikan lahan bukan eks marga secara keseluruhan dan peristiwa perlawanan yang terjadi masih belum banyak diketahui atau meluas.

Kenyataan tersebut sesungguhnya sudah mencirikan repertoar namun belum seperti yang dipikirkan oleh Tilly, sebab Tilly memosisikan repertoar sebagai aksi-aksi perlawanan yang dilakukan secara kolektif. Tetapi fungsi sebagai sebuah perlawanan dengan repertoar sebagai alat atau media yang mempertemukan aktor-aktor yang mewakili kelompoknya untuk melakukan tindakan perlawanan dan melakukan perjuangan bersama sudah mulai terlihat dalam tahun ini.

Adanya perlawanan litigasi di tahun 1984, terjadi bukan disebabkan adanya dukungan jaringan, dukungan politik atau hukum atau kekuatan sumber daya lainnya yang menciptakan perlawanan terbuka. Tetapi lebih disebabkan adanya mobilisasi partisipasi dan dukungan dari aktor mandiri yakni pengacara mandiri.

Temuan ini tidak seperti model mobilisasi tindakan kolektif dari Charles Tilly yang melihat bahwa tindakan perlawanan terbuka akan banyak ditentukan oleh dukungan sumber daya,

jaringan, fasilitas, kesempatan dan tindakan kolektif. Peruntukan litigasi merupakan hasil dari strategi salah seorang petani Rengas yang bernama JKF dibantu pengacara mandiri. Upaya inilah mobilisasi partisipasi menyebar ke petani lainnya terutama tokoh petani kharismatik Rengas. Mobilisasi partisipan yang terjadi dipercepat oleh faktor masuknya pengacara mandiri yang mampu memberikan keyakinan kepada petani Rengas bahwa perlawanan litigasi akan memberikan mereka dasar untuk melakukan perlawanan.

Kondisi litigasi yang terjadi nampaknya tidak sejalan dengan tipologi Tilly tentang repertoar lama dan repertoar baru. Menurut Tilly, perlawanan dengan aksi yang disebut sebagai *Popular Courts* masih digolongkan sebagai repertoar lama dengan karakteristiknya lokal, dilakukan oleh aktor lokal, sebatas keluarga atau kelompok yang tidak berwakil. Temuan data menunjukkan bahwa litigasi yang terjadi nampaknya kombinasi dari karakter repertoar lama dan repertoar baru yang dibedakan oleh tiga hal yakni; masuknya pengacara mandiri, menggunakan simbol public dan dilakukan dengan perwakilan petani.

Repertoar Perlawanan petani Rengas yang terjadi di masa Orde Baru, menggambarkan adanya perjalanan bentuk repertoar dan perubahan strategi serta taktik yang dipengaruhi tiga hal mendasar yakni;

- a. Sistem politik otoriter.
- b. Pilihan waktu, pilihan tempat serta bentuk capaian (*outcome*) perjuangan yang realitis.
- c. Kondisi yang bersifat kondisional seperti; terbentuknya kelompok-kelompok petani, pemerintah belum memberikan respon, baru terbentuk kelompok namun belum membentuk organisasi, keputusan Pengadilan dan Mahkamah Agung

atas gugatan petani terhadap PTPN VII yang tidak pasti pelaksanaannya eksekusinya.

Ada keterlibatan pihak ketiga yakni pengacara mandiri kuasa hukum dari JKF sebagai penggugat dan mewakili petani Rengas ke PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis berdampak terhadap mobilisasi dan pemanfaatan peluang yang ada untuk bersama-sama melakukan tindakan perlawanan litigasi. Kondisi ini tidaklah terjadi secara kebetulan tetapi menunjukkan bahwa petani mampu menginterpretasi keadaan yang dihadapi dengan mempertimbangkan pilihan waktu dan pilihan tempat.

Temuan ini sekaligus menjelaskan bahwa repertoar kategorik dalam kasus ini, disebabkan adanya penggunaan strategi dan taktik inovatif, bukan ditentukan oleh periode dan kategori repertoar lama dan baru seperti konsep Tilly.

Adanya repertoar dengan perlawanan dengan litigasi diikuti dengan strategi baru tindakan kolektif sementara taktik dilakukan secara gugatan ke pengadilan dan memakan waktu yang cukup lama. Wujud dari litigasi tersebut sesungguhnya berdampak pada capaian (*outcome*) dari tujuan perlawanan petani Rengas yang merubah keadaan sosial petani yakni;

- a. Petani Rengas mulai memperjuangkan tuntutan mereka secara berkelompok dan dalam satu lokasi tertentu saja;
- b. Petani yang berjuang terdiri dari beberapa kelompok yang didasarkan pada lokasi lahan mereka yang berdekatan, hubungan keluarga, petani yang menjadi korban, dukungan dari mantan kerio, isu-isu terus meluas dan diwariskan, dan keterlibatan pengacara rakyat secara mandiri. Ada pergeseran isu dan perubahan strategi yang mampu menarik petani-petani lokal baru untuk bergabung dalam baris perlawanan petani Rengas. Masuknya pendukung baru dari unsur

pengacara mandiri merupakan salah satu yang khas dalam aksi-aksi perlawanan terbuka episode ini.

- c. Perlawanan menggunakan upaya litigasi atas nama JKf terhadap PTPN VII mempertegas posisi petani Rengas bahwa mereka melakukan perlawanan secara terbuka dan kondisi ini bisa menjadi perubahan strategi dan taktik secara terbuka dan dari pra konflik ke konflik<sup>180</sup>.

Perwujudan repertoar dengan perlawanan melalui tindakan litigasi adalah suatu kenyataan yang merubah bentuk perlawanan petani Rengas menjadi konflik terbuka. Kondisi yang demikian tidak sejalan dengan konsep repertoar Tilly. Menurut Tilly dalam keadaan “bentuk repertoar lama atau repertoar baru” yang paling dominan merubah kondisi adalah faktor kekuatan struktural kelompok terlibat, bukan pada aktor petani. Temuan penelitian ini juga menjelaskan bahwa kunci perubahan bentuk repertoar terletak pada aktor petani itu sendiri yang mampu mempengaruhi kekuatan struktural kelompok. Aktor berada dalam posisi relatif dalam struktur sosial yang lebih besar yang mampu memperjuangkan rasa keadilan dan hak.

Repertoar perlawanan dengan litigasi petani Rengas pada kenyataannya mampu membawa perubahan sosial seperti yang telah dijelaskan di atas meskipun belum membawa hasil perjuangan yang diharapkan. Keadaan ini tidak sejalan dengan konsep Tilly yang hanya menjelaskan bentuk-bentuk repertoar dari suatu periode ke periode lainnya tanpa memberi analisis terhadap dampak repertoar yang dilakukan terhadap perubahan sosial.

Berdasarkan hasil analisis data lapangan ditemukan kondisi yang menjadikan repertoar dengan perlawanan yang diikuti perubahan strategi dan taktik bisa berlangsung terus-menerus

---

<sup>180</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

secara berkelanjutan dari tahun ke tahun berikutnya sebagai berikut;

Pada tahun 1981-1983 kondisi yang menjadi faktor penyambung repertoar dengan perlawanan petani Rengas dari tahun ke tahun berikutnya adalah ;

- a. Hasil perjuangan yang belum tercapai
- b. Ada petani yang melakukan perlawanan tetap bertahan dan berlangsung terus<sup>181</sup>.
- c. Isu-isu yang berkembang membentuk kepercayaan umum.

Pada tahun 1984-1991, kondisi yang menjadi penyebab berlangsungnya repertoar dengan perlawanan terjadi di tahun berikutnya adalah;

- a. Hasil perjuangan belum terwujud meskipun ada capaian tujuan.
- b. Upaya Litigasi yang belum memberikan hasil dan keputusan
- c. Aksi-aksi perlawanan yang terjadi secara terbuka bisa menjadi media pengetahuan bagi generasi selanjutnya.
- d. Dukungan perlawanan terhadap petani meluas dan menambah petani yang terlibat<sup>182</sup>.

Pada tahun 1992-1997, kondisi yang mempengaruhi keberlanjutan repertoar dengan perlawanan yang diikuti perubahan strategi serta taktik di tahun selanjutnya adalah;

- a. Hasil perjuangan belum terwujud, meskipun ada capaian tujuan
- b. Tidak ada realisasi dari kemenangan gugatan.
- c. Tidak ada respons dari pemerintah daerah
- d. Petani yang terlibat semakin meluas dan tetap memelihara perlawanan

---

<sup>181</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

<sup>182</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

- e. Menguatnya kesadaran petani Rengas dan lahirnya solidaritas dan identitas dalam bentuk penyatuan kelompok<sup>183</sup>.

Repertoar perlawanan petani Rengas yang berlangsung secara kontinyu dan melibatkan banyak petani lainnya bergabung melakukan perlawanan bersama merupakan perwujudan dari perubahan sosial dan menjadi wahana belajar dari pengalaman yang diturunkan oleh petani lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan oleh Alexander dan Mast<sup>184</sup>, bahwa sebenarnya berfungsi sebagai “wahana pelatihan bagi aktor lainnya”, yakni melatih aktor-aktor dengan beberapa cara di mana aktor kuat mampu membangun, dan mempertahankan posisi dominasi.

Petani-petani yang terlibat dalam cara rutin atau dipraktekkan dalam melakukan aksi selalu berimprovisasi kreatif dan meningkatkan kualitas penampilan disebabkan kondisi yang serba terbatas dan kemampuan petani membaca situasi yang dihadapinya. Kehadiran tokoh petani yang mampu memberikan semangat dan mencontohkan keberanian dalam tindakan perlawanan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, seperti MBH, AI, JKF dan MD merupakan perwujudan dari ketokohan mereka dan rasa senasib yang mereka alami selama ini.

Adapun kemenangan gugatan petani Rengas terhadap PTPN VII ini menjadi *resources* bagi aksi perlawanan petani Rengas selanjutnya. Kemenangan tersebut memobilisasi sumberdaya lainnya dan mengundang simpati beberapa mantan kerio dan kadus desa Rengas yang selama ini takut berbicara atau

---

<sup>183</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

<sup>184</sup> Alexander, J. C., & Mast, J. L, Introduction: Symbolic action in theory and practice. The cultural pragmatics of symbolic action. In J. C. Alexander, B. Giesen, & J. L. Mast (Eds.), *Social performance. Symbolic action, cultural pragmatics, and ritual* New York: Cambridge University Press, 2006: 1-28.

memberikan dukungan akhirnya mendukung untuk bergabung dan menjadi pembela yang aktif mengadakan aksi-aksi perlawanan.

Kondisi yang demikian tidak sejalan dengan pemikiran Tilly, menurutnya perubahan dari satu bentuk repertoar ke repertoar lainnya dalam satu masa merupakan bagian dari kondisi ekspulsif yang bersifat umum saja. Akan tetapi temuan penelitian ini menjelaskan bahwa peristiwa kemenangan gugatan petani terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis bukan suatu kemenangan semata, tetapi merubah banyak hal terkait bentuk repertoar, strategi dan taktik, capaian tujuan dan petani itu sendiri.

Peristiwa ini menandai beberapa hal penting dari perubahan sosial yang mampu membingkai beberapa peristiwa perlawanan seperti; meluasnya dukungan, bertambahnya petani yang terlibat, semangkin banyak masyarakat luas yang tahu perjuangan petani Rengas, pemerintah daerah mulai merasa terganggu dengan perlawanan petani Rengas, menguatnya solidaritas dan identitas petani bahwa mereka harus melakukan perlawanan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Beberapa kondisi di atas menjadi bingkai perlawanan yang mampu menyatukan dan menyesuaikan keadaan yang dihadapi petani Rengas. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Zald, Snow dan Tarrow disebut sebagai proses *framing* yakni suatu proses kolektif interpretasi, atribusi dan konstruksi sosial yang menjadi perantara peluang dan tindakan<sup>185</sup>. Maksudnya adalah proses framing dalam teori proses politik digunakan dalam memahami kesuksesan dan kegagalan organisasi ataupun gerakan sosial meraih simpati luas dari masyarakat. Pembentukan *framing* secara interaktif berkaitan dengan struktur mobilisasi, proses *framing* membutuhkan alat atau modul.

---

<sup>185</sup> Charles Tilly e-tal, *Dynamic of Contentious, Dynamics of Contention*. New YoCambridge University Press, 2005: 16

Penelitian ini juga menemukan penjelasan terkait dengan isu-isu yang beredar di area perlawanan. Isu-isu ternyata mempercepat munculnya repertoar dengan strategi dan taktik baru terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Mansis. Hal ini terjadi pada dua tingkatan yakni;

- a. Pada tingkat petani sebagai pihak yang melakukan perlawanan dan memerlukan pendukung.
- b. Pada tingkat membangun organisasi gerakan, meskipun secara formal belum terbentuk<sup>186</sup>.

Kondisi ini mendukung pemikiran McAdam, McCarthy dan Zald tentang struktur mobilisasi yang memposisikan struktur mobilisasi sebagai suatu sarana atau media baik formal maupun informal yang dimanfaatkan untuk aksi-aksi perlawanan yang memberikan ruang bagi lahirnya aksi-aksi baru kolektif<sup>187</sup>. Sebab terjadi akumulasi tindakan perlawanan dalam suatu bentuk repertoar. Kondisi ini sesungguhnya menggambarkan skematisasi dua dimensi dari lingkup *repertoire* yakni pertama; bentuk repertoar yang menempatkan beberapa *performance* dari karakteristik dalam setiap repertoar yang umumnya berhubungan tindakan secara umum. Kedua; strategi dan taktik perlawanan yang menunjukkan orientasi biasa ke arah pihak berwenang atau pihak yang dilindungi .

Hasil analisis data terkait dengan tindakan perlawanan dengan cara berkelompok terbatas yang terjadi di tahun 1981-1983, lebih pada membangun strategi penguatan-penguatan kelompok-kelompok petani yang berbasis pada keluarga sekerabat dan

---

<sup>186</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

<sup>187</sup> Doug McAdam, John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (editor's). 1996, *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural*, USA: Cambridge University Press., hal. 2. Lihat juga tulisan dalam bagian ini dari Abdul Wahib Situmorang, *op-cit*, hal: 23-24

dihubungkan dengan lahan yang saling berdekatan. Sementara taktik dilakukan secara berkelompok dengan cara menduduki lahan atau menanam lahan yang berdekatan dengan tempat tinggal atau pemukiman penduduk Rengas.

Keadaan ini dilakukan dengan tujuan keamanan dan kewaspadaan petani sendiri, bila sewaktu-waktu pihak PTPN VII melakukan kegiatan pengawasan atau aksi merusak apa yang ditanam oleh petani di atas lahan yang disengketakan tersebut. Petani bisa melawan dengan mengajak petani lainnya yang berdekatan.

Tahun 1984-1997, tindakan perlawanan dilakukan dengan cara kelompok meluas. Keadaan ini terkait dengan dilakukannya perlawanan dengan litigasi yang berdampak pada konflik terbuka antara petani Rengas versus PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Strategi ini mampu menciptakan kondisi sebuah perlawanan berkelanjutan yang mulanya kecil mengalami perluasan dukungan sehingga melibatkan petani-petani yang jauh lebih banyak. Sementara taktik yang dilakukan dengan memanfaatkan isu-isu kritis dan bantuan dari pengacara mandiri yang terlibat. Perwujudan dari perluasan petani yang terlibat merupakan hasil kemampuan tokoh-tokoh lokal dari petani menginterpretasi peluang yang ada dan membuka jalan bagi lahirnya bentuk repertoar.

Terkait dengan isu-isu yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat dan mempercepat munculnya repertoar perlawanan, sebab isu-isu tersebut bisa menciptakan kepercayaan umum didalam petani yang menganggap suatu tindakan akan dilakukan oleh PTPN VII. Hasil analisis data menunjukkan sebagaimana tabel berikut;

**TABEL 5.7. ISU-ISU YANG BERKEMBANG TAHUN 1981-1997**

Tahun	ISU-ISU YANG BERKEMBANG
1981	Lahan petani diambil secara paksa oleh PTPN VII
1982	Ganti rugi tidak manusia dan tanpa negoisasi
1983	Tindakan repesif aparat, petani ada yang dianiaya sampai meninggal dan Lahan dianggap tanah marga
1984	Ganti-Rugi belum ada kesepakatan
1985	Tindakan repesif yang dilakukan oleh PTPN VII
1986	Pengukuran tidak adil dan sepihak
1987	Pemerintah belum merespons
1988	Mobilisasi pihak keamanan oleh PTPN VII
1989	Penutupan area masuk ke lahan sengketa oleh PTPN VII
1990	Jadwal persidangan yang tidak jelas.
1991	Penambahan personi lkeamanan dari lampung
1992	Ganti rugi yang tidak jelas pembayarannya
1993	Pengukuran Ulang sepihak oleh PTPN VII
1994	Pemerintah mulai merespon serius PTPN VII
1995	Menambah personil keamanan
1996	HGU yang dimiliki PTPN VII ternyata tidak sesuai dengan yang diperuntukan.
1997	Eksekusi Keputusan Pengadilan tidak Jelas

Sumber data: Hasil analisis data lapangan 2015

Tabel di atas menjelaskan isu-isu kritis yang beredar dan berkembang dilingkungan petani Rengas. Isu-isu tersebut mempercepat pembentukan repertoar dan pilihan strategi serta taktik yang akan dilakukan oleh petani Rengas. Isu yang beredar merupakan kelanjutan dari isu-isu uang diwariskan dari tahun ke tahun perlawanan.

Temuan kondisi di atas nampaknya sejalan dengan pemikiran Rubin and Rubin<sup>188</sup> yang menggarisbawahi kontinum lanjut dari bergabungnya banyak aktor dalam melawan ketidakadilan dan

---

<sup>188</sup> Rubin and Rubin, *Community Organizing and Development*. A Pearson Education Company. Massachusetts, 2001, hal: 25-35

ketimpangan yang menjadi dasar melahirkan agenda perlawanan lebih besar dan bervariasi. Konsekuensi lanjut dari kontinum tersebut adalah gagasan alternatif yang menggabungkan kepentingan ekonomi dengan analisis relasi sosial seperti isu-isu tentang kebijakan dan HAM. Kontekstual strategi dan taktik perlawanan memerlukan respon yang tepat di tingkat petani yang digerakan oleh petani atau pewartalannya.

Temuan tersebut bertolakbelakang dengan pemikiran Tilly yang mengemukakan bahwa munculnya repertoar akibat dari aktor ke aksi perlawanan yang dilakukan secara kolektif ditentukan oleh dua hal yakni; pelebagaan tindakan perlawanan dan pengaruh dari bentuk repertoar sebelumnya.

Adapun hasil perjuangan petani Rengas sepanjang tahun 1981-1997, belum mencapai hasil perjuangan yang diharapkan. Tindakan perlawanan dalam berbagai bentuk yang diikuti dengan strategi dan taktik inovatif sering mengalami kegagalan bahkan mengakibatkan resistensi dari pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Seperti mobilisasi aparat keamanan di area sengketa, penangkapan petani yang melakukan penolakan eksekusi lahan, penghancuran batas tanah yang dibuat petani oleh pihak perkebunan dan pembersihan lahan yang di atasnya masih ada tanaman petani secara paksa, keputusan pengadilan negeri yang memenangkan gugatan petani kemudian diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung atas gugatan petani terhadap PTPN VII, ternyata juga tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan negeri Kayu Agung.

Ada pun perubahan strategi dan taktik perlawanan yang dilakukan petani Rengas sesungguhnya berdampak pada capaian perjuangan meskipun belum mewujudkan tujuan utama dari perlawanan tersebut. Capaian (*outcome*) tersebut merupakan kenyataan bahwa perubahan strategi dan taktik perlawanan yang dilakukan petani Rengas mampu membawa perubahan sosial

terhadap petani Rengas. Beberapa capaian perjuangan petani Rengas diantaranya:

Tahun 1981-1983, capaian perjuangan yang bisa dilakukan petani Rengas adalah kondisi perlawanan dari personal meluas menjadi keluarga dan kerabat serta petani lainnya yang tidak menjadi korban. Perlawanan itu juga menjadi media atau informasi bagi petani lainnya, bertambahnya petani yang terlibat langsung perlawanan dan mulai ada perlawanan bahwa tanah yang dilakukan secara tindakan kolektif melalui jalur litigasi mengatasnamakan petani Rengas area 32 dan 33.

Di tahun 1984-1991, capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas adalah Meluasnya petani terlibat dalam perlawanan, terbentuknya kelompok-kelompok petani

semangkin beragam bentuk perlawanan, meluasnya dukungan perjuangan terhadap petani Rengas, media pengetahuan bagi generasi Rengas selanjutnya, bergabungnya tokoh-tokoh petani dan tokoh masyarakat lainnya, mampu menarik pihak-pihak dari birokrasi untuk bergabung, perlawanan mulai mengganggu produksi tebu.

Di tahun 1992-1997, capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas diataranya; Meluasnya pihak terlibat, terbentuknya kelompok-kelompok petani, perlawanan dilakukan secara terbuka, pemerintah memberikan respon dengan mengevaluasi hasil kerja tim 9, membawa perlawanan ke level nasional melalui jalur litigasi<sup>189</sup>. Musyawarah dimulai dengan pihak terkait: BPN Pemkab, Kodim dan petani, Kemenagan litigasi. Meskipun capaian tersebut belum mewujudkan tujuan utama perjuangan petani Rengas, namun kondisi ini menjawab bahwa perubahan strategi dan taktik melalui repertoar dengan perlawanan bisa memberi perubahan

---

<sup>189</sup> Hasil pendalaman data dan temuan penelitian 2013

sosial bagi petani Rengas, capaian di atas adalah wujud dari perubahan dimaksud.

Kegagalan perlawanan petani Rengas dalam mencapai tujuan utama perjuangannya menunjukkan bahwa ada kekuatan suprastuktural yang melindungi PTPN VII untuk tetap mampu mengendalikan berbagai perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas saat itu. Hal ini bisa terjadi, sebab pemerintah Orde Baru dengan kekuasaannya selalu menggunakan kekuatan militer untuk melindungi dan mengendalikan stabilitas nasional termasuk aset-aset pembangunan seperti PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Pengaruh sistem politik otoriter Orde Baru yang membuat berbagai persoalan yang dihadapi PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis selalu diselesaikan dengan cara-cara kekuatan militer dan kriminalisasi petani. Perlawanan petani Rengas selalu dianggap melawan Negara dan menghambat kepentingan pembangunan nasional. Kalaupun ada solusi yang ditawarkan oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis selalu saja solusi yang merugikan pihak petani Rengas seperti ganti rugi yang tidak adil dan dipaksakan.

Pengaruh sistem politik masa Orde Baru yang otoriter sangat berdampak pada perlambatan perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas. Kenyataan ini berdasarkan perubahan strategi dan taktik perlawanan yang memakan waktu lama dan hampir tidak ada aktivitas perlawanan yang berdampak mengganggu serta memberi tekanan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Repertoar dengan perlawanan yang diikuti perubahan strategi dan taktik meskipun belum berhasil mewujudkan tujuan utama perjuangan petani Rengas di masa Orde Baru, namun capaian (*outcome*) perjuangan menunjukkan sudah terjadi perubahan sosial yang dialami oleh petani Rengas. Perubahan tersebut selalu memelihara dan menjaga keberlangsungan repertoar dengan perlawanan tetap hidup dan terjadi lagi di masa selanjutnya.

## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN TAKTIK PERLAWANAN SERTA CAPAIAN PERJUANGAN DI MASA REFORMASI TAHUN 1998-2010**

---

#### **6.1. Pengantar**

Bab ini merupakan kelanjutan dari pembahasan bab sebelumnya, akan tetapi fokus pembahasan pada pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah mengapa strategi dan taktik perlawanan itu mengalami perubahan dalam menghadapi PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis masa Reformasi tahun 1998-2010. Selanjutnya penelitian ini juga akan menjawab pertanyaan kedua dari penelitian ini yakni capaian (*outcome*) dari perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas yang terjadi di masa Reformasi dalam rentang waktu 1998-2010.

Hasil jawaban pertanyaan tersebut penting bagi penelitian ini untuk mengetahui lebih mendalam tentang repertoar dengan perlawanan (*repertoire of contention*) itu terjadi di Rengas dan wujud capaian (*outcome*) dari perjuangan petani Rengas selama masa Reformasi tahun 1998-2010.

Repertoar dengan perlawanan di masa Reformasi 1998-2010 merupakan keberlanjutan tindakan perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas pada masa Orde Baru. Dengan isu, bentuk repertoar, aktor, strategi, taktik, capaian dan hasil dan faktor perubahan yang berbeda juga. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan sistem politik di Indonesia dari masa Orde Baru yang otoriter ke masa Reformasi yang terbuka dan demokratis serta faktor lainnya.

## **6.2. Perlawanan dengan Perubahan Strategi dan Taktik serta Tujuan Perjuangan Petani Rengas Tahun 1998-2008**

Awal mula terjadinya repertoar dengan perlawanan di tahun 1998 adalah adanya kondisi ketidakjelasan pelaksanaan eksekusi Keputusan Mahkamah Agung tahun 1996 terkait dengan gugatan petani Rengas terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang menetapkan bahwa tanah adalah milik rakyat. Kondisi ketidakpastian ini diperkuat lagi dengan berbagai isu yang beredar di tengah petani Rengas saat itu seperti;

- a. Sikap pihak PTPN VII, yang mengklaim bahwa lahan petani Rengas semuanya telah dibebaskan dan diganti rugi. Sehingga tindakan pengelolaan lahan adalah legal tidak bisa ditolak lagi oleh petani Rengas. Ketika pertentangan argumen antara kedua pihak semakin kuat maka muncullah penggunaan usaha-usaha konfrontatif.
- b. Manajemen PTPN VII menggunakan kekuatan sekutu dalam hal ini aparat keamanan dari Polda Sumatera-Selatan yang memuncak menjadi aksi-aksi kekerasan.
- c. Penggunaan kekerasan melalui pengerahan aparat Polisi dan keamanan perkebunan saling berhadap-hadapan dengan petani Rengas yang sudah didukung oleh aktor-aktor lainnya, seperti masyarakat desa Ketiau, Sri kembang dan Tanjung Batu. Masyarakat ketiga desa ini menjadi pagar hidup menghadang pihak kepolisian agar tidak terjadi konfrontasi di area perkebunan Rayon VI<sup>190</sup>.

Isu-isu tersebut mempercepat munculnya repertoar dengan perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas secara terbuka, massif dan konfrontatif, diantara bentuk tindakan perlawanan tersebut adalah;

---

<sup>190</sup> Pendalaman data dan hasil temuan lapangan 2013

Pada tahun 1998, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk tindakan menduduki lahan perkebunan yang dikuasai PTPN VII. Adapun strategi perlawanan yang digunakan adalah mendirikan gubuk-gubuk dan memasang patok di area 32 dan 33. Sementara taktik perlawanan yang digunakan secara terbuka, massif dan dipimpin oleh SPI dan GPI. Tindakan ini sebelumnya telah memberi tahu pihak kepolisian dari Polres OKI bahwa petani akan melakukan aksi pendudukan lahan. ini seperti yang diceritakan oleh JKF<sup>191</sup>, sebagai berikut;

Akhirnya petani Rengas mengambil inisiatif untuk memasang batas-batas dengan mendirikan pondok sederhana di lahan yang telah mereka ukur sebelumnya secara massif dan terbuka. Kejadian pematokan batas dilakukan masyarakat setelah tidak dicapai kesepakatan dalam pertemuan pada Tanggal 13 Maret 1999 antara petani Rengas, PTPN VII, Polres OI, Pemda Ogan Ilir dan BPN Ogan Ilir . Aksi ini dilanjutkan dengan aksi penyampaian tuntutan secara terbuka di jalan menuju pengadilan negeri Kayu Agung. Surat terbuka dibacakan oleh DH mewakili kelompok-kelompok yang ada. Intinya petani Rengas meminta kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melihat persoalan Rengas sebagai bagian perjuangan kaum petani yang menjadi miskin oleh keberadaan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Penggunaan strategi perlawanan dengan tindakan mendirikan gubuk dan memasang patok pembatas serta taktik perlawanan secara terbuka, massif dan terkoordinasi merupakan kondisi baru yang digunakan dalam menghadapi PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di masa Reformasi. Keadaan ini dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi sebelumnya yakni kemenangan gugatan petani terhadap PTPN VII dan perubahan politik yang dialami oleh

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan bapak JKF di desa Ketiau tengah tanggal 3 Nopember 2011

Indonesia serta mulai terlibatnya tokoh perlawanan petani dari generasi muda seperti SPI dan GPI.

Keadaan yang demikian mendorong munculnya tindakan repertoar dengan perlawanan lainnya di tahun yang sama. Tindakan perlawanan dalam bentuk demonstrasi ke pemerintah daerah Sumatera-Selatan di Palembang. Strategi yang digunakan mengutus perwakilan petani dari kelompok 171, 111, 60 dan petani Rengas yang tidak tergabung dalam kelompok tersebut. Perwakilan tersebut dipimpin oleh MHD dibantu oleh AI, ZH, GPI dan FRI. Taktik yang dilakukan petani Rengas menyampaikan surat protes dan mendesak pemerintah provinsi Sumatera-Selatan dalam hal ini gubernur Rosyihan Arsyad agar merealisasi keputusan MA.

Penggunaan strategi dan taktik dengan mengutus perwakilan serta menyampaikan surat protes mendesak provinsi Sum-Sel merupakan kondisi baru yang digunakan oleh petani Rengas selama masa perlawanan terjadi. Hal ini perwujudan dari bentuk perubahan strategi dan taktik didalam mencapai (*outcome*) perjuangan petani Rengas.

**GAMBAR 6.1. DEMONTRASI DENGAN CARA  
MEMBACAKAN SURAT TUNTUTAN TERBUKADI JALAN  
MENUJU PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG**



Sumber: Dokumentasi GPI tahun 1999

Keterangan: Petani sedang berdemonstrasi di jalan menuju Pengadilan Negeri Kayu Agung, salah-seorang ketua kelompok petani membacakan tuntutan agar eksekusi segera dilaksanakan oleh pihak pengadilan negeri.

Repertoar dengan perlawanan yang diikuti oleh perubahan strategi dan taktik perlawanan di awal era Reformasi tersebut membuahkan capaian (*outcome*) perjuangan yakni adanya respons serius dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengeluarkan surat perintah tugas Bupati OKI nomor 300/260/II/1998 tanggal 18 Nopember 1998 tentang tindaklanjut penyelesaian konflik lahan antara PTPN VII Cinta Manis dengan Warga Kecamatan Tanjung Batu (sekarang Payaraman).

Hasil penelitian Tim terpadu dari kabupaten OKI tersebut dinyatakan bahwa tanah-tanah warga yang berada di Kecamatan Tanjung Batu desa Sri Tanjung, Sri Kembang, Rengas, Ketiau, Beti,

Sri Bndung, desa Tanjung Atap ternyata adalah tanah warga yang berada dalam area PTPN VII Cinta Manis Rayon II dan Rayon III, dan perusahaan sama sekali tidak memiliki plotting area<sup>192</sup>. Seperti yang diceritakan oleh SPI<sup>193</sup> sebagai berikut;

Tuntutan warga Rengas terhadap PTPN VII. Cinta Manis yang dilakukan secara tertulis kemudian disampaikan kepada Menteri Negara Pendaaygunaan BUMN melalui perwakilan Sumatera-Selatan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 Mei 1999 pengacara rakyat Rengas bersama Bupati OKI dan 2 (dua) orang wakil petani Kecamatan Tanjung Batu dijadwalkan bertemu dengan bapak Menteri BUMN, akan tetapi diwakili dengan pertemuan dengan staf ahli Menteri BUMN pak Mulyadi, ternyata staf ahli Menteri tersebut tidak menguasai permasalahan yang ada.

Pada tahun 1999, repertoar dengan perlawanan dilakukan dalam bentuk ujuk rasa dengan strategi perlawanan meminta dukungan politik dari DPRD Tingkat I maupun Tingkat II. Sementara taktik perlawanan yang dilakukan bertemu dengan DPRD OKI. Hasilnya adalah diadakan rapat dengar pendapat antara instansi terkait yang keputusannya adalah pada tanggal 2 Februari 2000, diadakan rapat kembali bersama dipimpin langsung oleh bapak Wagub Drs. H. Satya Nazori di auditorium pemerintah daerah Sumatera-Selatan. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa PTPN VII merasa "*kebal hukum*" sebab mereka

---

<sup>192</sup> Data diambil dari dokumen berita acara hasil inventarisasi areal perkebunan PG Cinta Manis yang di klaim warga Tanjung Batu tertanggal 19 Desember 1998 di Kayu Agung. Penyampaian berita acara hasil inventarisasi Tim Kabupaten OKI telah disampaikan kepada Gubernur Sum-Sel melalui nomor surat: 593/ 4885/I/1999 (lihat lampiran 3)

<sup>193</sup> Wawancara di desa Rengas 2 tanggal 3 Nopember 2011, saat itu sebagai sekretaris desa Rengas 2 dan pernah menjabat sebagai anggota BPD

berulang kali meminta penguluran waktu hanya untuk mengajukan bukti-bukti yang dipaksakan ada<sup>194</sup>.

Penggunaan strategi meminta dukungan politik dari DPRD Kabupaten dan Provinsi dan taktik bertemu dengan secara khusus dengan DPRD Kabupaten merupakan hal baru yang terjadi sepanjang perlawanan petani Rengas dengan PTPN VII. Dampak dari strategi dan taktik tersebut adalah capaian (*outcome*) pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten Ogan Komering Ilir serius menyelesaikan personal antara petani Rengas versus PTPN VII. Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan rapat bersama antara petani, PTPN VII dan pemerintah daerah. Sepanjang rapat berlangsung di auditorium pemerintah Sum-Sel petani Rengas melakukan unjukrasa dan demonstrasi di halaman DPRD OKI.

#### **GAMBAR 6.2. SUASANA DEMONSTRASI DI DPRD OI**



Sumber: Dokumentasi GPI

---

<sup>194</sup> Hasil rapat tersebut menjadi diktum dikeluarkannya surat nomor: 593.83/6623/1/2000 tentang perintah gubernur kepada PTPN VII untuk segera membayar ganti rugi kepada petani Rengas sesuai keputusan Kasasi MA 1996.

Keterangan: Suasana Demontrasi didepan Gedung DPRD Ogan Ilir

Pada bulan Agustus tahun 2000, repertoar dengan perlawanan dilakukan dalam bentuk menghadang dan menutup akses jalan di jalan lintas Timur Kayu Agung. Strategi yang digunakan memobilisasi petani Rengas dan masyarakat desa Rengas. Sementara taktik yang digunakan dalam tindakan tersebut memaksa pemerintah Kabupaten OKI melakukan rapat di pendopo kantor Pemda OKI pada tanggal 27 Agustus 2000. Sebab tindakan perlawanan dilakukan akibat dari sikap PTPN VII yang tidak melaksanakan hasil kesepakatan dan perintah gubernur untuk segera membayar ganti rugi sesuai limit waktu yang ditetapkan sebelumnya.

Kondisi dilatarbelakangi oleh bukti-bukti yang diajukan oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis kemudian diteliti oleh TIM Tingkat I dan TIM Tingkat II tanggal 8 Februari 2000, selanjutnya hasil penelitian tesebut diserahkan kepada TIM terpadu tanggal 20 Februari 2000, sedangkan pembahasannya dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2000 di ruang Bina Praja Pemrop Sumatera-Selatan.

Hasilnya adalah waktu yang telah disepakati yakni 1 (satu) Minggu berlalu begitu saja bahkan hingga 1 (satu) bulan. Dalam rapat tersebut dinyatakan oleh Bupati OKI bahwa waktu yang diberikan kepada PTPN VII untuk menunjukkan bukti tanding sudah habis, dan dianggap PTPN VII tidak dapat menunjukkan bukti tanding dan harus segera melaksanakan pembayaran ganti rugi yang dituntut oleh warga Rengas. Akan tetapi Bupati OKI memberi waktu 5 (lima) hari lagi kepada PTPN VII untuk menunjukkan bukti kepemilikan tandingan dimaksud. Menurut keterangan MHD<sup>195</sup> sebagai berikut;

---

<sup>195</sup> Wawancara dengan bapak MHD 6 Nopember 2011 di desa Rengas 2

Kami petani sudah siap dengan bukti-bukti tandingan untuk diadu dengan bukti PTPN VII. Ternyata PTPN VII bersikap arogan dengan menantang petani Rengas untuk mengadu data-data yang dimiliki. Aksi perlawanan pun berlanjut dimana petani Rengas mengumpulkan berbagai bukti tandingan yang diminta oleh pihak PTPN VII, hingga batas waktu yang ditetapkan PTPN VII tidak pernah sama sekali menunjukkan bukti yang dimiliki.

Berpegang pada hasil rapat di kantor Gubernur menyimak amar petunjuk dan arahnya sebagai berikut :

- a. Memberikan petunjuk dan arahan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada warga
- b. Bahwa ganti rugi tersebut dilakukan dengan pelepasan hak oleh Camat di Kantor Camat Tanjung Batu
- c. Bahwa pelapasan hak tersebut harus disaksikan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati OKI serta kuasa hukum rakyat Rengas<sup>196</sup>.

Berdasarkan penelitian oleh tim terpatu pemerintah provinsi Sumatera-Selatan, maka disimpulkan bahwa dari aspek legalitas bukti-bukti yang diajukan oleh petani berupa surat keterangan usaha yang diketahui Kades dan Camat dikeluarkan tahun 1982 s/d 1998 diyakini kebenarannya dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan hasil *plotting area* yang diusahakan PTPN VII ternyata perusahaan menggarap area di luar izin pencadangan seluar 1.249 Ha dan belum diganti rugi<sup>197</sup>.

Seperti yang diungkapkan oleh SS.SH<sup>198</sup> sebagai berikut;

---

<sup>196</sup> Lihat materi arahan dalam surat nomor: 593.83/6623/1/2000.

<sup>197</sup> Ringkasan isi keputusan gubernur Sumatera-Selatan nomor: 593.83/6623/1/2000

<sup>198</sup> Wawancara dengan bapak SS.SH di Palembang 20 Desember 2011, anggota tim pengacara mandiri.

Petani Rengas bersama kuasa hukum mengambil langkah-langkah hukum melalui surat permohonan tanggal 4 September 1999 nomor .94/PDT/IX/1999 kepada Bapak Gubernur Sumatera-Selatan dan memohon agar dapat menerbitkan surat keputusan mengenai pengembalian tanah usaha milik 324 berikut kewajiban PTPN VII untuk membayar kerugian masyarakat selama 27 tahun.

PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis mengingkari perjanjian tersebut tanpa alasan. Petani Rengas saat itu marah dan merasa dipermainkan oleh pihak PTPN VII, seperti yang diceritakan FI<sup>199</sup> sebagai berikut;

Petani Rengas sudah berkumpul di balai Kecamatan Payaraman pagi itu, tetapi dipindahkan ke Gedung Agung Kantor Bupati OKI. Sesuai kesepakatan petani Rengas dengan pihak PTPN VII dan disaksikan oleh Tim pelaksanaan ganti rugi dari Pemda OKI yang dipimpin oleh Sekwilda OKI dan Camat Tanjung Batu bertempat di Kantor Camat pada tanggal 12 Agustus 2000, tanpa konfirmasi dengan pihak-pihak tersebut, administrasi PTPN VII Cinta Manis langsung mengumumkan bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi ditunda sampai tanggal 18 Agustus 2000. Kejadian ini membuat warga Rengas naik pitam dan emosional, karena pihak PTPN VII untuk kesekian kalinya membohongi kesepakatan bahkan tidak mematuhi putusan kasasi Mahkamah Agung.

Melihat kejadian kesekian kalinya, maka Gubernur Sumatera-Selatan, menerbitkan telex register nomor. 593/896/I/TEL dan nomor. 593/897/I/TEL, yang ditujukan kepada Bupati OKI dan tembusannya juga dikirim kepada PTPN VII, Administrasi dan Jaksa pengacara negara selaku kuasa hukum PTPN VII Cinta Manis.

---

<sup>199</sup> Wawancara bapak FI di desa Rengas I tanggal 2 Desember 2011

Adapun amar tersebut meliputi :

- a. Pembayaran selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2000
- b. Pembayaran untuk 324 orang dengan luas tanah 1502 Ha
- c. Dari 1502 Ha sebanyak 614 bidang nilai ganti ruginya Rp 6,2 Miliar berpedoman pada buku perincian perhitungan ganti-rugi untuk 324 orang warga disusun oleh kuasa hukum rakyat Rengas bersama kuasa hukum PTPN VII<sup>200</sup>.

Pihak PTPN VII kembali diberi waktu 1 (satu) minggu untuk membayar ganti rugi secara keseluruhan. Dengan ketentuan;

- a. Ganti rugi diberikan kepada warga berjumlah 324 orang untuk tanah seluas 1502 ha terdiri dari 614 bidang
- b. Nilai ganti rugi sebesar 6.2 Miliar yang pelaksanaannya bersama-sama dengan TIM penyelesaian ganti rugi atas tanah dan atas Tanah tanam tumbuh dalam areal PTPN VII.
- c. Apabila pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis tidak memenuhi apa yang dinyatakan dalam sub 1 (satu), maka tanah-tanah warga yang berada dalam areal PTPN VII *harus dikembalikan kepada petani Rengas sebagai pemiliknya* (enclave) serta membayar/membagi hasil usaha selama 17 tahun mengelola tanah-tanah tersebut kepada masyarakat<sup>201</sup>.

Penggunaan strategi memobilisasi petani Rengas dengan taktik memaksa pemerintah Kabupaten OKI melakukan rapat merupakan kondisi baru yang terjadi selama perlawanan petani Rengas. Keadaan ini dimungkinkan bisa terjadi disebabkan semakin meluasnya dukungan terhadap perjuangan petani dan

---

<sup>200</sup> Lihat surat nomor: 593.83/6623/1/2000 tentang pembayaran ganti rugi dan surat nomor :593.83/0716/1/2001 tentang pembayaran ganti rugi dan area yang digarap oleh PTPN VII (lihat lampiran 6)

<sup>201</sup> Petikan amar keputusan gubernur sumatera-selatan surat nomor:593.83/0716/1/2001.

pemerintah daerah membuka diri memfasilitasi persoalan antara petani versus PTPN VII.

Pada tahun yang sama petani Rengas melakukan tindakan perlawanan dalam bentuk mendesak PTPN VII. Kondisi ini terjadi akibat dari Sikap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang selalu menunda ganti rugi dan menutupi bukti *plot area*. Strategi yang digunakan meminta dukungan dari DPRD II OKI agar mengevaluasi kebijakan dan keputusan bersama antara pemerintah daerah dengan PTPN VII yang belum menunjukkan hasil perubahan. Sementara taktik yang digunakan petani Rengas adalah meminta Pemerintah Daerah dan DPRD OKI agar memaksa dan menginstruksikan keputusan bersama direalisasikan atau PTPN VII mengembalikan lahan yang digunakan sebagai perkebunan tebu.

Penggunaan strategi meminta dukungan dari DPRD OKI dan taktik meminta pemerintah daerah dan DPRD OKI memaksa PTPN VII merealisasikan keputusan bersama atau PTPN VII mengembalikan lahan milik petani Rengas merupakan keadaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun taktik agar PTPN VII mengembalikan lahan milik petani Rengas adalah hal yang baru terjadi selama perlawanan berlangsung. Keadaan ini dipengaruhi oleh adanya mobilisasi petani di berbagai tempat dan semakin besarnya dukungan pemerintah daerah terhadap perjuangan petani Rengas. Selama berlangsungnya perlawanan tersebut petani melakukan unjuk rasa di depan ruas jalan menuju pabrik penggilingan gula di Ketiau.

**GAMBAR 6.3. PETANI RENGAS MELAKUKAN UNJUK RASA  
DI RUAS JALAN MENUJU PABRIK PTPN VII DI KETIAU**



Sumber: Dokumentasi peneliti

Keterangan: Petani Rengas melakukan Unjuk Rasa di ruas Jalan menuju pabrik PTPN VII di desa ketiau. Isi tuntutan agar PTPN VII melakukan perjanjian dan kesepakatan yang telah ada.

Capaian (*outcome*) dari perubahan strategi dan taktik perlawanan yang terjadi adalah adanya respon positif dari Pemerintah Daerah Sumatera-Selatan dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (saat itu masih belum menjadi kabupaten Ogan Ilir), meminta kepada Kementerian BUMN dan PTPN VII agar mengembalikan lahan warga secepatnya dan memberikan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan lahan warga. Desakan petani Rengas dan dukungan dari birokrat terhadap tuntutan kepada PTPN VII suatu tanda bahwa Pemerintah Daerah mendukung dan memberi jalan terhadap perjuangan petani Rengas selanjutnya, meskipun pemerintah pusat melalui kementerian

BUMN belum memberikan respon terhadap tuntutan tersebut. Terkait desakan pemerintah daerah, DPRD dan petani Rengas PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis menambah intensitas pengawasan dan pengamanan areal perkebunan khususnya areal di Rayon VI desa Rengas<sup>202</sup>.

Akhirnya Gubernur Sumatera-Selatan mengeluarkan surat bernomor: 593.83/0716/I/2001, tanggal 15 januari tahun 2001<sup>203</sup>, meminta kepada Kementerian BUMN dan PTPN VII agar mengembalikan lahan warga secepatnya dan memberikan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan lahan warga. Kemudian disusul dengan surat Gubernur nomor. 593.83.0716/1/2001, tanggal 15 Pebruari 2001 yang ini isinya adalah : Tuntutan warga Rengas terhadap tanah mereka yang dikuasai oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis direspon positif oleh Pemerintah Daerah Sumatera-Selatan melalui Di sisi lain, ada upaya-upaya yang serius dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera-Selatan terkait belum ada penyelesaian masalah antara petani dengan PTPN VII.

Selanjutnya Gubernur Sumatera-Selatan mengirim surat tanggal 15 Mei 2001 nomor. 593/2198/1 perihal mohon bantuan penyelesaian tuntutan masyarakat Kecamatan Tanjung Batu a/n Dumroh.Cs terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis kepada wakil Presiden RI yang pada waktu itu Ibu Megawati yang kemudian disusul surat 9 Agustus 2001 no.593/3822/1 perihal yang

---

<sup>202</sup> Dalam catatan kronologi konflik Rengas milik Pemda Sum-Sel dijelaskan bahwa tanggal 28 November tahun 2000, atas desakan masyarakat Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Ogan Komering Ilir, melalui surat nomor : 593.83/6623/I/2000, meminta kepada Kementrian BUMN dan PTPN VII agar mengembalikan lahan warga secepatnya dan memberikan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan lahan warga selama 17 tahun sejak berdirinya Perkebunan Tebu Cinta Manis. (lihat lampiran 8)

<sup>203</sup> Gubernur Sumatera Selatan saat itu adalah Bapak Rosihan Arsyad dan desa Rengas saat itu masih belum menjadi kabupaten Ogan Ilir.

sama kepada Bapak Wakil Presiden RI karena ada perganti Presiden dan Wakil Presiden periode 2001-2004 (Ibu Megawati dan Bapak Hamzah Haz). Surat tersebut ditembuskan juga ke DPR RI dan DPRD Sumatera-Selatan.

Pada tahun 2001, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk mendatangi kantor Gubernur di Palembang dan BPN. Strategi yang digunakan bergerak secara massif dan menginap di halaman kantor Gubernur, sementara taktik yang dilakukan petani Rengas adalah bertemua secara paksa sekda pemprov dan meminta untuk membatalkan HGU PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis atas tanah yang belum pernah diganti-rugi kepada BPN. Aksi perlawanan ini dipimpin oleh FRI dan SPI dengan diikuti oleh 70-80 petani Rengas. Seperti yang diceritakan oleh SPI, GPI dan SHI<sup>204</sup> sebagai berikut;

Tindakan perlawanan pun berlanjut seperti aksi menuntut ke birokrasi agar membatalkan HGU, menuntut DPRD TK I dan TK II agar kembali mengkoreksi pemberian lahan cadangan di Rengas dan membuat pansus untuk persoalan Rengas.

Seperti yang dituturkan oleh salah-seorang tokoh masyarakat TH (56 TH) sebagai berikut : Penggunaan strategi bergerak secara massif dan taktik penyanderaan pejabat pemerintah daerah merupakan kondisi yang baru terjadi sepanjang perlawanan petani Rengas. Hal ini dipengaruhi oleh peran tokoh petani lokal yang mampu memobilisasi petani lainnya dan menginterpretasikan kondisi yang ada. Dalam penelitian ini terungkap ada empat orang tokoh petani Rengas yakni MHD, SB, JKF, SFI, didukung oleh GPI, FRI dan pengacara rakyat Rengas. SS. SH<sup>205</sup>. Mereka yang berupaya melakukan perubahan dan membangun kesadaran petani untuk memperkuat solidaritas. Tindakan penyanderaan terhadap pejabat

---

<sup>204</sup> Wawancara bersama dengan SPI, GPI, SHI di desa Rengas 2 tanggal 5 Desember 2011.

<sup>205</sup> Hasil wawancara bapak SPI di Ketiau tanggal 28 Juli 2011

daerah adalah suatu upaya komunikasi dan memelihara komitmen keseriusan pemerintah daerah menyelesaikan dan mendukung perjuangan petani Rengas, bukan suatu upaya kriminalitas.

Pada tahun 2002, repertoar dengan perlawanan dilanjutkan dalam bentuk blockade akses jalan di area 32 dan 33 rayon VI. Strategi perlawanan dilakukan dengan cara penahanan truk-truk pembawa tebu ke pabrik. Sementara taktik perlawanan dilakukan dengan cara membakar tebu yang dimuat di truk ke pabrik. Tindakan ini dipimpin oleh MHD dan DH yang diikuti oleh 30 petani Rengas. Capaian (*outcome*) dari aksi blokade ini adalah memberi pengaruh terhadap kondisi PTPN VII, karena dilakukan pada masa musim giling tebu tahun 2003. Aksi ini terpaksa dilakukan sebab PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis sama sekali tidak mengindahkan keputusan pengadilan dan instruksi Gubernur.

Pada bulan Mei tahun 2002, tindakan yang dilakukan petani Rengas tersebut ternyata mendapat tanggapan serius oleh PTPN VII dengan melakukan pemecatan terhadap keluarga dari petani yang menjadi buruh harian lepas. Manajemen PTPN VII beralasan keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan penuntutan lahan terhadap PTPN VII. Sikap tidak akomodatif dan arogan yang diperlihatkan manajemen PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, direspon oleh beberapa tokoh warga dan petani Rengas dengan upaya berkomunikasi dengan kelompok-kelompok warga petani lainnya.

Meluasnya isu-isu sekitar peristiwa pemecatan buruh harian lepas oleh PTPN VII tidak saja melukai komitmen PTPN VII terkait pekerja lokal tetapi mendatangkan ketidakpuasan petani Rengas terhadap kebijakan dan kesewenangan PTPN VII. Seperti

Perusahaan lah kedoyanan igo ngeluarke janji-janji tempo ari sikok yo nak ngaja warga siko begawe di perusahaan jadi

pegawe tetap idak lepas, padamuloyo kite urang pecaye,,,nak lah hamper semua wargo beregot agam nian dengan rencano tu...tapi sejak kite protes lah bayak korban yang dipecat dak tahu ape salah ye....". (Awalnya kita warga sangat berharap perusahaan memperkerjakan warga sekitar sebagai pegawai tetap,,,tapi kenyataannya hanya harian lepas, semenjak kita sering protes dan demonstrasi banyak warga yang jadi korban dipecat) <sup>206</sup>.

Berbagai tindakan perlawanan dilakukan oleh petani Rengas akhirnya dibalas oleh PTPN VII dengan cara seperti penambahan personil dari TNI dan keamanan perusahaan yang berasal dari luar daerah seperti Lampung untuk menghentikan perlawanan petani Rengas. Seperti yang diceritakan SN<sup>207</sup>, sebagai berikut;

Sebagai contoh, jika pihak perusahaan memasang patok, maka petani akan mencabut patok-patok tersebut, dan kemudian memasang patok-patok baru. Jika tanah tersebut sudah ditanami tanaman, maka tanaman tersebut akan dicabut kemudian petani menanami tanaman baru yang mereka sukai, dan berbagai tindakan tandingan lainnya. Taktik perlawanan ini terjadi secara terbuka, massif dan berulang-ulang (*repeated*).

Penelitian ini menemukan biasanya pihak perkebunan akan beraksi balik menggunakan kekerasan, baik dengan tangan-tangan militer maupun aparat negara lainnya atau dengan "trend mutakhir" menggunakan tangan-tangan preman setempat atau preman-preman luar yang didatangkan khusus untuk itu.

Pada tahun 2003, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk menutup jalan utama menuju perkebunan di area 32 dan 33 Rayon VI desa Rengas pada tanggal 22 s/d 26. Strategi perlawanan

---

<sup>206</sup> Wawancara dengan bapak TH di desa Srikembang tanggal 24 Nopember 2011

<sup>207</sup> Wawanara dengan bapak SHN di desa Sri Kembang 1 tanggal 4 Nopember 2011

dilakukan oleh petani dengan cara memasang pagar dari bambu dan bahan lainnya, sementara taktik perlawanan dilakukan dengan menyerobot, mencabut dan merusak area perkebunan yang akan di semai bibit tebu. Tokoh petani penggerak peristiwa blokade adalah Jakfar bin Puti Hamid. MHD, SBN . Keempat tokoh akhirnya dikriminalisasi oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Kenyataannya petani yang dikriminalisasi oleh PTPN VII dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tahun 2003. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung mereka dinyatakan bersalah, berdasarkan keputusan nomor. 32/Pid.B/PN.KAG tanggal 24 April 2003. Selanjutnya para terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang hasilnya MHD dan lainnya dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan nomor: 54/Pid/2003/PT/PLG tanggal 18 Nopember 2003. Akan tetapi pada tingkat Kasasi dinyatakan mereka tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan perkara. Keputusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan ketetapan Majelis Hakim Mahkamah Agung hari Senin tanggal 15 Agustus 2005<sup>208</sup>.

Penggunaan strategi dengan cara memasang pagar dan taktik menyerobot, mencabut dan merusak dalam satu tindakan perlawanan merupakan suatu hal yang baru terjadi sepanjang perlawanan petani Rengas terhadap PTPN VII selama ini. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemahaman situasi dan keadaan lapangan yang dilakukan oleh beberapa tokoh petani Rengas. Selain itu menghindari terjadinya bentrokan fisik antara petani dengan pihak keamanan perkebunan yang selalu siap menghalau aktivitas petani Rengas.

---

<sup>208</sup> Salinan keputusan MA RI nomor 795K/Pid/2004 dan kutipan dari bagian keputusan MA RI nomor .795K/Pid/2004.

Pada tahun 2003, repertoar dengan perlawanan petani Rengas dilakukan dalam bentuk menyerang area perkebunan. Strategi yang dilakukan adalah berkebun dan berladang di lahan perkebunan. Adapun taktik perlawanan dilakukan dengan cara menggarap lahan yang sudah ditanami tebu oleh PTPN VII. Seperti yang diceritakan oleh FRI, SPI, MLD, MCS dan SB<sup>209</sup>;

Jika warga memaksa menggarap, maka warga tersebut dianggap menjarah tanah PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dan pada pagi hari atau malam harinya akan didata oleh pihak kepolisian cq Polsek Payaraman. Aksi pengusiran petani oleh pihak keamanan PTPN VII dibalas oleh petani dengan aksi tandingan dengan cara mengadakan pengukuran sendiri secara manual dan dilakukan secara massif di beberapa area Rayon VI.

Penggunaan strategi dan taktik demikian pernah dilakukan oleh petani Rengas di masa Orde Baru. Akan tetapi tidak dilakukan secara bersamaan seperti kejadian tindakan perlawanan tahun 2003 ini. Selain itu, petani Rengas melakukan penanaman massal di area perkebunan yang sudah disiapkan untuk penanaman tebu. Peristiwa ini dipengaruhi oleh keadaan yang memungkinkan petani Rengas melakukan tindakan tersebut, karena pilihan waktu dan tempat menunggu musim tanam. Capaian (*outcome*) dari kejadian ini adalah mengganggu aktivitas musim tanam tebu PTPN VII saat itu.

---

<sup>209</sup> Hasil wawancara bersama FRI, SPI, MLI dan MHI di Demangan Lubuk Keliat tanggal 20 Desember 2009

**GAMBAR 6.4. SUASANA BENTROKAN PETANI VERSUS  
APARAT KEAMANAN PADA SAAT PERISTIWA  
PENYERANGAN AREA 32-33 OLEH PETANI**



Sumber: dokumentasi intel di Ogan Ilir 2009

Keterangan: Petani menyerang masuk area perkebunan namun dihalangi oleh aparat keamanan dari satuan Brimob kepolisian Sum-Sel

Pada tahun 2003, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk pengukuran lahan di area 32-33 Rayon VI. Aksi ini dilakukan oleh kelompok 171 dan 111, dibantu petani dari desa Tanjung Batu. Strategi yang digunakan oleh petani Rengas merusak patok dan pengukuran ulang secara manual. Sementara taktik yang membuat parit pembatas. Akibat tindakan perlawanan tersebut akhirnya pemerintah daerah membentuk tim pengukuran ulang yang langsung di bawah BPN Sum-Sel<sup>210</sup>.

---

<sup>210</sup> Data olahan dari resume kronologis catatan FRI, GPI, FI dan sumber lainnya. Setelah berlalu enam tahun, maka pada pertemuan tanggal 13 mei 2009 dihadiri perwakilan warga desa, PTPN VII, Polres, Pemda Ogan Ilir dan instansi terkait, dan memutuskan pembentukan Tim untuk penyelesaian

Penggunaan strategi dan taktik demikian sesungguhnya pernah dilakukan oleh petani Rengas sebelumnya, hanya saja terjadi inovasi pada taktik perlawanan yakni menggali parit pembatas. Tujuannya agar pembatas lahan milik PTPN VII dan milik petani Rengas jelas. Akibat tindakan perlawanan tersebut beberapa petani Rengas digiring pihak kepolisian ke polsek Ogan Ilir.

**GAMBAR 6.5. PETANI RENGAS DIGIRING PIHAK KEAMANAN SETELAH MELAKUKAN PENCABUTAN PATOK**



Sumber: dokumentasi Intel tahun 2003

Keterangan: Petani Rengas digiring aparat keamanan setelah melakukan pencabutan patok di area 32 dan 33 tahun 2003

---

sengketa dan pengukuran batas wilayah yang di pimpin oleh BPN kabupaten Ogan Ilir tentang pengukuran ulang lahan yang dijadikan obyek sengketa. Hasilnya PTPN.VII Unit Usaha Cinta Manis menggarap lahan yang tidak termasuk dalam HGU seluas 825 Ha (lihat lampiran 8).

Pada tahun 2003, pemerintah provinsi Sumatera-Selatan akhirnya mengeluarkan dokumen berita acara Tim 9 tentang pembebasan tanah dan pembayaran ganti rugi yang hanya 825 Ha dari yang diklaim PTPN VII seluas 2.354 Ha. Dokumen yang menyatakan bahwa PTPN VII belum mengadakan pembayaran lahan ganti rugi kepada petani. Dengan adanya dokumen berita acara TIM 9 , ini artinya pihak PTPN.VII belum melakukan pembayaran dan pembebasan lahan 1529 Ha.

Berbagai peristiwa perlawanan yang terjadi sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa tokoh petani Rengas yang terlibat seperti MHD, DH, SHI, SPI, GPI dan FRI, sebagai berikut<sup>211</sup>;

Kami melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap PTPN VII seperti penghadangan merupakan satu bentuk perlawanan petani yang mulai sering dilakukan. Jika sebelumnya penangkapan, penghadangan, banyak dilakukan aparat negara terhadap petani yang menolak penyerahan lahannya, dalam kasus ini petani melakukan strategi serangan balik maksudnya penghadangan justru dilakukan petani terhadap aparat atau pihak lain yang mau kembali merusak patok, menutup areal atau mengusir petani. Taktik perlawanan dengan melakukan aksi mengadu data atau dokumen seperti; dokumen perbedaan luas lahan yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN.VII dengan HGU yang diberikan oleh pemerintah atau cara mengundang rapat atau mengikuti rapat atau melakukan rapat dengar pendapat secara terbuka yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Akhirnya diadakan rapat yang dihadiri seluruh ketua kelompok petani dan tokoh-tokoh sepuh petani Rengas berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan selama ini mengalami perkembangan yang lamban dan hampir tidak ada perubahan sama

---

<sup>211</sup> Wawancara dalam FGD yang dilakukan salah satu LSM bertempat di desa Ketiau tanggal 27 Desember 2011

sekali. PTPN VII tidak merubah keputusannya sekalipun dengan keputusan MA dan instruksi Gubernur. Hasil rapat memutuskan perlu merubah arah perjuangan selama ini dari persoalan hukum ke persoalan perubahan kebijakan. Seperti yang diceritakan oleh MHD<sup>212</sup> kepada peneliti berikut ini;

Kito urang diri lah lakoi juang sepanjang tahun, berumpe-  
rumpe galo kaum ni. Ndok ai ke jingoaan rupo hasilnya.  
Makonyo kite urang punyo rasen dan besepakat hasil  
rembukan. Kito ngelawan Negara sampe kapanpun endoan  
menang, kite kate bukti yang kalu dibawe ke pengadilan  
dianggap kate dasar. Akhirnye urang diri kite ubah sajo ke  
balek ke lahan.

(kita petani Rengas sudah lama berjuang namun sampai kita  
tua belum berhasil juga. Kita perlu berpikir ulang cara kita  
berjuang. Kita tidak kan pernah menang melawan Negara.  
Kita perlu memutuskan sekarang ini kita bukan berjuang  
untuk ganti rugi tetapi untuk mendapatkan kembali tanah  
kita).

Dalam rapat itu juga, seluruh petani dan kelompok petani  
yang ada akhirnya berikrar melebur menjadi gerakan perlawanan  
yang diberi nama “ *gerakan perlawanan petani Rengas*”. Gerakan ini  
berkomitmen menuntut pengembalian lahan yang diambil oleh  
PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, bukan merampas lahan yang  
sudah diganti rugi<sup>213</sup>. Selain itu strategi perjuangan dilanjutkan  
dengan cara perubahan kondisi perlawanan dari tujuan ganti rugi  
ke perubahan kebijakan pengembalian lahan dan dukungan dari  
pemerintah daerah dan DPRD.

---

<sup>212</sup> Wawancara dengan MHD bertempat di rumah kades Rengas 2 tanggal 3  
Februari 2012

<sup>213</sup> Rapat selanjutnya dilaksanakan di Masjid Jami Ar-Rahman Desa Rengas 2  
bulan Ferbuari 2003.

## GAMBAR 6.6. SUASANA MUSYAWARAH DI RENGAS 2



Sumber: Dokumentasi FI tahun 2003

Keterangan: Suasana musyawarah pertama dalam rangka peleburan kelompok-kelompok petani menjadi satu gerakan perlawanan tahun 2003.

Repertoar dengan perlawanan di awal reformasi berlangsung lebih kurang lima tahun 1998-2003, meskipun terbilang singkat tetapi berdampak pada capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas diantaranya;

- a. Meluasnya pihak terlibat
- b. Terbentuknya gerakan petani meskipun belum menunjukkan suatu organisasi
- c. Tindakan perlawanan dinamis dan intens terjadi dan berdampak mengganggu aktivitas PTPN VII.
- d. Pemerintah memberikan respon yang serius terhadap aksi perlawanan

- e. Perubahan tujuan perlawanan dari legal formal ke kebijakan dari kondisi ganti rugi ke kondisi pengembalian lahan.<sup>214</sup>

Capaian (*outcome*) yang paling utama dalam periode ini adalah mengalirnya dukungan dan cairnya hubungan antara pemerintah daerah, DPRD dan petani Rengas menunjukkan bahwa perlawanan yang dilakukan selama ini memiliki nilai *bargaining position* bagi petani.

Perwujudan dari capaian (*outcome*) di atas merupakan buah dari perubahan strategi dan taktik perlawanan yang dilakukan petani Rengas. Perubahan yang terjadi disebabkan adanya penyesuaian dari pilihan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan perlawanan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dan perubahan politik kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi di tahun 1998.

**TABEL 6.1. PILIHAN WAKTU DAN TEMPAT YANG MERUBAH STRATEGI DAN TAKTIK PERLAWANAN TAHUN 1998-2003**

TAHUN	WAKTU PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	BENTUK PERLAWANAN
1998	Eksekusi keputusan pengadilan tidak dijalankan oleh juru sita. Dan Tidak tercapainya kesepakatan antara petani, PTPN VII, BPN dan Pemkab OKI	Jalan poros menuju pabrik dan Area 32-33 Rayon VI	Blokade dan Pengukuran ulang lahan secara manual Menutup jalan utama menuju pabrik
1999	Adanya sikap PTPN VII yang mengulur waktu pembayaran	Area 32-33 dan basecamp karyawan	Menyerang

<sup>214</sup> Hasil pendalaman data dan analisis temuan lapangan 2013

TAHUN	WAKTU PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	BENTUK PERLAWANAN
	dan alasan lainnya		
2000	Adanya maklumat dari hasil kerja tim 9 yang dibentuk pemkab OKI bahwa HGU PTPN VII tidak sesuai dengan peruntukan dan plotting area	Area 32-33 desa Rengas	Menduduki area 32-33
2001	Sikap PTPN VII yang merasa kebal hukum yang membuat marah petani Rengas	Halaman DPRD OKI dan Pemkab OKI	Demonstrasi
2002	Sikap PTPN VII yang melakukan tindakan pembalasan terhadap tindakan petani Rengas	Halaman kantor Pemkab OKI, DPRD OKI dan simpang empat jalan ke pabrik desa Ketiau	Unjukrasa massal dan Mendesak PTPN VII
2003	Masa musim penggilangan tebu dan pengabaian instruksi pemkab OKI agar PTPN VII kembali merealisasikan komitmennya.	Halaman kantor pemprov Sum-Sel, Halaman DPRD Sum-Sel dan Bundaran Air Mancur Palembang	Mendatangi kantor Gubernur Sum-sel

Sumber data: Hasil analisis data lapangan 2015

Tabel di atas menjelaskan kondisi perubahan strategi dan taktik perlawanan secara dinamis dan intens. Kondisi tersebut terkait dengan waktu peristiwa perlawanan yang dipilih, tempat perlawanan, dan bentuk repertoar.

Ada kenyataan lain yang ikut mempercepat perubahan repertoar di tahun ini yakni isu-isu yang berkembang sejalan

dengan kondisi dihadapi oleh petani Rengas, sebagaimana tabel berikut;

**TABEL 6.2. ISU-ISU YANG BERKEMBANG TAHUN 1998-2003**

<b>TAHUN</b>	<b>ISU-ISU YANG BERKEMBANG</b>
1998	Era Politik Terbuka
1999	Mobilisasi aparat keamanan
2000	Penundaan negoisasi
2001	Ganti rugi yang tidak pernah ada dan selalu mengulur waktu dan Pemecatan buruh harian lepas
2002	Kriminalisasi petani
2003	HGU tidak sesuai dengan yang diperuntukan

Sumber: Hasil data lapangan

Tabel di atas menjelaskan beberapa isu-isu kritis yang beredar di tengah petani Rengas. Isu-isu tersebut berpengaruh mempercepat terbentuknya repertoar lainnya, sebab menjadi kepercayaan umum bahwa PTPN VII akan melakukan sesuatu tindakan balasan setiap kali petani mengadakan perlawanan. Hasil analisis data menunjukkan kenyataan sudah terjadi dinamika perubahan repertoar, aktor, strategi, taktik, capaian tujuan dan hasil dari perlawanan petani Rengas tahun 1998-2003. Perwujudan ini sebagai keberlangsungan dari perjuangan di tahun sebelumnya. sebagaimana penjelasan tabel berikut;

**TABEL 6.3 REPERTOAR, AKTOR, STRATEGI, TAKTIK ,  
CAPAIAN DAN HASIL YANG TERJADI TAHUN 1998-2003**

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
1998	Blokade Menutup jalan utama menuju pabrik	Petani Rengas dan petani dari desa tetangga	Menahan truk pengangkut tebu Memasang pagar dari bambu dan bahan lainnya	Membakar muatan truk pengangkut tebu	Dukungan petani bertambah,	Perlawanan petani Rengas belum mendapatkan hasil yang diharapkan yakni kembalinya lahan dari pihak PTPN VII.
1999	Menyerang pekerja PTPN VII dan merusak basecamp	Petani Rengas dan petani dari desa tetangga	Beraktivitas dilahan sengketa Membakar basecamp milik karyawan	Membuat parit pembatas. Terbuka dan massal.	Jaringan pendukung meluas	
2000	Pengukuran ulang lahan secara manual	Petani Rengas dan Petani lainnya dibantu masyarakat desa sekitar	Mendirikan gubuk pengawas Merusak patok	Merusak, mencabut, bibit tebu di area 32-33 secara massal	Masyarakat mulai memberikan dukungan dengan terlibat dalam aksi	
2001	Menduduki area 32-33	Petani Rengas dan kelompok 171-111 dan 60 dibantu warga sekitar	Mengutus perwakilan petani.	Merusak lahan yang siap di semai	Posisi tawar petani mulai di perhatikan serius	
2002	Demontrasi Unjukrasa massal dan blokade akses ke perkebunan	Petani Rengas dan kelompok 171-111 dan 60 dibantu	Meminta dukungan DPRD OKI. Mobilisasi petani.	Menyampaikan tuntutan, protes untuk secara tegas	Pemerintah daerah dan DPRD serius memberi fasilitas	

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
		warga sekitar		mengeluarkan maklumat pembatalan HGU.		
2003	Menghadang dan menutup jalan lintas di Kayu Agung Mendesak PTPN VII Mendatangi kantor Gubernur Sum-sel	Gerakan Petani Rengas secara massal	Dukungan DPRD OKI melakukan evaluasi kebijakan. Bergerak secara massal dan menginap di halaman pemprov Perubahan tujuan dari ganti rugi ke pengembalian lahan.	Mendesak. Bertemu dan berdialog dengan DPRD OKI. Memaksa pemkab OKI melakukan evaluasi PTPN VII. Memaksa DPRD dan Pemkab	Pemerintah daerah memberikan dukungan dengan membuka kembali keputusan Tim 9	

Sumber: Data penelitian tahun 2015

Tabel di atas menjelaskan perjalanan repertoar, aktor petani, strategi, taktik, capaian dan hasil perjuangan di tahun 1998-2003. Semua kondisi tersebut berpengaruh terhadap intensitas perlawanan terjadi. Kondisi di atas merupakan realitas yang dihubungkan oleh tindakan perlawanan kolektif sebagai sesuatu peristiwa perjuangan petani Rengas. Sekalipun hasil perjuangan belum bisa diwujudkan meskipun dukungan dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan pemkab OKI sudah ada, namun belum bisa merubah kebijakan terhadap penguasaan lahan.

Berdasarkan temuan data lapangan sepanjang tahun 1998-2003, ada beberapa pihak yang terlibat perlawanan di antaranya;

- a. Pihak dari petani Rengas

- b. Pihak dari PTPN VII dan sekutunya
- c. Pihak dari masyarakat di luar desa Rengas
- d. Pemerintah Daerah<sup>215</sup>

Di tahun 2004, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk protes keras dan sikap tidak percaya terhadap rencana pencadangan kembali lahan baru perkebunan gula 20.000 Ha oleh Gubernur Syahrial Oesman yang memimpin Sumatera-Selatan dari tahun 2003-2008. Hal ini membuat petani Rengas terluka dan marah, sebab upaya yang mereka lakukan untuk menuntut kembali lahan dari PTPN VII sama sekali tidak membuat pemerintahan daerah Sumatera-Selatan periode Syahrial Oesman mencari jalan keluar bagi persoalan Rengas.

Strategi yang digunakan oleh petani Rengas dengan menyatukan sikap penolakan terhadap segala upaya dan aktivitas PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Perlawanan ini dipimpin oleh beberapa generasi muda petani Rengas diantaranya; GPI, SPI, Suryadi, Muhclis dan FI, aksi ini diikuti oleh perkumpulan karang taruna desa Rengas dan perwakilan karang taruna desa tetangga seperti desa Ketiau, Sri kembang dan Embacang. Sementara taktik dilakukan dengan memobilisasi sumberdaya petani dan pendukung perlawanan terhadap PTPN VII.

Baik strategi maupun taktik yang digunakan dalam perlawanan ini sesungguhnya pengulangan dari strategi dan taktik yang pernah dilakukan sebelumnya. Hanya saja pelaku repertoar dengan perlawanan dilaksanakan oleh generasi muda dari petani Rengas. Kenyataan ini menunjukkan bahwa proses alih generasi dan keberlanjutan hubungan perlawanan antara petani Rengas versus PTPN VII tetap berlangsung dan berlanjut sampai tujuan petani terwujud.

---

<sup>215</sup> Hasil pendalaman data dan analisis temuan lapangan 2013

Pada tahun 2004, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk pendudukan lahan di area 33 oleh gerakan petani Rengas yang dipimpin oleh Wardi dan Imran yang diikuti oleh 30 petani Rengas. Strategi yang dilakukan dengan membangun pondok-pondok dan mengusir mandor PTPN VII. Sebab sebagai bentuk aksi balasan dari tindakan sewenang-wenang pihak manajemen PTPN VII di lahan yang sedang disengketakan. Taktik dilakukan dengan cara pencabutan dan aksi pembakaran lahan tebu milik PTPN VII.

Penggunaan strategi demikian pernah dilakukan sebelumnya, namun taktik dengan mengusir mandor PTPN VII dari area perkebunan merupakan suatu bentuk yang baru dilakukan oleh petani Rengas. Keadaan ini dipengaruhi oleh solidaritas petani Rengas yang semakin menunjukkan identitas sebagai kelompok perlawanan terbuka dan massif.

Pada tahun 2005, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk barikade dan mendirikan tenda menuju pabrik dilakukan secara massal. Strategi yang dilakukan dengan mendirikan tenda serta mematok lahan seluas 3000 Ha. Akibat aksi tersebut petani dituduh telah melakukan tindak pidana menempati lahan tanpa izin sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No 51/Prp/1960 tentang agraria<sup>216</sup>.

Tuduhan pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis terhadap petani Rengas yang melakukan aksi mendirikan tenda dan mematok lahan menjadi isu-isu di tengah kondisi perlawanan sedang memanas. Taktik dilakukan dengan menciptakan

---

<sup>216</sup> Pernyataan AY, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI mengungkapkan "Petani Ogan Ilir Sumsel menempati lahan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI tahun 1994 seluas 40 hektare lahan masyarakat dinyatakan sah milik petani. Dengan dasar inilah petani menggarap lahan tersebut," Pihak kepolisian dan PTPN VII telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena mereka merusak dan masuk ke lahan milik petani yang dilindungi Undang-Undang.

konfrontasi terbuka dan meluas. Selain itu sikap PTPN VII pada waktu bersamaan menambah personil keamanan dari unsur Brimob dan unsur pengamanan perkebunan sipil.

Strategi barricade dan mendirikan tenda dengan taktik konfrontasi terbuka dan meluas merupakan kondisi baru yang digunakan oleh petani Rengas selama perlawanan terhadap PTPN VII. Hal ini dipengaruhi oleh situasi petani Rengas yang semakin mendapatkan dukungan dari luar seperti petani dari lain daerah, selain itu akses pemerintah daerah yang mendukung perjuangan petani Rengas sangat mempengaruhi kepercayaan diri petani Rengas.

Pada tahun 2006, aksi perlawanan dalam bentuk penyerobotan, penyanderaan dan pengawasan terhadap karyawan parik di jalan masuk ke pabrik penggilingan tebu di desa Ketiau. Strategi yang dilakukan membuat pos penjagaan dan menjadikan kondisi konfrontatif terbuka dan massif. Sementara taktik dilakukan dengan *swipping area* namun tidak anarkis.

Penggunaan strategi dan taktik demikian baru pertama kali dalam perlawanan petani Rengas. Hal ini dipengaruhi oleh strategi dan taktik sebelumnya yang menggunakan barricade dan konfrontasi terbuka. Karena itu, strategi pos penjagaan dan taktik *sweeping area*, symbol yang dikirim petani Rengas bahwa petani siap melawan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Dalam penelitian ini ditemukan kondisi bahwa perlawanan ini dipercepat oleh isu-isu yang menciptakan ekstensitas dan kontinuitas perlawanan. Beberapa tokoh dari petani terlibat berkumpul di rumah sekdes Rengas 2, pertemuan tersebut awalnya membicarakan banyaknya LSM-LSM yang mulai melibatkan diri ke perjuangan petani Rengas. Namun ada salah-seorang petani melaporkan bahwa tanaman dibakar dan seorang warga ditahan oleh pihak PTPN VII di area yang disengketakan. Akibat hal

tersebut petani Rengas dan didukung warga melakukan *swipping area*, namun tidak dijumpai seorangpun petugas PTPN VII<sup>217</sup>.

Pada tahun 2007, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk menghancurkan irigasi dan bendungan di area 32-33 dan 36 Rayon VI, penghancuran irigasi dan bendungan yang dipimpin oleh SHI, ZH, MD. Strategi yang digunakan adalah mengaliri sawah dan perkebunan petani yang kering dengan membuka saluran irigasi yang dibuat PTPN VII<sup>218</sup>. Sementara taktik dilakukan dengan cara mengklaim bahwa PTPN VII telah melakukan pencemaran sungai yang digunakan masyarakat Rengas sehari-hari.

Sementara strategi dan taktik yang digunakan dalam perlawanan ini adalah suatu kondisi baru selama perlawanan berlangsung selama ini. Membongkar irigasi dan mengklaim bahwa PTPN VII melakukan pencemaran air sungai sebagai bukti bahwa petani mampu membaca peluang lain dari terjadinya perlawanan yang selama ini hanya berada di area 32-33. Bendungan dan klaim pencemaran sesungguhnya diluar target penjagaan aparat keamanan perkebunan dan isu yang beredar di tengah petani Rengas. Hal tak lepas dari peranan seorang tokoh masyarakat FRI yang selalu berupaya membaca situasi dan peluang lainnya untuk membentuk repertoar perlawanan yang bisa dilakukan oleh petani Rengas dan berdampak meluas.

Capaian (*outcome*) dari peristiwa ini adalah petani Rengas semangkin mendapat dukungan luas dari petani lainnya di luar desa Rengas, terutama yang memiliki kepentingan dengan air sungai. Selain itu, pemerintah daerah Sum-Sel langsung menurunkan tim untuk meneliti pencemaran air sungai akibat

---

<sup>217</sup> Hasil wawancara bersama dengan MHD, FI, Supriyadi, GPI, TH, MCI, SS, AI dan lainnya dalam pertemuan yang diadakan oleh Gerakan Petani Rengas tanggal 12 Januari 2012 di Masjid Ar Rahman di Rengas 2.

<sup>218</sup> Hasil pendalam informasi dan temuan data penelitian tahun 2013

penggunaan bahan kimia dan pembakaran lahan untuk meningkatkan kadar keasaman tanah. Respon cepat dari pihak terkait menunjukkan bahwa perlawanan petani Rengas sangat memberikan dampak terhadap roda pembangunan di Ogan Ilir dan Sumatera-Selatan.

**GAMBAR 6.7. PETANI RENGAS MEMBONGKAR IRIGASI AIR MENUJU PERKEBUNAN PTPN VII**



Sumber: Dokumentasi FRI salah-seorang tokoh masyarakat Rengas tahun 2007

Keterangan: Beberapa petani Rengas melakukan pembongkoran irigasi air sungai yang mengalir perkebunan PTPN VII area 32-33, aksi dilakukan karena sawah dan kebun petani mengalami kekeringan air.

**GAMBAR 6.8. PETANI MENGHADANG ALAT BERAT MILIK PTPN VII DI PAKSAUNTUK MEMBUKA JALUR AIR**



Sumber: Dokumentasi PTPN VII tahun 2007

Keterangan: Petani Rengas memaksa alat berat PTPN VII untuk membuka jalur air dari sungai ke

PTPN VII area 32-33 dialihkan ke perkebunan petani Rengas yang berada di luar area perkebunan.

Pada tahun 2008, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk mengusir mandor-mandor perkebunan tebu di area 32-33, tindakan ini disusul dengan aksi menahan truk-truk yang mengangkut pupuk untuk PTPN VII dilanjutkan dengan aksi pembakaran tebu. Strategi yang dilakukan oleh petani Rengas dengan cara memobilisasi petani Rengas lalu berkumpul di area simpang empat desa Rengas. Sementara taktik yang digunakan adalah aktivitas mobilisasi truk perkebunan sangat tinggi sehingga menyebabkan kebisingan dan polusi udara karena banyaknya debu, selain itu pembakaran residu perkebunan juga mengakibatkan udara di Rengas dikelilingi asap pembakaran. Aksi perlawanan ini dipimpin

oleh FRI, Abu Bakar Roni dan diikuti 40 orang petani Rengas. Dampak dari aksi ini pihak PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis melakukan pengamanan dan pengawalan truk-truk pupuk oleh Brimob Polda Sumatera-Selatan<sup>219</sup>.

Strategi mobilisasi petani dan mengumpulkannya dalam satu area perlawanan dan penggunaan taktik pencemaran lingkungan merupakan bentuk perlawanan yang kreatif dan improvisasi dari keadaan dan situasi yang dihadapi. Hal ini pengaruh dari penggunaan strategi dan taktik sebelumnya yang memberikan dampak bagi posisi petani Rengas. Kenyataan tersebut sebagai perwujudan dari peningkatan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas.

**GAMBAR 6.9. SUASANA AKSI PEMBAKARAN PERKEBUNAN  
TEBU OLEH PETANI RENGAS TAHUN 2008**



Sumber: dokumentasi FRI tahun 2008

Keterangan: Aksi pembakaran perkebunan PTPN VII oleh Petani tanggal 8-9 Desember 2008 di area 32-33 Rengas

---

<sup>219</sup> Hasil pendalam informasi dan temuan data penelitian tahun 2013

Repertoar dengan perlawanan petani Rengas tahun 2004-2008 ditandai dengan perubahan semangkin banyak pihak baru terlibat, meluasnya dukungan dan jaringan dari kalangan masyarakat dan petani diluar Rengas dan dukungan juga datang dari pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sumatera-Selatan.

Munculnya tindakan perlawanan disertai dengan strategi dan taktik inovatif yang berubah cepat, dan intens berakibat pada penegasan identitas kelompok perlawanan petani Rengas. Dalam penelitian ini kondisi tersebut menjelaskan ciri khas perlawanan petani Rengas yang tidak lagi didasarkan atas tuntutan legal formal semata tetapi telah mengakomundir persoalan atau isu yang selama ini belum sama sekali dituntaskan yakni;

- a. Tuntutan mengembalikan lahan,
- b. Lahan yang dituntut adalah lahan yang tidak pernah diganti rugi oleh PTPN VII.
- c. Mempertegas sikap penolakan petani Rengas terhadap hadirnya PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di lahan pertanian mereka.
- d. Sikap kebal hukum dan mencari-cari alasan untuk sengaja memperpanjang masalah tidak diselesaikan<sup>220</sup>.

Penelitian ini juga menemukan kondisi yang menjelaskan penguatan identitas kelompok sebagai perlawanan petani Rengas yakni adanya upaya mengumpulkan seluruh petani di pertengahan bulan Juli 2006, bertempat di masjid Ar Rahmah desa Rengas II. Seperti yang diceritakan FRI dan GPI <sup>221</sup> sebagai berikut;

Setelah shalat Isya' berkumpul beberapa tokoh masyarakat dan petani diantaranya adalah H.MHD, GPI, SPI, FRI, SHI,

---

<sup>220</sup> Hasil pendalaman data dan temuan lapangan 2013.

<sup>221</sup> Wawancara dengan FRI dan GPI di desa Rengas 2 tanggal 6 Nopember 2011

MLI, ADI<sup>222</sup>, membicarakan tentang taktik perjuangan menuntut realisasi pengembalian lahan dan menyatukan seluruh kelompok-kelompok yang petani yang ada. Bila selama ini taktik perlawanan dilakukan oleh gerakan petani yang umumnya menjadi korban dan gabungan dari kelompok 171, 111 dan 60, maka diusulkan semuanya dijadikan satu saja yakni “Gerakan Perlawanan Petani Rengas” tanpa ditambah dengan kata warga dan kelompok lagi<sup>223</sup>. Pagi harinya bertempat di masjid seluruh warga dan petani serta kelompok dimaksud bermusyawarah yang dipimpin oleh saudara FRI dan H.MHD menyepakati perubahan itu bahkan seluruhnya dengan suara bulat menyatakan bagi warga atau petani yang bergabung dengan perjuangan ini bila mereka tidak memiliki lahan akan diberi 3-5 Ha. Bahkan petani yang memiliki lahan yang luas siap membagi 5 Ha untuk warga yang ikut berjuang tanpa melihat asal daerahnya<sup>224</sup> .

---

<sup>222</sup> Mereka tokoh-tokoh yang memiliki posisi dan sekmentasi peran yang berbeda-beda, bila MHD pada level generasi yang mengalami sendiri perampasan lahan warga, GPI, SPI memiliki peran sebagai tokoh pemuda dan korban perampasan lahan keluarganya oleh perkebunan, tiga lainnya adalah pemuda yang selalu ikut dalam aktivitas perlawanan warga Rengas, mereka juga korban hilangnya mata pencarian akibat lahan yang hilang.

<sup>223</sup> Wawancara dengan MHD, SPI dan beberapa masyarakat di kediaman SPI sekarang kades Rengas II pada tanggal 12 September 2012.

<sup>224</sup> Hasil musyawarah tersebut juga menunjuk saudara FRI untuk mempersiapkan perjuangan secara prosedural dan taktis yakni dengan cara menggagas dan mengkonsep jalinan dengan gerakan petani yang ada di Sumatera-Selatan. Langkah awal dari gagasan ini adalah mengutus saudara FRI untuk membawa persoalan Rengas ke Walhi Sumatera-Selatan sembari mengikuti beberapa workshop. Pada saat bersamaan di Sumatera-Selatan sedang menghadapi Pilkada Gubernur tahun 2008 dan menjelang pemilu legislatif tahun 2009. Hasil wawancara bersama dengan bapak GPI, FI, SPI dan AWR di rumah bapak SPI desa Rengas 2 tanggal 17 Juli 2013.

Perubahan tersebut disertai komitmen bersama seluruh petani untuk membagi lahan bagi seluruh warga yang tidak memiliki lahan namun ikut berjuang seluas 3-5 Ha. Komitmen ini sebagai reaksi terhadap hak-hak yang hilang terhadap lahan mereka dan mata pencarian hidup petani Rengas oleh PTPN VII. Sebagaimana yang digambarkan oleh MHD dan SHN<sup>225</sup> sebagai berikut;

Kami urang diri sadar beno,, bahwesannye perjuangan iko daak kan selesai dan dide tahu kebile selesainnyo,, seharusnya kite gale bersama besatu padu dok seperti iko kelompok tapi dok beregut..perlu caro lain kite bejuang,,mumpu ade yang ngulemiye oyo kite bentuk organisasi”

(Kita semua warga dan petani Rengas sudah sekian lama berjuang namun belum juga terselesaikan. Kelompok kita banyak namun lemah, karena itu kita perlu bersatu membentuk suatu organisasi)

Pada tahun 2008 seluruh petani dan pendukung mendeklarasikan perlawanan petani Rengas sebagai Organisasi Tani Lokal (OTL) yang diberi nama Gerakan Petani Rengas. Ciri khas perjuangan tahun 2004-2008 adalah perubahan kelompok-kelompok petani ke gerakan petani dan tindakan perlawanan berjalan dinamis, intens dan melibatkan petani secara luas.

Kondisi ini menunjukkan ada capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas ke arah perwujudan tujuan utama diantaranya; Petani yang terlibat bertambah dan membentuk gerakan perlawanan, jaringan pendukung meluas seperti: Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat lua, Pembentukan pansus DPRD bersama Pemprov, Tekanan dari Pemprov dan DPRD ke PTPN VII untuk segera mengembalika lahan petani yang bukan area HGU,

---

<sup>225</sup> Wawancara bapak MHD dan SHM di desa Rengas 2 tanggal 12 Juli 2012.

deklarasi organisasi perlawanan petani Rengas, meskipun belum memiliki struktur organisasi dan perlawanan petani semangkin berakibat mengganggu produksi tebu dan musim giling.

Capaian (*outcome*) perjuangan memang belum mewujudkan tujuan utama perlawanan, namun capain-capain tersebut mempertegas bahwa sudah terjadi perubahan sosial akibat dari perlawanan yang berlangsung terus. Perubahan tersebut terwujud dalam kehidupan petani bahwa petani mampu solid dan membangun solidaritas dalam menghadapi perlawanan PTPN VII.

Sementara perubahan strategi dan taktik terjadi akibat pengaruh dari bentuk penyesuaian terhadap pilihan waktu dan tempat perlawanan yang dilakukan petani Rengas. Hasil analisis menjelaskan sebagaimana tabel berikut;

**TABEL 6.4. PILIHAN WAKTU DAN TEMPAT YANG MERUBAH STRATEGI DAN TAKTIK TAHUN 2004-2008**

TAHUN	WAKTU PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	BENTUK PERLAWANAN
2004	Kunjungan Gubernur Sum-Sel ke PTPN VII	Halaman kantor Pemkab OKI dan Halaman DPRD OKI	Protes keras dan mosi tidak percaya
2005	Tidak tercapainya kesepakatan antara petani, PTPN VII, BPN dan Pemkab OKI	Area 32-33 Rayon VI	Penggrusakan lahan
2006	Menagemen PTPN VII melakukan aksi balasan	Area 32-33 dan basecamp karyawan	Pengkusiran mandor dan pembakaran lahan
2007	Tingginya		Barricade dan

	aktivitas perkebunan pada musim giling dan sikap PTPN VII sebagai BUMN yang melakukan kepentingan nasional.	Desa Ketiau	mendirikan tenda di jalan utama pabrik
2008	Sikap PTPN VII yang merasa kebal hukum yang membuat marah petani Rengas dan bertepatan dengan Musim Kemarau, penceklik melanda desa Rengas.	Simpang empat desa Rengas, are 32-33 dan jalan poros menuju pabrik dan Rayon VI	Penyerobotan, penyanderaan, pengawasaan terhadap karyawan PTPN VII. Penghancuran irigasi, bendungan di area 32-33

Sumber data: Hasil analisis data lapangan 2015

Tabel di atas menjelaskan bahwa perubahan strategi dan taktik perlawanan ditentukan oleh pilihan waktu perlawanan, pilihan tempat perlawanan dan bentuk perlawanan. Selain itu ada beberapa kondisi yang ikut mempengaruhi perubahan tersebut yakni;

- a. Meluasnya pihak terlibat
- b. Dukungan dari pemerintah daerah sampai pada kebijakan
- c. Aksi dilakukan secara terbuka dan konfrontatif
- d. Aksi-aksi perlawanan langsung ditujukan ke instansi terkait dan massif<sup>226</sup>.

---

<sup>226</sup> Hasil pendalaman data dan temuan lapangan 2013

Perubahan yang terjadi juga dipengaruhi oleh isu-isu yang beredar di tengah kehidupan petani Rengas. Hasil penelitian dapat mengungkap beberapa isu sebagai berikut;

**TABEL 6.5. ISU-ISU YANG BEREDAR TAHUN 2003-2008**

TAHUN	ISU
2003	Ganti rugi yang tidak pernah ada Terhadap lahan sengketa. Petani tidak mengambil lahan yang sudah diganti rugi.
2004	Kriminalisasi petani
2005	Penambahan aparat keamanan
2006	Petani menghalangi penggilingan tebu dan menghancurkan aset negara
2007	Pencadangan kembali lahan baru
2008	Keberpihakan Pemda Sum-Sel.ke PTPN VII.khususnya dibawah kepemimpinan Syahril Oesman

Sumber: Hasil Analisis Data 2013

Tabel di atas menjelaskan bahwa beredarnya isu-isu di kehidupan petani Rengas ternyata menciptakan kepercayaan umum bagi petani akan suatu tindakan yang dilakukan oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Kenyataan ini mendorong petani melakukan perlawanan inovatif lainnya.

Hasil analisis data menunjukkan ada dinamika perubahan repertoar, aktor, strategi, taktik, capaian tujuan dan hasil dari perlawanan petani Rengas tahun 2004-2008 yang berlangsung cepat. Perwujudan ini sebagai keberlangsungan dari perjuangan di tahun sebelumnya. sebagaimana penjelasan tabel berikut;

**TABEL 6.6. REPERTOAR, AKTOR, STRATEGI, TAKTIK, CAPAIAN DAN HASIL PERJUANGAN TAHUN 2004-2008**

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
2003	Protes keras dan mosi tidak percaya	Petani Rengas dan petani dari desa tetangga	Menyatakan sikap menolak segala bentuk aktivitas perkebunan	Mobilisasi sumberdaya petani secara totalitas.	Petani yang terlibat bertambah dan membentuk gerakan perlawanan	Perlawanan petani Rengas belum menunjukkan hasil yang diharapkan yakni mendapatkan kembali lahan dari pihak PTPN VII.
2004	Penggrusakan lahan	Gabungan petani dan Gerakan perlawanan petani Rengas	Membangun pondok - pondok sebagai tempat mengawasi aktivitas PTPN VII	Pencabutan tebusan dan membakarnya	Jaringan pendukung meluas	
2005	Baricade dan mendirikan tenda di jalan utama pabrik	Gabungan petani dan Gerakan perlawanan petani Rengas	Melakukan penguji siran karya wan Mendirikan tenda	Menciptakan konfrontasi terbuka di area	Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat luas mendukung	
2006	Penyerobotan, penyand	Gabungan petani dan	Memotok lahan	Swipping area.	Pembentukan pansus DPRD	

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
	eraan, pengawasan terhadap karyawan PTPN VII.	Gerakan perlawanan petani Rengas	seluas 3.000 Ha .		bersama Pemprov	
2007	Penghancuran irigasi, bendungan di area 32-33	Gabungan petani dan Gerakan perlawanan petani Rengas	Membuat pos penjagaan menciptakan kondisi tidak nyaman Air sungai tidak bisa mengalir sawah dan perkebunan petani berakibat kering dan mati	Pencemaran lingkungan dan mematikan sumber air petani dan masyarakat.	Tekanan dari Pemprov dan DPRD ke PTPN VII untuk segera mengembalikan lahan petani yang bukan area HGU	
2008	Penggusuran mandor dan pembakaran lahan	Gabungan petani dan Gerakan perlawanan petani Rengas	Mobilisasi petani untuk berkumpul di simpang	Aktivitas dan mobilisasi truk pengangkut tebu sangat mengganggu	Deklarasi Organisasi perlawanan petani Rengas, meskipun belum memiliki	

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
			ng empat Rengas	gu petani Rengas,menimnulkan polusi udara, pembakaran	struktur organisasi	

Sumber: Data penelitian tahun 2015

Tabel di atas menjelaskan perjalanan repertoar, aktor petani, strategi, taktik, capaian dan hasil perjuangan di tahun 2004-2008. Semua kondisi tersebut menggambarkan situasi dari intensitas perlawanan yang berlangsung dinamis. Kondisi di atas merupakan realitas dari kekuatan yang dimiliki petani Rengas. Perwujudan serangkaian cara dan alat perlawanan yang digunakan untuk memperjuangkan harapan dan cita-cita petani Rengas.

Berdasarkan temuan lapangan ada beberapa pihak yang terlibat di dalam perlawanan petani Rengas di antaranya;

- a. Pihak berasal dari petani Rengas
- b. Pihak berasal dari PTPN VII dan sekutunya
- c. Pihak berasal dari pengacara mandiri
- d. Pihak berasal dari masyarakat di luar desa Rengas
- e. Pemerintah Daerah dan BPN

### 6.3. Reklaiming dan Redistribusi Lahan Tahun 2009-2010

Pada tahun 2009-2010, repertoar dengan perlawanan yang dilakukan petani Rengas hanya berlangsung dua tahun, namun ekstensivitas perlawanan dalam bentuk aksi-aksi yang dilakukan oleh petani Rengas berlangsung cepat dan meningkat volumenya daripada periode sebelumnya.

Kondisi ini merupakan perwujudan dari semakin jelasnya arah perlawanan petani Rengas dan dampaknya sementara sikap

PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis merasa kebal hukum dan tertekan. PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis tidak bisa mengambil keputusan dan kebijakan terkait persoalan lahan sengketa di Rengas. Sikap yang ada hanya menunda dan mengulur-ulur waktu bahkan menyerahkan seluruh persoalan ke Kementerian BUMN. Sementara perlawanan petani Rengas terus mendapat dukungan politik maupun administratif baik dari pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten bahkan DPRD Sumatera-Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kondisi-kondisi dari repertoar dengan perlawanan yang terjadi disepanjang tahun 2009-2010, sebagai berikut;

Pada tanggal 30 Maret 2009, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk pengukuran dan memasang patok yang terjadi di area 32 dan 33 Rayon VI. Strategi yang digunakan oleh petani Rengas adalah pengukuran sendiri dengan memasang batas-batas dan membangun pondok-pondok sederhana di lahan tersebut. Taktik yang digunakan dengan membiarkan pihak keamanan merusak pondok-pondok tersebut berulang kali.

Strategi dan taktik demikian merupakan pengulangan dari sebelumnya, namun mengalami inovasi dari sisi taktik yakni dengan membiarkan pihak keamanan membongkar pondok dan patok petani di area sengketa. Hal ini sengaja dilakukan oleh petani Rengas agar masyarakat luas mengetahui bahwa sikap dan perilaku PTPN VII sangat arogan dan lebih mengutamakan kekerasan terhadap petani Rengas. Kondisi ini dipengaruhi oleh kepercayaan dan pengetahuan petani Rengas bahwa PTPN VII selalu akan bersikap mengedepankan pembalasan dengan kekerasan.

Pada tanggal 21 Mei 2009, tindakan perlawanan kolektif dalam bentuk menduduki dan menguasai secara paksa di 3 (tiga titik) yang berada di Rayon VI yang ditanami perkebunan tebu. Strategi yang dilakukan petani Rengas menanam dan mendirikan

pondok yang berfungsi sebagai tempat pengawasan dan patroli agar pihak perusahaan tidak mengambil alih kembali tanah tersebut. Taktik yang digunakan dengan membuat maklumat yang ditulis di papan berukuran besar “tanah dikuasai petani Rengas dan dilindungi undang-undang”.

Penggunaan strategi demikian merupakan pengulangan saja, sementara taktik mengalami inovasi bentuk yakni membuat pengumuman diatas lahan yang disengketakan. Keadaan ini dipengaruhi oleh keinginan petani Rengas agar lahan yang dikuasai PTPN VII merupakan lahan dalam status belum diganti rugi dan bukan milik PTPN VII yang termasuk dalam area yang dicanangkan.

Pada tanggal 29 Juli 2009, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk pembabatan perkebunan dan pembakaran perkebunan tebu + 29 Ha. Strategi yang dilakukan dengan memblokade jalan masuk ke perkebunan dan menuntut lahan mereka segera dikembalikan setelah 30 tahun dikuasai oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Taktik yang digunakan petani Rengas menghindari pihak keamanan dimana pada saat yang sama pihak perkebunan mendapat bantuan pengamanan dari Brimoda Sum-Sel.

Pada tanggal 2 Agustus 2009, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk penyanderaan mandor dan pembakaran *basecamp*, akibat pondok-pondok yang dibangun petani Rengas kembali dibongkar. Strategi yang digunakan adalah konfrontasi antara petani dan keamanan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Ketika berlangsung pertikaian pihak perkebunan melakukan penyanderaan petani bernama Suhel oleh Satgas PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, dibantu oleh aparat Brimob Polda Sum-Sel. Taktik yang dilakukan petani Rengas adalah penyanderaan salah-seorang warga Rengas oleh pihak perkebunan ternyata ditanggapi

*reaktif* dengan menyandera juga pegawai PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis agar ditukar dengan Saudara Suhel.

Serangkaian strategi dan taktik diikuti dengan repertoar dalam berbagai bentuk yang dilakukan petani Rengas ternyata berdampak pada capaian (*outcome*) perjuangan diataranya: dilakukan pertemuan antara warga desa dengan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama diatas materai antara warga desa dengan PTPN VII yang di tandatangani Kepala Rayon VI untuk menyelesaikan kasus ini dengan musyawarah dan sepakat lahan sengketa akan diserahkan kembali kepada warga per 1 Oktober 2009 setelah pihak PTPN VII melakukan panen dan selesai menggarap lahan tersebut. Selanjutnya warga membersihkan lahan dan mendirikan pondok-pondok yang tidak permanen di areal tersebut sebagai bukti kepemilikan lahan<sup>227</sup>.

Se elokyo kito iko bepance nak gaweko kesepakan terkait umoh-umoh kito lah dibumi hangusko, semestinyo pihak PTPN VII tunduk dengan hasil musyawarah tempo arai". Sedulang kito iko rakyat Rengas lah diwariske pucang alas bukan punyo marga desa. Umoh-umoh di ladang tu artinyo tando pucang kito iko<sup>228</sup>.

(Sebagusnya kita duduk bersama dan bermusyawarah terkait dengan penghancuran pondok-pondok di ladang sebagai

---

<sup>227</sup> Wawancara dengan beberapa warga yang terlibat langsung MLI, GPI, ETS, SHN, Alwi, ARZ kesemuan informan warga Rengas pada tanggal 11 November 2011 dan dilanjutkan lagi pada 12 Desember 2011

<sup>228</sup> Hasil wawancara dengan H. MHD, Syahmil dan warga lainnya pada tanggal 10 Desember 2011 di desa Rengas 2. Berdasarkan temuan data di lapangan peristiwa ini didahului dengan adanya isu-isu yang beredar di lingkungan tentang adanya dua warga Rengas di sandera oleh pihak perkebunan ketika mereka sedang melakukan penanaman nanas di lahan yang diklaim oleh PTPN VII. akibatnya petani Rengas melakukan penyanderaan balik terhadap dua petugas dari PTPN VII.

tanda batas tanah warga. Seharusnya pihak PTPN VII, mentaati apa yang telah menjadi aturan kesepakatan, sebab tanah yang di sengketa itu warisan bukan tanah desa).

Sebagai suatu bentuk capaian (*outcome*) lainnya adalah pada tanggal 1 Nopember 2009, dilakukan musyawarah dan mediasi dilakukan oleh pihak Pemkab Ogan Ilir. Sebagai langkah preventif Bupati Ogan Ilir Bapak Ir. Mawardi Yahya menyatakan akan memanggil manajemen PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, persoalan sengketa lahan sudah terjadi lama dan berlarut-larut. Saat ini sudah ada keputusan Mahkamah Agung RI bahwa 40 Ha yang dimenangkan warga Rengas, namun tidak langsung dieksekusi. Bersamaan dengan tersebut petani Rengas melakukan demonstrasi damai di depan kantor Bupati Ogan Ilir.

#### **GAMBAR 6.10 AKSI DAMAI PETANI RENGAN DI DEPAN KANTOR BUPATI OGAN ILIR**



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2009

Keterangan: petani Rengas dan dukungan petani lainnya melakukan demonstrasi di Ogan ilir tahun 2009

Pada 7 Nopember 2009, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk pembabatan dan pembakaran tebu dilakukan oleh sejumlah petani Rengas di Rayon VI. Strategi yang digunakan petani adalah mengklaim bahwa tanah seluas 1.529 Ha yang dikuasai PTPN VII adalah milik 700 KK. Pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009, manager PTPN VII Cinta Manis mengatakan pihaknya telah membebaskan lahan seluas 4.833 Ha di desa Rengas, Lubuk Keliat dan Tanjung Batu sekitarnya. Menurutnya 1.529 Ha di Rayon VI desa Rengas adalah lahan PTPN VII Cinta Manis yang sudah dibebaskan dari warga Rengas pada tahun 1982 lalu melalui jual-beli Pesirah dan Kerio. Sementara taktik yang dilakukan petani Rengas adalah meminta PTPN VII menunjukkan bukti kepada masyarakat umum melalui media.

Penggunaan strategi dan taktik yang demikian merupakan bentuk baru selama perlawanan terjadi antara petani Rengas versus PTPN VII. keadaan ini dipengaruhi oleh semangkin kuatnya dukungan perjuangan petani Rengas yang datang dari luar petani seperti LSM dan Media Massa. Taktik mendesak PTPN VII agar melakukan publikasi bukti merupakan suatu tekanan dengan cara mengajak pihak lainnya untuk memberi dan mengajak masyarakat luas mengetahui duduk persoalan sesungguhnya.

Dampak dari tindakan tersebut adalah capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas yakni pada 3 Desember 2009 dilakukan pertemuan untuk musyawarah antara PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dengan petani Rengas dengan melibatkan POLDA Sumatera-Selatan yang bertujuan untuk dilakukan ganti rugi dengan cara membayar ke petani yang mau menerima dan agar persoalan tidak meluas. Kenyataannya adalah petani hanya minta PTPN VII mengembalikan lahan yang tidak pernah diganti rugi,

karena sudah jelas bahwa yang harus dikembalikan oleh PTPN VII adalah lahan seluas 1529 Ha milik petani Rengas<sup>229</sup>.

**GAMBAR 6.11. SUASANA PERTEMUAN ANTARA UTUSAN  
PETANI DENGAN PTPN VII DI RUANG BINA PRAJA  
KABUPATEN**



Sumber: Dokumentasi penelitian tahun 2009

Keterangan: suasana musyawarah perwakilan petani, PTPN VII dan Sekda 2009

Pada tanggal 4 Desember 2009, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk bentrokan berdarah dan reklamings massal. Aksi ini menggambarkan perjalanan panjang perlawanan petani Rengas yang berujung pada bentrokan berdarah dan tindakan reklamings. Strategi yang dilakukan dengan penukaran sandera dari pihak

---

<sup>229</sup> Pertemuan tanggal 3 September 2009, dilakukan di pendopo Kabupaten Ogan Ilir, menurut beberapa informan yang ditemui menyatakan bahwa pertemuan tersebut digagas oleh salah satu partai politik dalam rangka stabilisasi menjelang penghitungan hasil Pilkada Gubernur yang dilakukan bulan September 2009 dan Nopember akan dilantik.

PTPN VII dengan sandera dari petani, dimana peristiwa terjadi di area 32-33.taktik yang dijalankan petani ialah pembongkaran bangunan basecamp di area simpang empat 32-33 Rayon VI.

Strategi dan taktik ini pernah dilakukan oleh petani Rengas sebelumnya, namun kondisi yang dihadapi petani Rengas berbeda yakni ada mobilisasi pihak keamanan dari Brimob Polda Sum-Sel untuk melakukan pengamanan dan penukaran sandera antara petani yang ditahan PTPN VII dengan pegawai PTPN VII yang ditahan petani Rengas. Kondisi ini dipengaruhi oleh sikap arogansi dan mobilisasi keamanan yang berlebihan yang akhirnya terjadi bentrokan berdarah antara petani versus pihak keamanan. Kondisi ini mendorong terjadinya mobilisasi pihak petani Rengas di area 32-33 yang berujung pada konfrontasi berdarah dan terbuka.

Dari hasil penelitian menemukan penjelasan kondisi yang terjadi dimana 3.000 orang petani dan warga Rengas, melakukan aksi sweeping terhadap karyawan PTPN VII namun tidak menemukan hasil, akhirnya petani dan warga yang emosi mendatangi basecamp pegawai PTPN VII namun di hadang oleh pasukan Brimob Polda Sumatera-Selatan. Kejadian bentrok dan dilanjutkan dengan peristiwa penembakan 12 petani Rengas oleh Brimob Polda setelah shalat Jum'at. Pasca bentrokan berdarah tersebut, pada hari yang sama petani dan warga Rengas melakukan tindakan reklaiming massal dan pembakaran fasilitas milik PTPN VII di area 32 dan 33

### **GAMBAR 6.12. KEADAAN PASCA BENTROK PETANI VS BRIMOB**



Sumber: dokumnetasi kontributor metro TV tahun 2009

Keterangan: suasana pembakaran fasilitas milik PTPN VII di area 32 dan 33 tanggal 4 Desember 2009

### **GAMBAR 6.13. KORBAN PENEMBAKAN**



Sumber: Dokumentasi penelitian 2009

Keterangan: Gubernur Alex Noerdin membesuk korban penembakan konfrontasi berdarah Rengas dirumah sakit Bayangkara Polda Sum-Sel pada tanggal 6 Desember 2009

Seperti yang diceritakan oleh GPI, MCS, FI sebagai berikut<sup>230</sup>;

Pagi harinya ada 2 orang dari PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, membongkar pondok warga lalu ditangkap warga. Setelah sholat Jumat sekitar pukul 14.00 wib ribuan Warga Desa Rengas membawa 2 orang sandera (Pegawai PTPN VII) yang bernama DS (46 thn) dan BS (49 thn), yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian oleh Camat Payaraman. Namun warga dan petani bergerak menuju Rayon VI untuk menanyakan alasan pembongkaran pondok yang dibangun warga tersebut. Sekaligus melakukan tukar-menukar sandera dari pihak warga Wan dan RZL sedangkan dari pihak perkebunan David dan Bambang. Peristiwa tersebut diikuti oleh ribuan warga Rengas sementara manajemen PTPN VII dikawal oleh sekitar 70 personil Brimob, pada saat penyerahan sandera itulah terjadi penembakan oleh Brimob. Sebenarnya peristiwa ini tidak perlu terjadi, bila pihak PTPN VII tidak bersikap reaktif terhadap petani yang hendak mengembalikan sandera dari pihak PTPN VII. Tetapi kami saat itu bersama kapolresta telah mendapatkan pihak PTPN VII mengepung petani di area 31-32 Rayon VI. Sikap tersebut dibalas oleh petani lainnya yang berduyun-duyun datang ke lokasi. Tak bisa terelakan lagi konfrontasi berlangsung sampai pada pihak brimob mengambil langkah penembakan yang hanya berjarak 25 meter<sup>231</sup>.

Peristiwa penembakan tersebut dibalas reaktif oleh warga dan petani yang bergabung secara spontanitas dengan melakukan tindakan pembakaran atas bangunan dan kendaraan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang berada di lokasi saat itu. Akibat

---

<sup>230</sup> Wawancara dengan GPI, MCS, FI di Lubuk Batu tanggal 8 Nopember 2011

<sup>231</sup> Hasil wawancara dengan beberapa korban penembakan tersebut adalah M Gunadi (30), Ahmad (25), Muhlis (23), Masani (42), Wawan Gunadi (25), Al Husairin (35), Wani (46), Bustoni (39), Wawan (30), Suhandi (35), Asep (20), Fauzi (25), Firwanto (35), Relu (42), Ahmad (30), Miswaman (35), Yanto (25), Faidil (45) dan Ibadilah (30).

penembakan tersebut, terjadi konflik fisik antara ribuan warga dan petani dengan anggota Brimob, dan mereka melakukan penembakan tanpa peringatan dan mengakibatkan 12 warga terkena luka tembak. Menurut Husin<sup>232</sup> peristiwa itu seperti peristiwa yang tidak pantas dilakukan aparat Brimob kepada rakyatnya sebagaimana berikut;

Saya mantan polisi menegaskan dirinya mengutuk tindakan anarkis yang telah melakukan penembakan terhadap salah-satu anak kandungnya. “ *Brimob, kok, tiba-tiba menembak tanpa alasan yang jelas, bukannya memberi tembakan peringatan, jarak tembak antara Brimob dengan warga saat itu hanya 25 Meter* “. Sementara warga lainnya menuturkan bahwa peristiwa penembakan tersebut tanpa sama sekali diduga oleh warga dan petani Rengas, sebab kami datang bukan untuk berhadapan dengan pihak keamanan, tetapi ingin menyelamatkan petani yang dikepung oleh pihak keamanan PTPN VII di area 31-32. Tiba-tiba pihak brimob datang dari arah ketiau dan menghadang kami diperempatan jalan menuju area 31-32. Kami terus maju masuk area, disitulah penembakan terjadi.

---

<sup>232</sup> Wawancara dengan bapak Husin umur 80 tahun adalah pensiunan Polri dan warga asli Rengas.

### GAMBAR 6.14. AKSI PEMBAKARAN ALAT BERAT MILIK PTPN VII



Sumber : Dokumentasi Intel Polda Tahun 2009

Keterangan : Petani melakukan pembakaran alat berat milik PTPN VII di area VI berada di basecamp 2009

Berdasarkan kesaksian beberapa warga yang diwawancarai mengatakan seperti Wawan<sup>233</sup> saat kejadian, tepat di lokasi ada anggota Brimob, Satpam dan Satgas sekitar 60 orang. Mereka lengkap dengan senjata,” ujarnya. Sekitar pukul 08.00 WIB, pondok yang dibangun warga di Rayon VI dibongkar paksa Satgas PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis diback-up personel Brimob Polda Sumsel.

Pada tanggal 6 Desember 2009, aksi protes bersama Tim Advokasi LBH Palembang, dilakukan BAP oleh Polda Sumsel

---

<sup>233</sup> Wawan, Rozali dan Wan adalah warga Rengas yang terlibat reklamasi tanggal 4 Desember 2009. diwawancarai untuk penelitian ini di desa Rengas 2 tanggal 11 Juli 2011

terhadap korban penembakan yang masih dirawat di RS. Mohammad Husein Palembang atas nama korban : Mukhlis (23thn), Asep bin Samudi (23 thn), Sabili bin Amirudi (21 thn) dan Suhansi (35thn). Karena diprotes BAP akhirnya dihentikan.

#### **GAMBAR 6.15. KORBAN BENTROKAN BERDARAH DARI PETANI RENGAS**



Keterangan: Empat orang petani Rengas melapor ke Propam Polda Sum-Sel sebagai korban penembakan tanggal 4 Desember 2009

Pada tanggal 10 Desember 2009, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk demonstrasi massal mendatangi Markas Besar Polri Sumatera-Selatan. Strategi yang digunakan dengan mengajak Arif Patra M Zen dari Yayasan Batuan Hukum Indonesia. Kedatangan mereka ini untuk meminta keadilan dan proses hukum melalui Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri diwakili oleh tiga korban, yakni Mukhlis bin Suparman, Gunadi bin Ali, dan Firwanto. Sementara taktik yang digunakan oleh petani Rengas adalah melakukan koordinasi dengan berbagai media massa dan jaringan petani di Sumatera-Selatan.

Penggunaan strategi dan taktik tersebut adalah hal baru dalam perlawanan petani Rengas selama ini. Petani Rengas secara

terbuka mengajak terlibat pihak lainnya dalam persoalan penyelesaian ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani Rengas merasakan bahwa keterlibatan pihak lain memberi dampak baik petani Rengas dan tekanan bagi pihak PTPN VII.

Pada tanggal 28 dan 29 Desember 2009, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk demonstrasi dan unjuk rasa massal serta menginap dan berkemah di halaman DPRD Sumatera-Selatan. Strategi yang dilakukan dengan memobilisasi ribuan massa dari desa Rengas dan didukung oleh masyarakat yang tergabung dalam Sarekat Kesejahteraan Petani Sumatera Selatan (SKPSS) menuntut DPRD Sumatera Selatan agar segera membentuk Panitia Khusus (PANSUS) guna menyelesaikan kasus ini serta menuntut Gubernur Sumatera Selatan agar segera mengeluarkan surat yang isinya menginstruksikan PTPN VII untuk segera mengembalikan tanah petani Rengas<sup>234</sup>.

Kondisi ini dipengaruhi oleh kesadaran dan kemampuan berbagai tokoh perlawanan dari petani Rengas memaknai kembali tujuan perjuangan mereka yang tidak semata dimaknai sempit dan praktis yakni pertentangan dan perseteruan untuk klaim, tetapi perlawanan adalah sebagai suatu kewajiban moral yang harus dilakukan dengan strategi gerakan perlawanan dan klaim isu-isu kemanusiaan<sup>235</sup>.

---

<sup>234</sup> Aksi warga ini juga mendapatkan dukungan penuh belasan organisasi nonpemerintah, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel), Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumsel, Serikat Petani Ogan Ilir, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Nasional, KP Serikat Hijau Indonesia (SHI) Sumsel, DPP SHI, Perserikatan Organisasi Wanita dan Anak (OWA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumsel, DKR Sumsel, Uplink, LS ADI Sumsel, dan Sahabat Walhi

<sup>235</sup> Wawancara bersama dengan FI, Subandi, Supriyadi, GPI, MCS di desa Ketiau 12 Desember 2012

## GAMBAR 6.16. DEMONTRASI MASSAL DI DPRD SUMATERA-SELATAN TAHUN 2009



Sumber : Dokumentasi Humas Polda Sum-Sel tahun 2009

Keterangan: Suasana demonstrasi di gedung DPRD tanggal 28-29 Desember 2009 di Palembang, lebih dari 10.000 petani dan warga melakukan demonstrasi dengan tuntutan PTPN VII harus segera mengembalikan lahan petani.

Rangkaian perlawanan tersebut berdampak pada capaian (*outcome*) perjuangan diantaranya adalah; pada tanggal 7 Januari 2010, dilakukan aksi reklamasi lanjutan secara massal di atas lahan yang selama 27 tahun telah dirampas oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis<sup>236</sup>, strategi yang dijalankan adalah melakukan aktivitas penanaman pohon karet, nanas dan lainnya secara massal. Taktik

---

<sup>236</sup> Pada 29 Desember 2009, secara tertulis Drs. H. Suhaily Syam, SH, MM selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Sumatera Selatan dihadapan warga dan secara tertulis menyatakan bahwa areal tanah PTPN VII tidak ada Hak Guna Usaha (HGU). Artinya selama 27 tahun ini PTPN VII beroperasi secara ilegal dan merugikan negara. Demikian juga awal pembentukan UUPG Cinta Manis adalah untuk perkebunan tebu, namun dilokasi UUPG Cinta Manis sekarang ini banyak juga tanaman Sawit dan Karet.

yang digunakan adalah pemagaran dan pembuatan patok-patok batas diatas tanah-tanah mereka.

Ada kondisi yang menarik yakni area 32-33 yang selama ini dijaga dan selalu diawasi oleh pihak keamanan semenjak peristiwa 4 Desember 2009 tidak lagi dijaga bahkan dibiarkan oleh PTPN VII untuk dikuasai pihak petani Rengas. Pada tanggal 14 Januari 2010, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk pembongkaran bendungan yang diikuti ratusan massa petani<sup>237</sup>. taktik yang digunakan petani adalah membuat parit berukuran besar agar aliran air ke bendungan terhambat<sup>238</sup>.

Tindakan perlawanan ini menghasilkan capaian (*outcome*) perjuangan yakni dilakukannya redistribusi massal lahan hasil reklamasi pada tanggal 21 Mei 2010. Petani Rengas dan warga memutuskan untuk meredistribusi lahan secara massal dan mendirikan tenda serta mematok lahan seluas 3000 Ha. Selanjutnya lahan-lahan yang telah diduduki oleh petani Rengas dan warga dikembalikan lagi ke petani Rengas dan warga @ 3-5 Ha. Lebih kurang 5.000 petani Rengas dan warga sekitar yang ikut berjuang mendapatkan lahan yang mereka ambil kembali dari kekuasaan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

---

<sup>237</sup> Aksi tersebut di dampingi oleh Wahyu Agung Perdana, staf Dept. Penguatan Organisasi SPI

<sup>238</sup> Menurut Supri Gunawan (manager areal PTPN.VII), akibat aksi pembobolan bendungan oleh petani Rengas dan penguasaan lahan secara paksa oleh masyarakat sekitar kebun dan pabrik. Selanjutnya penguasaan lahan secara paksa itu, diikuti dengan penutupan akses jalan produksi. Dan, pabrik berhenti total akibat dari tidak adanya pasokan tebu Areal tebu dibakar seluas 310,8 hektar dan tidak dapat ditebang karena akses jalan diblokir dengan nilai kerugian Rp 6,05 miliar. Tebu ditebang tapi tidak dapat diangkut ke pabrik sebanyak 2.465 ton dengan nilai Rp1,37 miliar. Produksi gula tidak tercapai, akibat kapasitas giling tidak optimal karena pasokan tebu terganggu 827,7 ton dengan nilai Rp7,43 miliar. Pemakaian residu akibat giling tidak kontiyu sebanyak 74,3 ton atau senilai Rp 660 juta. Dengan kejadian ini PTPN. VII. Cinta Manis mengalami kerugian Rp15,52 miliar.

Capaian (*outcome*) berupa reklamings dan redistribusi massal yang dilakukan oleh petani Renga ternyata dipengaruhi oleh adanya dukungan pemerintah daerah. Bentuk dukungan tersebut termaktub dalam notulen hasil musyawarah nomor: 590/45/1/2009 tentang materi musyawarah antara warga Rengas, Lubuk Bandung dan Betung dengan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, tanggal 13 Mei 2009<sup>239</sup>. Hasil musyawarah dinyatakan sebagai berikut;

- a. Perwakilan warga Rengas (Gupriadi) bahwa berdasarkan tim inventarisasi lahan PTPN VII Cinta Manis seluas + 1360,29 ha yang merupakan wilayah desa Rengas, kemudian pada tahun 2003 kami (warga) melaksanakan pengukuran dengan memberitahukan pihak PTPN VII dan lahan tersebut seluas +3568 Ha. Lahan yang sudah diganti rugi 828,35 ha +4 ha = 832,5 ha. Yang menjadi tuntutan warga Rengas adalah lahan seluas 2735, 65 ha, mohon dikembalikan kepada petani Rengas.
- b. Perwakilan warga Lubuk Bandung (Muslim) bahwa luas lahan yang dikuasai oleh PTPN VII Cinta Manis 1395 ha yang sudah diganti rugi 375 ha, sehingga sisa lahan 1020 ha yang belum diganti rugi, mohon dikembalikan pada petani Lubuk Bandung
- c. Perwakilan warga Betung (Abidin Syarifudin), bahwa diperhitungkan di lokasi III luas lahan + 4800 ha sementara apabila dijumlahkan desa Rengas dan Lubuk Bandung luas lahan + 4963 ha. Berarti desa Betung tidak mempunyai lahan lagi. Kami warga Betung menjadi penyewa di tanah milik sendiri.

---

<sup>239</sup> Bagian ini adalah hasil notules rapat di ruang sekda kab ogan ilir, ditulis kembali sesuai aslinya (lihat lampiran 7)

- d. Penjelasan PTPN VII Cinta Manis, bahwa lokasi III yang sudah diganti rugi+4883,92 ha sebagian ada tanah masyarakat dan negara, ada yang belum diganti rugi milik saudara Jafar dan saudara AI. Mendengar uraian warga tadi lokasi III yang belum diganti rugi seluas 2735 ha.
- e. BPN Kabupaten Ogan Ilir, bahwa hasil pengukuran BPN Sum-sel dilokasi III PTPN VII Cinta Manis adalah 5499 ha, tanah rakyat 2413 ha, tanah marga 2985 ha, memang ada selisih antara luas lahan yang dituntut masyarakat dengan klaim PTPN VII Cinta Manis<sup>240</sup>.

**GAMBAR 6.17. SUASANA RAPAT BERSAMA DPRD, WAKIL PETANI, PTPN VII DAN PEMERINTAH DAERAH 2009**



Sumber: Biro Humas Pemda OI tahun 2009

Keterangan: rapat bersama wakili petani, DPRD, Pemprov dan PTPN VII

---

<sup>240</sup> Hasil notulen: 590/45/1/2009 (lihat lampiran 4)

Kondisi ini redistribusi lahan secara massal sama sekali tidak mendapat perlawanan dari PTPN VII, aksi redistribusi petani Rengas yang terjadi di area 32-33 dibiarkan saja oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Redistribusi itu sendiri sudah melalui kesepakatan diantara petani Rengas dan warga, bagi petani yang menjadi korban dikembalikan sesuai dengan haknya. Bagi warga yang tidak memiliki lahan tapi mengikuti perjuangan di bagi 3-5 Ha begitu juga dengan petani yang tidak memiliki lahan berasal dari luar desa.

Berdasarkan analisis data penelitian ini menemukan kondisi yang menjadi ciri khas perlawanan tahun ini adalah reklaiming dan redistribusi tanah kepada 800 KK luas antara 3-5 Ha @ petani Rengas, dan secara *de facto* tanah yang disengketakan sudah dikuasai oleh petani Rengas. Reklaiming dilakukan sebanyak tiga kali yakni 4 Desember, 7 Januari dan bersamaan dengan redistribusi dilakukan oleh petani Rengas tanggal 10 Januari tahun 2010. Luas lahan yang telah direklaiming di desa Rengas mencapai 3000 Ha. Lahan yang direklaiming tersebut merupakan lahan yang dikelola PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis selama 30 tahun tanpa HGU.

Aksi reklaiming dan aksi redistribusi tanah oleh gerakan Petani Rengas mendapat dukungan dari berbagai kalangan sipil. Seperti yang diceritakan oleh SA sebagai berikut<sup>241</sup>

Sebagai orang yang ikut dalam perjalanan perjuangan petani Rengas, sebagai mantan Camat Payaraman, Saya senang melihat warga dan petani yang tergabung dalam gerakan petani Rengas mulai melakukan pembersihan tanaman tebu milik PTPN dan memasang patok. Warga juga mulai menanam lahan dengan tanam ubi dan pisang secara ekonomi kehidupan petani Rengas yang mendapatkan tanah

---

<sup>241</sup> Wawancara dengan bapak SA di desa Payaraman tanggal 7 Nopember 2012

juga menjadi lebih baik, dalam artian terjadinya peningkatan penghasilan petani. Tanah garapan hasil redistribusi telah berhasil memberikan keleluasaan dan kemerdekaan relatif kepada petani terhadap petani lain dan pasar. Hasil pertanian dari tanah distribusi, setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan subsisten petani.

Dukungan muncul dari kalangan pesantren dan ormas Islam Se-Sumatera-Selatan, hal tersebut ditindaklanjuti dengan rapat pada tanggal 23 Januari 2010 dan dilanjutkan kembali pada bulan Mei 2010, bertempat di pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya OI pukul 19.30 Wib langsung. Tercatat 21 (duapuluh satu) peserta hadir pada malam tersebut diantaranya : PWNu Sum-Sel, Muhammadiyah Sum-Sel, Jami'ah Thariqah, GP Anshor Sum-Sel, Forum Ulama-Umaro, Forum Pondok Pesantren, Kahmi Sum-Sel, PMII Sum-Sel, Perwakilan De Portren Sum-Sel, LBH Palembang, Walhi, SPI, IMM Sum-Sel, dan mudir pesantren se kabupaten Ogan Ilir.

Elemen masyarakat tersebut menamakan dirinya Majelis Masyarakat Madani Ogan Ilir selanjutnya menyatakan sikap yang inti pernyataan tersebut adalah Majelis Masyarakat madani Ogan Ilir mendukung perjuangan Petani Rengas dan mendesak PTPN VII untuk mengedepankan sikap dan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan konflik agraria<sup>242</sup>. Dukungan politik dan sosial juga datang dari Yayasan LBH Indonesia, LBH Palembang, Aliansi Petani Indonesia (API), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), LSADI dan Bina Desa

Pada 15 April 2010 petani Rengas melakukan Deklarasi di lokasi penembakan 12 orang petani Rengas yang disebut dengan *simpang empat Desember*. Deklarasi tersebut sekaligus memperingati hari petani sedunia, dalam peristiwa itu dihadiri 1000 lebih petani dan warga dari Kecamatan Tanjung Batu dan diikuti sekitarnya dan

---

<sup>242</sup> Dokumen publikasi SPI Sum-Sel dan Walhi Sum-Sel tanggal 08 Desember 2012

diikuti 32 kelompok tani<sup>243</sup>. Pasca deklarasi tersebut, perlawanan petani Rengas menggunakan taktik yang di arahkan langsung ke kementerian BUMN di Jakarta. Sebelum melakukan demonstrasi ke Jakarta petani Rengas melakukan peringatan di atas lahan yang mereka reclaiming dan redistribusi sebagai symbol kemenangan perjuangan petani, meskipun lahan tersebut belum sepenuhnya di miliki, namun kini lahan tersebut dalam keadaan status qua.

**GAMBAR 6.18. PETANI RENGAS BERKUMPUL DI AREA 33 DI ATAS LAHAN REKLAIMING DAN DISTRIBUSI TAHUN 2010**



Sumber: Dokumentasi FRI tahun 2010

---

<sup>243</sup> Berdasarkan catatan dari dokumen Daftar Anggota SPI Ogan Ilir terdapat 32 kelompok petani di 38 lokasi desa yakni : Kasih Raja (9 Kelompok Petani), Ketiau (3 Kelompo petani), Talang Rejo ( 1 Kelompok Petani). Talang Tengah ( 2 Kelompok Petani), Darat dan Laut (2 Kelompok Petani), Betung (2 Kelompok Petani), Payaraman (3 Kelompok Petani), Seri Kembang, Munggu, Embancang, Nagasari, Ulak Kebahang, Rama Kasih, Kelampadu, Mekar, Payalingkung (masing-masing 1 Kelompok Petani). Hasil observasi lapangan menjelaskan bahwa deklarasi berdirinya basis SPI Rengas I dan Rengas 2 serta Lubuk Batang juga dihadiri ketua umum SPI Hendri Saragih, Walhi, Mahasiswa dan LBH Palembang.

Keterangan: Petani Rengas dan beberapa pendukung dari NGO melakukan deklarasi kemenangan di atas lahan reclaiming dan redistribusi.

Pada tanggal 11-12 Juli 2010, repertoar dengan perlawanan dalam bentuk demonstrasi ke Jakarta. Strategi dilakukan dengan mengikuti 600 petani Rengas. Para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia Ogan Ilir basis Rengas dan Gabungan Petani Penesak Bersatu (GPPB). Taktik yang dijalankan adalah membawa persoalan Rengas ke ranah kebijakan dan ke level nasional.

Pada saat aksi massal di Jakarta, ada kenyataan yang mengikat semua petani dalam satu tujuan yakni *melawan perkebunan*, mereka datang dikoordinasi oleh direktur Walhi Sum-Sel yakni saudara Anwar Sadat. Menurut keterangan beberapa warga seperti Yauna dan temannya, Cik Na, 58 tahun, ketika bersama-sama berada dalam bis mini yang disewa para petani Ogan Ilir usai mendemo bercerita sebagai berikut<sup>244</sup>

Kami secara sukarela mengumpulkan dana berupa uang, makanan, baju dan minyak sebagai bekal ke Jakarta. Kami meninggalkan keluarga di dusun, kami meninggalkan kekecewaan, kami hanya ingin Negara ini tahu bahwa kami di Rengas berjuang untuk kemuliaan kami ALLAH AKBAR.

Seorang petani perempuan paruh baya bercerita bahwa perusahaan perkebunan tersebut telah mencabut hak mereka selama puluhan tahun. Kini mereka tak punya lahan sama sekali. Juga anak-anak generasi penerus di Ogan Ilir. Ini pula yang dirasakan Abdul Muis. Ahmad Hasan, dan Man Diah<sup>245</sup>. Masalah ini pula yang menyatukan para petani dalam satu barisan tutur ibu

---

<sup>244</sup> Wawancara dengan ibu CKN di Palembang 5 Nopember 2012

<sup>245</sup> Wawancara MDH di Bendungan tanggal 9 Agustus 2012

Diah<sup>246</sup> sambil merinding, melihat mereka berdoa dan menggemakan takbir di tengah teriknya matahari. Dan seketika itu pula, teringat kata-kata Sadat, saat memimpin aksi demonstrasi;

Kalu ado (kalau ada) yang menculik *sikok* (satu), lawan. Ciduk *sikok*, lawan,” katanya dengan lantang dari atas bak mobil terbuka. “*Hari ini, Allah ada dalam jiwa kita orang-orang yang di zhalimi*<sup>247</sup>.

Perubahan strategi dan taktik perlawanan yang terjadi di tahun 2009-2010 berdampak pada capaian (*outcome*) perjuangan meskipun belum mewujudkan tujuan akhir perlawanan petani Rengas yakni: pengakuan hak atas lahan secara legal formal.

Diantara capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas di tahun 2009-2010 adalah; Meluasnya pihak terlibat baik dari desa Rengas maupun dari luar desa, dukungan dari pemerintah daerah sampai pada kebijakan, aksi dilakukan ke level nasional, aksi dilakukan secara terbuka dan bentrokan berdarah, dukungan politik dari DPRD menguat, Manajemen PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis menyerahkan persoalan ke Kementerian BUMN di Jakarta. Dalam periode ini, banyak capaian (*outcomes*) perjuangan yang terjadi, kondisi ini tak lepas dari perubahan sikap dan dukungan yang mengalir dari birokrat dan DPRD Sumatera-Selatan serta dukungan dari petani lainnya dalam bentuk keterlibat langsung.

Capaian (*outcome*) lainnya tahun ini adalah simpati dan dukungan terus mengalir dari berbagai pihak, sementara media massa lokal dan nasional menjadikan peristiwa itu sebagai *news peg* dan mulai secara intensif menerbitkan berita-berita yang berisikan tentang “penembakan aparat Brimob terhadap petani Rengas dan kriminalisasi petani Rengas oleh perusahaan”, serta dosa-dosa

---

<sup>246</sup> Wawancara ibu Diah (55 Th) di Rengas tanggal 11 November 2011

<sup>247</sup> Bagian ini diolah dari berbagai sumber seperti Media massa (sumatera ekpres, Berita Pagi, Tempo), dokumen pribadi warga dan hasil observasi lapangan

perusahaan sejak berdiri, termasuk dampak buruk ekonomi kehidupan sekitarnya<sup>248</sup>.

Meskipun klaim yang diperjuangkan petani Rengas yakni mengambilkembali lahan yang dikuasi oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis telah berhasil direbut dan dilakukan redistribusi, namun tujuan utama yakni merubah kebijakan atas lahan yang diperuntukan perkebunan tebu dan pabrik yang tidak termasuk HGU belum tercapai.

Kondisi ini menjelaskan bahwa capaian (*outcome*) dan hasil merupakan perwujudan dari repertoar dengan perlawanan yang diikuti perubahan startegi dan taktik perlawanan secara terus menerus dan memakan waktu yang panjang. Keberhasilan dalam bentuk reklamings dan redistribusi lahan menunjukan sudah terjadi perubahan sosial terkait dengan penguasaan lahan dan mulai adanya kembali sumber kehidupan petani Rengas dari lahan mereka sendiri. Perubahan tersebut berdampak pada pemerintah daerah yang lebih serius membangun desa Rengas dan akses perekonomian tradisional yang mulai hidup kembali seperti pasar, kalangan dan petani kembali menggarap lahan mereka yang lama dikuasai PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Perubahan yang terjadi juga dipengaruhi oleh isu-isu yang beredar di tengah kehidupan petani Rengas. Isu-isu yang berkembang dalam periode ini masih merupakan kelanjutan isu-isu sebelumnya, namun mengalami perluasan isu dan kontennya seperti; keberpihakan pemerintah daerah ke petani semangkin serius dan melibatkan unsur birokrasi lainnya seperti BPN, DPRD. Hasil penelitian dapat mengungkap beberapa isu kritis sebagai berikut;

---

<sup>248</sup> Beberapa media lokal sangat intensif dan mendalam membahas peristiwa Rengas seperti harian Berita Pagi, Harian Sriwijaya Post, Harian Nasional Republika, media ol-line wongkito.

**TABEL 6.7. ISU-ISU YANG BEREDAR TAHUN 2009-2010**

TAHUN	ISU
2009	Ganti rugi yang tidak pernah ada Terhadap lahan sengketa. Petani tidak mengambil lahan yang sudah diganti rugi. Kriminalisasi petani Penambahan aparat keamanan. PTPN VII mencoba menghasut beberapa Petani untuk mau menerima ganti rugi. Isu-isu tentang pengerahan keamanan di area 32-33 secara besar-besaran baik dari Sumatera-Selatan maupun didatangkan dari provinsi Lampung. Adanya petani yang ditahan oleh pihak PTPN VII
2010	Kriminalisasi petani oleh polisi yang di BAP akibat peristiwa konfrontasi berdarah. PTPN VII menyerahkan persoalan ke Kementerian BUMN.. Kebijakan pemerintah daerah dan dukungan DPRD sama sekali tidak membuat PTPN VII melakukan penyelesaian persoalan secara cepat dan tepat <sup>249</sup> .

Sumber: Hasil Analisis Data 2013

Tabel di atas menjelaskan bahwa beredarnya isu-isu di kehidupan petani Rengas ternyata menciptakan kepercayaan umum bagi petani akan suatu tindakan yang dilakukan oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Kenyataan ini mendorong petani melakukan perlawanan inovatif lainnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam tahun ini adalah :

- a. Petani
- b. PTPN VII
- c. Pemerintah Daerah
- d. DPRD
- e. Media Massa
- f. LSM/ORMAS

Berdasarkan analisis data didapati kenyataan bahwa perubahan strategi dan taktik perlawanan sepanjang tahun 2009-2010 dipengaruhi oleh pilihan waktu dan tempat perlawanan.

---

<sup>249</sup> Hasil pendalaman data dan pengembangan temuan penelitian 2013

Pilihan waktu dan tempat merupakan suatu bentuk penyesuaian dari strategi dan taktik mencapai hasil perjuangan sebagaimana tabel berikut;

**TABEL 6.8. PILIHAN WAKTU DAN TEMPAT YANG MERUBAH STRATEGI DAN TAKTIK TAHUN 2009-2010**

TAHUN DAN TGL	WAKTU PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	BENTUK PERLAWANAN
30 Maret 2009	Tidak tercapainya kesepakatan antara petani, PTPN VII, BPN dan Pemkab OKI	Area 32-33 Rayon VI	Pengukuran dan pemasangan patok
31 Maret 2009	Pasca bentrok berdarah 4 Desember 2009	Polda Sum-Sel	.Protes petani terhadap BAP di Polda.
29 Juli 2009	Pengerahan kewanaman perkebunan darilampung	Area 32, 33 dan jalan poros pabrik	Menduduki dan menguasai tiga lokasi berbeda sekaligus.
2. Agustus 2009	Penyanderaan petani dan penyanderaan karyawan	Area 32-33 dan jalan poros perkebunan	Pembabatan dan pembakaran perkebunan tebu.
2 September 2009	Adanya penambahan keamanan dari brimobda Sum-Sel di area VI bahkan di area V	Area 32-33 dan simpang empat Rengas	Bentrokan berdarah dan reklaiming massal
1 Nopember 2009	Musyawaharah bersama Pemkab Ogan Ilir	Kantor Bupati	Demonstrasi
7	Pengingkaran perjanjian damai	Rayon VI	Penyanderaan mandor dan

TAHUN DAN TGL	WAKTU PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	BENTUK PERLAWANAN
Nopember			pembakaran basecamp Karyawan
4 Desember 2009	Konfrontasi Berdarah dan Reklaiming Massal	Lokasi Rayon VI area 32 dan 33	Pembakaran dan pengrusakan kendaraan dan rumah dinas PTPN VII di Ketiau
28-29 Desember 2009	Ketidajelasan penyelesaian konflik sementara PTPN VII tidak dapat menunjukkan bukti pengolahan lahan sesuai plotting area	Halaman DPRD Sum-Sel	Demonstrasi dan unjuk rasa di DPRD Sum-Sel
7 Januari 2010	Dukungan yang kuat dari DPRD dan Pemkab dan Pemda	Area 32-33	Reklaiming lanjutan
14 Januari 2010	Penghasutan PTPN VII terhadap sebagian petani agar mau menjual lahannya kembali	Rayon VI Area 32-33 dan basecamp karyawan	Pembongkaran bendungan
15 April 2010	Sikap PTPN VII yang merasa kebal hukum yang membuat marah petani Rengas	Simpang empat desa Rengas, are 32-33 dan jalan poros menuju pabrik	Deklarasi gerakan petani Rengas
21 Mei 2010	Dukungan dari pemkab dan pemda yang kuat dan ada dasar	Area 32-33	Redistribusi massal

TAHUN DAN TGL	WAKTU PERISTIWA	TEMPAT PERISTIWA	BENTUK PERLAWANAN
	hukumnya bahwalahan milik petani		
11-12 Juli 2010	Tingginya aktivitas perkebunan pada musim giling dan sikap PTPN VII sebagai BUMN yang melakukan kepentingan nasional.	Kementerian BUMN Jakarta	Demostrasi massal ke Jakarta

Sumber data: Hasil analisis data lapangan 2015

Tabel di atas menjelaskan bahwa perubahan strategi dan taktik perlawanan dalam tahun ini dipengaruhi oleh pilihan waktu peristiwa, tempat peristiwa dan bentuk perlawanan.

Selain itu juga ada kondisi kondisional yang memberi kontribusi terhadap perubahan tersebut diantaranya; petani Rengas baik secara individual maupun secara kolektif melakukan interpretasi terhadap suatu kondisi yang akan dihadapi mereka dan mengambil langkah-langkah tindakan kolektif ke depan untuk melakukan perlawanan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Hasil analisis data menunjukkan ada dinamika perubahan repertoar, aktor, strategi, taktik, capaian tujuan dan hasil dari perlawanan petani Rengas tahun 2009-2010 yang berlangsung cepat dan ekstensive, sebagaimana penjelasan tabel berikut;

**TABEL 6.9. REPERTOAR, AKTOR, STRATEGI, TAKTIK,  
CAPAIAN DAN HASILTAHUN 2009-2010**

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
30 Maret 2009	Tidak tercapainya kesepakatan antara petani,PTPN VII, BPN dan Pemkab OKI	Gera kan petani Rengas dan petani lainnya dari luar Desa	Pengukuran ulang secara massal melibatkan pihak BPN dan Pemkab OKI sekaligus pemasangan patok baru	Membiarkan petugas keamanan PTPN VII menghancurkan patok berulang kali.	Meluasnya dukungan petani dan masyarakat lainnya	Perlawanan petani Rengas belum menunjukkan hasil yang diharapkan yakni mendapatkan kembali lahan dari pihak PTPN VII. Keberhasilan reklamasi dan redistribusi
31 Maret 2009	Pasca bentrok berdarah 4 Desember 2009	Gera kan petani Rengas dan petani lainnya dari luar Desa	Mendirikan pondok pengawas dan menanami dengan palawija	Membuat maklumat di papanberukuran besar dengan tulisan "Tanah Rakyat Rengas"	Masuknya advokasi dan media massa	
29 Juli 2009	Pengerahan kemanan perkebunan darilamp	Gera kan petani Rengas	Konfrontasi terbuka tetapi terbatas	Reaksi balasan atas pembakaran pondok petani. Menunjuka	Pemda baik provinsi dan pemkab memberik	

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
	ung	dan petani lainnya dari luar Desa		n bukti kepemilikan	an fasilitas dan dukungan penuh terhadap petani Rengas	usi lahan Tanah dalam status quo
2. Agustus 2009	Penyanderaan petani dan penyanderaan karyawan	Gera kan petani Rengas dan petani lainnya dari luar Desa	Klaim petani atas area milik 700KK	Mobilisasi massa dan petani Rengas.	Bupati OI turun tangan memberikan fasilitas dan negoisasi	
2 September 2009	Adanya penambahan keamanan dari brimobda Sum-Sel di area VI bahkan di area V	Gera kan petani Rengas dan petani lainnya dari luar Desa	.. Aktivitas bersama petani dilahan sengketa. Diikuti ratusan petani Rengas.	Pembongkaran basecamp yawan dan pembakaran kendaraan PTPN VII.	Pendampingan dari LBH dan NGO	
	Musyawa	Gera		Menyampai	Sandera	

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
1 Nopember 2009	rah bersama Pemb Ogan Ilir	kan petani i Rengas dan petani i lainn ya dari luar Desa	Demontra si massal	kan tuntutan dukungan dari DPRD dan Pemerintah Daerah	dari petani di bebaskan	
7 Nopember	Pengingk aran perjanjian damai	Gera kan petani i Rengas dan petani i lainn ya dari luar Desa	Memobilis asi massal petani dan dukungan masyarakat.	Pemagaran dan penanaman massal. Membuat parit besar menghentikan air ke irigasi PTPN VII.	DPRD membent uk pansus dan menngaja k PTPN VII berdialog terbuka	
4 Desember 2009	Konfront asi Berdarah dan Reklaimi ng Massal	Gera kan petani i Rengas dan petani i lainn	Tukar sandera. Bergabung nya petani dan masyarakat secara spontanitas akibat anakisme	Menjadi berita dimess media. Koordinasi bersama media massa,jaring an petani.	Reclaimin g massal	

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
		ya dari luar Desa	pihak Brimob.			
28-29 Desember 2009	Ketidajelasan penyelesaian konflik sementara PTPN VII tidak dapat menunjukan bukti pengolahan lahan sesuai plotting area	Gerakan petani Rengas dan petani lainnya dari luar Desa	Bersama LBH Palembang. Mengajak media massa, walhi dan spi Sum-Sel	Aksi simpatik, tertib mengundangi dukungan masyarakat.	Deklarasi gerakan petani	
7 Januari 2010	Dukungan yang kuat dari DPRD dan Pemkab dan Pemda	Gerakan petani Rengas dan petani lainnya dari luar Desa	Mendatangi Mapolda bersama petani dan tim advokasi	Menyerahkan tandamata berupa cangkul dan sepatuh brimob	Polda menarik seluruh pasukan dari area PTPN VII dan menggantinya dengan pengamananan standard	
14 Januari	Penghasutan PTPN VII	Gerakan petani	Membiarkan beberapa	Mengajak media massa	Petani Rengas semangki	

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
2010	terhadap sebagai petani agar mau menjual lahannya kembali	Rengas dan petani lainnya dari luar Desa	petani yang mau menerima ganti rugi dari PTPN VII	untuk meliputi pemberian ganti rugi dan sebagai bukti bahwa PTPN VII tidak memiliki hak atas lahan.	solid dan menyatakan bahwa PTPN VII mengambil lahan rakyat	
15 April 2010	Sikap PTPN VII yang merasa kebal hukum yang membuat marah petani Rengas	Geraikan petani Rengas dan petani lainnya dari luar Desa	Memobilisasi petani bersama jaringan lainnya ke DPRD dan Gubernur	Dukungan dalam bentuk kebijakan bahwa pemerintah daerah menyatakan HGU bermasalah dan siap memfasilitasi perwakilan petani ke kementerian BUMN	Lahan dikuasai oleh petani namun belum dibagi	
21 Mei 2010	Dukungan dari pemkab dan pemda yang kuat dan ada dasar	Geraikan petani Rengas dan petani	Pembagian lahan kepetani dan warga yang ikut berjuang.	Pembagian penguasaan lahan petani dan warga Rengas.	Status tanah dalam status qua	

TAHUN	REPERTOAR	AKTOR	STRATEGI	TAKTIK	CAPAIAN	HASIL
	hukumnya bahwasalah an milik petani	di lainya dari luar Desa				
11-12 Juli 2010	Tingginya aktivitas perkebunan pada musim giling dan sikap PTPN VII sebagai BUMN yang melakukan kepentingan nasional.	Geraakan petani di Rengas dan petani di lainya dari luar Desa	Penggabungan beberapa kelompok petani Rengas. Diikuti 600 petani Rengas.	Mengarahkan perlawanan ke pusat untuk merubah kebijakan. Membawa persolan Rengas ke ranah kebijakan dan nasional	Redistribusi massal	

Sumber: Data penelitian tahun 2015

Tabel di atas menjelaskan perlawanan di tahun 2009-2010 merupakan puncak krisis yang terjadi antara PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dengan petani Rengas yang sudah berlangsung selaa 30 Tahun.

#### 6.4. Refleksi

Penelitian ini secara umum menemukan keadaan tindakan perlawanan yang terjadi di tahun 1998-2010, merupakan wujud dari perwarisan perlawanan di tahun sebelumnya. Perlawanan petani di tandai dengan ada perubahan kekuasaan dari Orde Baru

ke kekuasaan Reformasi. Pergantian kekuasaan diikuti pula dengan perubahan sistem politik dari politik otoriter ke politik demokrasi. Keadaan ini memberi pengaruh terhadap kondisi perlawanan dan perubahan strategi dan taktik dari level regional ke level nasional. Kondisi ini menyebabkan posisi petani mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk ikut memberikan dukungan riil bukan sekedar pendapat personal tetapi kebijakan birokrasi dan politik.

Perlawanan yang dilakukan selama ini akhirnya berdampak pada hubungan antara petani Rengas dengan pemerintah daerah dan DPRD ke arah perubahan kebijakan atas lahan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Peneliti melihat paling tidak ada tiga unsur utama saling terkait yang mendorong keberhasilan tindakan kolektif petani Rengas, yaitu struktur peluang politik, struktur mobilisasi, dan pembingkaiian kolektif.. Pertama, struktur peluang politik dimaknai sebagai derajat keterbukaan politik yang memungkinkan dilakukanya aksi-aksi kolektif petani. Kedua, struktur mobilisasi sumberdaya merupakan proses di mana suatu organisasi gerakan petani yang diciptakan dapat menjamin kontrol kolektif terhadap sumberdaya material dan non material. Struktur mobilisasi sumberdaya terwujud dalam jaringan (struktur) dari skala mikro (kelompok informal) hingga meso (organisasi gerakan petani skala provinsi). Ketiga, pembingkaiian kolektif dipahami sebagai suatu proses pembimbingan nilai dan pengetahuan bersama dan sebagai suatu proses konstruksi sosial yang memediasi antara peluang politik dan aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani.yang dibangun atas dasar keyakinan umum petani.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori proses-politik<sup>250</sup> (*political process theory*) dan teori peluang politik (*political opportunity*

---

<sup>250</sup> Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Reading, MA: Addison-Wesley.

*theory*). Perspektif teori ini dibangun dan dikembangkan oleh Oberschall (1973), Gamson dan Schmeidler (1975), Dough McAdam, McCarthy, Wolfson dan Zald (1973;1977, 1996), Jenkins (1981), Roger Could (1991) dan Sydney Tarrow (1998)<sup>251</sup>. Baik teori stuktur politik maupun teori proses politik semuanya melihat pentingnya mobilisasi dan sumberdaya.

Sementara proses *framing* yakni suatu proses kolektif interpretasi, atribusi dan konstruksi sosial yang menjadi perantara peluang dan tindakan<sup>252</sup>. Maksudnya adalah proses framing dalam teori proses politik digunakan dalam memahami kesuksesan dan kegagalan organisasi ataupun gerakan sosial meraih simpati luas dari masyarakat. Pembentukan *framing* secara interaktif berkaitan dengan struktur mobilisasi, proses *framing* membutuhkan alat atau modul. Meminjam pandangan Tarrow terkait dengan alat atau cara *framing* yang sering digunakan adalah media atau sejenisnya<sup>253</sup>.

Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa petani sebagai aktor perlawanan yang aktif dan memainkan peranan penting dalam perlawanan dan perubahan strategi serta taktik. Kondisi ini tidak persis sama dengan pemikiran Tilly, ia berpendapat bahwa aktor repertoar pasif. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh adanya struktur kelompok. menurut peneliti struktur kelompok dimaksudkan dalam konsep Tilly tidak jelas peran dan keterlibatan dalam perlawanan yang terjadi. Apa sebagai pelaku, konseptor, ataukah sebagai penggerak massa.

Dalam penelitian ini hanya petani Rengas yang melakukan perlawanan secara kolektif, tidak ada upaya atau usaha menarik

---

<sup>251</sup> Rajendra Singh, *Op-cit*, hal :25-41. Lihat juga Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial, Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, Pustaka Pelajar, 2007, hal :7-10

<sup>252</sup> Charles Tilly e-tal, *Dynamic of Contentious*, New YoCambridge University Press, 2005, hal: 16

<sup>253</sup> Sidney Tarrow, *Power in movement*. Cambridge: University Press. 1998, hal: 106-117

partisipasi dan simpatisan di luar petani. Kalaupun kemudian hal itu terjadi lebih disebabkan pengaruh dari dampak tindakan perlawanan yang dilakukan.

Pemikiran Tilly tentang aktor dalam repertoar yang memiliki pengaruh ekonomi atau kekuasaan sosial. Namun hasil penelitian ini menemukan kondisi yang berbeda dengan konsep Tilly. Data mengungkapkan bahwa peran sentral tokoh-tokoh petani Rengas yang kharismatik dan berpengaruh ternyata ikut mempercepat proses pembentukan aksi-aksi inovatif dan strategis.

Hal ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tersebut mampu melakukan peran sebagai *cultural broker*, mereka memperkenalkan butir-butir budaya kritis kepada masyarakat Rengas, menggerakkan perubahan secara lokal, bahkan membuat petani Rengas sangat dibutuhkan bagi perubahan kebijakan pencadangan lahan perkebunan. Konsep *cultural broker* nampaknya seperti yang di konsepsikan oleh Hiroko Horikoshi<sup>254</sup>, yakni tokoh kharismatik seperti Kyai dan Ulama bisa memerankan fungsi perantara atau mediator bagi suatu proses perubahan besar dalam masyarakat bahkan bisa lebih mengejawantahkan otoritas mereka sebagai pemimpin lokal dibanding fungsi mereka sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat meskipun mereka tidak memiliki kekuatan posisi secara ekonomi dan politik.

Konsep aktor yang kreatif dan inovatif di dalam repertoire yang mampu merespon keadaan menjadi peluang mencapai tujuan perlawanan dengan berbagai aksi taktis dan strategis nampaknya lebih sejalan dengan konsep repertoire yang digambarkan oleh Amy r. Poteete memberikan definisi repertoire sebagai aksi-aksi yang multiple melalui aktor yang kreatif dan inovatif. Bahkan menurutnya repertoires “ *include multiple performances because they*

---

<sup>254</sup> Hiroko Horikoshi, *Kyai dan perubahan Sosial*, P3M, Jakarta, 1987, hal: 244.

*draw on multiple forms of power – political, economic, discursive, coercive, symbolic”.*

Penelitian ini menemukan bahwa bertindak secara kolektif berarti membutuhkan suatu identitas dan kesadaran kolektif. Kondisi ini tidak muncul secara mekanik atau atomatis, tetapi ada faktor yang menghubungkan antara kesadaran, identitas dan tindakan kolektif. Dalam kasus perlawanan petani Rengas ini peneliti menemukan faktor kuncinya yakni; kesamaan nasib dan kesukarelaan menerima tujuan yang sama. Temuan ini lebih dekat dengan pemikiran Gurin dan Townsend<sup>255</sup>.

Keduanya mengemukakan bahwa identitas dan solidaritas lebih ditentukan oleh kesamaan karakter, kesamaan tujuan, kesamaan nasib yang diperjuangkan. Berbeda dengan pemikiran Tilly yang menyebutkan identitas dan solidaritas dalam repertoar muncul secara mekanis dan otomatis. Kondisi ini terjadi dalam tindakan perlawanan dari tahun 1998-2010, dimana perlawanan dilakukan secara tindakan kolektif dengan membawa nama “petani Rengas”.

Penelitian ini menemukan bahwa isu-isu yang menyebar di kalangan petani Rengas ternyata bisa menjadi bagian penting dari taktik dan strategi perlawanan. Isu-isu tersebut selalu berproses dari satu kondisi ke kondisi lainnya dan bertambah dari satu periode ke periode lainnya memperkuat munculnya aksi-aksi perlawanan. Tilly tidak memberikan perhatian khusus terkait dengan isu-isu. Bagi Tilly isu bukanlah suatu yang bisa dijadikan model perubahan repertoar.

Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa isu-isu yang beredar di lingkungan perlawanan antara petani Rengas versus PTPN VII sebagai bagian dari kondisi yang selalu menyertai

---

<sup>255</sup> Gurin.P dan A. Townsend, *Properties of Gender Identity and their Implications for Gender Consciousness* “British Journal of Social Psychology, 25, 1986, hal: 139-148

repertoar yang terjadi. Sejak periode 1981-1983, 1984-1991, 1992-1997, 1998-2003, 2004-2008 dan 2009-2010, bahwa petani yang terlibat mampu memanfaatkan isu-isu untuk mendorong dan membentuk laju perlawanan. Isu-isu menjadi media konsolidasi di kalangan petani yang efektif misalnya melalui perbincangan antar petani dan aktor lainnya.

Temuan penelitian juga mengungkapkan keterlibatan pihak pengacara mandiri di tahun 1984 sampai dengan 2008, sementara keterlibatan LSM di tahun-2009-2010. Kondisi ini mendorong memberi perubahan petani dalam perkembangan karakter dan orientasi tatanan sosial yang lebih kompleks. Kondisi ini nampaknya persis sama diungkapkan oleh Migdal melalui konsep dimensi perubahan sosial. Perubahan sosial dan ekonomi diintegrasikan kedalam teori tentang partisipasi petani dalam politik dan revolusi. Migdal memaparkan dengan gamblang karakter dari keterlibatan petani dalam ruang politik. Inisiatif keterlibatan petani dalam arena politik lebih banyak diinisiasi oleh pihak lainnya<sup>256</sup>.

Peneliti menemukan bahwa perubahan bentuk tujuan dari hukum dan formal legal ke pengembalian lahan dan perubahan kebijakan ditambah dengan penguatan tuntutan ke dalam isu HAM dan kriminalisasi petani oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di tahun 2000. Menjelaskan suatu kondisi peningkatan capaian (*outcome*) yang diakui oleh petani Rengas. Kondisi ini lebih dekat dengan pemikiran dari Gamson yakni gerakan sosial dapat dilihat dari dua sisi, yakni pertama, adanya capaian-capaian baru (*new gains*) dan kedua, tingkat penerimaan (*levels of acceptance*)<sup>257</sup>.

---

<sup>256</sup> Migdal, Joel, *Peasants, Politics, and Revolution: Pressure Toward Political and Social Change the Third World*. Princeton University Press. London .1974, hal: 10-19.

<sup>257</sup> Donatella Della Porta dan Mario Diani. *Op-cit*, hal: 228.

Pertama, capaian-capaian (*outcomes*) baru tersebut mengacu pada adanya perubahan nyata yang terkait dengan kebijakan yang menyangkut tuntutan. Adapun yang kedua, bagaimana sebuah gerakan membawa hasil nyata dalam sistem perwakilan kepentingan. Sebagaimana konsep Gamson menggabungkan dua variabel keberhasilan suatu gerakan sosial tersebut ke dalam suatu tipologi<sup>258</sup> :

- a. *Full Response*, Keberhasilan penuh yaitu baik dari sisi capaian baru maupun tingkat penerimaan, keduanya terpenuhi semua.
- b. *Co-optation*, ada pengakuan tanpa dibarengi dengan pencapaian
- c. *Preemption*, pencapaian tanpa pengakuan
- d. *Collapse*, gagal total, tidak ada pengakuan dan pencapaian<sup>259</sup>.

Dengan demikian, capaian tujuan dan bagaimana hasil perjuangan dapat diterima oleh petani lainnya harus dilihat sebagai tujuan kolektifitas dari aksi-aksi perlawanan yang bersifat khusus. Kondisi ini mirip dengan pandangan Tarrow bahwa suatu perlawanan yang melakukan repertoar perlawanan adalah suatu bentuk gerakan sosial yang melakukan inovasi perlawanan khusus dan memiliki tujuan yang ada didalam gerakan sosial. Tarrow menggambarkan kondisi dari aksi-aksi perlawanan khusus dengan tujuan khusus tersebut dengan istilah *Paradigmatic change – 'moments of madness'* atau perubahan paradigma disaat-saat kegilaan karena itu, capaian dari repertoar khusus adalah tujuan utama dari klaim itu sendiri <sup>260</sup>. Kondisi ini terjadi di tahun 1998-2003-2004-2008 dan 2009-2010 secara umum.

---

<sup>258</sup> Donatella Della Porta dan Mario Diani. *Ibid.*

<sup>259</sup> Donatella Della Porta dan Mario Diani. *Ibid.*, hal: 228

<sup>260</sup> Charles Tilly & Sidney Tarrow *Contentious politics*. Paradigm Publisher, Boudler, Colorado, 2007:, hal: 216

Temuan penelitian ini bertolakbelakang dengan pemikiran Tilly bahwa perubahan terkait dengan posisi “interest”, maka dalam pemikiran Tilly tuntutan tidak semata dimaknai dengan ganti-rugi atau hitung-hitungan, tetapi bisa dimaknai sebagai “kepentingan” untuk merubah kebijakan.

Peneliti menemukan kondisi perlawanan di tahun 1998-2003, yang memberi kontribusi terhadap repertoar terus berlanjut ke tahun berikutnya diantaranya;

- a. Hasil perlawanan belum terwujud
- b. Tidak ada realisasi dari keputusan pengadilan dan Mahkamah Agung tentang ganti rugi oleh PTPN VII
- c. PTPN VII meningkatkan tindakan represifnya terhadap aksi-aksi petani Rengas
- d. Perubahan politik kekuasaan
- e. Pihak yang terlibat semakin meluas dan mulai didukung oleh jaringan di luar petani<sup>261</sup>.

Berdasarkan analisis data ditemukan juga kondisi yang memberi pengaruh bagi keberlanjutan repertoar di tahun 2004-2008 diantaranya;

- a. Hasil perjuangan belum terwujud
- b. Tidak ada realisasi dari keputusan pengadilan dan Mahkamah Agung tentang ganti rugi oleh PTPN VII
- c. Pihak yang terlibat semakin meluas dan mulai didukung oleh jaringan di luar petani<sup>262</sup>.
- d. Perlawanan dilakukan dengan gerakan petani Rengas.
- e. Dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD

Peneliti menemukan beberapa kondisi yang mempengaruhi keberlanjutan repertoar di tahun 2009-2010, diantaranya;

---

<sup>261</sup> Hasil pendalaman data dan analisis temuan lapangan 2013

<sup>262</sup> Hasil pendalaman data dan analisis temuan lapangan 2013

- a. Hasil perjuangan belum terwujud
- b. Dukungan kuat dari pemerintah daerah dan DPRD dalam bentuk tekanan kebijakan
- c. PTPN VII tidak menyelesaikan persoalan secara terbuka dan menyerahkannya ke Kementerian BUMN
- d. Petani Rengas berhasil mencapai tujuan perlawanan yakni reklamasi dan redistribusi.

Penelitian ini menemukan pengaruh dari deklarasi gerakan petani Rengas yang terjadi di tahun 2008, berdampak pada tahun perlawanan 2009-2010, yakni membenahi organisasi perlawanan dan melakukan upaya mobilisasi petani secara massif. Selain itu memaksimalkan ruang politik yang ada untuk mencapai tujuan utama perjuangan, bahkan bukan lagi persoalan lokal tetapi menjadi sorotan nasional.

Penelitian ini menemukan suatu mekanisme kerja dari pembentukan organisasi petani Rengas melalui proses yang tidak spontan dan otomatis. Dimulai dari tahapan pembinaan personal yang dilakukan secara simultan. Dilanjutkan ke proses ideologisasi perjuangan dengan melibatkan unsur-unsur berpengaruh di dalam melakukan tindakan perlawanan oleh petani Rengas. Pada tahap ini terjadi dialog antara struktur di dalam gerakan petani Rengas hingga sampai pada satu kesepakatan membentuk Gerakan Petani Rengas sebagai Organisasi Tani Lokal (OTL).

Keterlibatan berbagai pihak dalam peta perlawanan menunjukkan bahwa dampak gangguan berada pada tingkat nasional. Kondisi ini mendatangkan keutungan bagi petani Rengas yakni memperkuat bargaining position terhadap PTPN VII Unit Usaha CintaManis dan pemerintah.

Temuan ini lebih dekat dengan konsep mobilisasi dan proses politik seperti dari McAdam 1982; Tarrow 1989; Gamson 1990, yang menggambarkan bahwa gerakan sosial dan perlawanan dianalisis

dengan cara kelompok dan organisasi. Tarrow memberikan penekanan pada *protes cycles* sebagai suatu taktik menjaga kondisi perlawanan dalam bentuk-bentuk khusus. Tarrow memahaminya sebagai aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial baik dalam bentuk aktor perwakilan, gerakan dan organisasi.

Lebih jauh temuan ini juga seperti pemikiran terbentuknya jaringan sosial dari Roger V Gould<sup>263</sup> yang menyorotinya dari perspektif strukturalis dan rasionalis. Menurutnya dimaksud strukturalis bahwa jaringan sosial muncul karena dipengaruhi oleh konteks pola lokal atau struktur sosial. Aktor sosial terikat dalam peran khusus atau ia berada dalam kerangka kerja institusi tertentu. Bahwa perilaku sosial tidak hanya dipengaruhi oleh posisi ekonomi, sikap dan pertimbangan untung rugi saja, tetapi juga oleh *strong social attachments* terhadap orang lain. Adapun perspektif rasionalis dikatakan bahwa formasi jaringan itu dipengaruhi oleh adanya *self-interest*.

*“Rational-choice accounts and structuralist accounts of social protest (and of other phenomena, like markets) are generally seen as rivals, yet each points to research on social ties and movement participation as confirming evidence. To be more precise, each represents the accumulation of evidence concerning networks and movement.....Structuralists like to say that social behavior occurs in the context of local patterns – let’s call them “structures” – that channel choices and preferences in certain directions rather than others. (It doesn’t much matter to me whether you refer to such channeling as “constraining” or as “enabling,” or both: it is obvious that the availability of one line of action typically comes at the expense of another line of action, and conversely that the closing off of one choice frequently generates others”*<sup>264</sup>

---

<sup>263</sup> Roger V. Gould, *Why Do Networks Matter? Rationalist and Structuralist Interpretations* University of Chicago June 2000, hal: 1-7

<sup>264</sup> *Ibid*, hal: 8-10.

Penelitian ini menemukan keterlibatan media massa secara intens dalam perlawanan di tahun 2009-2010. Keterlibatan tersebut berdampak pada penguatan dan penyebarluasan informasi-informasi dan isu-isu yang mempercepat terbentuknya aksi perlawanan baru yang dilakukan oleh petani Rengas. Peran media massa sangat berpengaruh bagi perluasan dan penambahan jaringan yang mendukung strategi dan taktik perlawanan petani Rengas.

Tilly tidak memberikan perhatian khusus terhadap peran media massa dan proses perangkaian strategi. Media massa menjadi alat atau modul transmisi symbol yakni bentuk taktik repertoar perlawanan yang dilakukan petani Rengas untuk disampaikan kepada masyarakat umum sebagai sesuatu yang perlu mendapatkan dukungan atau menjadi preference bagi aksi-aksi yang mendapat dukungan publik.

Isu-isu kritis diseputar kehidupan petani ternyata mempercepat strategi dan taktik perlawanan dengan cara reklamasi dan redistribusi dilakukan oleh petani Rengas, kondisi-kondisi tersebut berkembang menjadi sumber daya potensial lokal dan sesuai dengan keadaan yang dihadapi.

Penelitian ini juga menemukan penjelasan kondisi perubahan strategi dan taktik perlawanan yang terjadi di tahun 2009-2010 dipengaruhi oleh pilihan waktu, pilihan tempat dan pilihan bentuk. Selain itu ada beberapa kondisi yang memperkuat repertoar diantaranya; faktor koordinasi dan musyawarah dengan beberapa perwakilan dari desa bertetangga. Selain itu juga dengan cara pembentukan aksi-aksi yang melibatkan masyarakat, tokoh, melibatkan media massa dan berbagai interpretasi spesifik tentang suatu situasi yang ingin diubah oleh petani Rengas dan mewujudkannya dalam taktik dan strategi perlawanan baru.

Temuan penelitian ini bertolakbelakang dengan teori repertoar Tilly yang menjelaskan bahwa repertoar perlawanan yang diikuti oleh strategi dan taktik bersifat umum serta memiliki tujuan serta hasil umum. Meskipun Tilly menyebutkan bahwa repertoar bisa mencapai tujuannya sebagaimana keadaan revolusi. Namun Tilly tidak mengungkapkan apakah revolusi itu capaian tujuan umum perjuangan atau hasil perjuangan. Artinya teori Tilly sesungguhnya kurang memadai untuk menganalisis suatu kasus perlawanan repertoar dengan spesifikasi cara, tujuan dan hasil khusus seperti halnya kasus petani Rengas ini.

Kenyataan yang terjadi secara khusus menjelaskan bahwa perubahan bentuk repertoar tidak ditentukan oleh periode perlawanan yang memisahkan peristiwa yang terjadi secara dikotomik. Temuan perlawanan petani Rengas justru menegaskan bahwa perubahan bentuk repertoar bisa saja terjadi secara tidak periodik dan dikotomik. Karena dipengaruhi oleh pilihan strategi dan taktik yang digunakan. Artinya satu bentuk repertoar yang sama terjadi sebelumnya bisa saja dipakai kembali pada tahun yang sama untuk perlawanan, namun strategi dan taktik yang menentukan apakah repertoar itu dikategorikan lama ataukah dikategorikan baru.

Penelitian ini juga menemukan kondisi yang menjelaskan perubahan strategi dan taktik perlawanan. Kondisi perubahan tersebut tidak juga diperlakukan secara statis dan dikotomik sehingga menciptakan bentuk repertoar yang kategorik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan strategi dan taktik perlawanan yang terjadi dalam kasus Rengas lebih ditentukan oleh pilihan waktu peristiwa, pilihan tempat peristiwa dan bentuk tindakan kolektif perlawanan. Selain itu ada juga kondisi yang memberikan kontribusi perubahan strategi dan taktik yang bersifat kondisional seperti; meluasnya dukungan, kemampuan petani

membaca situasi dan kondisi lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan analisis data dapat dijelaskan bahwa repertoar perlawanan petani Rengas mampu mencapai tujuan perlawanan namun belum berhasil mewujudkan harapan dan cita-cita perjuangan petani Rengas. Repertoar perlawanan petani Rengas secara nyata membawa perubahan sosial bagi kehidupan petani Rengas seperti; dukungan dan jaringan meluas, keberpihakan pemerintah daerah dan DPRD dalam bentuk kebijakan dan desakan terhadap PTPN VII.

Perubahan sosial yang berdampak luas dan mendasar merubah kehidupan sehari-hari petani Rengas adalah keberhasilan melakukan reklamasi dan redistribusi lahan atas penguasaan PTPN VII di tahun 2010. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi di tahun 1998, memberi perubahan bentuk tindakan perlawanan dan strategi serta taktik perlawanan petani Rengas. Selain terbukanya ruang politik yang terjadi perubahan dialami juga terhadap kondisi repertoar yang berjalan dinamis.

Temuan ini menegaskan bahwa repertoar perlawanan petani Rengas tidak seperti penggambaran dari teori *repertoire* Tilly. Menurut Tilly, suatu tindakan perlawanan repertoar tidak mampu menghasilkan perubahan sosial baik berupa capaian tujuan perlawanan maupun hasil perjuangan. Menurutnya suatu repertoar perlawanan hanya berfungsi sebagai alat dan cara menggambarkan perjalanan perlawanan suatu kelompok dan cara kelompok tersebut meniru berbagai tindakan perlawanan untuk digunakan pada tempat dan waktu lainnya, tidak untuk menganalisis perubahan sosial.

## **BAB VII**

---

### **PENUTUP**

#### **7.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan perwujudan teori *repertoire* Tilly dengan hasil penelitian ini. Menurut pendapat peneliti, konsep Tilly tidak realitis dengan teori *repertoirennya*, sebab tidak semua kasus perlawanan dengan repertoar akibat dari kompetisi sistem yang ada dan dipisahkan secara periodik dan memiliki tujuan yang umum.

Kenyataannya ada perlawanan yang diikuti dengan perubahan strategi dan taktik dengan tujuan khusus, dipengaruhi oleh perubahan sistem politik kekuasaan dan mengalami kegagalan maupun keberhasilan perjuangan. Selain itu repertoar yang dilakukan mampu menciptakan perubahan sosial, seperti halnya kasus repertoar perlawanan petani di Rengas.

Hasil temuan dan pembahasan terkait dengan kondisi-kondisi yang menjadi penyebab petani Rengas melakukan perlawanan dengan strategi dan taktik terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis adalah adanya pengambilan secara paksa lahan petani oleh Negara untuk area perkebunan tebu PTN VII di tahun 1980. Selain itu tidak tercapainya realisasi berbagai janji-janji PTPN VII terhadap petani Rengas seperti ganti-rugi, intiplasma dan memperkejakan warga lokal.

Kenyataan ini menjadikan rasa sangat kecewa petani dan mendorong petani melakukan perlawanan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis. Perasaan sangat kecewa petani sesungguhnya

menjadi unsur penting dari proses pembingkai perlawanan. Kondisi ini membingkai menjadi ketidakadilan yang muncul dari kegusaran moral (*moral indignation*). Kegusaran moral ini sering kali berhubungan dengan ketidaksetaraan yang tidak memiliki legitimasi yaitu perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu-individu atau kelompok-kelompok oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas terjadi dalam dua periode kekuasaan politik yakni; periode Orde Baru tahun 1981-1997 dan periode Reformasi tahun 1998-2010. Masing-masing periode kekuasaan politik memiliki sistem politik yang berbeda. Masa Orde Baru sistem politik yang berkuasa bersifat otoriter dan represif. Pemerintah lebih mengedepankan kekuatan militer untuk menyelesaikan persoalan dengan rakyatnya.

Sementara masa Reformasi sistem politik yang berkuasa bersifat terbuka dan demokratis. Pemerintah lebih mengedepankan kekuatan persuasif, dialogis dan kebijakan. Keadaan ini berdampak pada partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan dengan pemerintah lebih terlibat dan memiliki tekanan. Dampak dari sistem politik yang berbeda tersebut sangat signifikan terhadap perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas.

Pada masa Orde Baru di tahun 1981-1983, repertoar dilakukan oleh individual, keluarga, dan dukungan terbatas. Bentuk repertoarpun kurang memberikan dampak terhadap PTPN VII dan belum mampu mewujudkan hasil perjuangan. Strategi dan taktik lebih bersifat sporadik, tidak meluas dan belum memberikan tekanan berarti bagi PTPN VII. Demikian juga halnya dengan kondisi dari pelaku

Di tahun 1984-1991, perwujudan repertoar berupa litigasi yang dilakukan melalui perwakilan, kelompok dan dukungan dari

petani lainnya secara meluas. Sementara strategi dan taktik dilakukan secara terbuka, menyebar dalam area sengketa dan meluas, namun realitasnya perubahan strategi dan taktik yang dilakukan petani Rengas ternyata kurang memberikan dampak terhadap PTPN VII dan hanya mampu mewujudkan capaian tertentu saja.

Di tahun 1992-1997, repertoar masih melanjutkan periode sebelumnya dan menghasilkan capaian berupa kemenangan gugatan petani di Mahkamah Agung tetapi tidak dapat diimplementasikan. Berbagai strategi dan taktik dilakukan petani Rengas seperti; mendesak pemerintah daerah dan BPN, mendatangi kantor DPRD bahkan melakukan penghadangan truk perkebunan tidak berdampak terhadap sikap PTPN VII.

Perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas di masa Orde Baru tahun 1981-1997, berjalan lambat dan memakan waktu lama, hampir tidak ada bentuk repertoar dengan perlawanan yang terjadi. Kondisi ini terjadi akibat tekanan dan kontrol yang kuat dari pemerintah Orde Baru saat itu. Hal lain adalah sumberdaya yang dimiliki petani Rengas masih terbatas.

Dengan kenyataan ini menunjukkan bahwa perubahan strategi serta taktik petani Rengas di masa Orde Baru tahun 1981-1997, sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang berkuasa saat itu. Tidak berkembangnya bentuk repertoar akibat dari kondisi stagnan yang terjadi pada aras strategi dan taktik. Keadaan ini berpengaruh terhadap kegagalan mencapai hasil perjuangan. Ancaman dan tekanan politik Orde Baru yang dijalankan oleh PTPN VII. berakibat pada repertoar perlawanan petani Rengas hanya mampu mencapai tujuan-tujuan yang beriringan dengan peristiwa pada tahun tersebut, belum mampu menghasilkan suatu perubahan mendasar dari hasil perjuangan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh isu-isu yang ada dilingkungan perlawanan menjadi faktor

mempercepat pembentukan repertoar meskipun dengan strategi dan taktik seadanya.

Dalam keadaan di bawah pengawasan dan kontrol pihak keamanan terhadap aktivitas petani Rengas, perubahan strategi dan taktik perlawanan yang dilakukan petani Rengas ternyata masih mampu mewujudkan capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas yakni; kemenangan petani melalui jalur litigasi, petani lokal yang terus-menerus memobilisasi massanya dan dukungan meluas serta upaya membangun organisasi gerakan. Meskipun hasil perjuangan belum mampu diwujudkan.

Capaian-capaian (*outcomes*) umumnya bersifat memperkuat eksistensi petani sebagai pihak yang melakukan perlawanan atau tekanan terhadap PTPN VII seperti, meluasnya dukungan, bertambahnya petani yang terlibat, upaya litigasi yang berhasil namun tidak bisa diimplementasikan, ada upaya membangun jaringan organisasi. Keadaan yang demikian ternyata mampu membuka dan memaksimalkan peluang-peluang yang ada pada tahun-tahun sebelumnya.

Adakalanya repertoar perlawanan yang dilakukan di tahun sebelumnya hanya untuk mengalihkan perhatian pihak keamanan, namun terkadang memiliki gangguan yang cukup berarti bagi PTPN VII atau sekedar memberi akses bagi petani lainnya di tahun berikutnya. Kondisi ini mempertegas bahwa periode tidak berfungsi sebagai pemisahan peristiwa secara dikotomik, tetapi berfungsi sebagai penyesuaian yang mengikuti pilihan waktu, pilihan tempat dan pilihan perlawanan. Realitas ini menunjukkan bahwa repertoar perlawanan petani Rengas yang terjadi di tahun 1981-1997, tidak hanya diakibatkan adanya kompetisi sistem yang ada seperti industrilisasi dan kapitalism tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan dari kekuasaan politik yang ada saat itu.

Sementara perubahan strategi dan taktik perlawanan yang terjadi pada masa Reformasi tahun 1998-2010, berjalan dinamis, cepat dan dipengaruhi oleh keadaan Indonesia yang mengalami perubahan sistem politik kekuasaan dari sistem politik otoriter dan represif ke sistem politik terbuka dan demokrasi. Ini berarti pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan rakyat lebih mendahulukan sikap persuasif, terbuka, dan kebijakan. Keadaan ini berdampak luas bagi perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas. Kenyataan menunjukkan bahwa perubahan politik yang terjadi merubah strategi dan taktik perlawanan lebih meluas dan massif, bahkan perubahan berjalan cepat dan memiliki daya tekan terhadap PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Perlawanan petani Rengas masa Reformasi mendapat dukungan dan fasilitas dari pemerintah daerah dan DPRD. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan tekanan politik kepada PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis, agar segera mengembalikan lahan milik petani yang tidak masuk dalam HGU dan tidak pernah diganti rugi. Pada masa ini juga, dukungan terhadap petani tidak hanya datang dari kalangan petani saja namun partisipasi masyarakat begitu besar terhadap perjuangan petani Rengas.

Keterlibatan pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Provinsi dalam barisan perlawanan petani Rengas adalah suatu kenyataan yang tidak bisa ditemukan pada masa Orde Baru. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar petani Rengas bisa kembali menguasai lahan mereka ternyata belum juga menghasilkan perubahan kebijakan terhadap lahan sengketa.

Perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas masa Reformasi tahun 1998-2010, juga dipengaruhi keterlibatan pihak bukan petani seperti LSM dan ORMAS dan media massa. Dukungan berbagai elemen tersebut mampu memobilisasi

sumberdaya petani dalam bentuk gerakan petani Rengas yang memiliki misi memperjuangkan kembalinya hak atas tanah dari PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis.

Pada akhirnya perwujudan perubahan strategi dan taktik perlawanan berdampak pada capaian (*outcome*) perjuangan petani Rengas antara lain; Meluasnya pihak terlibat baik dari desa Rengas maupun dari luar desa, dukungan dari pemerintah daerah sampai pada kebijakan, aksi dilakukan ke level nasional, aksi dilakukan secara terbuka dan bentrokan berdarah, dukungan politik dari DPRD menguat. Capaian yang mewujukan sebagian cita-cita perjuangan petani Rengas yakni reklamasi dan redistribusi secara massif yang terjadi tahun 2009 dan berlanjut kembali di tahun 2010.

Kondisi ini merubah status lahan yang selama ini dikuasai PTPN VII menjadi status *status quo* dan kembali dikuasai oleh petani Rengas. Meskipun demikian perjuangan petani Rengas belum berhasil mewujudkan kepemilikan hak atas tanah. Hal ini terkait dengan kebijakan atas hak penguasaan dan pengelolaan lahan yang tentunya menghendaki perubahan mendasar dari kebijakan politik dalam bidang penataan undang-undang BUMN dan belum diimplementasikannya secara konsekuen undang-undang pokok agraria tahun 1960.

Dalam kasus perlawanan petani Rengas ternyata perubahan strategi dan taktik perlawanan yang terjadi bukanlah suatu yang kategorik, tetapi bersifat dinamis dan integratif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh bentuk penyesuaian yang terjadi akibat dari adanya pilihan waktu peristiwa, pilihan tempat kejadian dan pilihan bentuk perlawanan. Kasus perlawanan petani Rengas dengan repertoar merupakan kasus yang memiliki kekhasan sendiri yang berbeda dengan pemikiran Tilly. Kenyataan ini menjelaskan bahwa perubahan bentuk repertoar tidak ditentukan

oleh periode perlawanan yang memisahkan peristiwa perlawanan secara dikotomik dan kategorik tetapi ditentukan oleh pencapaian dan hasil tujuan yang diperjuangkan.

Kondisi lainnya yang memberi pengaruh terhadap perubahan strategi dan taktik perlawanan adalah peranan petani sebagai aktor perlawanan. Baik petani sebagai aktor dalam posisi tunggal maupun petani sebagai aktor kolektif atau dalam struktur sosial dan ekonomi yang terpendang atau dalam posisi sosial dan ekonomi rakyat kebanyakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa petani sebagai aktor yang terlibat dalam tindakan perlawanan repertoar merupakan sosok aktif dan dinamis, bukan sosok petani sebagai aktor pasif. Perlawanan repertoar petani Rengas merupakan upaya menciptakan kemandirian dan mencapai kedaulatan petani terhadap perubahan kebijakan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa teori repertoire Tilly tidak memadai menganalisis peranan aktor yang aktif dan dinamis baik sebagai sosok tunggal maupun kolektif.

. Repertoar dengan perlawanan yang dilakukan oleh petani Rengas sering berupa tindakan kolektif di luar kehidupan sehari-hari petani. Boleh dikatakan bahwa tindakan perlawanan dalam berbagai bentuk, strategi dan taktik dikarakteristikan oleh nilai yang berbeda untuk sampai pada capaian (*outcome*) dan hasil perlawanan bersifat khusus. Kondisi ini mempertegas bahwa perlawanan petani Rengas adalah suatu bentuk repertoar dengan perlawanan yang memiliki tujuan perjuangan secara khusus. Adanya kenyataan bahwa petani Rengas berhasil menguasai lahan sengketa dengan cara reklamings dan redistribusi massal dan berdampak terhadap perubahan sosial terhadap petani seperti mulai melakukan kegiatan berkebun dan berladang serta menjadikan lahan memiliki status qua. Sebagai suatu bukti bahwa

bentuk repertoar dengan perlawanan yang diikuti perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas adalah suatu perlawanan yang memiliki tujuan khusus.

Berbagai temuan penelitian ini memberikan implikasi terhadap teori repertoire Tilly diantaranya adalah :

- 1) Teori Tilly tidak cukup memadai untuk menganalisis pengaruh sistem politik kekuasaan yang bisa merubah repertoar, aktor, strategi, taktik, capaian dan hasil. Tilly tidak sama sekali meletakkan kekuasaan politik sebagai suatu instrumen yang menyebabkan suatu perlawanan repertoar mengalami kegagalan dan keberhasilan mencapai tujuannya. Tilly hanya memperhatikan peristiwa-peristiwa perlawanan yang terjadi dan menggambarkan perjalanan repertoar perlawanan tersebut secara periodik.
- 2) Teori Tilly tidak memadai untuk menganalisis perubahan sosial yang terjadi akibat dari perlawanan dengan repertoar. Kenyataan perlawanan petani Rengas membawa penemuan baru bahwa repertoar dengan perlawanan ternyata bisa mencapai tujuan perjuangan yang bersifat khusus seperti reklamings dan redistribusi. Kondisi ini berdampak terhadap perubahan sosial kehidupan petani. Tilly dengan konsep repertoarnya hanya menggambarkan capaian dan tujuan umum dari suatu perlawanan. Tilly tidak menganalisis lebih jauh capaian perjuangan tersebut bahkan perubahan sosial yang dihasilkan.
- 3) Teori Tilly juga tidak memadai untuk digunakan menganalisis keterlibatan pihak lain dan media massa. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa keterlibatan pihak diluar petani dan media massa sangat memberi pengaruh terhadap proses pembentukan tindakan dan berdampak pada mempercepat tekanan. Pada kenyataannya keterlibatan pihak

bukan petani dan media massa mempercepat munculnya bentuk repertoar lainnya dan berdampak pada posisi tawar petani terhadap pihak yang berkuasa.

- 4) Teori repertoire Tilly tidak bisa dipakai untuk menganalisis kasus perubahan bentuk repertoar dengan perlawanan ditentukan oleh pencapaian dan hasil tujuan yang diperjuangkan. Begitu juga bentuk repertoar dengan perlawanan yang memiliki tujuan khusus.
- 5) Temuan ini membuktikan bahwa teori repertoire Tilly hanya bisa digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis repertoar dengan perlawanan yang bersifat periodik dan katagorik, namun tidak bisa dipakai untuk menganalisis perlawanan yang diikuti dengan perubahan strategi dan taktik melalui bentuk penyesuaian waktu dan tempat sebagai pilihan tindakan serta capaian tertentu.

Peneliti berpendapat bahwa repertoar dengan perlawanan (*repertoire of contention*) petani Rengas dari tahun 1981-2010 adalah suatu bentuk repertoar dengan perlawanan yang memiliki tujuan khusus. Kondisi ini berpengaruh terhadap perubahan strategi dan taktik perlawanan petani Rengas. Dampak dari perubahan tersebut adalah menghasilkan capaian (*outcome*) tujuan dari perjuangan petani Rengas.

Capaian dari tujuan perjuangan akan sangat menentukan posisi dari repertoar itu sendiri. Artinya bahwa bila capaian dari tujuan yang diperjuangkan belum berhasil atau belum mencapai tujuan maksimalnya, maka repertoar dengan perlawanan akan terus berlanjut dan berlangsung di masa-masa selanjutnya. Namun bila capaian dari tujuan perjuangan sudah berhasil sesuai tujuannya, maka dengan sendirinya repertoar dengan perlawanan akan berhenti.

## 7.2. Inferensi Akademik

Berdasarkan hasil-hasil temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan antara lain;

1. Hasil studi dan temuan data lapangan menjelaskan bahwa masih ada ruang untuk diadakan penelitian lebih lanjut terkait hasil penelitian ini yakni adanya pengaruh yang kuat dari kekuasaan politik baik pada masa Orde Baru maupun masa Reformasi terhadap perubahan strategi dan taktik perlawanan repertoar yang dilakukan oleh petani Rengas. Pengaruh tersebut berdampak pada pencapaian dan hasil perjuangan bahkan menjadi penentu keberlangsungan repertoar.
2. Hasil penelitian ini juga menemukan kenyataan bahwa repertoar perlawanan petani di Rengas mampu melakukan perubahan sosial melalui reklamasi dan redistribusi lahan. Kondisi ini berdampak pada perubahan posisi tawar petani dan kehidupan mereka sehari-hari. Temuan ini membuka dilakukan penelitian lebih lanjut yang difokuskan pada repertoar perlawanan dan perubahan sosial yang dihasilkan.
3. Studi ini ikut berpartisipasi menggambarkan betapa kompleksitasnya permasalahan agraria terutama di wilayah pedesaan dan pertanian di Indonesia. Dominasi persoalan lebih dipengaruhi oleh penggunaan instrumen politik yang sistematis dan hukum positif yang berlaku daripada realitas dan rasakeadilan dari kehidupan petani.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Aamodt, M.G. 2007, *Industrial . Organizational Psychology: An Applied Approach (5thEd.)*, Thomson Wadsworth: California
- Alexander, J. C., & Mast, J. L, 2006, *Introduction: Symbolic action in theory and practice. The cultural pragmatics of symbolic action*. In J. C. Alexander, B. Giesen, & J. L. Mast (Eds.), *Social performance.Symbolic action, cultural pragmatics, and ritual* New York: Cambridge University Press
- Babbie, Earl, 2003, *The Practice of Sosial research*, 9<sup>th</sup> edition, Wadsworth/Thompson Learning Inc, USA
- Balack, Henry Campbell, 1990, *Black Law Dictionary: Difinitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition, Paul Min West Publishing Co: NewYork
- Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde.. 1998, *Security: A Framework for Analysis*,: Lynne Rienner. the United State of America
- Bates R. H., 1981, *Markets and States in Tropical Afrika: Te Political Basis of Agricultural Policies* Berkeley: University of California Press,
- Berger, Peter, and Thommas Luckman, 1990, *The Social Contruction of Reality: A Treaty of Sociology of Knowledge*, Anchor Books: NewYork

- Berger, Peter, and Thommas Luckman, 1966, *The Social Construction of Reality: A Treaty of Sociologi of Knowledge*, Anchor Book: New York
- Bourdieu, Pierre , 2001, "Further Notes on Bourdieu's 'Marxism'", dalam *International Journal of Contemporary Sociology*, Vol. 38
- Bourdieu, Pierre, 1990, "Sociology as Socio analysis: 'Tales of Homo Academicus' dalam *Sociological Forum* Vol. 5
- Canel Eduardo, 1997. "New Social Movement Theory and Resources Mobilization Theory: the Need for Integration", dalam Michael Kaufman dan Haraldo Dilla Alfonso (Ed)
- Carmin, Joann dan Deborah B. Balsler, 2002, *Selecting Repertoires of Action in Environmental Movement Organizations: An Interpretive Approach*. Sage Publication: <http://www.sageopublications.com>. diakses 11 Juni 2011
- Casparis, J.G. de. 1966. *Selected Inscription from the 7th to 9th Century AD*, Masa Baru: Bandung
- Cassell, C, Symon, G. 1994. *Qualitative Methods in Organizational Research*, Sage : London
- Christiane, Northrup, 2002, *Women`s Bodies, Women`s Wisdom*, A Bantam Book Publishing History : New York USA
- Cohen ean L, 1985, *Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements*. Dalam "Social Movements", Journal "Social Research: An International Quarterly of The Social Sciences", Vol. 52 No.4 (Winter 1985)
- Creswell, JW, 1994, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

- D, Della Porta, dan Diani, 2006, *Social Movements: An Introduction*. Oxford dan Malden, Mass: Blackwell
- Dahrendorf, Ralf, 1959, *Class and Class Conflict in Industrial Society, California*, Stanford University
- Daniel M, Cress and David A. Snow, 1996, *Mobilization at the Margins: Resources, Benefactors, and the Vitality of Homeless Social Movement Organizations*. *American Sociological Review*, 61.
- Daniel M, Cress and David A. Snow. 2000, *The Outcomes of Homeless Mobilization: The Influence of Organization, Disruption, Political Mediation, and Framing*. *American Journal of Sociology*
- Denzim, Norman. K, 1990, *Interpretive Interactionism*, Newbury Park London-New Delhi: Sage Publication The International Professional Publisher
- Denzim, Norman. K, 1997. *Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21<sup>st</sup> Century*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Denzim, Norman. K. 1978, *The Research Act: A Theoretical Introduction in Sociological Methods*, McGraw-Hills :New York
- Digirolamo Joel a, 2008, *Conflict in organitation, turbi charged leadershif*, by paranopower inc
- Donald F Faules dan R. Wayne Pace, 1993, *Organizational Communication*, Paperback, Revised
- Dyke, Van Nella, Sarah A. Soule, and John D. McCarthy, 2001, *The Role of Organization and Constituency in the Use of Confrontational Tactics by Social Movements*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, Anaheim, CA,

- Endraswara, Suwardi, 2003, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Gadjah Mada Press: Yogyakarta
- Eugen, Ehrlich, 1994, dalam Dragen. *A Primer in The Sociology of Law*, Harrow and Newton: New York
- Faille, De Roo, P, 1971, *Dari Zaman Kesulthanan Palembang*: Bratara: Jakarta
- Fauzi, Noer, 2005, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Insist Press. Yogyakarta
- Felix Sitorus MT, 2004, *Kerangka dan Metode Kajian Agraria*. Jurnal Analisis Sosial, Vol.9 No.1 April
- French, W.L., dkk. 1985, *Understanding Human Behavior in Organizations*, Harper & Row Publishers: New York
- Galtung Johan, 2000, *Leaving the Twentieth Century, Entering the Twenty First: Same Basic Conflict Formations ,dalam Seaching Peace: The Road To Transcend Method*, Pluto Press: USA
- Gardono, Iwan Sujatmiko, 2006, “ Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat” dalam *Gerakan Sosial : Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. LP3ES: Jakarta
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2005, *Sociology*, terjemahan oleh Alimandan, edisi ke 6, cet ketiga, Pranada Media : Jakarta
- Giddens Anthony and Philip W Sutton [2010] *Sociology : Introductory Reading* (3<sup>rd</sup> Edition) , Polity Press,UK.
- Giddens Anthony and Philip W Sutton, 2010, *Sociology : Introductory Reading* (3<sup>rd</sup> Edition) , Polity Press,UK.
- Giddens, Anthony 1997. *Sociology*. Third Edition. Polity Press

- Giddens, Anthony, 2003, *The Constitution of Society : Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*. Penerjemah Adi Loka Sujono, Pedati : Yogyakarta
- Gilgun, J, 1992, *Definition, Methodologies And Methods in Qualitative Family Research*. Handel (editors). *Qualitative Methods in Family Research*. Newbury Park : Sage
- Gould, Roger V, 2000, *Why Do Networks Matter? Rationalist and Structuralist Interpretations* University of Chicago
- Gurr Robert Ted (ed), 1980, *Hand Book of Political Conflict: Theory and Research*.
- Hadi, Sudharto P., 2006, *Resolusi Konflik Lingkungan*, BP Undip: Semarang
- Hamilton, Peter, 1990, *Reading From Talcott Parsons*, Terjemahan oleh Hartono Hadikusumo, Tiara Wacana: Yogyakarta
- Haryatmoko, 2002, *'Kekuasaan Melahirkan Anti kekuasaan*, Majalah Basis, Nomor 01-02 Januari-Februari
- Haryatmoko, 2003, *Etika politik dan kekuasaan*, PT Kompas Media Nusantara :Jakarta
- Hocker, Joyce and William Wilmot, 1985, *interpersonal Conflict*, 2nd ed. rev, Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Publishers Ian Craib, 1986, *Teori-Teori Sosial Modern*, CV Rajawali, Jakarta
- Horikoshi, Hiroko, 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial*, P3M: Jakarta
- Horton, P.B., Hunt, C.L. 1982. *Sociology*, McGraw-Hill Book Company, New York.
- Joel, Migdal, 1974, *Peasants, Politics, and Revolution: Pressure Toward Political and Social Change the Third World*. Princeton University Press. London .

- Joris verhulst, 2011, *mobilizing issues and the unity and diversity of protest events*, Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
- JOS, Hafid. 2001. *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah: Strategi dan Taktik Perlawanan*, Pustaka Latin : Bogor
- Kartodirdjo, Sartono, 1984, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Pustaka Jaya : Jakarta.
- Kirk Blackard dan James W.Gibson, 2002, *Capitalizing of Conflict: Strategies and Practices for Turning Conflict into Synergy in Organizations*, davies-black publishing Palo Alto, California
- Kriesi, Hanspeter. 1988. *The Interdependence of Structure and Action: Some Reflections on the State of the Art*. JAI Press Inc
- Kuntowijoyo, 2002, *Masyarakat Desa dan Radikalisasi Petani"*, *Esai-esai Sejarah Dr. Kuntowijoyo: Radikalisasi Petani*, Bentang Budaya : Yogyakarta
- Laraña Enrique, Hank Johnston, Joseph R. Gusfield, 1994, *New Social Movements :From Ideology to Identity Temple: University Press,*
- Louis Kriesberg,1998, *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution*, Lanham.Md: Row Man and LittleField
- Luthans, F, 1973, *Organizational Behaviour*, McGraw Hill Publishing Company: New York
- Mark Traugott,. 2010, *The Insurgent Barricade*. Berkeley: University of California Press
- Marx, Karl. 1867 (1990). *Capital, A Critique of Political Economy*, Penguin Classic: NewYork

- Mayer N Zald & John D Mc Carthy 2003, *Social Movement in an Organizational Society*, Transaction Publishers : New Jersey,
- Mc Adam, Doug, John D. McCarthy and Mayer N. Zald (eds), 1996. *Comparative perspection social Movements: Political Oppourtunities, Mobilizing structure and Cultural Framing*, Cambridge University Press : NewYork
- Mc Adam, Doug, Sidney Tarrow and Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention.*: Cambridge University Press : NewYok
- Mc Carthy, John D. and Mayer N Zald . 1977. "Resource Mobilization and social MovemenA partial Theory", dalam American Journal of Sociology Vol. 82 No. 6, May
- Melucci, A, 1989, *Nomads of the Present: Social Movements and Individual*
- Miall Hugh, 2000, *Resolusi Konflik Kontemporer: Penyelesaian, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras.* PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Michael, 2013, *How Repertoires Evolve : The Diffusion Of Suicide Protest In The Twentieth Century, Mobilization: An International Quarterly* 18(4):: 407-428
- Michael, 2013, *How Repertoires Evolve : The Diffusion Of Suicide Protest In The Twentieth Century, Mobilization: An International Quarterly* 18(4):
- Miles, M. B.; Huberman, A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods.* California : Sage
- Mills C. Wrigt, 1956, *The Power Of Ellites*, New York: Oxford University Press

- Musdhalifah, 2008, *Konflik Agraria dalam Relasi antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba*, Disertasi pascasarjana Universitas Indonesia: Jakarta
- Mustai'n, 2007, *Petani Versus Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara "studi kasus di PTPN XII Kalibakar Malang Selatan"*. Disertasi, pascasarjana Unair, dicetak dan diterbitkan, AR- Ruzz Media: Yogyakarta
- Noer Fauzi, 2008 , *Tanah Sebagai Syarat Hidup Masyarakat, kata pengantar edisi bahasa Indonesia dari buku "Transnasional Agrarian Movements: Confronting Globalization,"* yang diedit oleh Saturnino M. Borras Jr, Marc Edelman, dan Critobal Kay, dan diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris oleh Willey-Blackweell, UK.
- Norman, K, Denzim, 1990, *Interpretive Interactionism*, Newbury Park London-New Delhi: Sage Publication The International Professional Publisher, Northrup, Christiane, 2002, *Women`s Bodies, Women`s Wisdom*, New York USA: A Bantam Book Publishing History,
- Nugroho, Heru, 2004, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis (edisi Revisi)*, Pustaka pelajar: Yogyakarta
- O.J, Bartos dan Paul Wehr, 2002, *Using conflict theory*, Cambrige University Press : NewYork
- Oberschall, A. 1978. *Theories of Social Conflict: Annual Review of Sociology Vol. 4*,
- P Gurin. dan A. Townsend, 1986, *Properties of Gender Identity and their Implications for Gender Consciousness* "British Journal of Social Psychology, 25

- Patton, M. Q. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park : Sage Politics, Cambridge University Press
- Poteete, Amy r, 2011, *Repertoires of domination: decentralization as process in botswana and Senegal*, World Depeloment, Vol:3.
- Pruitt G. Dean dan Rubin Z. Jeffrey.. 2004, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Purwandari, Heru, 2006, *Perlawanan Tersamar Organisasi Petani: Upaya Memahami Gerakan Sosial Petani*. Thesis Pascasarjana Sosiologi Pedesaan IPB: Bogor
- Role , Brett, 2005, *Building An Electrical Repertoire Of Contention*, *Social Movement Studies*, Vol. 4, No. 1, 65-74, May
- Romdloni, Muhammad 2005, "*Teologi Petani: Analisis Peran Islam dalam Radikalisme Gerakan Petani pada Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NB) di Kabupaten Batang dan Pekalongan*", Thesis, UMS : Surakarta
- Rubin and Rubin, 2001, *Community Organizing and Development*. A Pearson Education Company. Massachusetts
- Safitri, Hilma , 2010, "*Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB)*" Thesis Pascasarjana IPB. Akatiga: Bandung
- Samuel, L Popkin 1986, *Petani Rasional*, terjemahan Sjahrir Mawi
- Saptono, Ade, 2005, *Potensi Lokal Dalam Penguasaan Tanah Dan Pemanfaatan Sumber Alam*, dalam jurnal *huma*, Unan, volume 2: Padang
- Schulte Nordholt, Henk dan Gerry van Klinken (ed). 2007. *Politik Lokal di Indonesia*, KITLV: Jakarta

- Scott, James C, 1976, *Everyday Forms of Peasant Resistance* New Haven: Yale University Press
- Scott, James C. 1984, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* New Haven: Yale University Press
- Shanin, Teodor. 1966. dalam Teodor Shanin (ed), *Peasantry as a Political Factor*, Middlesex : Penguin Books, 1971
- Siahaan, Hotman, 1996, "Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi", Disertasi, pascasarjana Airlangga: Surabaya.
- Singh, Rajendra, 2001, *Social Movements, Old and New : A Post Modernist Critique*. New Delhi, Thousand Oaks, London : Sage Publications
- Singh, Rajendra, 2010, *Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta, Resist Books
- Strauss, A. L. 1987. *Qualitative Analysis for Social Scientists*, Cambridge University Press: New York
- Susan, Novri, 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Kencana : Jakarta
- Tarrow Sidney , 1995, *Cycles of Collective Action: Between Movements of Madness and the Repertoire of Contention*, In *Repertoires and Cycles of Collective Action* by Mark Traugott. Durham and London University Press
- Tarrow Sidney , *Power In Movement: Collective Action, Social Movements And Politics*, Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-42271-X

- Taylor, S. J, Bogdan, R. 1984. *Introduction to Qualitative Reserach Methods : The Search for Meaning* (2nd ed.), John Wiley & Sons : NewYork
- Taylor, Verta and Nella Van Dyke, 2004, "*Get up, Stand up*": *Tactical epertoires of Social Movements*, The Blackwell Companion to Social Movements Edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, Hanspeter Kriesi Copyright © 2004 Blackwell Publishing Ltd,
- The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co,Inc: New York
- Tiara, Geidy Ariendi, 2011, *Stategi Perjuangan Petani Dalam Mendapatkan Akses Dan penguasaan Lahan: Studi Perlawanan Petani di Cisarua*, Disertasi, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, pascasarjana IPB
- Tilly Charles, 1977, *Getting It Together In Burgundy, 1675-1975, Theory and Society 4*, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam - Printed in the Netherlands,
- Tilly Charles, Lesley J. Wood , 2009, *Social movements, 1768 - 2008*, Paradigm Publishers: USA
- Tilly, Charles, 1978. *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House.
- Tilly, Charles,1986, *The Contentious French* (Cambridge, MA: Harvard University Press)
- Tilly, Charles,1995, *Popular contention in Great Britain, 1758-1834*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Tilly, Charles,1995, *To Explain Political Process*, The American Journal of Sociology

- Tilly, Charles,2000, “ *Processes and Mechanism of Democratization*”.  
Sociological Theory, Vol. 18, No. 1, 1-16.
- Tilly, Charles,2001, *Mechanism in Political Process*, Annual Review  
Political Science
- Tilly, Charles,2004, “*Trust and Rule*”. *Theory and Society*, February,  
Vol. 33, No. 1
- Tilly, Charles,2005a, *Trust and Rule*, Cambridge Studies In  
Comparative
- Tilly, Charles,2006, *Regimes and Repertoires*. Cambridge: Cambridge  
University Press.
- Tilly, Charles,2008, *Contentious performances*, Cambridge:  
Cambridge University Press,
- Tilly, Charles,2009, “*Social Movement and National Politics*” dalam C.  
Bright and Sandra Harding (Eds), *State-Making and Social  
Movements: Essays in History and Theory*. (Ann-Arbor,  
Michigan: University of Michigan Press)
- Tilly, Charles,e-tal, 2005b, *Dynamic of Contentious*, Cambridge  
University Press: NewYork
- Tilly,Charles. D. McAdam. S. Tarrow. 2008. *Dynamics of Contention*.  
Cambridge: Cambridge University Press
- Tjondronegoro Sediono M.P, Gunawan Wiradi, 2009: *Dua Abad  
Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa  
dari Masa ke Masa*, Gramedia: Jakarta
- Touraine, Alain, 1994, *An Introduction to the study of Social  
Movements*, Social Research,vol 52,no: 4
- Touraine, Alain,1992, *Beyond Social Movement, Theory Culture and  
Society*, vol,9, no,1

- Triwibowo, Darmawan (ed), 2006, *Gerakan Sosial*, Wahana Civil Society bagi Demokratisasi, LP3ES :Jakarta
- Turner, Bryan S, 2006, *Religion and Social Theory*, terjemahan oleh Inyik Ridwan Muzir "Agama dan teori sosial" cet. 2, IRCiso :Yogyakarta
- Wacquant, Loïc, 1989, "Toward a Reflexive Sociology: A Workshop with Pierre Bourdieu", dalam *Sociological Theory* Vol. 7(1)
- Wahib, Abdul Situmorang, 2007, *Gerakan Sosial, Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Wahyudi, 2005, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani" studi kasus Reklamasi atas tanah PTPN XII Kalibakar Malang Selatan"*, Disertasi pascasarjana Universitas Indonesia
- Wallace dan Wolf, 1995, *Reading in Contemporary Sociological Theory From Modernity to Post Modernity*, New Jersey: Prentice Hall
- Wallerstein, Immanuel, 1971, *Sociological Theory, An Introduction*, London, Heinemann
- Weber, Max, 2006, *From Max Weber: Essays in Sociology*, terj, Noorkholis "Max Weber Sosiologi", cet.1, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Weber, Max, 2006, *The Protestant Ethic and The spirit of Capitalism*, Terj. TW Utomo "Etika Protestan dan spirit Kapitalisme. cet., Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Wolff, Stefan, 2006, *Ethnic Conflict A Global Perspective*. New York. Oxford University Press

## **Kamus, Surat Kabar, Jurnal, Laporan, Internet**

- Alan, Berhard dan Jonathan Spencer, 1997, *Encyclopedia of social and cultural anthropology*, Routledge: London
- Balack, Henry Campbell, *Black Law Dictionary: Difinitions of the Term and Phrases of American and English Jurusprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition,
- Bambang Ismawan, *Partisipasi dan Dimensi Keswadayaan; Pengalaman LSM Membangun Keswadayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. II - No. 3 - Mei 2003.
- E. Canel. *New Social Movement Theory and Resource Mobilization Theory: The Need for Integration* (continued). Diakses dari [http://www.idrc.ca/en/ev-69139-201-1-DO TOPIC.html](http://www.idrc.ca/en/ev-69139-201-1-DO_TOPIC.html)., tanggal 4 Januari 2011
- Harian Umum Berita Pagi , Edisi Desember, terbit bulan Desember 2009
- Julia Jary dan David Jary, 1995, *Collins Dictionary of Sociology*, Edisi Kedua. Paul Min Westb Publishing Co, 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 1994, (Ed. II, Cetakan ketiga, Balai Pustaka,)
- Kartjono, 1988, *Demokratisasi di Tingkat "Grassroots" Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Prisma No. 6 Tahun XVII, Pusat Kajian Agraria IPB, 2008, *Laporan Hasil Penelitian Pengorganisasian Petani Indonesia*
- Sartono Kartodirdjo, 1988, *Lembaga Swadaya Masyarakat; Tinjauan Singkat*, Prisma No. 1 Tahun XVII, Januari
- Sujatniko, Iwan Gardono.. 2006, *"Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat"* dalam *Gerakan Sosial : Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*, LP3ES:Jakarta
- Winoto Joyo Majalah Bhumi Bhakti *"Mengelola Pertanahan untuk Kemakmuran Rakyat"* Edisi 10 Tahun, 2011

## GLOSSARY

---

Barricade	= Penghalang atau pengambat. Dalam perlawanan petani Rengas terdiri dari barisan petani yang menjadi pagar hidup
Budaya	= Hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia yang bisa dipelajari atau ditiru. Dalam hal ini suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi atau dipelajari.
Blokade	= Pengepungan atau penutupan suatu jalan, daerah, wilayah, daerah bertujuan untuk mencegah akses atau keluar masuk atau beraktifitas.
Beume/Beumo	= Berkebun atau berladang
Counter Attack	= Serangan balik
Devide Society	Masyarakat terbelah yaitu istilah yang digunakan dalam mengungkapkan kondisi masyarakat akibat munculnya konflik
Redistribusi	= Pembagian ulang atau mendistribusikan kembali sesuatu. Dalam hal ini petani Rengas melakukan pendudukan lahan kemudian membagikan lahan tersebut kepada petani.
Elastis	= Gampang digerangkan
Imagery Politic	= Politik pencitraan
Isu	= Masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi

Iko	= Ini
LBH	= Lembaga Bantuan Hukum
Litigasi	= Tindakan perlawanan melalui jalur hukum berupa gugatan perdata ke pengadilan negeri
Kerio	Kepala Dusun atau pemimpin dalam satu
	= dusun di dalam sebuah desa.
Marga	= Suku atau kampung dimana penduduk yang berdiam di wilayah tersebut masih ada hubungan kekerabatan
Network	= Jaringan dalam hal ini dukungan kepada petani
Rengas	Nama sebuah desa di Kabupaten Ogan Ilir
	= Sumatera-Selatan tempat berlangsungnya konflik antara petani vs PTPN VII
Rumpok	= Pondok yang dibuat di perkebunan berfungsi sebagai tempat berteduh atau mengawasi tanaman.
Serikat	= Kumpulan atau kelompok
SPI	= Serikat Petani Indonesia; sebuah LSM yang bergerak dalam bidang kesejahteraan petani dan kehidupan petani
Strategi	= Perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh sekelompok orang atau sebuah penyesuaian didalam sebuah aktifitas terkait pencapaian tujuan
SHI	= Serikat Hijau Indonesia
SKKT	= Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
Pesirah	= Kepala Desa atau kepala kampung, istilah ini berlaku sebelum diterapkannya Undang-undang tentang pemerintahan desa 1975. Di

Sumatera-Selatan istilah ini masih digunakan sampai dengan tahun 1985. Setelah tahun tersebut diganti dengan kepala desa

Pancung Alas	= Tanah yang dikelola secara turun menurun satu keluarga
Patok	= Sebuah tiang atau sejenisnya berfungsi sebagai penunjuk batas tanah atau batas ukuran.
Popular cours	= Pengadilan Rakyat
Taktik	= Sebuah cara pengaplikasian yang nyata dari strategi yang digunakan untuk melancarkan rencana.
Urang diri	= Istilah yang digunakan untuk masyarakat Ogan Ilir atau identitas kesukuan.
Unjukrasa	= Sebuah gerakan protes yang disampaikan didepan pihak berwenang atau berkuasa seperti; berkumpul sambil melakukan sesuatu, berbaring dijalan tampak tidur.
Walhi	= Wahana Lingkungan Hidup Indonesia: suatu LSM yang bergerak dibidang lingkungan dan kemanusiaan

## TENTANG PENULIS

---



Mohammad Syawaludin, lahir di Palembang tahun 1971 menamatkan sekolah dasar dan menengah pertama di Palembang. Melanjutkan ke ponpes ngabar ponorogo selesai tahun 1991. Menyelesaikan Sarjana S<sup>1</sup> dari fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang tahun 1995. Melanjutkan S<sup>2</sup> pada Fisip jurusan Sosiologi UGM dan Politik Islam pada program Studi Islam UMS tahun 1999 dan 2000. S<sup>3</sup> sosiologi dari Fisip UGM tahun 2015. Pernah menjadi wartawan pada salah satu Harian Umum Nasional selama 5 tahun. Liputan selama menjadi wartawan menekuni bidang konflik dan resolusi konflik seperti konflik di Sampit, Poso, Sumut, Papua, Lampung dan beberapa daerah di Buton Raya, Sulteng. Sejak tahun 2003 takdir membawanya kembali ke Palembang dan menjadi pendidik di UIN Raden Fatah Palembang pada fakultas Adab dan Humaniora dan Fisip.

muhammadsyawaludin\_uin@radenfatah  
awalugm@yahoo.co.id